

PROSPEKTUS

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	18 September 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesean	:	25 September 2024
Masa Penawaran Umum	:	20 September 2024	Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	:	25 September 2024
Tanggal Penjatahan	:	23 September 2024	Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	26 September 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multiguna serta Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 12, Jalan Kapt. Soebijanto Djajahadikusumo BSD City, Tangerang Selatan
15322, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500

Cabang:

192 kantor cabang, 31 gerai, dan 45 kantor cabang syariah di berbagai wilayah di Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp9.000.000.000,00,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) ("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp900.000.000,00,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali sertifikat jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi, yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma enam nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri A, 25 September 2026 untuk Obligasi Seri B dan 25 September 2027 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap II dan/tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI ASET PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA LIABILITAS PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BEI ATAU DI LUAR BEI DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN (KREDIT) YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN PERSEROAN, YANG APABILA BERJUMLAH MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LUKIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATING INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT: AA-(1m) (DOUBLE A MINUS)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TERKAIT HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI Penawaran Obligasi ini

dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN

EMISI OBLIGASI



WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 19 September 2024

PT BFI Finance Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada OJK melalui Surat No. Corp/Sjn/L/VI/24-0111 tertanggal 26 Juni 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUPPSK, dan peraturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah memperoleh Surat Pencatatan atas Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 dari OJK IKNB melalui surat No. S-1670/PL.III/2024 tertanggal 7 Juni 2024.

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-07880/BEI.PPI/07-2024 tertanggal 30 Juli 2024 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima Perseroan akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki kesamaan 1 (satu) orang anggota komisaris yaitu Sunata Tjiterosampurno. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini tentang Penjaminan Emisi Obligasi sedangkan hubungan Afiliasi dengan Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN TEKNIS	ix
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	2
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM	2
C. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN	2
D. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI	10
E. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)	10
F. HAK SENIORITAS ATAS UTANG	14
G. EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN BELUM DILUNASI	14
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	20
B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	21
C. RASIO	21
D. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
A. UMUM	23
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN	23
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	24
D. ANALISIS SEGMENT	24
E. KINERJA KEUANGAN	26
F. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS	29
G. RASIO KEUANGAN PERSEROAN	29
H. BELANJA MODAL	30
I. ANALISIS ARUS KAS	30
J. KOMITMEN DAN KONTINJENSI	32
K. FLUKTUASI KURS/SUKU BUNGA	32
L. ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN	32
VI. FAKTOR RISIKO	34
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	38
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	39
IX. PERPAJAKAN	135

X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	137
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	138
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	141
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	147
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	151
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	153
XVI.	LAPORAN KEUANGAN AUDIT	181

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Agen Pembayaran"	berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain/manfaat lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum dan bank umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
"Bapepam dan/atau Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DLJK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 2010 No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
"Bunga Obligasi"	berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
"Daftar Pemegang Obligasi"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Daftar Pemegang Rekening"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Denda"	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 bulan adalah 30 Hari Kalender.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
"Fitch"	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
"Hari Bursa"	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan per undang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Jumlah Terutang"	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"Kantor Cabang"	berarti unit jaringan pelayanan Perseroan.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR"	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"Masyarakat"	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri diluar wilayah Indonesia.

"Obligasi Berkelanjutan"	Berarti Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).
"Obligasi"	Berarti Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).
"Otoritas Jasa Keuangan atau OJK"	berarti lembaga negara yang independent yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemerintah"	berarti Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Pemegang Obligasi"	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI No. I-B tentang Rekening Efek Utama.
"Pemeringkat"	berarti pihak PT Fitch Ratings Indonesia atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.
"Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPPSK dan peraturan pelaksanaannya.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
"Penjamin Emisi Obligasi"	berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang seluruhnya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Peraturan IX.A.2"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan IX.A.7"	berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022"	berarti Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan.
"Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019"	berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

"Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020"	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020"	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
"Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014"	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020"	berarti Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
"Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020"	berarti Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
"Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020"	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"Perusahaan Anak"	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024, No. 99 tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiarsito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 98 tanggal 26 Juni 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 17 tanggal 12 Juli 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 2 Agustus 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI BFI

Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 12 tanggal 6 September 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Perwaliamanatan"	berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 97 tanggal 26 Juni 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 16 tanggal 12 Juli 2024, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 2 Agustus 2024 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 10 tanggal 6 September 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. SP-068/OBL/KSEI/0624 tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
"Perseroan"	berarti PT BFI Finance Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan.
"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi obligasi, perantara pedagang Efek, dan/ atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
"Pokok Obligasi"	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).
"Prospektus"	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
"RUPO"	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Satuan Perdagangan"	berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"Suara"	berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Emisi"	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal dilakukannya penjatahan atas Obligasi.

"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
"USD"	berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah Amerika Serikat.
"UUPM"	berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana terakhir diubah dengan UUPPSK.
"UUPPSK"	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
"Wali Amanat"	berarti pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN TEKNIS

<i>"Channeling"</i>	berarti kerja sama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal penerusan pinjaman untuk pembiayaan.
<i>"Dealer"</i>	berarti pihak (baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum) yang melakukan penjualan kendaraan bermotor roda empat dan lebih dan alat berat serta barang modal lainnya.
<i>"Joint Financing"</i>	berarti kerja sama antara perbankan dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan secara bersama-sama.
<i>"Piutang"</i>	berarti piutang Perseroan berupa piutang pembiayaan yang dimiliki Perseroan.
<i>"Piutang Performing"</i>	berarti piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang belum jatuh tempo atau yang angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, ruang lingkup kegiatan bisnis Perseroan adalah pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan konsumen berbasis syariah, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan salah satu misi Perseroan yaitu untuk menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen, saat ini Perseroan memfokuskan penyaluran pembiayaannya untuk segmen usaha kecil dan menengah.

Aktivitas pembiayaan investasi dan modal kerja merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, seperti alat berat, mesin industri, properti, kendaraan bermotor roda dua dan empat, serta pembiayaan barang modal lainnya, dengan jangka waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan aktivitas pembiayaan *multifinance* merupakan pembiayaan masyarakat berupa pendanaan untuk beragam kebutuhan dengan jaminan berupa kendaraan roda dua dan empat, melalui skema pembayaran angsuran secara berkala untuk beragam kebutuhan.

Perseroan juga melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berbasis Syariah berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 yang berbentuk pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa.

PROSPEK USAHA

Kinerja ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap stabil di tengah melemahnya prospek ekonomi global. Dengan dukungan fundamental ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,2% (yoy). Target tersebut masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, dimana selama tujuh kuartal berturut-turut (Q4-2021 hingga Q2-2023) Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar lebih dari 5%. Meski begitu, faktor-faktor domestik seperti perlambatan ekspor, kenaikan suku bunga dalam negeri dan pelemahan nilai tukar Rupiah juga perlu dipertimbangkan.

Pemilu Presiden tahun 2024 merupakan salah satu faktor utama yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi Indonesia. Banyak pelaku usaha yang memilih untuk *wait and see* dampak dari hasil Pemilu terhadap kebijakan Pemerintah kedepannya. Di lain sisi, pemulihan ekonomi di tahun 2024 juga perlu diwaspadai dengan berbagai ketidakstabilan politik global seperti perang Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina yang dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri serta ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasokan pangan dan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara global.

Pada awal tahun 2024, OJK memperkirakan piutang-piutang pembiayaan *multifinance* untuk tumbuh *double digit* pada tahun 2024. Dengan berkaca pada kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023, proyeksi atas pemulihan ekonomi yang berlanjut di tahun 2024 serta perkembangan kinerja dan pencapaian Perseroan di tahun 2023, Perseroan berada di posisi yang baik untuk dapat memanfaatkan potensi pasar dengan berbagai strategi yang akan ditempuh di tahun 2024 dan beberapa tahun ke depan. Rencana dan langkah-langkah strategis ini akan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan yang ditargetkan Perseroan.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan *multifinance* di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Menurut data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2023 yang diterbitkan oleh OJK, pembiayaan *multifinance* merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, dengan kontribusi sebesar 52,0% dan jumlah piutang yang mencapai Rp245,2 triliun per 31 Desember 2023. Segmen ini mengalami peningkatan piutang sebesar 13,8% dari posisi piutang pada tahun 2022 sebesar Rp215,3 triliun. Sementara itu, rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami peningkatan dari 2,32% per 31 Desember 2022 menjadi 2,44% per 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki keunggulan dalam beberapa area, antara lain teknologi informasi, SDM yang handal, serta fokus usaha yang jelas dan wilayah jangkauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keunggulan ini akan dimanfaatkan Perseroan untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dengan risiko yang terukur. Perseroan berkeyakinan dapat tumbuh lebih baik di

semester II 2024 setelah melakukan banyak konsolidasi dan penyesuaian di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang semester I 2024, sehingga pada akhir tahun 2024, Perseroan dapat membukukan pertumbuhan positif dengan kualitas aset yang diharapkan dan mencapai profitabilitas di atas rata-rata industri.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 Mei 2017 Juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per tanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Rupiah	%*
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450	51,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.351.257.682	183.781.442.050	48,88
Sub-total	15.039.383.620	375.984.590.500	100,00
Saham Treasuri	927.732.000	23.193.300.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	
Saham dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	

Keterangan:

*) % kepemilikan saham disajikan secara neto, diluar saham treasuri.

KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi Berkelanjutan	:	Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 Target
Dana	:	Sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah).
Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024.
Jenis Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).
Bunga Obligasi	:	Seri A : Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri C : Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Jumlah Minimum Pemesanan	:	Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah)
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian

hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdataan.

- Hak Senioritas atas Utang : Pemegang Obligasi ini tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari. Pada setiap, waktu Pemegang Obligasi ini mempunyai kedudukan yang sama dengan hak kreditur lainnya, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- Hasil Pemeringkatan : AA⁻ _(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember	
		2023	2022
Jumlah Aset	24.036.269	23.991.435	21.929.634
Jumlah Liabilitas	14.458.652	14.491.639	13.173.725
Jumlah Ekuitas	9.577.617	9.499.796	8.755.909

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan	2.582.518	2.677.659	6.353.113	5.383.010
Beban	(1.888.775)	(1.827.003)	(4.327.861)	(3.144.329)
Laba Sebelum Pajak	693.743	850.656	2.025.252	2.238.681
Beban Pajak Penghasilan	(131.072)	(164.726)	(381.453)	(432.002)
Laba Periode/Tahun Berjalan	562.671	685.930	1.643.799	1.806.679
Penghasilan Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(78.787)	13.281	2.451	14.125
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	483.884	699.211	1.646.250	1.820.804
Laba per Saham Dasar (nilai penuh)	37	46	109	121

*tidak diaudit

Rasio

Keterangan	31 Mei 2024	31 Mei 2023*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rasio Usaha (%)				
Laba sebelum pajak / pendapatan	26,9	31,8	31,9	41,6
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	21,8	25,6	25,9	33,6
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)**	14,1	18,3	17,3	20,6
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA)**	5,6	6,6	6,9	8,2
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (NPF) - neto	1,5	1,8	1,4	1,0
Rasio Keuangan (x, kecuali dinyatakan lainnya)				
Cash Ratio	0,2	0,2	0,2	0,2
Current Ratio	1,6	1,4	1,5	1,6
Utang terhadap ekuitas (gearing ratio)**	1,4	1,6	1,4	1,4
Rasio liabilitas terhadap aset	0,6	0,6	0,6	0,6
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,5	1,8	1,5	1,5
Interest coverage ratio	2,8	3,2	3,1	4,6
Debt service coverage ratio	0,3	0,4	0,4	0,5
Rasio Pertumbuhan (%)				
Jumlah pendapatan	(2,4)	19,4	18,0	30,6
Laba periode/tahun berjalan	(17,8)	(8,9)	(9,0)	59,7
Jumlah aset	0,2	13,0	9,4	40,3
Jumlah liabilitas	(0,2)	20,0	10,0	60,5
Jumlah ekuitas	0,8	2,5	8,5	17,8

*tidak diaudit

**laba periode berjalan 31 Mei 2024 dan 2023 disetahunkan (mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 01//2016)

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan adalah PT Finansial Integrasi Teknologi.

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Tahun Mulai Penyertaan	Status
PT Finansial Integrasi Teknologi	2017	Pinjam Meminjam Online Berbasis Teknologi	99,00	0,3%	2017	Beroperasi

FAKTOR RISIKO

Risiko yang Berkaitan dengan Usaha Perseroan

Risiko Utama – Risiko Pembiayaan (Kredit)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit yang merupakan risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan *multifinance*. Risiko kredit didefinisikan sebagai ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudent, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih. Risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva yang diambil alih di bawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan nilai pasar aktiva yang diambil-alih tersebut karena kondisinya yang di bawah standar maupun karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva (*Loan to Value Ratio*) menjadi terlalu tinggi. Pada saat ini, kelompok konsumen terbesar bagi Perseroan adalah di segmen konsumen kelas menengah ke bawah sehingga jika kondisi perekonomian nasional memburuk berkepanjangan maka akan mengakibatkan konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Usaha

- Risiko Pendanaan dan Likuiditas
- Risiko Persaingan
- Risiko Operasional
- Risiko Kepatuhan dan Regulasi
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia dan Kepengurusan
- Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Strategi
- Risiko Tata Kelola

Risiko Umum

- Risiko Perekonomian
- Risiko Kebijakan Moneter
- Risiko Perubahan Kurs
- Risiko Sosial Politik
- Risiko Hukum

Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi serta utang Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) ("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI

BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang kepentingan pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi, yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri A, 25 September 2026 untuk Obligasi Seri B dan 25 September 2027 untuk Obligasi Seri C.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch dengan peringkat:

AA⁻_(idn) (double A Minus)



PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multiguna serta Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2 Jalan Kapt.
Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500

Cabang:

192 kantor cabang, 31 gerai, dan 45 kantor cabang syariah di
berbagai wilayah di Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN (KREDIT) YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN PARA KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN PERSEROAN, YANG APABILA BERJUMLAH MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
- Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) tertanggal 21 Juni 2024 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar tertanggal 26 Juni 2024 yang telah ditandatangani Perseroan;
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 Mei 2017 Juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25 Per Saham		
	Jumlah Saham	Rupiah	%*
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450	51,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.351.257.682	183.781.442.050	48,88
Sub-total	15.039.383.620	375.984.590.500	100,00
Saham Treasuri	927.732.000	23.193.300.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	
Saham dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	

Keterangan:

*) % kepemilikan saham disajikan secara neto, diluar saham treasuri.

C. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini memiliki jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).

Bunga Obligasi

Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi akan dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri A, 25 September 2026 untuk Obligasi Seri B dan 25 September 2027 untuk Obligasi Seri C.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga-ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	25 Desember 2024	25 Desember 2024	25 Desember 2024
2	25 Maret 2025	25 Maret 2025	25 Maret 2025
3	25 Juni 2025	25 Juni 2025	25 Juni 2025
4	5 Oktober 2025	25 September 2025	25 September 2025
5		25 Desember 2025	25 Desember 2025
6		25 Maret 2026	25 Maret 2026
7		25 Juni 2026	25 Juni 2026
8		25 September 2026	25 September 2026
9			25 Desember 2026
10			25 Maret 2027
11			25 Juni 2027
12			25 September 2027

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal peninjauan;
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - j. Perseroan wajib melakukan peninjauan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah tanggal peninjauan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
 - n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
 - q. pembelian kembali Efek bersifat utang oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. terhapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPU.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 2. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - c. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenant*), Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan pembayaran (kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada setiap tahun buku Perseroan atau pembayaran kepada kreditur lainnya dan pembayaran kepada pihak lainnya dalam rangka kegiatan normal perusahaan sehari-hari), selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang.
 - ii. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan normal perusahaan sehari-hari dari Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari RUPS.
 - iii. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - iv. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan akan diberikan Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan data/dokumen pendukung/informasi lainnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - iii. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah Wali Amanat menerima data/dokumen pendukung/informasi lainnya secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- i. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai ketentuan KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- ii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020, Peraturan OJK No. 35/POJK.5/2018 dan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 jo. Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Memastikan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahun Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan pada ayat 6.3 (vii) Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 (sepuluh) kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iv. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- v. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
- vi. Dalam hal terjadinya kelalaian, mengizinkan Wali Amanat dan/atau pihak independen yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat di luar kompetitor Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan. Dalam hal ini, yang prosedur dan penentuan pihak yang akan menjadi pihak independen akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Perseroan dan pelaksanaannya akan sesuai dengan ketentuan.
- vii. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan atas:
 - a. Laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
 - b. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut ke OJK dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
 - c. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (tidak diaudit) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulanan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
- viii. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang berlaku umum dari waktu ke waktu.
- ix. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- x. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
 - a. setiap perubahan Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS;

- b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahu kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau disusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang bernilai material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak (jika ada);
 - e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUPPSK dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat;
 - f. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali Perusahaan Anak dan karyawan-Perseroan) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan.
 - g. melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
- xi. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu:
- a. Pemeringkatan Tahunan
 - i) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas setiap klasifikasi Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat yang berbeda dengan sebelumnya karena adanya fakta material atau kejadian penting, Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat yang berbeda; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda.
 - ii) Masa berlaku peringkat yang berbeda adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - c. Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii) Peringkat tahunan dan peringkat yang dikeluarkan oleh Pemeringkat karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan

- 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
 - d. Pemeringkatan Ulang
 - i) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xi) huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i merupakan peringkat yang berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.
 - xii. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Apabila:
- i. Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lainnya yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - ii. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - iii. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) atau pailit oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - iv. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - v. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi dan pihak lainnya. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Hak-hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara

proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan RUPO harus cukup beralasan dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan meliputi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Kewajiban pembayaran nilai Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau saat jatuh tempo dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
 - b. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - c. Kondisi Perseroan yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan;
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); dan
 - e. Kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat 9.1 huruf a dan c Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan (yang mana sesuai dengan kondisi nomor 1 huruf a dan c pada subbab ini) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai kondisi kelalaian yang dilakukan tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Ayat 9.1 huruf d Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan (yang mana sesuai dengan kondisi nomor 1 huruf d pada subbab ini) dan keadaan atau kejadian tersebut mengacu pada ketentuan subbab pembatasan dan kewajiban angka 4.iii di atas atau Pasal 6.4 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Ayat 9.1 huruf b dan e Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan (yang mana sesuai dengan kondisi nomor 1 huruf b dan e pada subbab ini) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Pemegang Obligasi melalui pengumuman tersebut berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan tagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. Segala biaya pelaksanaan RUPO yang timbul menjadi beban Perseroan.

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan yang baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

D. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan surat No. 114/DIR/RATLTR/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

AA^{-(idn)} (*double A Minus*)

PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AA^{-(idn)} untuk Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia dengan nilai total maksimal Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah). Fitch juga menetapkan peringkat AA^{-(idn)} atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang akan jatuh tempo paling lama tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

Peringkat Nasional 'AA-' menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama. Risiko gagal bayar inheren hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPPSK dengan PT Fitch Ratings Indonesia yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klasifikasi Efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan.

E. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, jumlah pokok atau nilai pokok, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan, atau penyisihan dana dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020.
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan dari:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktupaling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO
RUPO diselenggarakan dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat.
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut.
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Ketentuan teknis pelaksanaan:

- 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10.2, maka Pemegang Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- 3) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- 4) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- 6) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- 7) Sebelum pelaksanaan RUPO
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

8. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 10.6 angka 2 Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:

- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:

1. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
 - vi. Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
3. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
 7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 10.5 Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 10. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris.
 11. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.
 12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

F. HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi ini tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari. Pada setiap, waktu Pemegang Obligasi ini mempunyai kedudukan yang sama dengan hak kreditur lainnya, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

G. EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN BELUM DILUNASI

Efek bersifat utang yang telah diterbitkan Perseroan yang masih terutang pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Nama Efek		Nilai Terutang (Rp Juta)	Tingkat Bunga Tetap	Tanggal Jatuh Tempo
<i>Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Inconesia</i> <i>Tahap III Tahun 2023</i>	Seri B	227.000	7,00%	27 Januari 2025
	Seri C	256.000	7,375%	27 Januari 2026
<i>Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Inconesia</i> <i>Tahap IV Tahun 2023</i>	Seri B	385.000	7,00%	14 April 2025
	Seri C	625.000	7,15%	14 April 2026
<i>Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Inconesia Tahap</i> <i>V Tahun 2023</i>	Seri B	850.000	7,00%	15 Juni 2026

Total Jumlah efek yang masih terutang per tanggal diterbitkannya Prospektus ini sebesar Rp2,34 triliun.

Efek bersifat utang diatas mempunyai senioritas karena memiliki jaminan secara khusus yang dijamin oleh Perseroan dan mempunyai hak keutamaan atau preferen.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020"**), mengingat nilainya tidak mencapai 20% (dua puluh) persen dari ekuitas Perseroan. Apabila dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk transaksi dengan pihak Afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, maka untuk sementara Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah kurang lebih setara dengan 0,564% (nol koma lima enam empat persen) dari total nilai Obligasi yang diterbitkan, yang terdiri dari:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,147%
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,164% yang terdiri dari:
 - Biaya Konsultan Hukum sebesar 0,025%;
 - Biaya Notaris sebesar 0,006%;
 - Biaya Akuntan Publik sebesar 0,133%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,056% yang terdiri dari:
 - Biaya Wali Amanat sebesar 0,017%;
 - Biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sebesar 0,039%; dan
- Biaya lain-lain (biaya Bursa Efek, pendaftaran OJK, Kustodian Efek, percetakan, iklan dan lain-lain) sebesar 0,147%.

III. PERNYATAAN UTANG

Jumlah liabilitas dalam bab ini diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA (Rekan pada BDO dengan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042)) dalam laporan audit tertanggal 21 Juni 2024 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dengan nomor Laporan Auditor Independen No. 00082/3.0423/AU.1/09/1042-2/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp14.458.652 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Liabilitas	31 Mei	
	2024	
Pinjaman yang diterima – Pihak ketiga		10.094.134
Surat berharga yang diterbitkan – setelah dikurangi biaya emisi surat berharga yang belum diamortisasi		3.117.443
Beban akrual		189.837
Utang dividen		407.446
Utang pajak		19.705
Utang lain-lain – Pihak ketiga		470.674
Liabilitas imbalan pasca-kerja		159.413
Jumlah Liabilitas		14.458.652

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi sehingga tidak ada pecabutan dan pembatasan-pembatasan tersebut.

Pinjaman yang Diterima – Pihak Ketiga

		(dalam jutaan Rupiah)
	31 Mei	
	2024	
Pinjaman (Dolar AS)		
Pinjaman Sindikasi		2.689.871
PT Bank CIMB Niaga Tbk		332.284
PT Bank Permata Tbk		260.048
PT Bank CTBC Indonesia		170.657
Sub - Jumlah Pinjaman (Dolar AS)		3.452.860
Pinjaman (Rupiah)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		1.503.951
PT Bank Central Asia Tbk		936.111
PT Bank Pan Indonesia Tbk		873.971
Pinjaman Sindikasi (Agen: PT Bank DKI)		858.406
PT Bank KEB Hana Indonesia		454.167
PT United Tractors Tbk		382.776
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		362.500
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk		297.090
PT Bank Maspion Indonesia Tbk		283.333
PT Bank Jago Tbk		244.722
PT Bank CIMB Niaga Tbk		202.363
PT Bank DKI		190.991
PT Bank Shinhan Indonesia		66.667
PT Gaya Makmur Tractors		26.985
Sub - Jumlah Pinjaman (Rupiah)		6.684.033
Jumlah Pinjaman		10.136.893
Dikurangi:		
Biaya transaksi yang belum diamortisasi		(42.759)
Pinjaman - Neto		10.094.134

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal. Pembayaran pokok pinjaman untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp2.658.859 juta.

Pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

Surat Berharga yang Diterbitkan

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Mei
		2024
Nilai Nominal:		
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021		530.000
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023		483.000
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023		1.010.000
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023		1.100.000
Jumlah Nilai Nominal		3.123.000
Dikurangi:		
Biaya emisi Obligasi yang belum diamortisasi		(5.557)
Jumlah - Neto		3.117.443

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Mei
		2024
Utang Obligasi Sesuai Jatuh Temponya:		
< 1 tahun		1.392.000
1-2 tahun		881.000
2-3 tahun		850.000
Jumlah		3.123.000

Nama Efek		Nilai Nominal (Rp Juta)	Tingkat Bunga Tetap	Tanggal Jatuh Tempo	Status Pembayaran	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021	Seri C	530.000	7,25%	6 Agustus 2024	Belum jatuh tempo	AA- (idn)
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023	Seri B	227.000	7,00%	27 Januari 2025	Belum jatuh tempo	AA- (idn)
	Seri C	256.000	7,375%	27 Januari 2026	Belum jatuh tempo	AA- (idn)
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023	Seri B	385.000	7,00%	14 April 2025	Belum jatuh tempo	AA- (idn)
	Seri C	625.000	7,15%	14 April 2026	Belum jatuh tempo	AA- (idn)
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023	Seri A	250.000	6,00%	25 Juni 2024	Belum jatuh tempo	AA- (idn)
	Seri B	850.000	7,00%	15 Juni 2026	Belum jatuh tempo	AA- (idn)

Beban Akrual

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Mei
		2024
Bonus dan Tunjangan Lainnya		84.600
Bunga		68.127
Jasa tenaga ahli		4.101
Lain-lain		33.009
Jumlah		189.837

Utang Pajak

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Mei
		2024
Pajak Penghasilan		
Pasal 21		6.006
Pasal 23		947
Pasal 26		1.758
Pasal 4(2) - Final		380

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Mei 2024
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.730
Taksiran Pajak Penghasilan Badan terutang	7.884
Jumlah	19.705

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Rincian liabilitas atas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Mei 2024
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	234.549
Nilai wajar aset program	(75.136)
Jumlah	159.413

Utang Lain-lain – Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Mei 2024
Titipan konsumen	273.070
Utang kepada supplier	97.658
Premi asuransi	40.649
Utang pengurusan fidusia	882
Lain-lain	58.415
Jumlah	470.674

Liabilitas Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan

Liabilitas Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	31 Mei 2024
Pinjaman yang diterima – Pihak ketiga	1.565.524
Surat berharga yang diterbitkan – neto	778.905
Jumlah	2.344.429

Dalam memenuhi liabilitas Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan tersebut di atas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Rasio keuangan yang diperjanjikan dalam perjanjian utang

Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	Persyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Perseroan per 31 Mei 2024
Gearing ratio (total debt to tangible net worth) (x)	<5x	1,4x
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	<5%	1,4%
Dampak mata uang yang tidak dilindungi	<25%	0,0%
Ekuitas yang diharuskan (tangible net worth)	>Rp1 triliun	Rp9,4 triliun

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MEI 2024.

MANAJEMEN LIABILITASNYA.	PERSEROAN	MENYATAKAN	KESANGGUPAN	UNTUK	MENYELESAIKAN	SELURUH

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK TERDAPAT KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, DAN TIDAK TERDAPAT RESTRUKTURISASI KREDIT BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Perusahaan Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024 (diaudit) dan 2023 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (diaudit) beserta catatan atas laporan-laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporan audit tertanggal 21 Juni 2024, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA. Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042)

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Mei 2024	31 Desem ber 2023	2022
Aset			
Kas dan setara kas	1.394.669	1.739.659	1.073.255
Piutang pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	20.972.708	20.706.393	19.554.254
Piutang ijarah dan IMBT - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	79.640	52.769	7.767
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	339.523	250.715	162.635
Aset derivatif	85.195	56.657	103.056
Beban dibayar di muka dan uang muka	49.046	34.437	24.767
Aset tetap - neto	699.409	720.827	659.145
Aset hak-guna - neto	41.807	41.025	38.419
Aset takberwujud - neto	236.351	255.166	139.499
Aset pajak tangguhan	135.600	131.963	164.029
Aset lain-lain	2.321	1.824	2.808
Jumlah Aset	24.036.269	23.991.435	21.929.634
Liabilitas			
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	10.094.134	8.665.860	10.246.908
Surat berharga yang diterbitkan - setelah dikurangi biaya emisi surat berharga yang belum diamortisasi	3.117.443	4.720.775	1.581.490
Beban akrual	189.837	324.121	479.299
Utang dividen	407.446	788	1.522
Utang pajak	19.705	199.717	263.269
Utang lain-lain - Pihak ketiga	470.674	437.423	489.352
Liabilitas imbalan pasca-kerja	159.413	142.955	111.885
Jumlah Liabilitas	14.458.652	14.491.639	13.173.725
Ekuitas			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham	399.178	399.178	399.178
Tambahan modal disetor - neto	609.459	609.459	609.459
Saham treasuri	(232.957)	(232.957)	(232.957)
Penghasilan komprehensif lain (Kerugian) keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(72.526)	666	(10.267)
Keuntungan pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	58.942	64.537	73.020
Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	125.000 8.689.866	120.000 8.538.215	115.000 7.801.690
	9.576.962	9.499.098	8.755.123
Kepentingan non-pengendali	655	698	786
Jumlah Ekuitas	9.577.617	9.499.796	8.755.909
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	24.036.269	23.991.435	21.929.634

B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2024	31 Mei 2023*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan				
Piutang pembiayaan	2.408.521	2.534.966	5.933.842	5.052.248
Keuangan	22.678	24.321	82.564	22.870
Syariah	58.438	41.374	108.662	65.157
Lain-lain	92.881	76.998	228.045	242.735
Jumlah Pendapatan	2.582.518	2.677.659	6.353.113	5.383.010
Beban				
Gaji dan tunjangan	(650.313)	(608.586)	(1.457.103)	(1.324.648)
Beban bunga dan keuangan	(391.649)	(379.200)	(951.310)	(624.099)
Umum dan administrasi	(365.154)	(346.986)	(870.505)	(771.052)
Cadangan kerugian penurunan nilai Piutang pembiayaan	(404.187)	(421.501)	(785.034)	(367.235)
Piutang ijarah dan IMBT	(1.890)	(427)	(1.015)	(223)
Lain-lain	(75.582)	(70.303)	(262.894)	(57.072)
Jumlah Beban	(1.888.775)	(1.827.003)	(4.327.861)	(3.144.329)
Laba Sebelum Pajak	693.743	850.656	2.025.252	2.238.681
Beban Pajak Penghasilan	(131.072)	(164.726)	(381.453)	(432.002)
Laba Periode/Tahun Berjalan	562.671	685.930	1.643.799	1.806.679
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	(90.360)	16.674	13.498	26.409
Pajak penghasilan terkait	17.168	(3.168)	(2.565)	(5.018)
	(73.192)	13.506	10.933	21.391
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Kerugian pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	(6.907)	(278)	(10.468)	(8.979)
Pajak penghasilan terkait	1.312	53	1.986	1.713
	(5.595)	(225)	(8.482)	(7.266)
Penghasilan Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(78.787)	13.281	2.451	14.125
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	483.884	699.211	1.646.250	1.820.804
Laba per Saham Dasar (nilai penuh)	37	46	109	121

*tidak diaudit

C. RASIO

Keterangan	31 Mei 2024	31 Mei 2023*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rasio Usaha (%)				
Laba sebelum pajak / pendapatan	26,9	31,8	31,9	41,6
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	21,8	25,6	25,9	33,6
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)**	14,1	18,3	17,3	20,6
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA)**	5,6	6,6	6,9	8,2
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (NPF) - neto	1,5	1,8	1,4	1,0
Rasio Keuangan (x, kecuali dinyatakan lainnya)				
Cash Ratio	0,2	0,2	0,2	0,2
Current Ratio	1,6	1,4	1,5	1,6
Utang terhadap ekuitas (gearing ratio)**	1,4	1,6	1,4	1,4
Rasio liabilitas terhadap aset	0,6	0,6	0,6	0,6
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,5	1,8	1,5	1,5
Interest coverage ratio	2,8	3,2	3,1	4,6
Debt service coverage ratio	0,3	0,4	0,4	0,5

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)				
Jumlah pendapatan	(2,4)	19,4	18,0	30,6
Laba periode/tahun berjalan	(17,8)	(8,9)	(9,0)	59,7
Jumlah aset	0,2	13,0	9,4	40,3
Jumlah liabilitas	(0,2)	20,0	10,0	60,5
Jumlah ekuitas	0,8	2,5	8,5	17,8

*tidak diaudit

**laba periode berjalan 31 Mei 2024 dan 2023 disetahunkan (mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 01//2016)

D. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	Persyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Perseroan per 31 Mei 2024
Gearing ratio (total debt to tangible net worth) (x)	<5x	1,4x
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	<5%	1,4%
Dampak mata uang yang tidak dilindungi	<25%	0,0%
Ekuitas yang diharuskan (tangible net worth)	>Rp1 triliun	Rp9,4 triliun

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan perjanjian dengan bank.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini berisi tentang diskusi hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024 (diaudit) dan 2023 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (diaudit) beserta penjelasan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek usaha Perseroan di masa mendatang.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dalam laporan audit tertanggal 21 Juni 2024, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan auditor independen tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA. (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042) untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 serta ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA, (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta No. 57 tanggal 7 April 1982 jo. Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, Tambahan No. 1390 tanggal 21 Desember 1982.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 038/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan yang meliputi: (i) Pembiayaan Investasi, (ii) Pembiayaan Modal Kerja, (iii) Pembiayaan Multiguna dan/atau (iv) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pada awal pendiriannya, Perseroan hanya bergerak di bidang sewa pembiayaan (*leasing*) saja, namun sejak awal tahun 1990an, Perseroan mulai menjalankan bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat besarnya pangsa pasar kendaraan bermotor di Indonesia, dan memfokuskan diri dalam pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya mobil dan sepeda motor (baik baru dan bekas), khususnya merek-merek yang memiliki nilai jual kembali yang baik. Perseroan telah memiliki jaringan kerja sebanyak 192 kantor cabang, 31 gerai dan 45 kantor perwakilan syariah yang tersebar hampir seluruh ibukota propinsi serta kota-kota potensial lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan di antaranya adalah menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen Perseroan.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan disebabkan oleh berbagai hal, baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama terdiri dari:

Kondisi perekonomian dan perbankan

Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan tingkat inflasi. Faktor makro ekonomi yang kondusif yang ditunjang dengan pertumbuhan produk domestik bruto akan menyebabkan pertumbuhan sektor riil akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan pembelian dan permintaan pembiayaan kendaraan. Sementara itu, bila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan cenderung akan meningkat, begitupun sebaliknya.

Jaringan, baik berupa lokasi kantor perusahaan maupun rekanan bisnis perusahaan

Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan *multifinance* adalah bagaimana perusahaan tersebut mendekatkan diri ke target pasar yang dituju, baik secara fisik dengan keberadaan kantor cabang maupun secara *virtual* lewat hubungan baik dengan rekanan bisnis di daerah tersebut yang berpotensi untuk memberikan referensi bisnis kepada perusahaan *multifinance* dimaksud.

Kualitas aktiva produktif / portofolio

Setiap perusahaan yang menyalurkan kredit, baik perbankan maupun *multifinance* dihadapkan dengan resiko kredit yang tidak tertagih (macet). Oleh karena itu, manajemen kredit merupakan hal pokok untuk menunjang keberhasilan Perseroan secara berkesinambungan.

Posisi keuangan

Posisi keuangan yang kuat sebagaimana ditunjukkan dengan besarnya modal sendiri dan rasio utang terhadap modal yang rendah, serta kecukupan penyisihan atas piutang yang diragukan. Semua ini bertujuan untuk menjaga performa Perseroan apabila kondisi ekonomi sedang buruk sehingga profitabilitas dan pertumbuhan Perseroan dapat berlangsung terus.

Kemampuan penghimpunan dana

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, kemampuan Perseroan dalam penghimpunan dana merupakan faktor yang sangat penting. Selain memiliki jumlah ekuitas yang cukup besar pada saat ini, Perseroan tetap memerlukan sumber pendanaan lainnya, baik melalui penerbitan surat utang dan pinjaman dari perbankan (dalam dan luar negeri) maupun kerjasama pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan usahanya.

Proses internal

Selain poin-poin di atas, yang tidak kalah penting adalah proses internal yang kuat, yang meliputi sumber daya manusia (SDM) baik dari level manajemen hingga staf untuk mengeksekusi kebijakan yang diambil; proses kerja yang efisien dan efektif serta sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh informasi dapat tersaji untuk pengambilan keputusan manajemen yang tepat waktu dan akurat.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten dan selalu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh penggunaan estimasi akuntansi yang penting yang diterapkan dalam kebijakan akuntansi Perseroan telah dijelaskan dalam laporan keuangan.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

D. ANALISIS SEGMENT

Berikut ini analisis segmen operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024 dikaitkan dengan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Mobil	Sepeda Motor	Lain-Lain	Jumlah
Pendapatan				
Pendapatan pembiayaan	1.698.134	399.036	369.789	2.466.959
Lain-lain	53.242	18.249	44.068	115.559
Jumlah pendapatan	1.751.376	417.285	413.857	2.582.518
Beban				
Beban operasional	1.005.204	232.517	244.977	1.482.698
Cadangan kerugian penurunan nilai	298.962	56.619	50.496	406.077
Jumlah beban	1.304.166	289.136	295.473	1.888.775
Laba sebelum pajak	447.210	128.149	118.384	693.743
Beban pajak penghasilan	(84.494)	(24.211)	(22.367)	(131.072)
Laba periode berjalan	362.716	103.938	96.017	562.671

Analisis profitabilitas per segmen operasi selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024

Secara keseluruhan, terjadi penurunan penyaluran pembiayaan baru untuk seluruh segmen operasi Perseroan sebesar 12,8% selama periode lima bulan pertama tahun 2024 dari pencapaian periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp9.535.299 juta menjadi Rp8.317.495 juta. Hal ini terjadi karena pergerakan ekonomi yang cukup dinamis di triwulan pertama tahun 2024 yang diwarnai dengan perhelatan pilpres, momentum Ramadhan, serta kondisi geopolitik.

Sebagai dampak dari penurunan pembiayaan baru tersebut, jumlah piutang pembiayaan neto Perseroan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,7% dari Rp21.112.574 juta pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp20.972.708 juta pada tanggal 31 Mei 2024. Berdasarkan jumlah piutang pembiayaan neto, bisnis Perseroan masih didominasi oleh segmen produk pembiayaan beragun kendaraan mobil sebesar 69,7%, diikuti dengan pembiayaan motor sebesar 7,2%, dan pembiayaan lain-lain (alat berat dan mesin, properti dan syariah) sebesar 23,1%.

Segmen Mobil

Pembiayaan baru mobil melemah, dengan nilai yang dibukukan selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 sebesar Rp5.128.759 juta, turun 16,5% atau Rp1.010.141 juta lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pelemahan di sektor otomotif, konsumsi yang menurun dan tingkat persepsi risiko yang meningkat, khususnya di segmen berpendapatan rendah, serta gangguan operasional yang dialami Perseroan di 2023. Sebagai dampak dari penurunan penyaluran pembiayaan baru tersebut, piutang pembiayaan bersih dan jumlah pendapatan untuk segmen mobil tidak mengalami pertumbuhan. Sementara itu, jumlah beban mengalami kenaikan sebesar 12,2% dari Rp1.162.260 juta selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2023 menjadi Rp1.304.166 juta pada periode yang sama di tahun 2024, yang berasal dari penyisihan atas piutang yang diragukan. Dengan demikian, laba sebelum pajak dari segmen operasi mobil mengalami penurunan sebesar 22,2% selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 menjadi Rp447.210 juta dari sebelumnya Rp575.090 juta.

Segmen Sepeda Motor

Kinerja pembiayaan sepeda motor selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 mengalami penurunan yang substansial terutama karena pengetatan penyaluran pembiayaan baru antara triwulan kedua dan ketiga 2023. Nilai pembiayaannya menurun 36,4% menjadi Rp914.585 juta dari sebelumnya Rp1.438.197 juta pada periode yang sama di tahun 2023. Segmen motor berkontribusi hanya sebesar 11,0% dari total piutang pembiayaan bersih Perseroan per 31 Mei 2024. Sebagai dampak dari penurunan penyaluran pembiayaan baru tersebut, piutang pembiayaan bersih untuk segmen motor mengalami penurunan sebesar 37,6% dari Rp2.432.234 juta pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp1.516.700 juta pada tanggal 31 Mei 2024. Selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024, jumlah pendapatan yang berasal dari segmen motor mengalami penurunan sebesar 28,9% dari Rp587.161 juta pada periode yang sama di tahun 2023 menjadi Rp417.285 juta. Jumlah beban Perseroan mengalami penurunan sebesar 33,0% dari Rp431.482 juta selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 menjadi Rp289.136 juta, sejalan dengan penurunan penyisihan atas piutang yang diragukan. Dengan demikian, laba sebelum pajak dari segmen operasi motor mengalami penurunan sebesar 17,7% selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 menjadi Rp128.149 juta, dari sebelumnya Rp155.679 juta.

Segmen Lain-lain

Segmen lain merupakan gabungan dari beberapa bisnis Perseroan yang tersebar di pembiayaan alat-alat berat, mesin-mesin, properti, bisnis syariah serta gabungan pendapatan dan biaya yang tidak dapat dialokasikan ke segmen mobil dan motor. Berhubung masing-masing segmen ini tidak terlalu besar dan bukan merupakan bisnis utama Perseroan, maka pengungkapannya digabungkan menjadi satu segmen. Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024, terjadi peningkatan pembiayaan baru sebesar 16,1% menjadi Rp2.274.151 juta dan peningkatan nilai piutang pembiayaan bersih sebesar 16,8% menjadi Rp4.842.553 juta dari sebelumnya Rp4.146.992 juta pada periode yang sama di tahun 2023. Di sisi lain, jumlah pendapatan naik sebesar 17,2% menjadi sebesar Rp413.857 juta pada periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 dari sebelumnya Rp353.148 juta pada periode yang sama di tahun 2023. Sementara itu, dari sisi beban, terjadi peningkatan beban sebesar 26,7% dari Rp233.261 juta menjadi Rp295.473 juta, terutama disebabkan oleh pengeluaran beban operasional seiring peningkatan pembiayaan baru sehingga laba sebelum pajak menurun sebesar 1,3% dari Rp119.887 juta menjadi Rp118.384 juta.

E. KINERJA KEUANGAN

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023

Pendapatan. Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan piutang pembiayaan (93,2% dari keseluruhan), pendapatan syariah (2,3%), pendapatan keuangan (0,9%) dan pendapatan lain-lain (3,6%). Jumlah pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp2.582.518 juta, menurun Rp95.141 juta atau 3,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp2.677.659 juta.

Penurunan ini terjadi terutama berasal dari penurunan pada penyaluran pembiayaan baru. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari kebijakan manajemen untuk menekan kenaikan tingkat piutang bermasalah yang timbul ditengah tantangan yang terjadi di industri pendukung usaha pembiayaan, seperti industri otomotif yang mengalami penurunan penjualan kendaraan baru roda empat sekitar 20% sampai dengan Mei 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, industri alat-alat berat juga mengalami penurunan sebesar 27% dalam periode yang sama. Karena penurunan tersebut, maka Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaannya, yang berdampak pada penurunan piutang pembiayaan dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas piutang pembiayaan adalah POJK 22 / 2023, yang mengatur tata cara penagihan yang lebih ketat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya tingkat kehati-hatian bagi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan bisnis sesuai peraturan OJK tersebut, dan secara sementara berdampak pada pengetatan atas kebijakan pembiayaan yang diambil, dan berdampak pada pertumbuhan piutang pembiayaan. Karena piutang pembiayaan yang tidak tumbuh tersebut, maka pendapatan Perseroan juga terdampak, dimana terjadi sedikit penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Manajemen berpendapat bahwa dampak penurunan yang terjadi sudah dapat dikendalikan, dan Perseroan telah memiliki Standar Operasional dan Prosedur dan menyiapkan karyawan lapangan untuk mengikuti aturan yang berlaku, sehingga di periode Semester kedua tahun 2024, diharapkan trend pertumbuhan bisnis akan kembali terlaksana, sehingga secara tahunan, pendapatan Perseroan akan dapat tumbuh kembali.

Pendapatan Piutang Pembiayaan. Jumlah pendapatan piutang pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp126.445 juta atau 5,0% dari Rp2.534.966 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp2.408.521 juta untuk periode yang sama di tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai penyaluran pembiayaan baru selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 yang menyebabkan pendapatan piutang pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp89.126 juta atau 4,7% menjadi Rp1.820.492 juta dari Rp1.909.618 juta pada periode yang sama di tahun 2023. Selain itu, penurunan dapat dilihat juga dari pendapatan berbasis jasa dari pembiayaan baru (pendapatan administrasi) dan pendapatan terminasi atas pelunasan lebih awal masing-masing turun sebesar 7,9% dan 8,3%.

Pendapatan Keuangan. Jumlah pendapatan keuangan mengalami penurunan sebesar Rp1.643 juta atau 6,8% dari sebesar Rp24.321 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp22.678 juta untuk periode yang sama tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya penempatan dana di bank dan pengelolaan dana yang efektif.

Pendapatan Syariah. Jumlah pendapatan syariah mengalami kenaikan sebesar Rp17.064 juta atau 41,2% dari Rp41.374 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp58.438 untuk periode yang sama tahun 2024. Hal ini seiring meningkatnya jumlah piutang pembiayaan syariah selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.

Pendapatan Lain-lain. Jumlah pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp15.883 juta atau 20,6% dari Rp76.998 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp92.881 juta untuk periode yang sama tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan sebesar 21,0% atau Rp13.803 juta, berkat upaya pemulihan yang intensif dan upaya pengelolaan yang lebih baik.

Beban Gaji dan Tunjangan. Jumlah beban gaji dan tunjangan mengalami kenaikan sebesar Rp41.727 juta atau 6,9% dari Rp608.586 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp650.313 juta untuk periode yang sama tahun 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perseroan sebesar 2,2% atau 235 karyawan dari 10.620 karyawan menjadi 10.855 karyawan, serta penyesuaian gaji tahunan yang dilaksanakan setiap awal tahun. Manajemen Perseroan selalu melakukan peninjauan atas produktivitas dan benefit yang dibayarkan kepada karyawan dari waktu ke waktu, sehingga tetap pada taraf kompetitif dan juga produktif.

Beban Bunga dan Keuangan. Jumlah beban bunga dan keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp12.449 juta atau 3,3% dari Rp379.200 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp391.649 juta untuk periode yang sama tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya rata-rata biaya dana dari 6,9% menjadi 7,1%.

Peningkatan beban bunga dan keuangan tidak terlepas dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia (7 Days Repo Rate), yang mengalami peningkatan dua kali peningkatan dari tahun 2023 hingga saat ini. Manajemen selalu mencermati kondisi likuiditas dan suku bunga perbankan, dan melakukan diversifikasi pendanaan melalui kerjasama perbankan serta penerbitan obligasi secara berkala, sehingga dapat meminimalisir dampak kenaikan suku bunga bagi Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi. Jumlah beban umum dan administrasi mengalami kenaikan sebesar Rp18.168 juta atau 5,2% dari sebesar Rp346.986 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp365.154 juta untuk periode yang sama tahun 2024. Komponen kenaikan beban terbesar adalah pada beban amortisasi aset tak berwujud yang naik sebesar 147,8% atau Rp17.208 juta dan beban penerimaan angsuran yang naik sebesar 38,7% atau Rp16.489 juta.

Menurut pandangan Manajemen, peningkatan beban umum dan administrasi telah terkontrol dengan baik dengan berbagai prosedur dan aturan main terkait pengeluaran biaya, termasuk otoritas dan batasan pengeluaran biaya, serta pengawasan audit dan control atas budget operasional yang telah berjalan saat ini.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Jumlah penyisihan cadangan penurunan nilai mengalami penurunan sebesar Rp15.851 juta atau 3,8% dari Rp421.928 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp406.077 juta untuk periode yang sama tahun 2024. Hal ini sejalan dengan perbaikan kualitas aset yang dialami selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.

Risk Manajemen Perseroan melakukan perhitungan kecukupan pencadangan piutang berkala secara bulanan untuk memastikan CKPN yang dibentuk cukup dan sesuai dengan peraturan OJK maupun standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Beban Lain-lain. Jumlah beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp5.279 juta atau 7,5% dari sebesar Rp70.303 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp75.582 juta untuk periode yang sama tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban penghapusan atas piutang dalam proses penyelesaian.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa pengawasan atas beban lain-lain juga sudah dilakukan dengan baik, sebagaimana pengendalian atas biaya umum dan administrasi.

Laba Periode Berjalan. Sebagai akibat dari perubahan pada akun-akun sebagaimana telah dijelaskan di atas, laba periode berjalan mengalami penurunan sebesar Rp123.259 atau 18,0% dari Rp685.930 juta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Rp562.671 juta untuk periode yang sama tahun 2024.

Manajemen telah merencanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa laba di semester dua tahun 2024 dapat tumbuh lebih baik dibanding semester pertama, diantaranya dengan menumbuhkan penyaluran pembiayaan baru yang lebih agresif serta perencanaan manajemen atas aktivitas penagihan sehingga kredit macet dan piutang tak tertagih dapat diminimalisir serta pengawasan yang lebih baik atas biaya operasional serta produktifitas karyawan yang lebih tinggi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan. Jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.353.113 juta, meningkat Rp970.103 juta atau 18,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.383.010 juta. Peningkatan tersebut terutama dikontibusi dari peningkatan pendapatan piutang pembiayaan sebesar Rp881.594 juta atau 17,4% dan pendapatan keuangan sebesar Rp59.694 juta atau 261,0%.

Pendapatan Piutang Pembiayaan. Jumlah pendapatan piutang pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp881.594 juta atau 17,4% dari sebesar Rp5.052.248 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp5.933.842 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan piutang pembiayaan sebesar Rp792.878 juta atau 21,6% menjadi Rp4.465.384 juta dari Rp3.672.506 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selain itu, kenaikan dapat dilihat juga dari pendapatan berbasis jasa dari pembiayaan baru (pendapatan administrasi) sebesar 9,9% atau Rp75.571 juta, pendapatan denda keterlambatan atas pembayaran konsumen dan pendapatan terminasi atas pelunasan lebih awal masing-masing naik sebesar 7,4% dan 3,5%.

Pendapatan Keuangan. Jumlah pendapatan keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp59.694 juta atau 261,0% dari Rp22.870 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp82.564 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penempatan dana yang meningkat sebelum disalurkan untuk pembiayaan baru, sejalan dengan peningkatan volume bisnis Perseroan.

Pendapatan Syariah. Jumlah pendapatan syariah mengalami kenaikan sebesar Rp43.505 juta atau 66,8% dari sebesar Rp65.157 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp108.662 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini seiring meningkatnya jumlah piutang pembiayaan syariah selama tahun 2023.

Pendapatan Lain-lain. Jumlah pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp14.690 juta atau 6,1% dari sebesar Rp242.735 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp228.045 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan atas pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan sebesar 5,8% atau Rp12.164 juta dan penurunan keuntungan bersih atas penjualan aset tetap sebesar 33,2% atau Rp6.707 juta.

Beban Gaji dan Tunjangan. Jumlah beban gaji dan tunjangan mengalami kenaikan sebesar Rp132.455 juta atau 10,0% dari Rp1.324.648 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp1.457.103 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perseroan sebesar 10,9% atau 1.097 karyawan dari 10.099 karyawan menjadi 11.196 karyawan sepanjang tahun 2023.

Beban Bunga dan Keuangan. Jumlah beban bunga dan keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp327.211 juta atau 52,4% dari Rp624.099 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp951.310 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah pinjaman di tahun 2023 yang mencapai Rp13.386.635 juta atau 13,2% lebih besar dibandingkan Rp11.828.398 juta di tahun 2022. Sementara rata-rata biaya dana tidak berubah dari tahun 2022 ke 2023, yakni senilai 7,0%.

Beban Umum dan Administrasi. Jumlah beban umum dan administrasi mengalami kenaikan sebesar Rp99.453 juta atau 12,9% dari sebesar Rp771.052 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp870.505 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh beban penerimaan angsuran, yang meningkat 86,5% atau Rp69.680 juta. Kenaikan signifikan juga terjadi pada beban perbaikan dan pemeliharaan, sebesar 39,4% atau Rp35.134 juta. Sementara itu, honorarium tenaga ahli, yang di tahun 2022 merupakan komponen terbesar dari beban umum dan administrasi, menunjukkan penurunan 71,1% atau Rp105.401 juta di tahun 2023.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Jumlah penyisihan cadangan penurunan nilai mengalami kenaikan sebesar Rp418.591 juta atau 113,9% dari Rp367.458 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp786.049 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini sebagian terjadi karena dampak dari kenaikan kredit macet setelah terjadinya serangan siber, sebagai imbas dari terhentinya sistem operasional Perseroan untuk sementara waktu. Akibatnya, efektivitas tim penagihan untuk melaksanakan tugasnya turut terdampak, sehingga terjadi peningkatan kredit macet dan kerugian piutang tak tertagih.

Beban Lain-lain. Jumlah beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp205.822 juta atau 360,6% dari sebesar Rp57.072 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp262.894 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Beban lain-lain di tahun 2023 terutama berupa penghapusan piutang dalam proses penyelesaian. Jumlahnya mencapai 87,1% dari keseluruhan beban lain-lain yang mencapai Rp262.894 juta, meningkat lebih dari 3,5 kali lipat dari nilainya di tahun 2022. Penyebabnya adalah besarnya tingkat penyelesaian piutang melalui mekanisme serah aset, dimana terjadi penurunan nilai penjualan aset yang dialihkan dibandingkan dengan nilai buku piutang yang diambil alih tersebut.

Laba Tahun Berjalan. Di tahun 2023, Perseroan membayar beban pajak penghasilan sebesar Rp381.453 juta, atau Rp50.549 juta lebih rendah dibandingkan di tahun 2022. Hal ini berkorelasi dengan jumlah laba sebelum pajak di 2023, sebesar Rp2.025.252 juta atau 9,5% di bawah pencapaian tahun 2022. Rasio beban pajak penghasilan adalah 18,8% dari jumlah laba sebelum pajak di tahun 2023, sementara rasio serupa di tahun 2022 adalah 19,3%. Sebagai hasilnya, laba tahun berjalan di 2023 tercatat sebesar Rp1.643.799 juta, atau 9,0% lebih rendah dibandingkan Rp1.806.679 juta di tahun 2022.

F. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp24.036.269 juta mengalami kenaikan sebesar Rp44.834 juta atau 0,2% dari Rp23.991.435 juta pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan - neto sebesar 1,3% atau Rp266.315 juta menjadi Rp20.972.708 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.991.435 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.061.801 juta atau 9,4% dari Rp21.929.634 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan sebesar 5,9% atau Rp1.152.139 juta menjadi Rp20.706.393 juta, serta peningkatan kas dan setara kas sebesar 62,1% atau Rp666.404 juta menjadi Rp1.739.659 juta. Peningkatan kas dan setara kas disebabkan terutama karena adanya penempatan dana yang meningkat sebelum disalurkan untuk pembiayaan baru, sejalan dengan peningkatan volume bisnis Perseroan

Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp14.458.652 juta mengalami penurunan sebesar Rp32.987 juta atau 0,2% dari Rp14.491.639 juta pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan jumlah liabilitas terutama pada pos surat berharga yang diterbitkan - neto dan utang pajak.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.491.639 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.317.914 juta atau 10,0% dari Rp13.173.725 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan terbesar terutama pada pos surat berharga yang diterbitkan - neto, yaitu penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, IV dan V Tahun 2023 selama tahun berjalan sebesar Rp3,8 triliun.

Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp9.577.617 juta mengalami kenaikan sebesar Rp77.821 juta atau 0,8% dari Rp9.499.796 juta pada 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 1,8% atau Rp151.651 juta dari Rp8.538.215 juta di akhir tahun 2023 menjadi Rp8.689.866 juta pada tanggal 31 Mei 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.499.796 juta mengalami kenaikan sebesar Rp743.887 juta atau 8,5% dari Rp8.755.909 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 9,4% atau Rp736.525 juta dari Rp7.801.690 juta di akhir tahun 2022 menjadi Rp8.538.215 juta di akhir tahun 2023.

G. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang dapat mendukung perkembangan usaha di masa mendatang, dimana sumber likuiditas secara internal berasal dari penerimaan pembayaran angsuran piutang-piutang pembiayaan dari konsumen dan

selalu melebihi jumlah kewajiban yang jatuh tempo dari waktu ke waktu. Di samping sumber likuiditas internal tersebut, Perseroan juga memiliki sumber likuiditas eksternal dengan tersedianya fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan pada saat ini.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Di samping itu, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup pada saat ini.

Solvabilitas

Solvabilitas mengukur berapa aset dan ekuitas yang dibiayai dengan menggunakan liabilitas.

Tingkat solvabilitas aset (liabilitas terhadap jumlah aset) Perseroan per 31 Mei 2024 adalah sebesar 0,6x, sementara tingkat solvabilitas ekuitas (liabilitas terhadap ekuitas) Perseroan per 31 Mei 2024 adalah sebesar 1,5x.

Besarnya solvabilitas aset yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian aset dan ekuitas yang dibiayai menggunakan liabilitas dan sisanya menggunakan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Perseroan membayar utang relatif tinggi.

Profitabilitas

Profitabilitas Perseroan dapat dilihat dari imbal hasil aset dan imbal hasil ekuitas.

Imbal hasil aset mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan per 31 Mei 2024 adalah sebesar 5,6%.

Rasio imbal hasil ekuitas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan per 31 Mei 2024 adalah sebesar 14,1%.

Sesuai dengan SEOJK No. 05/2015 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, imbal hasil aset di atas 2% dan imbal hasil ekuitas di atas 6% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat."

H. BELANJA MODAL

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya dilakukan untuk investasi infrastruktur teknologi informasi dan perluasan kantor cabang. Sumber dana untuk belanja modal Perseroan sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak membuat komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak ketiga atau pun melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Pengeluaran belanja modal Perseroan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp52.173 juta.

I. ANALISIS ARUS KAS

Laporan arus kas Perseroan disusun dengan menggunakan metode *direct* dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	(20.132)	(1.278.550)	276.677	(3.521.594)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(35.109)	(114.334)	(335.089)	(238.199)
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan	(289.749)	2.447.048	724.816	3.863.866
(Penurunan) Kenaikan bersih kas dan setara kas	(344.990)	1.054.164	666.404	104.073
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	1.739.659	1.073.255	1.073.255	969.182
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	1.394.669	2.127.419	1.739.659	1.073.255

*tidak diaudit

Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi

Arus kas aktivitas operasi Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024 terutama terdiri dari pemasukan dari penerimaan kas bersih dari transaksi pembiayaan sebesar Rp1.577.151 juta serta pengeluaran untuk penghasilan dan beban bunga sebesar Rp388.182 juta, beban umum dan administrasi sebesar Rp1.167.889 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp205.899 juta.

Arus kas aktivitas operasi Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2023 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari pembiayaan bersama sebesar Rp273.700 juta serta pengeluaran untuk penghasilan dan beban bunga sebesar Rp369.551 juta, beban umum dan administrasi sebesar Rp1.084.432 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp275.221 juta.

Arus kas aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari transaksi pembiayaan sebesar Rp3.180.147 juta dan pembiayaan bersama sebesar Rp391.279 juta dan transaksi lain-lain sebesar Rp212.989 juta serta pengeluaran untuk penghasilan dan beban bunga sebesar Rp883.640 juta, beban umum dan administrasi sebesar Rp2.223.972 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp400.126 juta.

Arus kas aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari transaksi lain-lain sebesar Rp243.739 juta serta pengeluaran kas bersih untuk transaksi pembiayaan sebesar Rp1.114.370 juta, penghasilan dan beban bunga sebesar Rp605.602 juta, beban umum dan administrasi sebesar Rp1.757.063 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp346.829 juta.

Arus kas untuk aktivitas investasi

Arus kas aktivitas investasi Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp17.064 juta serta pengeluaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp42.139 juta dan aset takberwujud sebesar Rp10.034 juta.

Arus kas aktivitas investasi Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2023 terutama terdiri dari pengeluaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp78.949 juta dan aset takberwujud sebesar Rp42.973 juta.

Arus kas aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp27.380 juta serta pengeluaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp192.943 juta dan aset takberwujud sebesar Rp169.526 juta.

Arus kas aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp31.632 juta serta pengeluaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp164.033 juta dan aset takberwujud sebesar Rp105.798 juta.

Arus kas (untuk) dari aktivitas pendanaan

Arus kas aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2024 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari pinjaman yang diterima sebesar Rp1.317.251 juta dan pengeluaran untuk pelunasan pokok surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp1.607.000 juta.

Arus kas aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2023 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp2.700.000 juta serta pengeluaran kas bersih untuk pinjaman yang diterima sebesar Rp252.952 juta.

Arus kas aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terutama terdiri dari pengeluaran kas bersih untuk surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.145.000 juta, pinjaman yang diterima sebesar Rp1.517.821 juta dan dividen tunai sebesar Rp902.363 juta.

Arus kas aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 terutama terdiri dari penerimaan kas bersih dari pinjaman yang diterima sebesar Rp5.344.363 juta serta pengeluaran untuk pelunasan pokok surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp910.000 juta dan dividen tunai sebesar Rp570.747 juta.

J. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kontinjensi yang signifikan.

K. FLUKTUASI KURS/SUKU BUNGA

Perseroan mempunyai utang dalam mata uang asing (seluruhnya dalam mata uang USD) yang berasal dari pinjaman luar negeri. Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki risiko dalam kemampuan Perseroan memenuhi kewajibannya jika terjadi fluktuasi dalam kurs ataupun suku bunga. Untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga atas pinjaman dalam mata uang asing, Perseroan telah melakukan lindung nilai atas seluruh utang dengan tingkat bunga yang berfluktuasi (*floating rate*) dalam mata uang asing, pada bank-bank yang terpercaya, sehingga tidak ada risiko perubahan kurs maupun suku bunga atas pinjaman dalam mata uang asing tersebut, kecuali risiko yang timbul karena kegagalan *counter party* bank mengeksekusi transaksi lindung nilai tersebut.

Dalam menghadapi risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, Perseroan melakukan seleksi atas pinjaman yang akan diajukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

L. ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN

Tabel-tabel berikut menyajikan profil jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal di bawah ini:

Posisi per 31 Mei 2024

(dalam jutaan Rupiah)

	Tidak memiliki jatuh tempo	<1 bulan	1-3 bulan	>3-12 bulan	1-3 tahun	>3 tahun	Total
Aset keuangan							
Kas dan setara kas	1.394.669	-	-	-	-	-	1.394.669
Piutang pembiayaan		1.953.944	1.797.237	7.190.168	9.488.121	1.377.629	21.807.099
- Piutang ijarah dan IMBT	-	8.225	6.171	24.599	38.273	5.227	82.495
Aset derivatif	-	2.039	5.979	27.661	49.516	-	85.195
Piutang karyawan	-	2.123	2.155	5.857	36.766	692	47.593
Jumlah aset keuangan	1.394.669	1.966.332	1.811.542	7.248.285	9.612.675	1.383.548	23.417.051
Liabilitas keuangan							
Pinjaman yang diterima	-	498.602	1.073.491	3.957.704	4.607.096	-	10.136.893
Surat berharga yang diterbitkan	-	250.000	530.000	612.000	1.731.000	-	3.123.000
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	68.127	-	-	-	-	68.127
Utang kepada supplier	-	97.658	-	-	-	-	97.658
Utang premi asuransi	-	-	40.649	-	-	-	40.649
Jumlah liabilitas keuangan	-	914.387	1.644.140	4.569.704	6.338.096	-	13.466.327
Perbedaan jatuh tempo	1.394.669	1.051.945	167.402	2.678.581	3.274.579	1.383.548	9.950.724

Posisi per 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

	Tidak memiliki jatuh tempo	<1 bulan	1-3 bulan	>3-12 bulan	1-3 tahun	>3 tahun	Total
Aset keuangan							
Kas dan setara kas	1.739.659	-	-	-	-	-	1.739.659
Piutang pembiayaan		1.880.960	1.900.122	6.929.697	9.502.491	1.257.243	21.470.513

	Tidak memiliki jatuh tempo	<1 bulan	1-3 bulan	>3-12 bulan	1-3 tahun	>3 tahun	Total
Piutang ijarah dan IMBT	-	9.924	3.778	14.536	22.826	2.752	53.816
Aset derivatif	-	3.512	7.726	39.800	5.619	-	56.657
Piutang karyawan	-	2.961	2.182	6.635	36.068	617	48.463
Jumlah aset keuangan	1.739.659	1.897.357	1.913.808	6.990.668	9.567.004	1.260.612	23.369.108
Liabilitas keuangan							
Pinjaman yang diterima	-	623.370	887.286	3.739.225	3.451.627	-	8.701.508
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	617.000	1.770.000	2.343.000	-	4.730.000
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	75.090	-	-	-	-	75.090
Utang kepada supplier	-	81.109	-	-	-	-	81.109
Utang premi asuransi	-	-	45.288	-	-	-	45.288
Jumlah liabilitas keuangan	-	779.569	1.549.574	5.509.225	5.794.627	-	13.632.995
Perbedaan jatuh tempo	1.739.659	1.117.788	364.234	1.481.443	3.772.377	1.260.612	9.736.113

Posisi per 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

	Tidak memiliki jatuh tempo	<1 bulan	1-3 bulan	>3-12 bulan	1-3 tahun	>3 tahun	Total
Aset keuangan							
Kas dan setara kas	1.073.255	-	-	-	-	-	1.073.255
Piutang pembiayaan	-	1.682.792	1.799.185	6.795.767	9.076.296	1.033.649	20.387.689
Piutang ijarah dan IMBT	-	830	801	2.934	3.019	512	8.096
Aset derivatif	-	2.979	9.531	42.493	48.053	-	103.056
Piutang karyawan	-	4.079	3.235	6.963	37.139	1.505	52.921
Jumlah aset keuangan	1.073.255	1.690.680	1.812.752	6.848.156	9.164.508	1.035.666	21.625.017
Liabilitas keuangan							
Pinjaman yang diterima	-	678.804	800.173	3.818.252	4.948.485	33.145	10.278.859
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	655.000	930.000	-	1.585.000
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	48.133	-	-	-	-	48.133
Utang kepada supplier	-	84.116	-	-	-	-	84.116
Utang premi asuransi	-	-	58.736	-	-	-	58.736
Jumlah liabilitas keuangan	-	811.053	858.909	4.473.252	5.878.485	33.145	12.054.844
Perbedaan jatuh tempo	1.073.255	879.627	953.843	2.374.904	3.286.023	1.002.521	9.570.173

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan. Di bawah ini adalah rincian risiko material yang mana faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Utama

Risiko Pembiayaan (Kredit)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit yang merupakan risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan *multifinance*. Risiko kredit didefinisikan sebagai ketidak-mampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudent, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih. Risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva yang diambil alih di bawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan nilai pasar aktiva yang diambil-alih tersebut karena kondisinya yang di bawah standar maupun karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva (*Loan to Value Ratio*) menjadi terlalu tinggi. Pada saat ini, kelompok konsumen terbesar bagi Perseroan adalah di segmen konsumen kelas menengah ke bawah sehingga jika kondisi perekonomian nasional memburuk berkepanjangan maka akan mengakibatkan konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

2. Risiko Usaha

Risiko Pendanaan dan Likuiditas

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Oleh karenanya, ketidakcukupan dana atau modal, kurangnya akses tambahan dana atau modal, keterbatasan sumber-sumber pendanaan dapat berdampak pada menurunnya pertumbuhan Perseroan. Demikian pula dengan ketidak-mampuan untuk mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh temponya akan berdampak kepada reputasi Perseroan dimata kreditur dan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru di kemudian hari.

Risiko lain yang terkait dengan pendanaan dan likuiditas adalah ketidak-mampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan aktivitas pembiayaan yang dijalankan Perseroan akan mengakibatkan ketidak-sesuaian pendanaan yang selanjutnya menurunkan pendapatan Perseroan. Demikian pula dengan risiko atas perbedaan suku bunga pinjaman dengan pembiayaan juga dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan dikenal memiliki reputasi yang sangat baik dan aktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk menunjang aktivitas pembiayaan Perseroan selama tahun berjalan baik melalui pinjaman dari perbankan maupun penerbitan surat utang melalui penawaran umum.

Risiko Persaingan

Sektor usaha pembiayaan, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor makin diminati oleh para investor, mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Beralihnya fokus bisnis beberapa perusahaan pembiayaan dengan menitikberatkan pada sektor usaha pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor serta meningkatnya pembiayaan kendaraan oleh bank-bank akan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor ini terutama pada tingkat suku bunga. Dampak langsung dari semakin tingginya persaingan ini apabila tidak bisa ditanggulangi adalah akan menurunkan pendapatan dan pangsa pasar Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan kegiatan operasional sehari-hari yang dijalankan yang berasal dari penyimpangan prosedur kerja maupun kontrol yang tidak berjalan, serta sistem komputerisasi

yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak pada proses memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, serta berkontribusi terhadap reputasi dan daya saing Perseroan, baik secara bisnis maupun dalam menarik calon-calon karyawan yang tepat dalam menunjang pertumbuhan Perseroan, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

Risiko Kepatuhan dan Regulasi

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengkinikan pengetahuan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang baru diterbitkan. Selanjutnya, kemampuan Perseroan dalam mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki Perseroan. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan dikenakannya sanksi bahkan sampai dicabutnya ijin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi

Peran teknologi, khususnya teknologi informasi dalam industri pembiayaan saat ini mempunyai posisi dan fungsi yang sangat strategis, karena bukan hanya sebagai sarana pendukung, teknologi informasi juga sebagai *strategic enabler* bagi bisnis Perseroan. Jika Perseroan lalai dalam mengoptimalkan teknologi informasinya untuk mencapai kepuasan nasabah, maka kelalaian tersebut akan berdampak negatif bagi kinerja operasional Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif juga bagi kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia dan Kepengurusan

Kesuksesan Perseroan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari manajemen kunci dan tenaga teknis serta kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, perubahan demografi, upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lain terkait jam kerja minimum dan pemutusan hubungan kerja, dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Apabila Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan integritas pegawai dan pengurus yang berkualitas, maka hal ini dapat mempengaruhi fokus bisnis Perseroan sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak bisa mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang potensial. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan kecukupan jumlah karyawan yang sesuai dengan skala kegiatan usaha yang dimiliki Perseroan saat ini, atau Perseroan tidak dapat merekrut tambahan karyawan untuk memenuhi rencana ekspansi, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh.

Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan saat ini dikendalikan dan dikelola oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha. Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, baik sektor pembiayaan, maupun secara umum, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan/proyeksi di masa yang akan datang. Selain itu, jika bisnis Perseroan semakin berkembang, terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan berinvestasi pada entitas lain, yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan, berkaitan dengan jasa pembiayaan maupun bidang usaha yang sama sekali berbeda. Hal tersebut berpotensi untuk membuat proses pengembangan bisnis Perseroan yang telah direncanakan saat ini menjadi tidak relevan lagi.

Risiko Strategi

Dalam menjalankan bisnisnya, tentunya Perseroan membutuhkan strategi yang tepat guna menyesuaikan seluruh aspek bisnis dan operasional sehingga visi dan misi Perseroan dapat tercapai dengan baik. Apabila strategi yang diterapkan tidak tepat tentunya dapat menyebabkan kegagalan dalam aspek bisnis dan operasional baik dalam skala

besar maupun kecil. Oleh karenanya, pengawasan secara aktif oleh manajemen serta adanya evaluasi dan penyesuaian rencana strategis pun dilakukan secara berkala oleh Perseroan untuk memperkecil munculnya risiko strategi tersebut.

Risiko Tata Kelola

Risiko tata kelola merupakan risiko yang muncul karena adanya kegagalan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, ketidaktepatan gaya manajemen, kecurangan serta perilaku tidak terpuji. Apabila hal-hal yang berkaitan dengan risiko tata kelola tersebut muncul, tentunya dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam aspek menjalankan kegiatan bisnis dan operasional bahkan dapat memberikan risiko reputasi ke Perseroan. Oleh karenanya, transparansi informasi serta akuntabilitas setiap pihak yang terkait atas kinerja, lalu pertanggungjawaban setiap karyawan sesuai fungsi dan jabatan, independensi antara sesama karyawan, kesetaraan dan kewajaran dalam menjaga kepentingan pemegang saham dan semua pemangku kepentingan lainnya dilakukan oleh Perseroan agar terhindar dari risiko tata kelola tersebut.

3. Risiko Umum

Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan, seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak negatif pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan.

Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana yang mengecil yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Sedangkan deregulasi di bidang moneter dan keuangan umumnya akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Situasi tersebut dapat menurunkan aktifitas Perseroan maupun pendapatan usaha Perseroan. Selain itu, terdapat risiko Pemerintah menetapkan kebijakan suku bunga yang tinggi, yang dapat mengakibatkan margin pembiayaan bersih Perseroan menjadi turun, yang berdampak pada penurunan pendapatan.

Risiko Perubahan Kurs

Risiko perubahan kurs dapat berdampak pada fasilitas pinjaman Perseroan dalam valuta asing. Selain itu penurunan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing akan berdampak langsung terhadap peningkatan harga jual kendaraan bermotor, dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang dapat berdampak negatif kepada kegiatan pembiayaan Perseroan, dan berpotensi menurunkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan Perseroan.

Risiko Sosial Politik

Kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan Perseroan, merupakan bagian dari industri keuangan nasional, yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan kondisi sosial politik. Dengan demikian, apabila terjadi ketidakstabilan politik yang berdampak pada distorsi kondisi perekonomian secara umum, hal ini dapat menyebabkan pengaruh yang kurang baik terhadap kinerja usaha Perseroan.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen Perseroan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi Perseroan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Risiko ini dapat timbul dari aktivitas pembiayaan maupun aktivitas operasional.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk memastikan kelengkapan dan kekuatan hukum dalam aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional adalah faktor yang sangat penting. Kelengkapan dan kekuatan hukum yang dimiliki Perseroan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional sangat tergantung dari kemampuan manajemen Perseroan dalam membuat dan menerapkan

standar/persyaratan yang diperlukan secara hukum terkait dengan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional tersebut. Tidak tersedianya kelengkapan dan kekuatan hukum akan dapat menimbulkan tuntutan hukum yang berdampak pada kerugian yang akan menimbulkan kebangkrutan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi serta utang Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

VII.	KEJADIAN	PENTING	SETELAH	TANGGAL	LAPORAN	AUDITOR
	INDEPENDEN					

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material dan relevan setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dalam laporan audit tertanggal 21 Juni 2024 hingga Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, selain informasi dibawah ini:

- Pada tanggal 25 Juni 2024, Perseroan telah melakukan pelunasan atas pokok dan bunga atas Obligasi V Tahap 5 Seri A sejumlah Rp254.166.666.666,67.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan dan didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 7 April 1982 Jo. Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.19 tanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3, dan Pasal 15, yang telah mendapat (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052483.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0271122 tanggal 27 Juli 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0144874.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2022, Tambahan No. 31534.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.500.000 Per Saham		
	Saham	Rupiah	
Modal Dasar	2.000	3.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan	1.000	1.500.000.000,00	
Modal Disetor	1.000	1.500.000.000,00	
Sisa Saham dalam Portepel	1.000	1.500.000.000,00	

Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal Rp1.500.000 Per Saham		%
		Rupiah		
Manufactures Hanover Leasing Corporation	700	1.050.000.000,00		70,00
PT Arya Upaya Corporation	250	375.000.000,00		25,00
Achmad Hadiat Kismet Hamami	50	75.000.000,00		5,00
Jumlah	1.000	1.500.000.000,00		100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor 67 tanggal 9 Agustus 2006, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 6 Juni 2006, Nomor 013/MPD.JKT.SLT/CT/VI/2006, sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk Nomor W7-HT.01.04.7242, diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 21 Mei 2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat perubahan nama Perseroan menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp500,00 Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	760.339.281	380.169.640.500,00
Modal Disetor	760.339.281	380.169.640.500,00
Sisa Saham Dalam Portepel	239.660.719	119.830.359.500,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
HSBC Bank PLC S/A Client General No-Treaty	135.232.983	67.616.491.500,00	17,85
Account C/O Hongkong and Shanghai Bank HSBC-Fund Services Client A/C 500 C/O	109.388.939	54.694.469.500,00	14,40
Hongkong and Shanghai Bank Special Custody Account for The Exclusive BFT of CST of Credit Suisse SE C.O BFT Standart Chartered Bank	93.019.500	46.509.750.000,00	12,23
HSBC-Fund Services Client A/C 006 C/O	51.679.000	25.839.500.000,00	6,80
Hongkong and Shanghai Bank Chase JKT S/A BF EMP IRS C/O Hongkong and Shanghai Bank	41.818.699	20.909.349.500,99	5,50
HSBC IT TST A/C ADR CO LTD C/O Hongkong and Shanghai Bank	38.627.934	19.313.967.000,00	5,01
Masyarakat	290.572.226	145.286.113.000,00	38,21
Jumlah	760.339.281	380.169.640.500,00	100,00

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan ini, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KEP-038/KM.5/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan, diterbitkan tanggal 20 Februari 2006.

Berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut, ruang lingkup kegiatan Perseroan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK 84) adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal meliputi bidang sebagai berikut:

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak Piutang
3. Pembiayaan Konsumen

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan setelah RUPS Luar Biasa yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Akta tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Usaha Pembiayaan:
 - a. Pembiayaan investasi
 - b. Pembiayaan modal kerja
 - c. Pembiayaan multiguna
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK
2. Usaha Pembiayaan Syariah:
 - a. Pembiayaan jual beli
 - b. Pembiayaan investasi
 - c. Pembiayaan jasa

Untuk menjalankan usaha pembiayaan syariah, Perseroan telah menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-27/NB.223/2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perseroan dan keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 8 Februari 2018.

Selanjutnya, guna memenuhi persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha Perseroan, khususnya Peraturan OJK No. 35/2018 maksud dan tujuan Perseroan telah berubah menjadi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembiayaan (aktivitas keuangan).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Usaha Pembiayaan:
 - b. Pembiayaan Investasi;
 - c. Pembiayaan Modal Kerja;

- d. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
 - e. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
 - f. Usaha Pembiayaan Syariah:
 - g. Pembiayaan Jual Beli;
 - h. Pembiayaan Investasi; dan/atau
 - i. Pembiayaan Jasa
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan dan pengembangan, antara lain menambah jaringan usaha, membangun infrastruktur dan kegiatan lain yang mendukung usaha dan kinerja Perseroan.
 - b. melakukan kegiatan mencari dan/atau memperoleh sumber pendanaan.
 - c. melakukan segala perbuatan pemilikan dan sewa menyewa dengan pihak lain.
 - d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan atau terkait dengan kegiatan usaha utama.
 - e. Sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Keterangan
1982	Perseroan didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia.
1990	Perseroan mendapatkan izin operasi sebagai perusahaan <i>multifinance</i> dan melakukan perubahan nama menjadi PT Bunas Finance Indonesia. Selanjutnya pada tahun yang sama, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagai Perusahaan Terbuka dan melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
1998-2000	Perseroan mengalami dampak dari krisis finansial di Indonesia dan Asia yang berlangsung sejak tahun 1997-1998, dan melakukan restrukturisasi hutang dengan kreditur.
2001	Perseroan berhasil melakukan restrukturisasi hutang dengan kreditur dan melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk.
2011	Pemegang saham utama Perseroan mengalami perubahan setelah terjadi pengalihan saham oleh beberapa pemegang saham sebelumnya kepada Trinugraha Capital & Co SCA, suatu konsorsium keuangan yang terdiri dari TPG Capital, Northstar Group dan Garibaldi Thohir.
2017	Perseroan mendirikan Perusahaan Anak, FIT, dengan aktivitas usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (<i>peer to peer lending</i>). Perseroan juga mendirikan Dewan Pengawas Syariah pada Oktober 2017.
2018	FIT memperoleh izin dari OJK untuk kegiatan usaha <i>peer to peer lending</i> dengan nama Pinjam Modal (<i>pinjammodal.id</i>).
2019	Perseroan mendapat penghargaan dari majalah Infobank sebagai Perusahaan Multi Finance No.1 (kategori aset di atas Rp10 triliun) selama 3 tahun berturut turut dan Platinum Trophy untuk kinerja financial terbaik selama 10 tahun berturut-turut.
2020	FIT memperoleh izin dari OJK untuk kegiatan fintech dan menjadi perusahaan anak <i>multifinance</i> yang pertama memiliki izin fintech.
2022	Pemegang saham utama Perseroan, Trinugraha Capital & Co SCA melakukan aksi korporasi Voluntary Tender Offer dan membeli sebanyak 852.876.278 saham Perseroan dari pemegang saham publik dan meningkatkan kepemilikannya atas Perseroan menjadi 5,34%. Selanjutnya, Jerry Ng dan Garibaldi Thohir menjadi pemilik manfaat akhir (<i>ultimate beneficial owner</i>) dari Perseroan.
2023	Perseroan mendapat kenaikan pemeringkatan nasional oleh Fitch Ratings dari 'A+(idn)' menjadi 'AA-(idn)' di bulan Maret 2023.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 2022

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 Mei 2017 Juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per tanggal 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pemeaana Saham	Nilai Nominal Rp25 Per Saham		
	Saham	Rupiah	%*
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450,00	51,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.351.257.682	183.781.442.050,00	48,88
Sub-total	15.039.383.620	375.984.590.500,00	100,00
Saham Treasuri	927.732.000	23.193.300.000,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500,00	
Saham dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500,00	

Keterangan:

*) % kepemilikan saham disajikan secara netto, diluar saham treasuri.

2023

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 Mei 2017 Juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per tanggal 31 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemeaana Saham	Nilai Nominal Rp25 Per Saham		
	Saham	Rupiah	%*
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Db Spore Ses CIt A/C For Ntasian Discovery MSTR FD-864134218	832.804.900	20.820.122.500,00	5,54
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450,00	51,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.518.452.782	162.961.319.550,00	43,34
Sub-total	15.039.383.620	375.984.590.500,00	100,00
Saham Treasuri	927.732.000	23.193.300.000,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500,00	
Saham dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500,00	

Keterangan:

*) % kepemilikan saham disajikan secara netto, diluar saham treasuri.

2024

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 Mei 2017 Juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per tanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Pemeaana Saham	Nilai Nominal Rp25 Per Saham		
	Saham	Rupiah	%*
Modal Dasar	20.000.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450	51,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.351.257.682	183.781.442.050	48,88
Sub-total	15.039.383.620	375.984.590.500	100,00
Saham Treasuri	927.732.000	23.193.300.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	
Saham dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	

Keterangan:

*) % kepemilikan saham disajikan secara netto, diluar saham treasuri.

4. Perizinan

Perseroan

a. Nomor Induk Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB No. 8120213191841 tanggal 29 Mei 2024 (Perubahan ke-3), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Alamat Kantor : Sunburst CBD BSD City Lot 1-2, Lengkong Gudang Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15322
 Status Penanaman Modal : PMDN

Berdasarkan izin di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	64911	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	Sunburst CBD Lot 1-2, Jln Kapt Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15322	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2.	64913	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	Sunburst CBD Lot 1-2, Jln Kapt Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15322	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

NIB berlaku selaman Perseroan menjalankan kegiatan usaha di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

b. Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

- 1) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KEP-038/KM.5/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan, diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2006. Berdasarkan mana Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen.

Izin usaha ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan selama Perseroan masih menjalankan usahanya serta sepanjang Perseroan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

- 2) Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-27/NB.223/2018 tanggal 8 Februari 2018. Berdasarkan mana Dewan Komisiner OJK memberikan Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perseroan.

c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)

Perseroan telah mendapatkan PKKPR melalui persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha Nomor: 10012210213674008 (Konvensional) dan 14122110213674102 (Unit Usaha Syariah) yang seluruhnya diterbitkan tanggal 14 Desember 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kegiatan Usaha : Perusahaan Pembiayaan Konvensional (KBLI 64911) dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (KBLI 64913)
 Skala Usaha : Usaha Besar
 Lokasi Usaha : Sunburst CBD Lot 1-2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City
 Luas Tanah : 7.050 m²

Dengan ketentuan PKKPR berlaku pada tanggal diterbitkannya dan berlaku selama tiga tahun sejak diterbitkan.

d. Perizinan Lingkungan dan Dokumen Pendukung Sehubungan Pembangunan dan Operasional Kantor Pusat Perseroan

1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”)

Perseroan telah memperoleh izin AMDAL berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Tangerang Selatan No. 660/77-BP2T/2011 tanggal 28 Desember 2011, perihal Kesepakatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Kantor Pusat PT BFI Finance Indonesia Tbk. Sehubungan dengan surat tersebut, dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan sebagai bagian dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup BFI Finance Indonesia Tbk, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk pembangunan Kantor Pusat yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

2) Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Perseroan telah memperoleh IMB berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 645/15-BP2T/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Kantor Diberikan kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk pembangunan kantor yang terletak di Sunburst CBD, BSD City Lot 1-2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan tidak mengurangi berlakunya peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan agar memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

3) Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”)

Perseroan telah memperoleh SLF melalui Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor 594.3/5-DPMPTSP/OL/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Nomor: 741.23/0757-Sanitasi tanggal 13 Maret 2020, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan pemeriksaan dokumentasi administrasi, dokumen teknis, dan peninjauan di lokasi bangunan dan memberikan rekomendasi kepada Perseroan untuk dapat diterbitkan SLF, dengan rincian informasi:

Pemilik Bangunan	:	PT BFI Finance Indonesia Tbk
Nama Bangunan Gedung	:	BFI Finance Indonesia (<i>Head office</i>)
Fungsi Bangunan Gedung	:	Kantor
Klasifikasi Bangunan	:	Perkantoran
Nomor PBG	:	645/15-BP2T/2011 tanggal 18 Januari 2011
Lokasi Bangunan Gedung	:	Sunburst CBD Lot 1-2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
Kelaikan	:	Laik Fungsi

SLF ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

4) Sertifikat Keselamatan Kebakaran (“SKK”)

Perseroan telah memperoleh SKK dengan Nomor 300.21/150-DAMKAR/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang diterbitkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran No. 300.21/150-DAMKAR/2023 tanggal 9 Oktober 2022, dengan pertimbangan bahwa Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan menerangkan sarana proteksi kebakaran pada gedung BFI Finance Indonesia yang terletak di Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, Sunburst CBD Lot. 1-2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dinyatakan layak pakai, memenuhi persyaratan dan berfungsi baik.

SKK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Oktober 2024.

5) Perizinan dan Dokumen Sehubungan dengan Keselamatan Alat Angkut

Dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan Eskalator, Perseroan telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap spesifikasi alat angkut berupa *elevator* di gedung BFI Finance Indonesia, yang dibuktikan dengan penerbitan sertifikat oleh PT Andalan Jasa Keselamatan sebagaimana hasil dari pemeriksaan dan pengujian standar di bidang *elevator*, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan No. 560/1429/ELEV-ESC/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal: Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Obyek K3 berupa Elevator Passenger 01, dengan kapasitas angkut 1.050 Kg/14 orang.
- b. Surat Keterangan No. 560/1430/ELEV-ESC/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal: Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Obyek K3 berupa Elevator Passenger 02, dengan kapasitas angkut 1.050 Kg/14 orang.
- c. Surat Keterangan No. 560/1431/ELEV-ESC/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal: Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Obyek K3 berupa Elevator Passenger 03, dengan kapasitas angkut 1.050 Kg/14 orang.
- d. Surat Keterangan No. 560/1432/ELEV-ESC/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal: Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Obyek K3 berupa Elevator Passenger 04, dengan kapasitas angkut 1.050 Kg/14 orang.
- e. Surat Keterangan No. 560/1433/ELEV-ESC/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal: Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Obyek K3 berupa Elevator Service 05, dengan kapasitas angkut 1.600 Kg/21 orang.

Sertifikat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali paling lambat Februari 2025.

e. Sertifikasi Profesi Bidang Pembiayaan

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK 7/POJK.05/2022, Perseroan telah mengikutsertakan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai manajerial, dan karyawannya dalam Sertifikasi Profesi di bidang Pembiayaan, yang diselenggarakan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sertifikasi Ahli Pembiayaan Direksi

No.	Nama	Jabatan	No. Sertifikasi	Refreshment Point 2023
1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	8127-50860-600-0317	10
2.	Sudjono	Direktur Keuangan	8127-10001-600-0416	10
3.	Sutadi	Direktur Bisnis	8127-10000-600-0416	10
4.	Andrew Adiwijanto	Direktur Operasional dan SDM	8127-51216-600-0717	10
5.	Goklas *)	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

- Berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia, sertifikasi Direksi tidak memiliki masa kedaluwarsa sepanjang Direksi memenuhi refreshment point setiap tahun. Seluruh Direksi telah mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) point setiap tahun.
- *)Direksi Perseroan atas nama Goklas telah menerima Pengumuman Hasil Ujian terkait Sertifikasi Ahli Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Surat LSP Pembiayaan Indonesia No. 014/SPPI/AH/VI/24 tanggal 3 Mei 2024, dengan predikat "Kompeten." Kewajiban Goklas untuk melakukan penyegaran (refreshment) akan berlaku efektif pada tanggal diterbitkannya surat persetujuan dari OJK terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan. sampai dengan efektifnya pengangkatan tersebut, Goklas tidak berkewajiban memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018.

2) Sertifikasi Tingkat Dasar Pembiayaan Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	No. Sertifikasi	Refreshment Point 2023
1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	8127-50468-550-0716	5
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	8127-50469-550-0317	5
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen	8127-00001-600-0615	5
4.	Sunata	Komisaris	8127-50466-550-0716	5
5.	Tjiterosampurno			
6.	Saurabh Narayan	Komisaris	64911-1100-6-0000032-	N/A
	Agarwal*)		2023	

Keterangan:

- Berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia, sertifikasi Dewan Komisaris tidak memiliki masa kedaluwarsa sepanjang Dewan Komisaris memenuhi refreshment point setiap tahun. Seluruh Dewan Komisaris telah mengumpulkan paling sedikit 5 (lima) point setiap tahun.
- *)Komisaris Perseroan atas nama Saurabh Narayan Agarwal telah mendapatkan Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP203/PL.02/2023 tanggal 8 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, kewajiban Saurabh Narayan Agarwal untuk memenuhi syarat keberlanjutan atau penyegaran (refreshment) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung

pada tahun takwim berikutnya sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan dari OJK terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan.

3) Sertifikasi Tingkat Dasar di Bidang Pembiayaan Pegawai Manajerial

Nama	Jabatan	Sertifikasi	Masa Berlaku	Catatan
Iwan	Asset Management Deputy Director	Sertifikasi Tingkat Dasar Pembiayaan Manajerial - SPPI	14 April 2024	Akan mengikuti perpanjangan sertifikasi pada bulan Agustus 2024
Tan Rudy Eddywidjaja	Marketing Deputy Director	Sertifikasi Tingkat Dasar Pembiayaan Manajerial - SPPI	14 April 2024	Akan mengikuti perpanjangan sertifikasi pada bulan Agustus 2024
Goklas	Chief Risk Management & Transformation Officer	Sertifikasi Tingkat Dasar Pembiayaan Manajerial - SPPI	22 Mei 2027	Telah mengikuti <i>assessment</i> Sertifikasi dan memperoleh Kartu Serifikasi Digital (<i>e-Card</i>) LSPPI No. 8127-56788-500-0524
		Sertifikasi Ahli Pembiayaan	-	Telah mengikuti <i>assessment</i> Sertifikasi dan memperoleh Kartu Serifikasi Digital (<i>e-Card</i>) LSPPI No. 8127-56788-600-0524
Baskoro Fadin Wafdana	New Business & Partnership Tribe Lead	Sertifikasi Tingkat Dasar Pembiayaan Manajerial - SPPI	14 April 2024	Akan mengikuti perpanjangan sertifikasi pada bulan Agustus 2024
Ari Binoto Lumbantobing	Chief Technology Officer	Sertifikasi Tingkat Dasar Pembiayaan Manajerial - SPPI	26 Oktober 2026	Telah mengikuti <i>assessment</i> sertifikasi dan memperoleh Kartu Serifikasi Digital (<i>e-Card</i>) LSPPI No. 8127-56642-500-1023
Tonny Widjaja	Finance & Treasury Head	Sertifikasi Tingkat Dasar Pembiayaan Manajerial - SPPI	16 Juni 2024	Akan mengikuti perpanjangan sertifikasi pada bulan November 2024

4) Sertifikasi Profesi di Bidang Penagihan dan Eksekusi Agunan Karyawan

Perseroan telah mengikutsertakan 2.560 karyawannya dalam Sertifikasi Profesi di Bidang Penagihan dan Eksekusi Agunan.

Perusahaan Anak

1. Nomor Induk Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 8120019100976 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Finansial Integrasi Teknologi
 Alamat Kantor : Foresta Business Loft 5 Unit 11, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kec. Pagedaan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15331
 Status Penanaman Modal : PMDN

NIB tersebut diterbitkan pada tanggal 7 November 2018, perubahan ke-5 pada tanggal 23 Agustus 2022 dan dicetak pada tanggal 23 Agustus 2022.

NIB FIT telah berlaku efektif selama FIT menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

FIT dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagai berikut:

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
				Jenis	Legalitas
64951	Layanan Pinjam	Foresta Business Loft 5 Unit	Tinggi	Jenis	Legalitas
	Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	11, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kec. Pagedaan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15331		NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
	(Fintech P2P Lending) Konvensional			Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

2. Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-20/D.05/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Finansial Integrasi Teknologi.

Berdasarkan mana Anggota Dewan Komisiner OJK memberikan izin usaha perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada FIT dengan sistem elektronik pinjam modal, laman web pinjammodal.id, nama dan merek aplikasi pinjam modal pada sistem operasi Android, iOS dan website, dan model bisnis konvensional.

3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)

FIT telah mendapatkan PKKPR melalui persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha Nomor: 23082210213603052 yang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT Finansial Integrasi Teknologi
 Kegiatan Usaha : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional - KBLI 66311
 Skala Usaha : Usaha Besar
 Lokasi Usaha : Foresta Business Loft 5 Unit 11, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kec. Pagedaan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15331
 Luas Tanah : 78,59 m²

Dengan ketentuan PKKPR berlaku pada tanggal diterbitkannya dan berlaku selama tiga tahun sejak diterbitkan.

5. Perjanjian Penting

Perjanjian Teknis

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Lelang tanggal 10 Desember 2015 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama Lelang antara PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Balai Lelang Indonesia No. 173-A/BLI/PKS/LGL/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020	i. Perseroan ii. PT Balai Lelang Indonesia (" Balai Lelang ")	Balai Lelang atas permintaan Perseroan setuju untuk melaksanakan lelang noneksekusi terhadap aset milik Perseroan maupun lelang eksekusi atas obyek lelang bagi debitur yang dianggap lalai berdasarkan perjanjian pembiayaan antara debitur	3% sampai dengan 0,5% dari harga terbentuk lelang maupun dari harga pelunasan.	Terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu berlaku sejak 10 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2025.

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
			dengan Perseroan.		
2.	Perjanjian Kerjasama Referensi Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan No. 062/COMMLIFE-AGR/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Jo. Addendum I No. 040/FWDII-AMD/XI/2020 tanggal 30 Oktober 2020 dan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Addendum II No. FWD-AGR/LGL/X-2021/00357 tanggal 18 Oktober 2021	i. Perseroan ii. PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life) ("Pihak Kedua")	Perseroan dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya akan mereferensikan produk asuransi Pihak Kedua kepada nasabah Perseroan yang telah disetujui permohonan kreditnya oleh Perseroan, dan atas setiap referensi yang telah disetujui pertanggungannya oleh Pihak Kedua, Perseroan akan memperoleh imbalan jasa referensi dari Pihak Kedua	Akan dibayarkan biaya referensi sesuai nilai premi yang dibayarkan	Berlaku sejak tanggal ditandatangani perjanjian hingga diakhiri oleh salah satu pihak
3.	Perjanjian Kerjasama Asuransi Pembiayaan No. 169/ASPAN/DIR/PKS/XI/2016 tanggal 14 November 2016 jo. Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Pembiayaan No. 048/ASPAN/DIR/PKS/III/2017 tanggal 13 Maret 2017	i. Perseroan ii. PT Asuransi Purna Artanugraha ("APA")	Perjanjian kerjasama asuransi pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada APA atas risiko: i. Meninggal dunia; ii. Cacat tetap karena sakit dan/atau kecelakaan; iii. Pemutusan hubungan kerja iv. Pembiayaan macet.	Rate imbal jasa sebesar 0,6% sampai dengan 1,5% dari premi	Berlaku sejak 14 November 2016 sampai dengan terdapat kesepakatan penghentian
4.	Perjanjian Kerjasama Layanan Transaksi Pembayaran Multi Biller, Nomor Standard Chartered Bank: MB-BFI/150210, Nomor PT Artajasa Pembayaran Elektronik: 022/PKS.SCB-BFI/AJ/000/2010 dan Nomor BFI: OP/TRS/L/II/2010-0186 tanggal 15 Februari 2020 jo. Addendum Pertama terhadap Perjanjian Kerjasama Layanan Transaksi Pembayaran Multi Biller Nomor Standard Chartered Bank: 005/TB-WB/IV/2020, Nomor PT Artajasa Pembayaran Elektronik: 018A/PKS.SCB-BFI/AJ/000/2020 dan Nomor BFI: BFI/OPDEV/PKS/IV/2014 tanggal 01 Mei 2020	i. Standard Chartered Bank ii. PT Artajasa Pembayaran Elektronik iii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran elektronik	Biaya transaksi, adalah biaya yang diperlukan untuk setiap transaksi berhasil yang dilakukan pelanggan dengan menggunakan layanan, yaitu sebesar Rp4.900	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
5.	Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Debit Transfer, Nomor Cashlez: 016/PKS/CASHLEZ/III/2020 dan	i. PT Cashlez Worldwide Indonesia ("Cashlez") ii. Perseroan	Para Pihak telah menyetujui untuk melakukan kerjasama dimana Perseroan	Kedua akan dikenakan biaya penggunaan fitur debit transfer sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
	Nomor BFI: BFI/OPDEV/III/20/03 tanggal 01 April 2020	(secara bersama "Para Pihak")	sebagai merchant dari Cashlez yang menggunakan aplikasi layanan sistem pembayaran non tunai berupa fitur "debit transfer"	Rupiah) per transaksi (belum termasuk PPN).	diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
6.	Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Co-Branding Mandiri E-Money, Nomor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: DBT.TBR/PKS/EBD.100/2016, tanggal 06 Maret 2017	i. Perseroan ii. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Penerbitan Kartu Co-Branding berbasis smart card dengan menggunakan Kartu Mandiri e-Money oleh Bank Mandiri dengan desain khusus yang menampilkan logo Perseroan dan Bank Mandiri sesuai permintaan Perseroan dengan memperhatikan standar yang berlaku pada Bank Mandiri.	Biaya penerbitan kartu mitra menjadi beban Perseroan, yaitu sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).	Perjanjian ini berlaku untuk 2 tahun yang dimulai efektif sejak tanggal perjanjian ini tanggal 6 Maret 2017 sampai 6 Maret 2019, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, sepanjang tidak ada pemberitahuan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian ini
7.	Perjanjian Kerjasama Jasa Verifikasi Biometrik Nomor 20190528-BFI101 tanggal 27 Juni 2019 jo. Addendum I Nomor 20200518/ASLIRI/LGL/CA.ADD-BFI01 tanggal 18 Mei 2020 Jo. Addendum II Nomor: 011/ASLIRI/LGL/VI/2021/CA.ADD-BFI02 tanggal 30 April 2021 dan terakhir diubah dengan Addendum III No. 001/ASLIRI/LGL/XII/2023/CA.ADD-BFI03 tanggal 5 Desember 2023	i. PT Asli Rancangan Indonesia ("ARI") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	ARI sepakat untuk menyediakan jasa verifikasi biometrik kepada Perseroan untuk memverifikasi data orang perseorangan dalam bentuk informasi bahwa data "Sesuai" atau "Tidak Sesuai" dan tidak ada informasi secara terperinci yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	Biaya layanan sebesar Rp7.500.001.500,00 (belum termasuk pajak)	Perjanjian berlaku sejak 16 Juni 2021 dan akan otomatis diperpanjang untuk waktu 1 (satu) tahun sampai diakhiri oleh salah satu pihak
8.	Perjanjian Keanggotaan tanggal 09 November 2019	i. PT Rapi Utama Indonesia ("Rapindo") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Rapindo menyediakan dan mengelola sistem registrasi aset untuk melakukan pendataan objek pembiayaan serta melakukan pemeriksaan atas objek pembiayaan, yang telah dibiayai oleh sejumlah perusahaan pembiayaan atau menjadi jaminan pelunasan hutang debitur kepada	Biaya keanggotaan mulai dari Rp20.000.0000 sampai dengan Rp70.000.000 per tahun dan biaya layanan minimal Rp1.000.000	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dana akan diperpanjang secara otomatis untuk waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
			sejumlah perusahaan pembiayaan atau perbankan, dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda kepada beberapa perusahaan lain dan ataupun pembiayaan ganda kepada pihak perbankan		
9.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset tanggal 18 Januari 2019	i. Perseroan ii. PT Solusi Integrasi Pratama ("SIP") (secara bersama "Para Pihak")	Perseroan bermaksud menunjuk SIP untuk melakukan jasa pengelolaan aset Perseroan yang berupa barang jaminan dan/atau objek pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh debitur dengan Perseroan	Besar imbalan jasa yang menjadi hak SIP atas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebesar 3,5% dari harga penjualan aset	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
10.	Perjanjian Pemeliharaan No. 0237/HKM/MJEE/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Jo. PKS No. 0287/HKN/MJEE/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam PKS No. 0184/HKN/MJEE/IV/2022 tanggal 29 April 2022	i. Perseroan ii. PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator ("MJEE") (secara bersama "Para Pihak")	Perseroan memberi tugas kepada MJEE dan MJEE menerima bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan Mitsubishi Elevator (L.O.G; Labour, Oil, Grease)	Perseroan sepakat untuk membayar kepada MJEE biaya pemeliharaan elevator sebesar Rp6.937.500,00 per 3 (tiga) bulan atau sebesar Rp55.500.000,00 per tahun, serta biaya panggilan kemacetan elevator pada hari kerja tetapi di luar jam kerja akan diperhitungkan sebesar Rp40.000,00 per jam perorang atau Rp50.000,00 per jam perorang pada hari libur dan hari Minggu.	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
11	Perjanjian Layanan Tanda Tangan Elektronik No. Privy: 093/PD-BD/PKS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 Jo. Addendum I No. 228/PID-BD/PKS/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, Addendum II No. 018/Privy-BD/PKS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Addendum III No. 014/AMD-TTE/LGL-BD/PID/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Addendum IV No. 050/AMD/LGL/BD/PED/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023	i. Perseroan ii. PT Privy Identitas Digital ("PRIVY") (secara bersama "Para Pihak")	Layanan jasa tanda tangan elektronik	Biaya layanan yang disepakati Para Pihak atas layanan jasa PRIVY adalah Rp189.733.000	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
12	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Jasa Pembiayaan antara PT Vostropay Paramarta Nusantara dengan Perseroan Nomor VPN: 017/PKS/MFC/VPN.BFI/II/2019	i. PT Vostropay Paramarta Nusantara ("Vospay") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Kerjasama fasilitas pembiayaan pada platform digital Vosplay	Harga yang disepakati Para Pihak untuk kerjasama ini sebesar Rp50.050.000,00	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya sampai dengan berakhir oleh Para Pihak
13	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Jasa Pembiayaan No. 019/PKS.LJK/VPN.BFI/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan diubah seluruhnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Vostropay Paramarta Nusantara dengan Perseroan tanggal 15 September 2020	i. Perseroan ii. PT Vostropay Paramarta Nusantara ("Vospay") (secara bersama "Para Pihak")	Kerjasama jasa pemasaran yang ditawarkan Perseroan kepada Vospay agar konsumen memperoleh informasi fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perseroan	Biaya imbal jasa kepada Vospay sebagai berikut: 1) Jika nominal pencairan sebesar kurang dari Rp20.000.000, maka fee yang didapat oleh Perseroan adalah sebesar 1%; dan 2) Jika nominal pencairan sebesar lebih dari Rp20.000.000, maka fee yang didapat oleh Vospay adalah sebesar 2%.	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhir oleh Para Pihak
14	Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2019	i. Perseroan ii. PT Motoran Teknologi Indonesia ("MTI") (secara bersama "Para Pihak")	Perseroan bermaksud mengadakan kerjasama dengan MTI agar Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perseroan	Biaya imbal jasa dari Rp300.000 sampai dengan Rp500.000 per kontrak.	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas sampai dengan berakhir oleh Para Pihak
15	Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Agustus 2019	i. Perseroan; ii. PT Indoglobal Nusa Persada ("iGlobal") (secara bersama "Para Pihak")	Perseroan bermaksud untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada debiturnya yang dalam hal ini merupakan pengguna aplikasi untuk pembayaran biaya pendidikan yang direkomendasikan oleh iGlobal kepada Perseroan melalui aplikasi milik iGlobal	iGlobal berhak untuk memperoleh imbalan jasa dari Perseroan dalam jumlah sebesar 1,5% dari nilai pembiayaan diberikan oleh Perseroan kepada pengguna aplikasi.	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas sampai dengan berakhir oleh Para Pihak
16	Perjanjian Kerjasama tanggal 25 September 2019	i. Herman Handoko yang diwakili dalam jabatan selaku Channel Head dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi	Pihak Pertama bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua agar Konsumen dapat memperoleh informasi	Perseroan akan memberikan imbalan jasa sesuai dengan nilai transaksi	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas sampai dengan berakhir

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
		bertindak untuk dan atas nama Perseroan ("Pihak Pertama") ii. PT Karya Anak Nasional ("Pihak Kedua") (secara bersama "Para Pihak")	mengenai fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Pihak Pertama		oleh Para Pihak
17	Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Oktober 2019	i. PT Zhengan Indonesia Indonesia ("Pihak Pertama") ii. Herman Handoko dalam kapasitas jabatannya sebagai Channel Head, yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan ("Pihak Kedua") (secara bersama "Para Pihak")	Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud mengadakan kerjasama guna merealisasikan dan meningkatkan penjualan alat-alat kesehatan milik Pihak Pertama dengan menggunakan fasilitas sewa pembiayaan dari Pihak Kedua oleh debitur	-	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhir oleh Para Pihak
18	Perjanjian Kerjasama No. Partner: 04/BD/PKS/XI/2019 tanggal 24 Oktober 2019	i. PT Olsera Indonesia Pratama ("OLSERA"); ii. Yefra Bramiana dalam kapasitasnya selaku Business Development Head Perseroan, dari oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perseroan ("Perseroan"). (secara bersama "Para Pihak")	OLSERA menunjuk Perseroan guna menyediakan sumber pendanaan dimaksud kepada pengguna aplikasi OLSERA, baik berupa penyediaan fasilitas modal kerja dan/atau persediaan barang dagangan dan pemasok	Imbal jasa Rp1.180.000 untuk pencairan dengan jaminan mobil dan imbal jasa Rp440.000 untuk pencairan dengan jaminan motor	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhir oleh Para Pihak
19	Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Januari 2020	i. Yefra Bramiana yang diwakili dalam jabatan selaku Business Development Head dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan ("Pihak Pertama") ii. Reancy Triashari yang diwakili dalam jabatan selaku Head of	Pihak Pertama bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua agar konsumen dapat memperoleh informasi mengenai fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Pihak Pertama.	Imbal jasa sebesar 0,5% sampai dengan 1% dari nilai pembiayaan per jaminan dan 0,75% sampai dengan 3,5% dari total nilai pembiayaan per bulan.	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas sampai dengan diakhir oleh Para Pihak

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
		Marketing dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT Cerdas Digital Nusantara ("Pihak Kedua"). (secara bersama "Para Pihak")			
20	Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2020	i. Yeftha Bramiana yang diwakili dalam jabatan selaku Business Development Head dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan ("Pihak Pertama"); ii. PT Moladin Digital Indonesia ("Pihak Kedua") (secara bersama "Para Pihak")	Pihak Pertama bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua agar konsumen dapat memperoleh informasi mengenai fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Pihak Pertama	Imbal jasa sebesar 0,5% sampai dengan 1% dari nilai pembiayaan per jaminan dan 0,75% sampai dengan 3,5% dari total nilai pembiayaan per bulan.	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
21	Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Umum Syariah No. 06/002/III/PERJ.DIR/ASEI tanggal 26 Maret 2019	i. Perseroan ii. PT Asuransi Asei Indonesia (secara bersama "Para Pihak")	Rekanan perusahaan asuransi untuk segala jasa pembiayaan Perseroan	Marketing fee sebesar 20% dari setiap penutupan asuransi	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
22	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Aswata Kencana Takaful No. 086/DIR/II/2019 tanggal 7 Februari 2019	i. Perseroan ii. PT Asuransi Wahana Tata (secara bersama "Para Pihak")	Para Pihak sepakat bahwa Perseroan akan melakukan pemasaran atas produk asuransi atas dasar prinsip syariah kepada konsumen Perseroan.	Kesepakatan mengenai kontrobusi, biaya administrasi, dan risiko ditetapkan sesuai polis yang diterbitkan Perseroan	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
23	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah No. 226.PKS-LS/BFI-ASM.SYR/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019	i. Perseroan ii. PT Asuransi Sinar Mas ("ASM") (secara bersama "Para Pihak")	Para Pihak sepakat bahwa Perseroan akan melakukan referensi atas produk asuransi ASM kepada konsumen.	Kesepakatan mengenai kontrobusi, biaya administrasi, dan risiko ditetapkan sesuai polis yang diterbitkan Perseroan	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
24	Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Nomor 795/Cigna-BFI/VI/14 tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat di bawah tangan jo. Addendum Pertama Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Nomor 122/CIGNA-BFI/VI/19 tanggal 10 Juni 2019, Addendum Kedua No. 92/CIGNA-BFI/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dan Addendum Ketiga	i. Perseroan ii. PT Chubb Life Insurance (d/h PT Asuransi Cigna) ("Chubb") (secara bersama "Para Pihak")	Perseroan dengan ini menunjuk Chubb untuk melakukan penutupan Asuransi Jiwa Kredit Kolektif BFI Loan Protection ("Produk Asuransi") sesuai syarat dan	Imbal jasa ditentukan sesuai jangka waktu pinjaman, dimulai dari 1 – 72 bulan dengan minimum <i>net single premium</i> 1,8 – 58,4/per 1.000 up dan <i>gross single premium</i> 5,5- 63/per 1.000 up.	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
	Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kolektif tanggal 14 Maret 2024		ketentuan yang tercantum dalam polis induk dan perjanjian ini atas debitur yang bersedia ikut serta dalam Produk Asuransi;		
25	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Nomor 041/PKS/FSI/V/2014 tanggal 19 Mei 2014	i. Perseroan ii. PT Asuransi Indrapura ("AI") (secara bersama " Para Pihak ")	Kerjasama penutupan asuransi atas mesin/peralatan industri dan/atau alat berat (<i>heavy equipment</i>) yang menjadi objek fasilitas sewa guna usaha yang diberikan oleh Perseroan kepada penyewa guna usaha (<i>lessee</i>) berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.	Harga pertanggungan didasarkan pada new replacement value unit tersebut dan dapat disesuaikan dengan harga baru yang sebenarnya untuk mencegah under insurance	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhir oleh Para Pihak
26	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Tanggal 1 Desember 2014	i. Perseroan ii. PT Asuransi Indrapura ("AI") (secara bersama " Para Pihak ")	Perseroan sebagai tertanggung, menunjuk AI sebagai penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor yang menjadi objek atau jaminan atas fasilitas pembiayaan dari Perseroan	Harga pertanggungan yang berlaku dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini minimal sebesar pokok hutang debitur atau sesuai permintaan Perseroan kepada AI	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhir oleh Para Pihak
27	Perubahan dan Pernyataan kembali Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) No. 0100/049/B/24052023 tanggal 24 Mei 2023 Jo. Addendum I No. 0100/091/B/14122023 tanggal 14 Desember 2023, Addendum II No. 0100/006/B/26012024 tanggal 26 Januari 2024, Addendum III No. 0100/013/B/26022024 tanggal 26 Februari 2024, Addendum IV No. 0100/019/B/28032024 tanggal 28 Maret 2024, Addendum V No. 0100/037/B/26062024 tanggal 27 Juni 2024, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VI No. 0100/042/B/01082024 tanggal 1 Agustus 2024.	i. PT Bank Jago Tbk ii. Perseroan	Perjanjian kerja sama fasilitas pembiayaan bersama	Rp2.000.000.000	Perjanjian ini bermula pada 5 Agustus 2024 sampai dengan 5 Agustus 2027.
28	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment dan Property All Risk) No. 001/MOU/DIR/RO/LS-HE/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 dan perubahannya sebagaimana	i. Perseroan ii. PT Asuransi Raksa Praktikara (" ARP ")	Perseroan menunjuk ARP sebagai penanggung untuk menutup asuransi atas obyek	Harga pertanggungan didasarkan pada new replacement value unit tersebut dan dapat disesuaikan dengan harga baru yang	Jangka waktu pertanggungan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
	termuat dalam Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment) No. 001/MOU/DIR/RO/LS-HE/097/2021 tanggal 2 Mei 2024	(secara bersama "Para Pihak")	pertanggungan asuransi milik Perseroan yang disewa pembiayaan kepada pihak debitur, dan ARP menyetujui untuk menutup asuransi atas obyek pertanggungan	sebenarnya untuk mencegah <i>under insurance</i>	sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan
29	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Kendaraan Melalui Fasilitas Pembiayaan No. 001/Moladin/MOU/III/2022 tanggal 22 Februari 2022	i. PT Moladin Digital Indonesia (" MDI ") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penjualan kendaraan bermotor roda empat dalam kondisi bekas dengan sumber aplikasi dari MDI melalui skema fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan	-	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
30	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Kendaraan Melalui Fasilitas Pembiayaan No. 001/Caroline/MOU/III/2022 tanggal 21 Februari 2022	i. PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (" ASL ") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penjualan kendaraan bermotor roda empat dalam kondisi bekas dengan sumber aplikasi dari ASL melalui skema fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan	-	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
31	Perjanjian Kerja Sama Penjualan Kendaraan Melalui Fasilitas Pembiayaan No. 001/CARSOME/MOU/VIII/2021 tanggal 15 Maret 2022	i. PT Car Some Certified Indonesia (" CSCI ") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penjualan kendaraan bermotor roda empat dalam kondisi bekas dengan sumber aplikasi dari CSCI melalui skema fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan	-	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
32	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pengamanan No. ISS-01007.03-D tanggal 2 Januari 2024	i. Perseroan ii. PT ISS Indonesia	Kerjasama penyediaan jasa pengamanan	Rp179.190.546	Terhitung dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
33	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Kebersihan No. ISS-	i. Perseroan	Kerjasama penyediaan jasa	Rp41.737.845	Terhitung 11 April 2024 dan berakhir

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
	02204.01-C tanggal 2 Januari 2024	ii. PT ISS Indonesia	pengelolaan <i>cleaning service</i>		pada tanggal 10 April 2025.
34	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Office Support No. ISS-01007.02-G tanggal 2 Januari 2024	i. Perseroan ii. PT ISS Indonesia	Kerjasama penyediaan jasa pengelolaan <i>office support</i>	Rp75.756.083	Terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
35	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengendalian Hama No. ISS-01007.01-J tanggal 2 Januari 2024	i. Perseroan ii. PT ISS Indonesia	Kerjasama penyediaan jasa pelayanan kebersihan (<i>cleaning service</i>) dan pengendalian hama (<i>pest & rodent control</i>)	Rp154.435.980	Terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
36	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Office Support No. ISS-02204.02-C tanggal 10 April 2024	i. Perseroan ii. PT ISS Indonesia	Kerjasama penyediaan jasa penunjang berupa jasa pelayanan <i>office support</i>	Rp53.867.348	Terhitung 11 April 2024 sampai dengan 10 April 2025
37	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK No. 100.4.7.1/5833/DUKCAPIL tanggal 20 Mei 2024	i. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ("DJKPS") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Dalam rangka menunjang proses verifikasi dan validasi data calon nasabah dan nasabah pada layanan pembiayaan Perseroan melalui pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan ruang lingkup pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan	Kewajiban Perseroan membayar atas pelayanan akses pemanfaatan yang akan dikirimkan dokumen terkait oleh DJKPS kepada Perseroan.	Perjanjian kerjasama oleh Para Pihak sampai dengan 31 Maret 2026
38	Perjanjian untuk Penyedia Layanan Manajemen Perjalanan tanggal 1 Juli 2022 dan diperbaharui dengan PKS No.11/SAM-GNJ/JKT/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023	i. PT Golden Nusantara ("Golden Nusa") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Perseroan menunjuk Golden Nusa untuk memberikan jasa pelayanan manajemen perjalanan	Biaya layanan yang ditetapkan untuk pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada komisi dan struktur harga yang akan dibayarkan Perseroan, dengan rincian komisi sebagai berikut: 1) Tiket pesawat, dengan tujuan domestik dan internasional, sebesar 2,5% dari harga yang dibayarkan; 2) Voucher hotel, baik domestik dan internasional, penentuan komisi bersifat fleksibel, dipengaruhi oleh harga yang kompetitif dari hotel; 3) Tiket kereta, dengan tujuan domestik, sebesar Rp10.000;	Sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama oleh Para Pihak sampai dengan 6 Oktober 2024

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
				4) Rental mobil, sebesar Rp100.000; 5) Pembatalan, pengembalian dana, penerbitan ulang, dengan catatan bahwa untuk tujuan domestik dikenai biaya sebesar Rp50.000 dan tujuan Internasional dikenai biaya sebesar Rp250.000; 6) Biaya layanan darurat atau pemesanan layanan tiket yang digunakan pada hari yang sama, dikenakan biaya sebesar Rp350.000 per-PNR (<i>Passenger Name Record</i>)	
39	Perjanjian Layanan Internet Gateway No. 005/IPG DOKU/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021	i. PT Nusa Satu Inti Artha ("DOKU") ii. Perseroan (secara bersama "Para Pihak")	Perseroan menunjuk DOKU untuk menyediakan layanan <i>internet payment gateway</i> , serta layanan <i>back office</i> dan <i>fraud detection system</i>	-	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya sampai dengan berakhir oleh Para Pihak
40	Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Layanan Kebutuhan Perjalanan Dinas untuk Korporasi No. 200/BFI/PKS/IV/2022 tanggal 11 April 2022	i. Perseroan ii. PT Trinusa Travelindo ("Trinusa") (secara bersama "Para Pihak")	Para Pihak sepakat dan bermaksud mengadakan kerja sama dalam rangka layanan reservasi kebutuhan perjalanan dinas untuk korporasi Perseroan melalui penyediaan Corporate Booking Access (CBA) oleh Trinusa yang mencakup pemesanan tiket transportasi, akomodasi dan fitur-fitur lainnya.	-	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhir oleh Para Pihak
41	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor tanggal 1 Juli 2022	i. Perseroan ii. PT Pan Pacific Insurance ("PPI") (secara bersama "Para Pihak")	Perseroan sebagai tertanggung menunjuk PPI sebagai penanggung untuk melaksanakan asuransi terhadap kendaraan bermotor yang	Harga pertanggungan yang berlaku dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini minimal sebesar pokok hutang debitur atau sesuai permintaan Perseroan kepada PPI	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhir oleh Para Pihak

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
			menjadi objek atau jaminan atas fasilitas pembiayaan dari Perseroan		
42	Perjanjian Penutupan Asuransi Pinjaman Berbasis Online No. FIT. 009/LGL/FIT-PKS/VII/2019, No. 038/PKS-MKT/FIT-ASI/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019	i. FIT ii. PT Asuransi Simas Insurtech ("Simas") (secara bersama "Para Pihak")	Penyediaan asuransi pinjaman berbasis online oleh Simas kepada FIT untuk setiap debitur FIT	Pembayaran didasarkan pada premi yang diterbitkan dan dihitung dari nilai outstanding loan	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak
43	Perjanjian Layanan Tanda Tangan Elektronik No. Privy: 086/PID-BD/PKS/XI/2019 dan No. FIT: 018/LGL/FIT-PKS/X/2019, tanggal 28 November 2019	i. FIT ii. PT Privy Identitas Digital ("Privy") (secara bersama "Para Pihak")	Layanan Privy yang tersedia berdasarkan perjanjian ini adalah EnterpriselD, terdiri dari Enterprise Action Balance, Employee Account, dan PrivyID User Validation	Biaya yang harus dibayar oleh FIT untuk pemakaian Layanan adalah Rp85.000.000	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya sampai terdapat pengakhiran oleh Para Pihak
44	Perjanjian Kerjasama antara PT Finansial Integrasi Teknologi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penggunaan Layanan Integrated Cash Management Nomor. TBS/17B/08-04-2020 tanggal 8 April 2020	i. FIT ii. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (secara bersama "Para Pihak")	Ruang lingkup layanan integrated cash management yang disediakan BNI kepada FIT berdasarkan perjanjian ini meliputi: 1) Layanan BNI Direct; 2) Layanan BNI API-P2P Lending; 3) Layanan BNI Virtual Account Debit; 4) Layanan BNI e-collection.	Biaya layanan diberikan tergantung jenis transaksi yang dilakukan FIT dengan tarif minimum Rp200 – Rp100.000	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya sampai terdapat pengakhiran oleh Para Pihak
45	Perjanjian Keanggotaan Pefindo Biro Kredit No. 090/PK/PBK/IX/2018 tanggal 17 September 2018	i. PT Pefindo Biro Kredit ("PBK") ii. FIT, yang dalam hal ini diwakili oleh Fajar Tetanua dalam kapasitasnya sebagai Chief Operating Officer berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 September 2018, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama FIT ("Anggota") (secara bersama "Para Pihak")	Para Pihak sepakat untuk mengatur hubungan di antara mereka berdasarkan mana: 1) PBK adalah pihak yang menghimpun data dan menghasilkan informasi perkreditan. 2) Anggota adalah pihak yang menjadi sumber data bagi PBK dan memperoleh informasi perkreditan dari PBK.	Biaya keanggotaan adalah sebesar Rp60.000.000.000/tahun	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
46	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 1 Oktober 2021 Juncto Akta Sewa Menyewa No. 08 tanggal 4 April 2024	i. Hartini Thandra ii. FIT	Sewa meyewa bangunan ruko seluas 118,00 m ² dan luas bangunan 640,84 m ² Foresta Business Loft 5 No. 15.	Jumlah keseluruhan harga sewa menyewa selama jangka waktu perjanjian adalah sebesar Rp2.730.000.000	Perjanjian ini berlaku sejak 15 November 2024 sampai dengan 14 November 2029.

Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan miliknya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya oleh PT Asuransi FPG Indonesia.

No	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Premi	Nomor Polis	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungan (Rupiah)
1.	Money Insurance Policy	BPKB dan sertifikat di seluruh kantor Perseroan termasuk gerai	Rp52.619.750,00	FPG.24.1212.2 4.00004	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp150.000.000.000,00
2.	Money Insurance Policy	Uang tunai atau alat tukar lain yang senilai dengan uang di seluruh cabang Perseroan	Rp7.211.750,00	FPG.24.1212.2 4.00001	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp21.775.000.000,00
3.	Money Insurance Policy	bpkb dan sertifikat di seluruh kantor perseroan termasuk gerai	Rp11.782.250,00	FPG.24.1212.2 4.00002	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp57.000.000.000,00
4.	Money Insurance Policy	Cash in transit di seluruh kantor Perseroan termasuk gerai	Rp52.001.000,00	FPG.24.1212.2 4.00003	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp900.000.000.000,00
5.	Polis Asuransi Standar Gempa Bumi (Earthquake Insurance)	Head office (BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt Soebijato Djojohadikusumo, BSD City)	Rp151.466.967,60	FPG.24.0153.2 4.00001	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp151.466.967.600,00
6.	Polis Asuransi Standar Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami (EQVET)	seluruh kantor perseroan termasuk gerai	Rp196.554.416,63	FPG.24.0153.2 4.00002	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp231.209.901.914,00
7.	Polis Property All Risks	Head office (BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt Soebijato Djojohadikusumo, BSD City)	Rp111.804.078,08	FPG.24.0109.2 4.00015	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp151.466.967.600,00
8.	Polis Property All Risks	Seluruh kantor Perseroan termasuk gerai	Rp170.651.971,32	FPG.24.0109.2 4.00016	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp231.209.901.914,00
9.	Electronic Equipment Insurance Policy	Head office (BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt Soebijato Djojohadikusumo, BSD City)	Rp136.852.484,98	FPG.24.0804.2 4.00002	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp21.462.978.035,40
10.	Terrorism & Sabotage Insurance Policy	Head office, kantor cabang dan gerai	Rp9.784.260,17	FPG.24.0151.2 4.00001	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp382.676.869.514,00

No	Jenis Asuransi	Obyek Pertanggungan	Premi	Nomor Polis	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungan (Rupiah)
11.	Machinery Breakdown Insurance Policy	Head office (BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2. Jl. Kapt Soebijato Djojohadikusumo, BSD City) dan kantor cabang di Jl. Raya Cisauk Suradita, Tangerang	Rp2.519.475,00	FPG.24.0803.2 4.00002	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp5.867.000.000,00
12.	Public Liability Insurance	Kerusakan yang berakibat kantor penyewa di BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2. Jl. Kapt Soebijato Djojohadikusumo, BSD City	Rp2.151.000,00	FPG.24.0901.2 4.00001	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp5.000.000.000,00
13.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Seluruh kendaraan bermotor di head office, kantor cabang dan gerai	Rp1.269.243.369,22	FPG.24.0222.2 4.00168	31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2024	Rp60.722.675.000,00

Perjanjian Kredit

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
1.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/21/0609/N/CG6 tanggal 28 Mei 2021 junctis Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. 32 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, juncto Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 47 tanggal 18 April 2023, yang dibuat di hadapan	- PT Bank Permata Tbk - Perseroan	Modal Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah 2- Non Aset (Fasilitas MMQ Non Aset)	Rp100.000	-	- Jaminan fidusia atas piutang pembiayaan milik Perseroan Fasilitas MMQ Non Aset 2, dengan nilai penjaminan sampai sebesar Rp70.000.000.000,00	-	28 Mei 2021 – 18 April 2026

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
	Agustine Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta							
2	Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/21/0608/A MD/CG6 tanggal 28 Mei 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 46 tanggal 18 April 2023, yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	- Perseroan - PT Bank Permata Tbk	Fasilitas Term Loan IV ("TL")	Rp400.000	Rp260.048	- Jaminan piutang pembiayaan TL 4 - Fidusia atas piutang pembiayaan milik Perseroan yang berasal dari pembiayaan konsumen (mobil dan sepeda motor) (hanya merk Jepang), pembiayaan leasing alat berat dan kendaraan komersial dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari dan nilai fidusia minimum 70% dari baki debet TL 4, dengan nilai penjaminan sebesar Rp280.000.000.000,00	6,80%	28 Mei 2021 - 18 Oktober 2026
3a	Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 141 tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette C.H. Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 098/PK/2024 tanggal 6 Februari 2024	- Perseroan - PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")	Fasilitas Kredit Money Market ("KMK")	Rp100.000	-	Clean basis (Tidak ada jaminan)	6,25%-7,30% per tahun	6 Februari 2024 - 25 Maret 2027
3b	Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H.,LLM, Notaris di Jakarta	- Perseroan - KEB Hana	KMK - 3	Rp200.000	Rp4.167	Piutang milik Perseroan sebesar 100% dari total nilai outstanding pokok KMK - Working Capital Installment 3. Jaminan telah dibebani dengan fidusia sebesar 100% dari nilai outstanding pokok KMK - Working Capital Installment 2 atau	6,25%	23 September 2021 - 21 Oktober 2024

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
						setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000,00.		
3c	Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 13 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta	- Perseroan - KEB Hana	KMK - 4	Rp300.000	Rp169.444	Piutang milik Perseroan sebesar 70% dari total nilai outstanding pokok KMK - Working Capital Installment - 4. Jaminan akan dibebani dengan fidusia sebesar 70% dari nilai outstanding pokok atau setinggi-tingginya sebesar Rp210.000.000.000,00.	7,30%	13 Desember 2022 – 3 Februari 2026
3d	Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 15 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta	- Perseroan - KEB Hana	KMK - 5	Rp300.000	Rp280.556	Piutang milik Perseroan sebesar 70% dari total nilai outstanding pokok KMK - Working Capital Installment - 5. Jaminan akan dibebani dengan fidusia sebesar 70% dari nilai outstanding pokok atau setinggi-tingginya sebesar Rp210.000.000.000,00.	6,80%	15 Februari 2024 – 25 Maret 2027
4	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 83 tanggal 31 Agustus 2012, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah oleh Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per. XIII tanggal 4 September 2024 yang dibuat di bawah tangan.	- Perseroan - PT Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Money Market	Rp100.000	-	-	7,30%	31 Agustus 2024 – 30 November 2024
5	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 57 tanggal 24 Agustus 2022, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 005/IBD-PT/LEG/24	- Perseroan - PT Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Tetap VI	Rp1.000.000	Rp375.000	Jaminan fidusia atas piutang sebagaimana tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 58 tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta.	6,25% – 7,30%/tahun	24 Agustus 2022 – 24 Agustus 2026

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
	tanggal 19 Agustus 2024 dibuat dibawah tangan							
6	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 28 tanggal 13 Maret 2023, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 002/IBD-PT/LEG/24/Per. 1 tanggal 19 Agustus 2024 dibuat dibawah tangan	- Perseroan - PT Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Tetap VIII	Rp1.000.000	Rp388.889	Jaminan fidusia atas piutang sebagaimana tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 13 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta.	6,90%-7,25%/tahun	13 Maret 2023 – 13 Maret 2027
7	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 89 tanggal 30 April 2021 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara <i>juncto</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 004/IBD-PT/LEG/24 tanggal 19 Agustus 2024 dibuat dibawah tangan	- Perseroan - PT Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Tetap V	Rp1.000.000	Rp110.082	Jaminan fidusia atas piutang sebagaimana tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 April 2021, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta.	6,25% - 7,00%/tahun	30 April 2021 – 30 Januari 2025
8	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No. 70 tanggal 31 Maret 2021	- Perseroan - PT Bank Mandiri Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja VII	Rp200.000	Rp60.688	- Piutang kepada <i>end user</i> dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari yang diikat fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari limit kredit, disertai kuasa pengalihan hasil eksekusi dan hak tagih klaim asuransi atas barang yang dibiayai	6,75%/tahun	31 Maret 2021 – 14 Juli 2025

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
						dengan piutang tersebut. Sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 71 tanggal 31 Maret 2021, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. - Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada butir a di atas, maka Perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 100%.		
9	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 85, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris Jakarta tanggal 26 Juli 2022 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 106, yang dibuat di hadapan Elisabeth Retna Ambarwati, S.H., Notaris Jakarta tanggal 24 Juni 2024.	- Perseroan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp750.000	Rp736.345	- Piutang kepada <i>end user</i> dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari yang diikat fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 70% dari limit kredit, disertai kuasa pengalihan hasil eksekusi dan hak tagih klaim asuransi atas barang yang dibiayai dengan piutang tersebut. Sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 107 tanggal 24 Juni 2024, dibuat di hadapan Elisabeth Retna Ambarwati S.H., Notaris di Jakarta. - Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada poin di atas, maka Perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 70%.	6,90%/tahun	24 Juni 2024 – 1 April 2029

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
10	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No. 29, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris Jakarta tanggal 20 September 2022	- Perseroan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp500.000	Rp144.639	- Piutang kepada <i>end user</i> dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari yang diikat fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari limit kredit. - Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada poin di atas, maka Perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 100%.	7,20%/tahun	20 September 2022 – 9 Desember 2024
11	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor WCO.KP/588/K MK/2021 No. 14, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris Jakarta tanggal 8 Desember 2021	- Perseroan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp250.000	Rp121.707	- Piutang kepada <i>end user</i> dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari yang diikat fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari limit kredit, disertai kuasa pengalihan hasil eksekusi dan hak tagih klaim asuransi atas barang yang dibiayai dengan piutang tersebut. Sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 15 tanggal 8 Desember 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. - Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada poin di atas, maka Perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 100%.	6,25%/Tahun	8 Desember 2021 -- 8 Maret 2026.

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
12	Akta Perjanjian Kredit Modal No. 47, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris Jakarta tanggal 29 Maret 2022	- Perseroan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp750.000	Rp253.107	- Piutang kepada <i>end user</i> dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari yang diikat fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari limit kredit, disertai kuasa pengalihan hasil eksekusi dan hak tagih klaim asuransi atas barang yang dibiayai dengan piutang tersebut. Sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 48 tanggal 29 Maret 2022, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. - Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada poin di atas, maka Perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 100%.	6,25%/Tahun	29 Maret 2022 – 26 April 2026
13	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No. 41, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris Jakarta tanggal 28 Februari 2023.	- Perseroan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp750.000	Rp130,253	- Piutang kepada <i>end user</i> dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari yang diikat fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 70% dari limit kredit. - Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada poin di atas, maka Perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 70%.	7,15%/tahun	28 Februari 2023 – 27 Maret 2025

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
14	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No. 9, yang dibuat di hadapan Elisabeth Retna Ambarwati, SH., Notaris Jakarta tanggal 2 April 2024	- Perseroan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp750.000	Rp736,347	- Piutang kepada <i>end user</i> dengan umur tunggakan kurang dari 90 hari yang diikat fidusia secara yuridis sempurna dilampiri daftar piutang agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 70% dari limit kredit. - Dalam hal jaminan sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada poin di atas, maka Perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan jumlah jaminan sehingga <i>security coverage</i> minimal tetap sebesar 70%.	6,90%/tahun	2 April 2024 – 22 Mei 2026
15	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 37 tertanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Notaris Antonius Wahono P., SH.	- Perseroan - PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")	Fasilitas Medium Term Loan	US\$18.000.000	Rp170.657	Fidusia piutang sampai dengan nilai penjaminan sebesar USD12.600.000 atau ekuivalen sebesar Rp195.998.040.000 nilai kurs per tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp15.176 dimana CTBC menambahkan <i>buffer</i> 2,5% sehingga kurs yang digunakan adalah Rp15.555 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang Tanggal 20 Februari 2023.	5,86%/tahun	20 Februari 2023 - 20 Februari 2026
16	Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Maret 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah oleh Perubahan Kedelapan atas Perjanjian Kredit No. 322/Add-KCK/2024 tanggal 12 September 2024.	- Perseroan - PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Instalment Loan	Rp3.900.000	Rp936.111	Khusus menjamin Fasilitas Installment Loan 6: - Piutang pembiayaan bersih minimal 70% dari jumlah baki debet Fasilitas Installment Loan 6. - Tagihan dan piutang yang diserahkan dalam kondisi lancar dan tidak diagunkan kepada kreditor lain	Bunga di tetapkan pada tanggal penarikan.	14 Desember 2020-27 Maret 2027.
17	Perjanjian Kredit No 12 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat di	- Perseroan - PT Bank DKI	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp500.000	Rp190.991	Piutang pembiayaan milik Perseroan yang belum diikat dan dijaminkan kepada pihak manapun	6,00%/tahun	16 Juni 2022 - 29 Juni 2025

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
	hadapan Notaris Buchari Hanafi, SH.					dengan nilai penjaminan minimal sebesar 70% dari jumlah pokok yang terutang dengan ketentuan kendaraan bermotor roda empat kondisi baru dan/atau bekas, serta pembiayaan alat berat dengan kondisi baru dan/atau bekas.		
18	Perjanjian Kredit No S.2020/PK/VIII-IECAI/JAGO tanggal 6 Agustus 2020 yang diubah terakhir dengan Akta Addendum V No. 0100/031/B/300 52024 tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., Notaris di Jakarta;	- PT Bank Jago Tbk - Perseroan	Fasilitas Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka	Rp250.000	Rp244.722	Fidusia atas piutang pembiayaan milik Peseroan dengan kualitas lancar sebesar 70% dari jumlah pokok yang terutang	6,9% efektif per tahun.	22 September 2022 sampai dengan 22 September 2028
19	Perjanjian Kredit No. 200/CB/JKT/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta dilegalisasi oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 240/L/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan yang terakhir kali diubah dengan perubahan ke-9 Perjanjian Kredit No. 200/CB/JKT/2016 yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2024	- PT Bank CIMB Niaga Tbk - Perseroan	Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus	Rp800.000	Rp202.363	Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus	6,25%-6,80%/tahun	17 Maret 2022 – 25 Mei 2027
20	Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 Juni	- Perseroan - PT Bank China Constuction	Fasilitas Kredit	Rp250.000	Rp97.090	Tagihan dan/atau future account receivable sampai sebesar	6,20%/tahun	9 Juni 2022 – 7 Juli 2025

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
	2022, yang dibuat di hadapan Dra. Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta	Bank Indonesia Tbk ("CCB")				Rp175.000.000.000 sebagaimana ternyata di daftar piutang Perseroan tanggal 9 Juni 2022		
21	Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Dra. Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta	- Perseroan - PT Bank China Constuction Bank Indonesia Tbk ("CCB") -	Fasilitas Kredit	Rp300.000	Rp200.000	- Terhadap tagihan dan/atau <i>future account receivable</i> tersebut selanjutnya kan dibebankan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp210.000.000.000 sebagaimana pengikatan jaminan yang akan dibuat dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh CCB serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	6,80%/tahun	14 Mei 2024 – 27 Mei 2027
22	Akta Perjanjian Kredit No. 121 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	- PT Bank Shinhan Indonesia - Perseroan	Fasilitas Pinjaman Korporasi	Rp200.000	Rp66.667	Tagihan, dengan nilai penjaminan dari waktu ke waktu sebesar Rp140.000.000.000	6,25%/tahun	28 April 2022 – 19 Mei 2025
23	Perjanjian Pinjaman tertanggal 06 Januari 2022 jo. Perjanjian Pinjaman tertanggal 14 Oktober 2022	- PT Gaya Makmur Tractors - Perseroan	Fasilitas Pinjaman	Rp50.000	Rp26.985	Clean basis	5%/tahun	6 Januari 2022 – 25 Januari 2026
24	Akta Perjanjian Kredit No. 155 tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Perubahan I Atas Perjanjian Kredit No. 1594/11/2023 yang dibuat pada tanggal 8 Desember 2023 dan Perubahan II Atas Perjanjian Kredit No:	- Perseroan - PT Bank UOB Indonesia ("UOBI")	Fasilitas Revolving Credit Facility Fasilitas Cross Currency Swap	Rp400.000 USD100	-	- Jaminan fidusia atas piutang sebagaimana tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 156 tanggal tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan minimal sebesar Rp320.000.000.000 atau dengan nilai minimum 80% dari jumlah terutang.	Sesuai konfirmasi bank yang ditentukan 2 Hari Kerja sebelum tanggal penarikan dan tingkat suku bunga tetap (<i>fixed</i>)	28 September 2023 – 24 Juli 2027

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
	1052/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024							
25	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 18 tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	- PT Bank Maspion Indonesia Tbk - Perseroan	Fasilitas Fixed Loan Sliding	Rp300.000	Rp283.333	Sejumlah piutang pembiayaan atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dimiliki oleh Perseroan dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Perseroan satu dan lainnya, dengan nilai penjaminan sebesar Rp210.000.000.000	6,80%/tahun	7 Juni 2023 – 19 April 2027
26	Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 20 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,	- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Perseroan	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp390.000	Rp362.500	- Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian kredit ini; - Tagihan pokok kepada <i>end user</i> (dalam bentuk portofolio) dengan kategori tunggakan sampai dengan 90 hari kalender sebesar 70% dari baki debit fasilitas kredit dan akan dilakukan pengikatan secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari plafond kredit.	6,80%/tahun	20 Desember 2023 – 22 April 2027
27	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 61 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan	- PT Bank DKI - PT Bank Pembangunan Daerah Papua - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan - Perseroan	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp1.600.000	Rp858.406	Piutang pembiayaan milik Perseroan dengan nilai penjaminan minimal sebesar 70% dari jumlah pokok yang terutang dengan ketentuan kendaraan bermotor roda empat kondisi baru dan/atau bekas, serta pembiayaan alat berat dengan kondisi baru dan/atau bekas.	Indikator LIBOR + margin sebesar ekuivalen 6,25%/tahun	23 September 2022 – 29 Maret 2026
28	Syndicated Term Loan Facility Agreement tanggal 30 Agustus 2021	- Chang Hwa Commercial Bank Ltd, Manila Branch - First Commercial Bank Ltd,	Secured Syndicated Term Loan Facility	US\$80	Rp349.439	- Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Pembayaran Asuransi senilai Rp217.543.106.999,00 (dua ratus tujuh	SOFR 3 Month + margin	30 Agustus 2021 – 14 Maret 2025

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Limit Fasilitas yang terakhir (dalam jutaan Rupiah/Dollar USD)	Outstanding Per 31 Mei 2024 (dalam jutaan Rupiah)	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
		- Singapore Branch - Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Labuan - RHB Bank Berhad - Standard Chartered Bank, Jakarta Branch - Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, Singapore - The Export Import Bank of the Republic of China - The Hokkoku Bank, Ltd, Singapore Branch - The Joyo Bank, Ltd				belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), Berdasarkan Akta No. 102 tertanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. - Gadai atas Rekening Transaksi. Hal ini, berdasarkan Akta Gadai Atas Rekening Transaksi No. 103 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta		
29	Akta Perjanjian Kredit tanggal 2 Mei 2023	- Perseroan - Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch - PT Bank SBI Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - PT Bank KB Bukopin Tbk - Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	Secured Syndicated Term Loan Facility	US\$150	Rp2.340.432	-	Term SOFR 3 Month + margin	2 Mei 2023 – 25 April 2027
30	Perjanjian Fasilitas Perbankan No.139/PFP-DBSI/VI/1-2/2024 tanggal 11 Juni 2024.	- PT Bank DBS Indonesia - Perseroan	Committed Amortized Term Loan Facility	Rp300.000	-	Jaminan kebendaan fidusia atas piutang dengan kriteria Lancar/tidak ada tunggakan yang lebih dari 90 hari dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah terhutang (outstanding) atau maksimum sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah)	suku bunga yang disepakati bersama sebelum penarikan	11 Juni 2024 – 11 Maret 2027

Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Sifat Afiliasi	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat	Nilai (Rp)
1.	Perjanjian Sewa Ruang tanggal 2 Oktober 2017, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup junctis Addendum Ke-1 Perjanjian Sewa Ruang tertanggal 2 Oktober 2017 dan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Addendum Ke-2 Perjanjian Sewa Ruang tanggal 2 Oktober 2018	- Perseroan - FIT	Afiliasi karena dikendalikan secara langsung	2 Oktober 2019 s/d 1 Oktober 2024	Pemilik setuju untuk menyewakan dan Penyewa setuju untuk menyewa ruangan berlokasi di BFI Tower di Lantai 2 seluas 140 m2 yang beralamat di Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djohadikusumo, BSD City, Tangerang, Banten 15322, berikut dengan tempat parkir tetap (permanen lot-reserved) dan semua fasilitas umum yang menjadi area bersama.	Rp1.197.000.000 untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga maupun afiliasi telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, mengikat Perseroan, tidak bertentangan satu sama lain, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini serta tujuan penggunaan dananya, sampai dengan penerbitan Prospektus ini.

6. Keterangan Tentang Aset Tetap dan Aset Bergerak Perseroan

Aset Tetap

Berikut ini adalah daftar aset tetap tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan berikut status kepemilikan tanah per tanggal 31 Mei 2024 dengan nilai buku sebesar Rp401.885 juta, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak	Peruntukan
1.	HGB No.247	8 Agustus 1997	90	Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	24 September 2027	Perseroan	Kantor Cabang
2.	HGB No.54	28 Mei 2021	61	Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali	28 Mei 2051	Perseroan	Kantor Cabang
3.	HGB No.577	14 Oktober 1996	76	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan	Mess
4.	HGB No.578	14 Oktober 1996	79	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan	Mess
5.	HGB No.317	11 Oktober 1996	119	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036	Perseroan	Kantor Cabang
6.	HGB No.318	11 Oktober 1996	116	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036	Perseroan	Kantor Cabang
7.	HGB No.246	9 Juli 1996	118	Desa/Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten/Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan	15 Juli 2035	Perseroan	Kantor Cabang
8.	HGB No.9	15 Juli 1997	200	Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2027	Perseroan	Kantor
9.	HGB No.494	31 Agustus 1995	88	Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah,	24 September 2034	Perseroan	Kantor Cabang

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak	Peruntukan
				Kotamadya Semarang, Jawa Tengah			
10.	HGB No.1506	18 Mei 2006	700	Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara	17 Mei 2026	Perseroan	Kantor Cabang
11.	HGB No.982	11 Oktober 2005	206	Kelurahan Kebun Handil, Kec.Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi	15 Februari 2027	Perseroan	Kantor Cabang
12.	HGB No.349	27 April 1995	638	Desa Wumialo, Kecamatan Kota Utara, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara	27 September 2037	Perseroan	Kantor Cabang
13.	HGB No.00022	12 Juli 2006	57	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan	Kantor Cabang
14.	HGB No.00023	12 Juli 2006	57	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan	Kantor Cabang
15.	HGB No.173	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera-Selatan	6 November 2037	Perseroan	Kantor Cabang
16.	HGB No.174	4 Januari 2008	65	Kecamatan Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan	Kantor Cabang
17.	HGB No.782	18 September 2008	2.062	Kelurahan Delima, Kecamatan Tampian, Pekanbaru, Riau	18 September 2028	Perseroan	Kantor Cabang
18.	HGB No.848	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan	Kantor Cabang
19.	HGB No.847	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan	Kantor Cabang
20.	HGB No.44	10 Mei 2010	468	Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	10 April 2040	Perseroan	Kantor Cabang
21.	HGB No.10034	30 April 2003	75	Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter, Jakarta Utara	3 Februari 2027	Perseroan	Kantor Cabang
22.	HGB No.190/Kt.B	5 Juni 2008	250	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung	23 Maret 2030	Perseroan	Kantor Cabang
23.	HGB No.4151	19 September 2006	73	Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak	3 September 2036	Perseroan	Kantor Cabang
24.	HGB No.556	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan	Kantor Cabang
25.	HGB No.557	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan	Kantor Cabang
26.	HGB No.42	30 Juli 2007	140	Jl. Basuki Rahmat, Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	28 Desember 2029	Perseroan	Kantor Cabang
27.	HGB No.44	30 Juli 2007	140	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	14 Juni 2042	Perseroan	Kantor Cabang
28.	HGB No.0004	25 Januari 2001	285	Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan	25 Agustus 2039	Perseroan	Kantor Cabang
29.	HGB No.1996	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan	Kantor Cabang

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak	Peruntukan
30.	HGB No.1995	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan	Kantor Cabang
31.	HGB No.06032	18 November 2009	7.050	Sunburst BSD City Lot I2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Banten	15 Juli 2027	Perseroan	Kantor Pusat
32.	HGB No.6	26 September 1995	149	Jl. Hayam Wuruk No. 8l, Jelutung, Jambi	9 Maret 2030	Perseroan	
33.	HGB No. 4076	15 Mei 2009	65	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi	24 September 2026	Perseroan	Kantor Cabang
34.	HGB No.731	11 Juli 2011	159	Desa/Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	29 Maret 2043	Perseroan	Kantor Cabang
35.	HGB No. 1524	14 November 2011	352	Jl.Soekarno Hatta, Kelurahan Baturunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan	Tanah Kosong
36.	HGB No.403/Desa Madegondo	29 Juli 1991 kemudian diperpanjang 20 tahun lagi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo No.13- 550.1.33.16.2003 tanggal 22 Mei 2003	152	Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	21 Februari 2025	Perseroan	Kantor Cabang
37.	HGBNo.40	24 Agustus 2010	530	Desa/Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	24 Agustus 2040	Perseroan	Kantor Cabang
38.	HGB No.58/RANOTANA	15 Februari 2012	217	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan	Tanah Kosong
39.	HGB No.57/RANOTANA	15 Februari 2012	490	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan	Tanah Kosong
40.	HGB No. 00279	9 Februari 2012	98	Jl.Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	8 Februari 2032	Perseroan	Tanah Kosong
41.	HGB No.01070	29 Juli 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 Sept 2042	Perseroan	Kantor Cabang
42.	HGB No.01071	24 September 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 September 2042	Perseroan	Kantor Cabang
43.	HGB No.6486	9 Desember 2011	325	Jl.Jend.Sudirman, RT 006, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	9 Desember 2031	Perseroan	Tanah Kosong
44.	HGB No.315	4 Desember 2001	1.179	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Jl. Gatot Subroto Barat)	21 Desember 2041	Perseroan	Kantor Cabang
45.	HGB No.11	17 Oktober 2012	142	Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Kabupaten Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara	17 Oktober 2042	Perseroan	Kantor Cabang
46.	HGB 00517	26 Maret 2013	20	Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang	3 Maret 2043	Perseroan	Kantor Cabang

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak	Peruntukan
				Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat			
47.	HGB 00518	17 April 2013	900	Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan	Kantor Cabang
48.	HGB No.1538	4 Mei 2012	900	Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan	Kantor Cabang
49.	HGB No.00329	5 September 2006	255	Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	9 September 2043	Perseroan	Kantor Cabang
50.	HGB No.00330	19 Desember 2008	210	Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	18 September 2043	Perseroan	Kantor Cabang
51.	HGB No.01	28 Desember 2009	430	Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara	14 Maret 2043	Perseroan	Kantor Cabang
52.	HGB No.20218/Karunrung	17 Januari 2002	600	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan	Kantor Cabang
53.	HGB No.20217/Karunrung	13 Juli 2009	409	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan	Kantor Cabang
54.	HGB No.349	24 Maret 2016	72	Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Propinsi Banten	24 Maret 2045	Perseroan	Kantor Cabang
55.	HGB No.0024	25 Juli 2014	335	Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	30 Juni 2044	Perseroan	Kantor Cabang
56.	HGB No.006	21 Mei 2015	702	Jalan Prof.M.Yamin SH No.65-66 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provingsi Jambi	3 Juli 2035	Perseroan	Kantor Cabang
57.	HGB No.00109	8 September 2016	1.102	Jalan Pulau Sumba No.7 Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Tengah, Kota Poso, Sulawesi Tengah	16 Agustus 2036	Perseroan	Kantor Cabang
58.	HGB No. 08633	12 September 2017	2.170	Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan	Tanah Kosong
59.	HGB No. 08634	12 September 2017	1.250	Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan	Tanah Kosong
60.	HGB No. 08635	12 September 2017	990	Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan	Tanah Kosong
61.	HGB No. 09489	7 Desember 2018	990	Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten	8 Desember 2048	Perseroan	Tanah Kosong
62.	HGB No. 01657	16 Juli 2018	100	Kel. Lateri, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	16 Juli 2048	Perseroan	Kantor Cabang
63.	HGB No. 01658	22 November 2018	100	Kel. Lateri, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	21 November 2048	Perseroan	Kantor Cabang

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak	Peruntukan
64	HGB No. 315	4 Desember 2001	1179	Desa Pandangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	21 Desember 2041	Perseroan	Kantor Cabang
65	HGB No. 00517	26 Maret 2013	20	Jalan Ahmad Yani By Pass Karawang	3 Maret 2043	Perseroan	Kantor Cabang
66	HGB No. 20218	17 Januari 2002	600	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal juga sebagai Jalan Harstansing Baru)	12 November 2042	Perseroan	Kantor Cabang
67	HGB No. 20217	13 Juli 2009	409	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (setempat dikenal juga sebagai Jalan Harstansing Baru)	12 November 2042	Perseroan	Kantor Cabang
68	HGB No. 1657	16 Juli 2018	100	Perumahan Citra Land "Bay View City" berlokasi di Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Ambon, Maluku (setempat dikenal juga dengan nama Jl. Wolter Monginsi)	15 Juli 2048	Perseroan	Kantor Cabang
69	HGB No. 00109	08 September 2016	1102	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, Kelurahan Gebangrejo.	16 Agustus 2036	Perseroan	Kantor Cabang

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan jual beli/pengikatan jual beli atas bidang tanah berikut ini:

No	HGB/ Hak Milik	Lokasi	Luas (m ²)	Alas Hak Penguasaan	Keterangan	Peruntukan
1.	-	Sebidang tanah siap bangun di Kavling Commercial De Park – BSD City	4.614	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1000050382/PPJT/30KO/II/2017. Keterangan: Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah tersebut terjadi antara PT Bumi Serpong Damai Tbk sebagai pihak penjual dan Perseroan sebagai pihak pembeli, untuk tanah yang terletak di Kavling Commercial De Park No. Kavling: Lot. 16 dan luas tanah + 4.614 m ² .	Tanah dilakukan pengikatan jual belinya oleh Perseroan untuk tanah seluas ± 4.614 dan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk No.1000050382/PPJT/30KO/II/2017, yang mengatur jual/beli dengan syarat-syarat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.	Tanah Kosong

Aset Bergerak

Berikut ini adalah daftar aset bergerak yang dimiliki Perseroan berikut nomor kepemilikan kendaraan bermotor dimaksud per 31 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Terdaftar A/N	Merek, Tipe	Tahun	No. BPKB
1.	Perseroan	Toyota New Avanza 1.3 E Mt	2012	111680144
2.	Perseroan	Toyota New Avanza 1.3 E Mt	2013	J05873230
3.	Perseroan	Toyota New Avanza 1.3 E Mt	2012	110760670
4.	Perseroan	Yamaha Jupiter Z	2011	K03507385
5.	Perseroan	Daihatsu F65Irv-Gmdfj Mt	2012	L06177297
6.	Perseroan	Toyota Avanza 1300 G	2010	K5933618
7.	Perseroan	Toyota New Avanza 1.3 E Mt	2012	K05770645
8.	Perseroan	Daihatsu F65Irv-Gmdfj (4x2)	2013	L9892313
9.	Perseroan	Honda Crv 2.0 Mt	2012	O06148350

No.	Terdaftar A/N	Merek, Tipe	Tahun	No. BPKB
10.	Perseroan	Bmw 3200 Cko At	2016	M08287575
11.	Perseroan	Mercedes Benz E400 A/T	2014	N06615472
12.	Perseroan	Bmw 3201 Cko At	2016	N02796593
13.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	2018	O06071941
14.	Perseroan	Toyota New Avanza 1.3 E	2018	N07313538
15.	Perseroan	Mercedes Bez E200 (W213) At	2019	P04251022
16.	Perseroan	Honda D1802n2612 A/T	2019	P04314740
17.	Perseroan	Honda D1802n2612 A/T	2019	P04314739
18.	Perseroan	Mercedes Benz Glc 200 (x253)	2019	P04367882
19.	Perseroan	Hyundai H-1 2,5 Cr01 At	2018	O06097858
20.	Perseroan	Honda D1802n2612 A/T	2019	P04314738
21.	Perseroan	Toyota Avanza 1.3 G	2018	N09461660
22.	Perseroan	Suzuki Gc 415 T (4x2)	2015	N10880238
23.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T Fg	2018	N09380381
24.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 Mt	2018	O00332414
25.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	2018	O05909302
26.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	2018	O05909303
27.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	2018	O05911051
28.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	2018	O06071941
29.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	2018	O06628075
30.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	2018	O05913733
31.	Perseroan	Daihatsu Xenia 1.3 X M/T	2018	O8187617
32.	Perseroan	Toyota Avanza 1.3 E M/T	2022	S04584226
33.	Perseroan	Toyota Avanza 1.3 E M/T	2022	S04580836
34.	Perseroan	Toyota Hilux	2022	R03069339
35.	Perseroan	Toyota All New Avanza Vvti E 1.3 M/T	2022	Q05989160M
36.	Perseroan	Toyota All New Avanza Vvti E 1.3 M/T	2022	N01208338
37.	Perseroan	Toyota All New Avanza Vvti E 1.3 M/T	2022	O00389888
38.	Perseroan	Toyota All New Avanza Vvti E 1.3 M/T	2022	M11072848
39.	Perseroan	Toyota Innova 2.4 A/T Disel	2022	M082007080
40.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	N09354271
41.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	Q00152021
42.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	O01098668R
43.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	N09370946
44.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	N02702891
45.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	O07925589
46.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	Q04043605
47.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	Q07924734
48.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496208
49.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496366
50.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496215
51.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497272
52.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497367
53.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496321
54.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R024972267
55.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496363
56.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02506424
57.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496200
58.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496205
59.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496214
60.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496211
61.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496365
62.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496322
63.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497362
64.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496072
65.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496190
66.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496687
67.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496328
68.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496194
69.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497353
70.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496685
71.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496188
72.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496191
73.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496216
74.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497351
75.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496691

No.	Terdaftar A/N	Merek, Tipe	Tahun	No. BPKB
76.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497360
77.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496183
78.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496196
79.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497269
80.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496373
81.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496181
82.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496696
83.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496192
84.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496369
85.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496361
86.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496218
87.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496333
88.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496220
89.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496324
90.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496372
91.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496323
92.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496331
93.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496364
94.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496185
95.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496182
96.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496198
97.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496690
98.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496206
99.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496207
100.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496176
101.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R0246176
102.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496222
103.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496199
104.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497350
105.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497274
106.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496362
107.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496370
108.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496209
109.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497346
110.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496697
111.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496680
112.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496204
113.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497359
114.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496689
115.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496202
116.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497348
117.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497366
118.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496186
119.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	P084868760
120.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497349
121.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496367
122.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497361
123.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496219
124.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496320
125.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497354
126.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496699
127.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	O05687148
128.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496368
129.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497271
130.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496325
131.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496193
132.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496217
133.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497381
134.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496330
135.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497268
136.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496329
137.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02497363
138.	Perseroan	Toyota Avanza E	2021	R02496319
139.	Perseroan	Toyota All New Avanza Vvti G 1.3 M/T	2017	R02497278
140.	Perseroan	Toyota Avanza 1.3 E Mt	2021	R02496688
141.	Perseroan	Toyota Avanza G 1.3 Mt	2018	S03413493

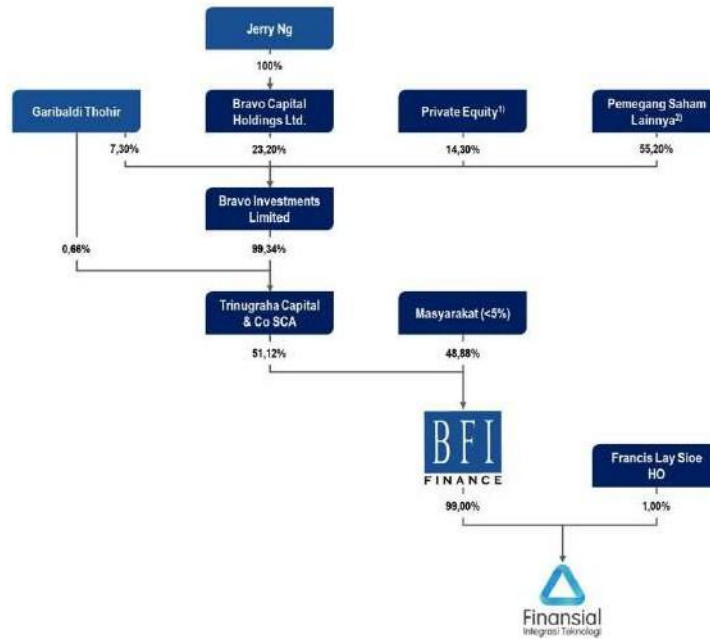
No.	Terdaftar A/N	Merek, Tipe	Tahun	No. BPKB
142.	Perseroan	Toyota New Avanza Vvti 1.3 E Mt	2021	R00829660
143.	Perseroan	Daihatsu All New Xenia R Sporty Vvti	2017	R02496225
144.	Perseroan	Honda Verza Cw Fi	2021	R02496318
145.	Perseroan	Toyota Grand New Veloz 1.5 Mt	2017	R02496362
146.	Perseroan	Daihatsu-All New Xenia-R 1.3 Mt	2021	U08489594
147.	Perseroan	Toyota-New Rush-Trd Sportivo 1.5 Mt	2019	P08065921
148.	Perseroan	Suzuki-Allnewertiga-Gx Double Blower 1.5 Mt	2022	R020553740
149.	Perseroan	Toyota-Grand New Avanza-G 1.3 Mt	2019	N07243831
150.	Perseroan	Toyota-Grand New Avanza-Facelift E 1.3 Mt	2019	Q02117087
151.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2024	U07880614
152.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2024	U07880616
153.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2024	U07880611
154.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2024	U07880610
155.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2024	U07880615
156.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2024	U07901960
157.	Perseroan	Daihatsu-All New Xenia-R 1.3 Mt	2021	Q07096892
158.	Perseroan	Toyota-All New Rush-G 1.5 Mt	2021	Q07306342
159.	Perseroan	Toyota-All New Rush-Trd Sportivo 1.5 Mt	2021	Q07428355
160.	Perseroan	Toyota-All New Rush-G 1.5 Mt	2020	Q03145530
161.	Perseroan	Toyota All New Avanza Vvti G 1.3 Mt	2017	S04675787
162.	Perseroan	Toyota Grand New Veloz 1.3 Mt	2018	O07925589
163.	Perseroan	Daihatsu New Terios X Extra 1.5 Mt	2017	O5687148
164.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2023	T04557838
165.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2023	T04557823
166.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2023	T04557842
167.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2023	T04557830
168.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2023	T04557829
169.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2023	T04557831
170.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2023	T04557834
171.	Perseroan	Toyota Avanza Type E M/T	2023	T04557835
172.	Perseroan	Toyota New Avanza - Vvti G 1.5 Mt	2021	S07109371
173.	Perseroan	Daihatsu All New Terios R 1.5 Mt	2019	P073198760
174.	Perseroan	Daihatsu All New Terios R 1.5 Mt	2019	P07268386
175.	Perseroan	Suzuki-Xi 7-Alpha 1.5 Mt	2021	Q03423090
176.	Perseroan	Toyota-All New Avanza-G 1.5 Mt	2022	S07163462M
177.	Perseroan	Toyota-All New Rush-Trd Sportivo 1.5 Mt	2019	P06945770
178.	Perseroan	Toyota-Grand New Avanza-Facelift E 1.3 Mt	2021	Q04557533
179.	Perseroan	Daihatsu-All New Terios-X 1.5 Mt	2019	U06362209
180.	Perseroan	Daihatsu-All New Terios-R15mtids	2022	S04193233
181.	Perseroan	Daihatsu-All New Terios-X 1.5 Mt	2020	U02614046
182.	Perseroan	Toyota-Grand New Avanza-Faceliftgl3mt	2021	S02031649
183.	Perseroan	Daihatsu-All New Xenia-R Vvti 1.3 Mt	2022	S03719509
184.	Perseroan	Suzuki-Allnewertiga-Gx 1.4 Mt	2021	R00620206
185.	Perseroan	Suzuki-Allnewertiga-Gx 1.4 Mt	2019	O03788979
186.	Perseroan	Toyota-All New Rush-Trd Sportivo 1.5 Mt	2020	P07642142F

Aset tetap lainnya - konsolidasian per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)			
No.	Jenis Aset	Status Kepemilikan	Nilai Buku
1.	Peralatan kantor	Milik Perseroan	85.358
2.	Kendaraan	Milik Perseroan	208.287
3.	Perabot dan Perlengkapan	Milik Perseroan	3.079
4.	Aset dalam Pembangunan	Milik Perseroan	800
Total			297.524

7. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pemegang saham yang menjadi pengendali Perseroan adalah Trinugraha Capital & Co. SCA. Sementara pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 adalah Garibaldi Thohir dan Jerry Ng. Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Informasi Penyampaian Data tanggal 17 Juni 2022.



Catatan:

% Kepemilikan saham disajikan secara neto di luar saham treasuri. Keterangan:

- 1) NS Advisors adalah Northstar Advisors Pte Ltd
- 2) Investor-Investor Lain adalah para investor pasif dan tidak memiliki hak suara sehubungan dengan Perseroan. Mereka adalah Varsity Investment Pte Ltd, Gamvest Pte Ltd, dana-dana ekuitas yang dikelola Warburg Pincus dan Tsering Fund Pte Ltd.

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	TC&Co
Kusmayanto Kadiman	PK	-
Johannes Sutrisno	KI	-
Alfonso Napitupulu	KI	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Saurabh Narayan Agarwal	K	-
Francis Lay Sioe Ho	PD	-
Sutadi	D	-
Sudjono	D	-
Andrew Adiwijanto	D	-
Goklas	D	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris PD :

Presiden Direktur K :

Komisaris

KI : Komisaris Independen D :

Direktur

8. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih serta diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut. Tugas dan wewenang Komisaris berserta Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 22 Mei 2024, dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-

0210827 tanggal 6 Juni 2024 dan (ii) Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110977.AH.01.II.Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	Johanes Sutrisno
Komisaris Independen	:	Alfonso Napitupulu
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno
Komisaris	:	Saurabh Narayan Agarwal

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Asrori S. Karni
Anggota	:	Dr. Hj. Helda Rahmi Sina

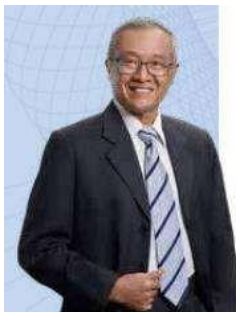
Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho
Direktur Bisnis dan Manajemen Aset	:	Sutadi
Direktur Keuangan	:	Sudjono
Direktur Operasional	:	Andrew Adiwijanto
Direktur Transformasi	:	Goklas*)

*)Direktur atas nama Goklas belum mendapatkan surat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan, pengangkatannya akan menjadi efektif pada tanggal surat persetujuan yang dimaksud dikeluarkan. Jabatan Goklas sebagai Direktur akan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatuhan. Sampai dengan efektifnya pengangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undang Goklas tidak memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, dokumen-dokumen persyaratan untuk mengikuti Fit & Proper Test di OJK terkait penilaian kemampuan dan kepatuhan Goklas sebagai Direktur Perseroan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima Permohonan Fit & Proper Test No Pengajuan. 000000000015850 tertanggal 5 Agustus 2024.

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris



Kusmayanto Kadiman

Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, bergelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977 dan gelar *Doctor of Philosophy* dari Australian National University, Australia tahun 1988.

Pengalaman kerja:

2011 – sekarang	:	Perseroan – Presiden Komisaris
2009 – sekarang	:	Komisaris & Penasihat di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam & pembangkit tenaga listrik
2022 – sekarang	:	PT Global Digital Niaga Tbk – Komisaris Independen
2021 – sekarang	:	Anggota International Advisory Board Komatsu Ltd, Jepang
2020 – sekarang	:	PT Sarana Menara Nusantara Tbk – Komisaris Independen
2017 – sekarang	:	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia – Komisaris
2016 – sekarang	:	PT Setiabudi Investment Management – Presiden Komisaris
2016 – 2017	:	PT iForte Solusi Infote – Presiden Komisaris
2015 – sekarang	:	PT Adaro Power – Wakil Presiden Komisaris
2015 – 2020	:	PT Tamaris Hidro – Komisaris
2004 – 2009	:	Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
2002 – 2004	:	Ketua Asian – Europe University Network (ASEA – UNINET)
2001 – 2004	:	Rektor Institut Teknologi Bandung
1995 – 1998	:	Kepala Pusat Pengembangan Teknologi ITB
1995 – 1998	:	Kepala Laboratorium Kontrol ITB
1993 – 1995	:	Direktur Kelompok Usaha
1993 – 1990	:	Direktur Pusat Komputer ITB



Johanes Sutrisno

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 72 tahun, bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1980 dan gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Gadjah Mada tahun 2009.

Pengalaman kerja:

2011 – sekarang	:	Perseroan – Komisaris Independen 2021
– sekarang	:	Perseroan – Ketua Komite Audit
2016 – sekarang	:	Perseroan – Ketua Komite Nominasi & Remunerasi 2014 –
2016	:	PT Gaudi Dwi Laras – Direktur
2010 – 2016	:	PT Bentoel International Investama, Tbk – Komite Audit 2007 –
2013	:	PT Carsurin – Direktur Keuangan
2000 – 2011	:	Perseroan – Presiden Komisaris 1991
– 1999	:	Perseroan – Direktur
1982 – 1991	:	Perseroan – Senior Manager Credit 1980 –
1982	:	Mutual International Finance Corporation 1973
– 1976	:	SGV, Utomo, Mulia & Co – Auditor



Alfonso Napitupulu

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 73 tahun, bergelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1975.

Pengalaman kerja:

2011 – sekarang	:	Perseroan – Komisaris Independen & Ketua Komite Nominasi & Remunerasi
2016 – 2018	:	PT Kredit Biro Indonesia Jaya – Komisaris Utama
2015 – 2021	:	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur – Komisaris Independen
2015 – 2020	:	Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2014 –
2016	:	PT Kredit Biro Indonesia Jaya – Komisaris
1993 – sekarang	:	Kantor Hukum atau Law Office of Alfonso Napitupulu & Partners – Managing Partner
1989 – sekarang	:	PT Nana Mandiri Dwikarya – Direktur Utama
1988 – 1993	:	Kantor Pengacara Alfonso, Giunseng & Kolopaking, Jakarta 1984 –
1985	:	Praktisi International Lawyer di Law Office of Bronson, Bronson & McKinnon, San Francisco, California, Amerika Serikat
1976	:	Advokat Konsultan Hukum untuk Pasar Modal dan Hak Kepemilikan Intelektual
1975 – 1988	:	Kantor Hukum Gani Djemat & Partners



Sunata Tjiterosampurno

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, bergelar *Master in Finance (Merit)* dari London Business School pada tahun 2002 dan gelar *Bachelor of Business Administration (Distinction)* dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada tahun 1995

Pengalaman kerja:

2015 – sekarang	:	Perseroan – Komisaris
2022 – sekarang	:	PT Bundamedik Healthcare System Tbk. – Komisaris 2013 –
sekarang	:	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. – Komisaris 2013 –
2014	:	Perseroan – Komite Manajemen Risiko
2011 – 2022	:	PT Delta Dunia Makmur Tbk. – Komisaris
2009 – 2021	:	PT Bukit Makmur Mandiri Utama – Presiden Komisaris

- 2008 – 2015 : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk – Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi
- 2006 – sekarang : Northstar Advisors Pte. Ltd – Managing Director
- 2004 – 2006 : PT Danareksa Sekuritas – Direktur Investment Banking 1998 –
- 2004 : Boston Consulting Group, Jakarta – Konsultan
- 1995 – 1998 : Riset Ekuitas PT Lippo Securities – SBC Warburg – Assistant Vice President



Saurabh Narayan Agarwal

Komisaris

Warga Negara Singapura, 42 tahun, bergelar *Bachelor of Technology* di bidang Teknik Elektro dan *Master of Science* di bidang Mikroelektronika dari Indian Institute of Technology Bombay, India pada tahun 2004, serta gelar *Master of Business Administration* dari Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 2009.

Pengalaman kerja:

- 2023 – sekarang : Perseroan – Komisaris
- 2023 – sekarang : PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (juga dikenal sebagai Oona Insurance Indonesia) – Komisaris
- 2022 – sekarang : Aseana Insurance Pte. Ltd. – Direktur 2021
- sekarang : GCash – Direktur
- 2021 – sekarang : Advance Intelligence Group – Direktur
- 2018 – sekarang : Online Mobile Services Joint Stock Company – Direktur
- 2018 – sekarang : Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank – Direktur
- 2016 – sekarang : Warburg Pincus Singapore – Direktur Utama 2013
- 2016 : Warburg Pincus New York – Prinsipal
- 2009 – 2013 : Warburg Pincus New York – Wakil Presiden 2007
- Temasek Holdings – Investment Associate

Dewan Pengawas Syariah



H. Asrori S. Karni

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, saat ini tengah menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Indonesia. Beliau meraih gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010 serta gelar Sarjana Agama jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah; kini bernama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1998.

Pengalaman kerja:

- 2017 – sekarang : Perseroan – Ketua Dewan Pengawas Syariah
- 2021 – sekarang : PT Sinar Mitra Sepadan Finance – Ketua Dewan Pengawas Syariah
- 2020 – sekarang : Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat untuk periode 2020-2025 2018 –
- sekarang : PT Indomobil Finance Indonesia – Anggota Dewan Pengawasa Syariah
- 2015 – 2020 : Ketua Komisi Infokom di Majelis Ulama Indonesia Pusat
- 2015 – 2020 : Wakil Ketua Bidang Qanuniah (hukum) Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- 2013 – sekarang : Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- 2012 – 2020 : Dosen Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta



Helda Rahmi Sina

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, bergelar *Master in Islamic Economics* dari Fakultas Syariah, Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2000 dan Sarjana Syariah Islamiyyah dari Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 1996, Program Doktor Bidang Ekonomi Syariah di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Pengalaman kerja:

2017 – sekarang	:	Perseroan – Dewan Pengawas Syariah
2023 – sekarang	:	<i>Chief of Strategic Alliance</i> di Hurriyah Global Consulting Firm 2023 –
sekarang	:	<i>Faculty Member</i> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
2020 – 2023	:	Kepala Divisi Pemasaran dan Pelatihan LPPI
2014 – 2020	:	Kepala Divisi Konsultasi & Pengembangan Program Keuangan Syariah di ICDIF – LPPI
2010 – sekarang	:	Dosen Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta Timur
2010 – sekarang	:	Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta 2010 –
2014	:	Anggota Dewan Pakar Ekonomi Syariah di Universitas Az Zahra, Jakarta Timur
2009 – 2015	:	Dosen mata kuliah <i>Sharia Contracts & Product</i> program MBA di Sharia Banking & Finance, Institut Teknologi Bandung
2008 – 2014	:	Kepala Bagian Penyelenggara Program Keuangan Syariah di ICDIF – LPPI
2006 – 2008	:	Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara, Jakarta Timur

Direksi



Francis Lay Sioe Ho

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, bergelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Singapore (sekarang National University of Singapore), Singapura pada tahun 1972 dan *Master of Business Management* dari Asian Institute of Management Manila, Filipina pada tahun 1975.

Pengalaman kerja:

1986 – sekarang	:	Perseroan – Presiden Direktur
1983 – 1986	:	Perseroan – Direktur
1975 – 1980	:	PT Indovest – Treasury Officer
1972 – 1973	:	Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) – Singapura



Sutadi

Direktur Bisnis dan Manajemen Aset

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, bergelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1998 dan gelar *Executive Master of Business Administration* dari IPMI – International Business School, Jakarta pada tahun 2018.

Pengalaman kerja:

- 2014 – sekarang : Perseroan – Direktur Bisnis dan Manajemen Aset 2012
- 2014 : Perseroan – *Retail Business Division Head*
- 2008 – 2012 : Perseroan – *Department Head dan Associate Division Head*
- 2006 – 2008 : Perseroan – *Regional Manager*
- 2004 – 2006 : Perseroan – *Branch Manager*
- 2001 – 2004 : Perseroan – *Branch Establishment Manager*
- 2000 – 2001 : Perseroan – *Branch Manager*
- 1999 – 2000 : PT Tjiwi Kimia Pulp & Paper – *Sales Executive*
- 1997 – 1999 : Perseroan – *Collection & Credit Analyst Officer*



Sudjono

Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, bergelar *Enterprise Risk Manager* dari Asia Risk Management Institute dan National University of Singapore, Singapura pada tahun 2009, gelar *Master of Business Administration* dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta pada tahun 2006 dan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1993.

Pengalaman kerja:

- 2014 – sekarang : Perseroan – Direktur Keuangan
- 2014 – 2017 : Perseroan – Direktur Keuangan merangkap Direktur Teknologi Informasi
- 2003 – 2013 : Perseroan – anggota Komite Manajemen Risiko
- 1993 – 2014 : Perseroan – Kepala Divisi Keuangan & Teknologi Informasi 1991 –
- 1993 : KAP Hans Tuankotta Mustofa – anggota Deloitte Touche Tohmatsu International – Auditor Senior



Andrew Adiwijanto

Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, bergelar Sarjana Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Jawa Timur, pada 1992 dan gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Gadjah Mada, Jakarta pada tahun 2013. Beliau memperoleh sertifikat khusus mengikuti kursus intensif "*Human Capital Management: Making HR & Business Partnership Work*" dari Asian Institute of Management, Manila, Filipina pada tahun 2008.

Pengalaman kerja:

- 2017 – sekarang : Perseroan – Direktur Operasional
- 2015 – 2017 : Perseroan – anggota Komite Nominasi & Remunerasi 2014
- 2017 : Perseroan – *Head of Compensation & Benefit*
- 2012 – 2017 : Perseroan – *Head of Operation & Control*
- 1993 – 2014 : Perseroan – *Marketing Officer, Branch Manager (Makassar, Denpasar, Palembang), Regional Manager (Wilayah Sumatera), Department Head Quality Service, Corporate Service, Human Resources, Branch Operation*



Goklas

Direktur Transformasi

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, gelar *Executive Master of Business Administration* dari IPMI International Business pada tahun 2023 dan gelar *Management Development Program* dari Asian Institute of Management pada tahun 2007.

Pengalaman kerja:

2015 – 2024	:	Perseroan – <i>Senior Vice President, Head of Project Management Office</i>
2014 – 2015	:	Perseroan – <i>Department Head of Non-Dealer Financing Product</i>
2010 – 2013	:	Perseroan – <i>Department Head of Branch Development Department</i>
2007 – 2009	:	Perseroan – <i>Business Development Unit Head</i>
2005 – 2006	:	Perseroan – <i>Non-Dealer Financing Product Development</i>
2003 – 2004	:	Perseroan – <i>Branch Manager</i>
2002 – 2003	:	Perseroan – <i>Head of Product at Branch Level</i>
2001	:	Perseroan – <i>Management Trainee</i>

Seluruh Direksi Perseroan yang menetap di Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 yang menyatakan bahwa Direksi perusahaan pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

9. Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas atau dua pertiga dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan secara teratur dengan Direksi, dan jika diperlukan rapat Dewan Komisaris diadakan setelah rapat gabungan, jika dianggap perlu oleh satu anggota Dewan Komisaris melalui permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi atau jika diminta oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sepersepuluh dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris dibuat berdasarkan keputusan bersama. Dalam hal keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan akan dibuat dengan cara pemungutan suara dengan lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan pada keputusan yang dibuat tidak boleh memberikan suara atas keputusan yang akan dibuat tersebut. Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris resmi, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis atas usulan tersebut dan menandatangani dokumen yang bersangkutan. Keputusan yang dibuat dengan cara demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dibuat secara sah dalam rapat Dewan Komisaris resmi.

Selama tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, rapat Dewan Komisaris diadakan sebanyak 5 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut:

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota (%)
Kusmayanto Kadiman	5	100
Johanes Sutrisno	5	100
Alfonso Napitupulu	5	100
Sunata Tjiterosampurno	5	100
Saurabh Narayan Agarwal	5	100

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS tahunan. Besarnya remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.267 juta, Rp7.774 juta dan Rp8.066 juta.

Direksi

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. Direksi juga wajib mengadakan rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi (*teleconference*) atau sistem komunikasi lain sejenis di mana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran secara langsung dalam rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara para anggota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pemberi kuasa tidak memberikan kuasa khusus, maka pemberian kuasa tersebut bersifat mutlak. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi, kecuali apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh pejabat satu level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Selama tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, rapat Direksi diadakan sebanyak 5 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut:

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota (%)
Francis Lay Sioe Ho	5	100
Sutadi	5	100
Sudjono	5	100
Andrew Adiwijanto	5	100
Goklas*	-	-

**) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.*

Gaji dan tunjangan Direksi ditentukan oleh RUPS tahunan. Besarnya remunerasi yang diterima oleh Direksi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp25.020 juta, Rp50.192 juta dan Rp44.523 juta.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, anggota Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan surat Keputusan Direksi Perseroan No. BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014, Perseroan telah menunjuk Sudjono sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dan memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Email Sekretaris Perusahaan adalah corsec@bfi.co.id, dengan nomor telepon (021) 2965 0300/2965 0500. Informasi terkait dengan pengalaman kerja Sudjono secara lengkap dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan melakukan sosialisasinya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Perseroan;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK, BEI, dan lembaga regulator lainnya tepat waktu;

- c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, termasuk mempersiapkan proses penyelenggaraan (pelaporan rencana RUPS, pengumuman, pemanggilan dan penyampaian hasil RUPS), mempersiapkan materi RUPS (termasuk Laporan Tahunan Perseroan), dan pelaksanaan RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program pengenalan terhadap Perseroan untuk anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
 5. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Perseroan.

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisaris No. BOC/I/2016-01 tanggal 26 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/I/2021-01 tanggal 26 Januari 2021, yang berlaku efektif tanggal 25 Januari 2021, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Johannes Sutrisno (Komisaris Independen)
 Anggota : Edy Sugito
 Anggota : Friso Palilingan

Edy Sugito

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, bergelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1991. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2016. Sebelumnya, Edy Sugito bekerja antara lain sebagai Direktur KSEI selama tahun 1998-2000, Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dari tahun 2000-2005, Direktur Penilaian Perusahaan BEI dari tahun 2005-2012 dan Komisaris Independen PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk periode dari tahun 2013 – 2022. Saat ini, Edy Sugito juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit (periode tahun 2020 – 2025) dan Komisaris Utama/Independen (periode tahun 2022 – 2027) di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sebagai anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk (periode tahun 2024 – 2029), sebagai Komisaris Independen di PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (periode tahun 2022 – 2025), di PT Wismilak Inti Makmur Tbk (periode tahun 2022 – 2027), di PT Dharma Satya Nusantara Tbk (periode tahun 2022 – 2027) serta di PT Madusari Murni Indah Tbk (periode tahun 2024 – 2027).

Friso Palilingan

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, bergelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2005 dan *Master of Accountancy* pada tahun 2008 dari Kwik Kian Gie School of Business (dahulu Institut Bisnis dan Informatika Indonesia). Beliau juga memperoleh sertifikasi *Certified Public Accountant* pada tahun 2008 dan *Chartered Accountant* pada tahun 2013, keduanya dari IAI, serta *Certified Audit Committee Practitioner* dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) pada tahun 2016. Beliau saat ini juga menjabat sebagai *Senior Partner* di KAP Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit PT Intiland Development Tbk, Komisaris dari PT Kiat Ananda Cold Storage, PT Ananda Solusindo dan PT Manggala Kiat Ananda, serta anggota Komite Audit PT Asahimas Flat Glass Tbk, PT Cisarua Mountain dan PT Provident Investasi Bersama Tbk. Sejak 2023, beliau juga merangkap sebagai Komisaris PT Mitra Ananda Megadistrindo dan anggota Komite Audit PT BNI Sekuritas.

Informasi terkait dengan pengalaman kerja Johannes Sutrisno secara lengkap dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan No. BOC/I/2016-01 tanggal 26 Januari 2016, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, atau yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lainnya antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, khususnya yang menyangkut bidang akuntansi dan keuangan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dengan bekerjasama dengan Kokmiten Manajemen Risiko Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perseroan.

Selama tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Komite Audit antara lain meliputi:

1. Mengadakan rapat Komite Audit setiap tiga bulan sekali;
2. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

Selama tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 2 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut:

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota (%)
Johanes Sutrisno	2	100
Edy Sugito	2	100
Friso Palilingan	2	100

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2024-0116 tanggal 20 Juni 2024 yang berlaku efektif pada tanggal yang sama, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Alfonso Napitupulu
 Anggota : Sunata Tjiterosampurno
 Anggota : Luki Sri Herlambang

Luki Sri Herlambang

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, pada tahun 2002. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode 2024-2026. Saat ini beliau juga merangkap sebagai Head of Compensation, Benefits and Rewards di Perseroan.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sejumlah posisi di Perseroan, antara lain sebagai Head of Branch Operations pada tahun 2002-2010, Head of Branch Operations & Development pada tahun 2011-2012, Head of Operational Development pada tahun 2013-2015 dan Payroll Head pada tahun 2016-2019.

Beliau tidak terafiliasi dengan anggota komite-komite lainnya di bawah Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham utama dan pengendali; baik langsung maupun tidak langsung.

Informasi terkait dengan pengalaman kerja Alfonso Napitupulu dan Sunata Tjiterosampurno secara lengkap dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. BOC/I/2015-05 tanggal 1 Desember 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai:
 - i. struktur remunerasi;
 - ii. kebijakan atas remunerasi; dan
 - iii. besaran atas remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan dan dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yang mana salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selama tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut:

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota (%)
Alfonso Napitupulu	1	100
Sunata Tjiterosampurno	1	100
Elisabeth Vivi Jeki Aryani	1	100

Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan surat No. Com/JS/SK/III/2003 tanggal 18 Maret 2003. Berdasarkan Resolusi Dewan Komisaris Atas Perubahan Nama Dari Komite Manajemen Risiko Menjadi Komite Pemantau Risiko Ref.No.BOC/V/2020-001 tanggal 13 Mei 2020. Berdasarkan Resolusi Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2021-0092 tanggal 15 Juni 2021, maka susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Johanes Sutrisno (Komisaris Independen)
 Anggota : Jono Effendy

Jono Effendy

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, bergelar Magister Keuangan dari Universitas Pelita Harapan, Tangerang pada tahun 2003, gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1996. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank Commonwealth sejak tahun 2013, Komisaris Independen merangkap anggota Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2020, Komite Tata Kelola Perusahaan sejak tahun 2022 di PT FWD Insurance Indonesia, serta anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Nusantara Finance Cakrawala sejak tahun 2023.

Berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko Perseroan No. Com/JS/SK/III/2003 tanggal 18 Maret 2003, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan dan praktik pemantau risiko yang digunakan dalam mengelola risiko, yang berhubungan dengan perubahan lingkungan bisnis dan parameter risiko;
2. Meninjau ulang identifikasi profil risiko oleh Komite Pemantau Risiko dan peninjauan kriteria batas risiko maksimum yang dapat ditoleransi di pasar, kredit, treasury dan operasional;
3. Memastikan kegiatan bisnis ada dalam parameter risiko yang dapat diterima; dan
4. Meninjau ulang analisis yang dilakukan oleh Divisi Pemantau Risiko mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang mempunyai potensi risiko bagi Perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Sesuai Piagam Komite Manajemen Risiko, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Manajemen Risiko wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Manajemen Risiko, yang mana salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Manajemen Risiko merupakan Ketua Komite Manajemen Risiko.

Selama tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 1 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut:

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota (%)
Johanes Sutrisno	1	100
Jono Effendy	1	100

Internal Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal dan berdasarkan Surat Penunjukkan Anggota Unit Audit Internal No. SK/BOD/VII/14-0009 tanggal 16 Juli 2014, anggota Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Fledy Rizmara
Anggota : Roy Rinaldi

Pembentukan Piagam Unit Audit Internal telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fledy Rizmara

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, diangkat menjadi *Head of Internal Audit* Perseroan dengan masa jabatan 10 tahun. Beliau berkarier di Perseroan sejak tahun 2005 sebagai *Audit Staff*, kemudian menjadi *Audit Team Leader* pada tahun 2007, *Audit Supervisor* pada tahun 2010, *General Audit Unit Head* dan *Field Audit Unit Head* pada tahun 2011.

Roy Rinaldi

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, diangkat menjadi *Internal Audit* Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Internal Audit selama tahun 2006-2007, *Internal Audit Officer* di kantor pusat Jakarta selama tahun 2008-2009, *Coordinator General Audit* di kantor pusat Jakarta selama tahun 2010-2012, *Unit Head General Audit* di kantor pusat Jakarta selama tahun 2013-2014, *Head General Audit* selama tahun 2015-2022 dan *Strategic Audit Head* sejak tahun 2023-sekarang.

Berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan tanggal 1 Maret 2009, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan/audit khusus jika diperlukan; dan
10. Menyusun peringkat/skor hasil audit per kantor cabang untuk menilai tingkat kepatuhan masing-masing kantor cabang terhadap peraturan, kebijakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pimpinan Unit Usaha Syariah

Berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Unit Usaha Syariah tanggal 20 November 2017 oleh Presiden Direktur Perseroan, telah menunjuk Pimpinan Unit Syariah Perseroan untuk kegiatan usaha pembiayaan berbasis syariah, yakni Deni Nasri.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pedoman Kerangka Kerja Perseroan dalam sistem manajemen risiko adalah berdasarkan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang terdiri dari fungsi pengawasan, pengendalian, serta pengelolaan.



1. Lini Pertahanan Pertama
Unit-unit bisnis dan operasional bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan menanggulangi risiko. Tanggung jawab utamanya adalah mengelola eksposur risiko harian, sesuai dengan target pasar, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan
2. Lini Pertahanan Kedua
Direktorat Risiko Perseroan, tim Compliance, tim Operational Risk, tim Anti-Fraud, Departemen Financial Control, dan Unit Legal & Litigation (sebagai bagian dari Departemen Asset Management, Recovery & Inventory) melakukan pengawasan independen. Direktorat Risiko Perseroan bertanggung jawab mengkaji dan menyetujui strategi dan tingkat risiko yang dapat diterima, serta bekerja sama dengan unit-unit bisnis dan operasional dalam memastikan pengelolaan risiko sesuai batasan yang ditetapkan. Departemen Financial Control mengelola dan bertanggung jawab untuk menetapkan anggaran keseluruhan berikut tingkat risiko yang dapat diterima, memantau pemenuhannya, serta mengelola sumber-sumber pendanaan jangka pendek dan panjang beserta posisi likuiditas berdasarkan perkembangan kualitas portofolio. Unit Legal & Litigation mengelola risiko kepatuhan terkait hukum dan bertanggung jawab memastikan bahwa peraturan yang berlaku telah disosialisasikan dan dipatuhi seluruh unit terkait.
3. Lini Pertahanan Ketiga
Departemen Audit Internal melakukan pengujian dan audit independen secara berkala terhadap setiap proses yang dijalankan unit-unit pada lapis pertama dan kedua.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

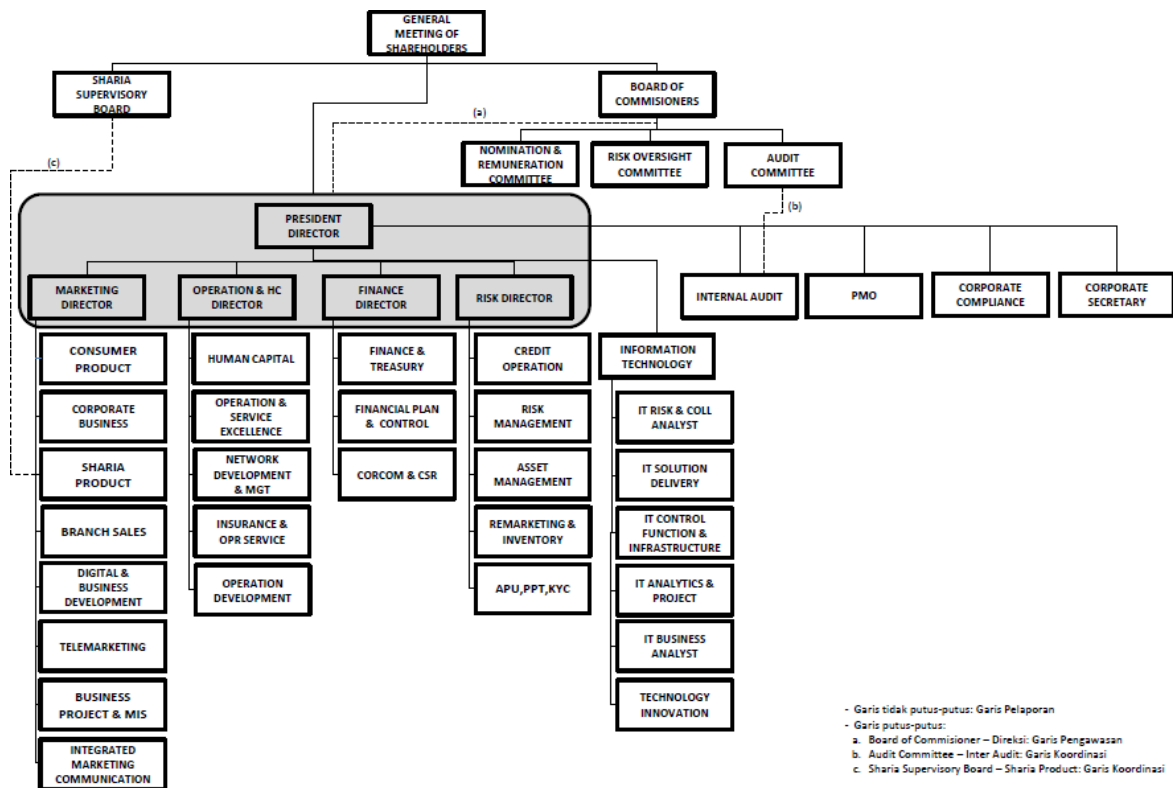
Perseroan bertekad untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan dari para pemegang saham melalui komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan Perseroan adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang dan memaksimalkan tingkat pengembalian modal bagi para pemegang saham melalui penyediaan berbagai produk jasa pembiayaan kepada para pelanggan. Untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan ini, Perseroan telah berkomitmen untuk melaksanakan secara optimal standar tata kelola perusahaan dan membangun budaya untuk menghargai suatu keberhasilan, integritas pribadi, kepercayaan dan sikap saling menghormati satu sama lain. Harapan-harapan dari karyawan dan pihak-pihak dimana Perseroan megikat hubungan bisnis tercantum dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha.

Kepemimpinan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dimulai dari Dewan Komisaris dan Direksi. Adalah tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa setiap manajer senior Perseroan memegang teguh tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan kepada para pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan semua pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.

Dalam prosesformulasi kerangka kerja tata kelola perusahaan, Perseroan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah yaitu OJK dan BEI. Perseroan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan sesuai tuntutan praktek-praktek berusaha yang lebih baik.

10. Struktur Organisasi

Merujuk pada Peraturan OJK 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah Pasal II, berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



11. Sumber Daya Manusia

Penekanan pada nilai-nilai dasar Perseroan telah menempatkan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam Perseroan. Adapun nilai-nilai dasar Perseroan antara lain Giat Memperbaiki Diri Secara Berkesinambungan (*Grow and Improve Continuously*), Saling Menghormati dan Peduli (*Respect & Care*), Layanan yang Memuaskan kepada Pelanggan (*Excellent Service*), Memiliki Integritas Sepenuhnya (*Absolute Integrity*), dan Saling Percaya & Semangat Kerjasama Team (*Trust & Team Spirit*).

Perseroan secara aktif merekrut tenaga kerja baru untuk dijadikan calon pemimpin masa depan Perseroan. Komitmen atas pengembangan sumber daya manusia dibuktikan dengan terus menerus memberikan pelatihan internal dan eksternal secara intensif, baik dari sisi teknis maupun sisi kemampuan manajerial dan kepemimpinan, agar tingkat profesionalitas karyawan senantiasa meningkat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik dan bersih, karyawan juga dididik untuk senantiasa memperhatikan etika bisnis dan mengikuti pedoman prinsip-prinsip berusaha yang telah diatur Perseroan.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan mempekerjakan 10.855 orang karyawan, yang terdiri dari 6.169 orang karyawan tetap dan 4.686 karyawan kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi karyawan tetap berdasarkan status kepegawaian

Klasifikasi	31 Mei 2024	2023	31 Desember 2022	2022
Tetap	6.169		6.322	6.095
Kontrak	4.686		4.874	4.004
Total	10.855		11.196	10.099

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang pendidikan

Klasifikasi	31 Mei 2024	2023	31 Desemb er 2022
Master (S2 & S3)	72		61
Sarjana (S1)	4.487		4.177
Sarjana Muda (D3)	571		635
SMU kebawah	1.039		1.222
Total	6.169	6.322	6.095

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang jabatan

Klasifikasi	31 Mei 2024	2023	31 Desemb er 2022
Manajer Senior	349		331
Manajer Junior	963		756
Officer	2.945		2.828
Staf	1.912		2.180
Total	6.169	6.322	6.095

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang usia

Klasifikasi	31 Mei 2024	2023	31 Desemb er 2022
<25	218		227
25 - 30 Tahun	2.113		2.262
31 - 40 Tahun	3.207		3.053
41 - 50 Tahun	565		491
>50 Tahun	66		62
Total	6.169	6.322	6.095

Komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

Klasifikasi	31 Mei 2024	2023	31 Desemb er 2022
Kantor Pusat	1.476		1.234
Sumatera	833		876
Jadeta	819		841
Jawa Barat	333		366
Jawa Tengah	429		438
Jawa Timur	1.017		1.049
Sulawesi	816		828
Kalimantan	446		463
Total	6.169	6.322	6.095

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan 2 orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor	KITAS	IMTA / otifikas	No. RPTKA	Masa Berlaku
1.	Ng Koon Pek	Malaysia	Konsultan	A56350131	JITAA64321	KEP. No. B.3/032706/PK.04.01/III/2 024 tanggal 19 Maret 2024	14965 tanggal 15 Maret 2024	01 April 2025
2.	Tomas Hrncir	Republik Ceko	Tenaga ahli	43838331	IM2VAC52824	KEP. No. 3/163452/PK.04.01/XII/20 23 tanggal 18 Desember 2023	63067 tanggal 1 Desember 2023	14 Februari 2025

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah membentuk LKS Bipatrit sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pembentukan LKS Bipatrit tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh wakil pengusaha dan pekerja/buruh Perseroan, dicatatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dengan nomor bukti pencatatan: 500.15.13.2/03/Disnaker/2024 pada tanggal 27 Mei 2024.

Susunan pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Rizky Agustian Alamsyah	Ketua	Unsur Pekerja
2.	Relin Rezeki Pratama Damanik	Wakil Ketua	Unsur Pengusaha
3.	Galuh Apriyana	Sekretaris	Unsur Pengusaha
4.	Ridhanti Rizky Fitri	Bendara	Unsur Pekerja
5.	Septiani Arie Arsanda	Anggota	Unsur Pengusaha
6.	Fais Arrozaq	Anggota	Unsur Pengusaha
7.	Muhammad Rijal	Anggota	Unsur Pekerja
8.	Nuring Septyasa Laksana	Anggota	Unsur Pengusaha
9.	Ayu Lembayung	Anggota	Unsur Pekerja
10.	Tri Yusniadi MS	Anggota	Unsur Pekerja

Masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit ini berlaku selama 3 (tiga) tahun tahun sejak 27 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2027.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

12. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak serta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Juni 2024, Perseroan:

1. Tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
3. Tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak;
4. Tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
5. Tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Tidak sedang terlibat dalam sengketa di bidang persaingan usaha;
7. Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri; dan
8. Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim yang mungkin timbul.

Kecuali untuk perkara-perkara sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
1.	415/Pdt/2012/PT.Sby (Pengadilan Tinggi Surabaya)	Edy Setiawan ("Pembanding") melawan Perseroan selaku terbanding.	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pembanding dengan kewajiban Pembanding membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran	Pembanding mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - menyatakan perjanjian pembiayaan batal demi hukum - menghukum Perseroan untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pembanding - menghukum	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (Rp2.000.000.000) Amar Putusan: Menguatkan Putusan 35/Pdt.G/2011/PN.Mkt (Pengadilan Negeri Mojokerto) Status: Dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
			tersebut, maka Pembanding wajib membayar denda kepada Perseroan. Debitur telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Perseroan terkendala melakukan penguasaan atas jaminan/barang yang dibiayai.	Perseroan membayar ganti rugi immateriil kepada Pembanding - meletakkan sita jaminan atas harta benda yang dimiliki oleh Perseroan yang terletak di Jalan Pahlawan No. 36, Mojokerto, Jawa Timur.	
2.	1641K/Pdt/2019 (Mahkamah Agung)	Syaroni ("Pembanding") melawan Perseroan selaku terbanding dan pemohon kasasi	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pembanding dengan kewajiban Pembanding membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pembanding wajib membayar denda kepada Perseroan. Pembanding telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Perseroan telah melakukan penguasaan atas jaminan/barang yang dibiayai.	Pembanding mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - menetapkan sita jaminan atas jaminan/barang yang dibiayai. - mencabut izin operational dan menutup kantor Perseroan cabang Semarang. - mengembalikan unit kepada Pembanding. - membekukan rekening Perseroan. - membayar ganti rugi. - memerintahkan Perseroan untuk meminta maaf kepada Pembanding.	Nilai Gugatan: Materiil (Rp52.500.000) & Imateriil (Rp1.000.000.000) Putusan Pengadilan: Putusan 416/Pdt.G/2017/PN.SMR (Pengadilan Negeri Semarang) dan Putusan 223/Pdt/2018/PT.Smg (Pengadilan Tinggi Semarang) Amar Putusan: Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi Status: Putusan Kasasi memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan.
3.	2648 K/PDT/2022 (Mahkamah Agung)	Jimi Karter Hariandja ("Penggugat") melawan Perseroan selaku tergugat.	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.	Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, - menyatakan perbuatan Perseroan yang akan melakukan lelang atau penarikan obyek yang dibiayai adalah perbuatan	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Putusan Pengadilan: Putusan 164/Pdt.G/2020/PN.Bpp (Pengadilan Negeri Balikpapan) dan Putusan 127/PDT/2021/PT.SMR (Pengadilan Tinggi Samarinda) Amar Putusan: Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
			Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat wajib membayar denda kepada Perseroan. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Perseroan terkendala melakukan penguasaan atas jaminan/barang yang dibiayai.	melawan hukum, - memerintahkan kepada Perseroan untuk membatalkan penarikan/lelang atas jaminan/barang yang dibiayai, - memerintahkan kepada Perseroan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya dengan pembayaran angsuran Rp7.000.000.- per bulan sampai lunas, - membatalkan denda/penalti atas kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan.	Status: Putusan Kasasi memerintahkan PN melakukan pemeriksaan
4.	Perkara Pengaduan di BPSK Kota Medan	Ahmad Yanto ("Penggugat") melawan PT Asuransi Wahana Tata selaku teradu I dan Perseroan selaku teradu II	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pengadu dengan kewajiban Pengadu membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pengadu wajib membayar denda kepada Perseroan. Pengadu telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Jaminan telah hilang, sehingga oleh PT Asuransi Wahana Tata diberikan ganti rugi.	Pengadu meminta agar jumlah hutang Pengadu adalah sesuai dengan perhitungan Pengadu: - meminta agar sisa hutang Pengadu kepada Perseroan sebesar Rp23.915.372,-, - meminta agar PT Asuransi Wahana Tata membayar ganti kerugian sebesar Rp73.272.628,-	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan BPSK
5.	Perkara Pengaduan di BPSK DKI Jakarta	Jogi Partopuan Pasaribu ("Penggugat") melawan Perseroan selaku teradu	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pengadu dengan kewajiban Pengadu membayar angsuran kepada Perseroan	Pengadu meminta sebagai berikut: - Pengadu diberikan kesempatan restrukturisasi, - Perseroan mengembalikan	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan BPSK.

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
			dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pengadu wajib membayar denda kepada Perseroan. Pengadu telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Perseroan telah melakukan penguasaan kembali atas jaminan, namun Pengadu keberatan atas tindakan penguasaan tersebut, sehingga mengajukan pengaduan terhadap Perseroan.	jaminan kepada Pengadu.	
6.	Perkara Pengaduan di BPSK Depok	Nurni ("Pengadu") melawan Perseroan selaku teradu.	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pengadu dengan kewajiban Pengadu membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pengadu wajib membayar denda kepada Perseroan. Pengadu telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Pengadu telah meninggal dunia,	Pengadu melakukan pengaduan terhadap Perseroan, dengan meminta berupa penghapusan kewajiban dan pengembalian BPKB atas jaminan.	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan BPSK

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
			sehingga ahli waris Pengadu merasa berhak untuk memperoleh pencairan asuransi jiwa kredit. Namun, karena pencairan tersebut ditolak oleh perusahaan asuransi karena tidak memenuhi syarat administratif.		
7.	276/Pdt.Bth/2022/PN Mks (Pengadilan Negeri Makassar)	Hj. Herlinda Mahmuddin ("Pelawan") melawan Nur Darmiati ("Terlawan I"); Perseroan ("Terlawan II"); Nona Angriany ("Terlawan III"); Drs. H. Mubarak Pataba ("Terlawan IV"); Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar ("Terlawan V")	Pelawan merasa sebagai pemilik jaminan (tanah dan bangunan) perjanjian, sehingga tidak menerima upaya pelelalaan yang dilakukan oleh Perseroan.	Pelawan mengajukan gugatan dengan meminta: - menyatakan Pelawan sebagai pihak yang tepat dan beralasan. - menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang baik dan benar. - menyatakan jaminan merupakan milik Pelawan. - menyatakan tidak sah dan batal jual beli runah dan tanah milik Pelawan oleh Terlawan IV kepada Terlawan I - memerintahkan Terlawan I menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dan bangunan kepada Pelawan. - memerintahkan Terlawan II melalui Terlawan III menyerahkan surat surat atas tanah dan bangunan kepada Pelawan. - memerintahkan Terlawan II menanggungkan pelaksanaan lelang jaminan. - memberikan kesempatan kepada Pelawan melunasai kewajiban tunggakan Terlawan I atas diri Terlawan II melalui Terlawan II. - menghukum Terlawan IV menyerahkan kepada Pelawan seluruh uang hasil jual rumah dan tanah milik Pelawan.	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Status: Dalam proses pemeriksaan MA.
8.	81/Pdt.G/2023/PN Mks (Pengadilan Negeri Makassar)	Ernawati N ("Penggugat I"), Muh Rusdi	Penggugat I dan Penggugat II merupakan suami istri,	Penggugat I dan Penggugat II	Nilai Gugatan: Materiil (Rp50.000.000) &

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
		("Penggugat II") melawan Perseroan dan Rizal, S.H. selaku Direktur PT Rezky Syifa Global selaku tergugat	yang merupakan debitur yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari Perseroan berdasarkan perjanjian pembiayaan. Sebagai penerima fasilitas pembiayaan, maka Penggugat I dan Penggugat II membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II wajib membayar denda kepada Perseroan. Penggugat I dan Penggugat II merasa janggal atas jumlah pembayaran yang tercatat di pencatatan Perseroan atas pembayaran yang telah dilakukan. Penggugat I dan Penggugat II merasa belum pernah menerima salinan perjanjian pembiayaan. Penggugat I dan Penggugat II merasa ada ketidakjelasan mengenai jumlah suku bunga. Penggugat I dan Penggugat II merasa Perseroan ada membocorkan data pribadinya kepada pihak lain. Penggugat I dan Penggugat II keberatan atas penggunaan <i>debt collector</i> untuk menagih hutang kepadanya dan keberatan atas penagihan yang dilakukan oleh Perseroan.	mengajukan gugatan dengan meminta: - Perjanjian pembiayaan batal demi hukum. - Perseroan menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat I dan Penggugat II. - Perseroan membayar ganti rugi materiil dan imateriil. - Perseroan membayar biaya perkara.	Imateriil (Rp200.000.000) Amar Putusan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Status: Dalam proses pemeriksaan MA.

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
9.	Perkara No. 318/Pdt/2023/PT BTN di Pengadilan Tinggi Banten	Ahmad Suja'i ("Penggugat I"), Ecih Mariani ("Penggugat II") melawan Perseroan	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan kewajiban Penggugat I dan Penggugat II membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Penggugat I dan Penggugat II telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Penggugat I dan Penggugat II merasa perjanjian pembiayaan memuat klausula baku yang dilarang.	Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - menyatakan perjanjian pembiayaan batal demi hukum. - menyatakan Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum karena mencantumkan klausula baku yang dilarang pada perjanjian pembiayaan. - memerintahkan Perseroan tidak melakukan pengambilan barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan tanpa surat perintah dari ketua pengadilan.	Nilai Gugatan: Materiil (Rp25.000.000) & Imateriil (0) Putusan Pengadilan: Putusan 318/Pdt.G/2023/PN.Tng (Pengadilan Negeri Tangerang) Amar Putusan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Status: Dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung
10.	Perkara No. 125/Pdt/2024/PT Sby di Pengadilan Tinggi Surabaya	Yayuk Wijastuti ("Penggugat") Perseroan, Silvy Kurniawati, Bambang Marsudi dan Fuad Agung (bersama-sama selaku "Tergugat")	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat wajib membayar denda kepada Perseroan. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Perseroan telah melakukan penguasaan atas barang yang dibiayai.	Penggugat keberatan atas tindakan Perseroan yang melakukan penguasaan atas barang, sehingga mengajukan gugatan dengan meminta berupa: - menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. - menghukum Tergugat mengembalikan barang. - menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil, imateriil dan uang paksa. - putusan serta merta.	Nilai Gugatan: Materiil (Rp446.672.000) & Imateriil (Rp5.000.000.000) Amar Putusan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Status: Dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
11.	Perkara Pengaduan di BPSK Kabupaten Pahuwato	Usman Ota ("Pengadu") melawan Perseroan selaku teradu	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pengadu dengan kewajiban Pengadu membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pengadu wajib membayar denda kepada Perseroan. Pengadu telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Sehingga Perseroan melaksanakan hak penguasaan kembali atas barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan.	- Pengadu keberatan atas tindakan Perseroan, sehingga mengajukan perkara ini.	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan BPSK
12.	Perkara Pengaduan No. 08/P3K/BPSK/VII/2023 di BPSK Kota Sukabumi	Tatan Suahemi ("Pengadu") melawan Perseroan selaku teradu	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pengadu dengan kewajiban Pengadu membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pengadu wajib membayar denda kepada Perseroan. Pengadu telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan.	Pengadu keberatan atas restrukturisasi yang diberikan oleh Perseroan, oleh karenanya Pengadu meminta kelonggaran dalam ketentuan pembayaran kepada Perseroan, serta penghapusan denda keterlambatan. -	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan BPSK

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
13.	Perkara Pengaduan di BPSK Kabupaten Pahuwato	Sri Yusniawati S Bafadal ("Pengadu") melawan Perseroan selaku teradu	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pengadu dengan kewajiban Pengadu membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pengadu wajib membayar denda kepada Perseroan. Pengadu telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Sehingga Perseroan melaksanakan hak yaitu melakukan penguasaan kembali atas barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan.	Pengadu keberatan atas pelaksanaan hak Perseroan tersebut, sehingga mengajukan perkara ke BPSK, dengan meminta agar Pengadu diperbolehkan melanjutkan pembayaran angsuran.	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan BPSK
14.	Perkara Pengaduan di BPSK Kabupaten Tohuwatu	Ruslan Taib ("Pengadu") Melawan Perseroan selaku teradu	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pengadu dengan kewajiban Pengadu membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pengadu wajib membayar denda kepada Perseroan. Pengadu telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan	Pengadu keberatan atas pelaksanaan hak Perseroan tersebut, sehingga mengajukan perkara ke BPSK, dengan meminta agar Pengadu diperbolehkan melanjutkan pembayaran angsuran.	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan BPSK

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
			dan teguran oleh Perseroan. Sehingga Perseroan melaksanakan hak yaitu melakukan penguasaan kembali atas barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan.		
15.	Perkara No. 3/Pdt/2024/PT BJM di Pengadilan Tinggi Banjarbaru	Nasir ("Penggugat") melawan Perseroan	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat wajib membayar denda kepada Perseroan. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Penggugat merasa perjanjian pembiayaan memuat klausula baku yang dilarang. Penggugat keberatan Perseroan mengalokasikan pembayaran Penggugat untuk kontrak yang satu dialokasikan untuk kontrak yang lain.	Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - menyatakan Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum. - memerintahkan Perseroan untuk tidak melakukan eksekusi terhadap barang objek/jaminan atas perjanjian pembiayaan. - menyatakan perjanjian pembiayaan batal dan tidak mengikat. - memerintahkan Perseroan menerima pelunasan sebesar kehendak Penggugat. mengukumi Perseroan membayar uang paksa.	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Putusan Pengadilan: Putusan 37/Pdt.G/2023/PN Mtp (Pengadilan Negeri Martapura) Amar Putusan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Status: Dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung
16.	Perkara Pengaduan di BPSK Kabupaten Pahuwato	Roslan Doholio ("Pengadu") melawan Perseroan dan Moh. Zulkidert M. Waraga (bersama-sama selaku "Para Termohon")	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pengadu dengan kewajiban Pengadu membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.	Pengadu merasa keberatan dan mengajukan permohonan ke BPSK terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - menyatakan perbuatan Para Termohon melakukan perbuatan melawan hukum.	Nilai Gugatan: Materiil (Rp7.830.000) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan BPSK

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
			Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Pengadu wajib membayar denda kepada Perseroan. Pengadu telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Pengadu merasa tidak pernah menerima salinan perjanjian pembiayaan dari Perseroan. Dengan demikian, Perseroan melaksanakan haknya untuk melakukan penguasaan atas barang objek/jaminan dari salah satu perjanjian pembiayaan. Untuk perjanjian pembiayaan yang lain, Pengadu mengaku pernah akan melakukan pembayaran, tapi tidak bisa karena sistem pembayaran diblokir, sehingga Pengadu melakukan pembayaran melalui eksternal <i>collector</i>. Namun eksternal tersebut tidak menyetorkan uang pembayaran kepada Perseroan.	- menyatakan Para Termohon untuk mengembalikan uang Pengadu atau memasukan uang angsuran 2 bukan ke sistem Perseroan. - menyatakan akibat perbuatan para Termohon, segala biaya dan denda dibebankan kepada Para Termohon. menyatakan Perseroan agar mengaktifkan aplikasi pembyaran pada sistem Perseroan.	
17.	Perkara No. 119/Pdt.Bth/2023/PN Kwg di Pengadilan Negeri Karawang	Dede Sunarya ("Penggugat") melawan Liana ("Terbantah I"), Perseroan ("Terbantah II"), Michael Ryan Adiwinata ("Terbantah III"), Notaris Bayu Rushdian Utama ("Turut Terbantah I"), KPKNL ("Turut Terbantah II") dan BPN	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan	Pasangan Penggugat dan Penggugat tidak terima atas lelang tersebut, sehingga mengajukan bantahan terhadap hasil lelang objek jaminan dengan meminta berupa: - Menyatakan bahwa pembantah/termohon eksekusi adalah pembantah yang benar dan beritikad baik (<i>good opposant</i>); - Menyatakan perbuatan yang	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
		Karawang ("Turut Terbantah III")	meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan, sehingga Perseroan melakukan cessie piutang kepada Terbantah III. Terbantah III kemudian melakukan lelang tanah dan bangunan objek jaminan. Pemenang lelang Terbantah I telah membeli objek jaminan tersebut.	dilakukan oleh Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, dan Turut Terbantah III adalah perbuatan melawan hukum; - Menyatakan Risalah Lelang Nomor 815/33/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 tidak sah dan harus batal demi hukum; - Menyatakan Permohonan Eksekusi dari Terbantah I Nomor 11/Pdt.Eks.L/2023/PN Kwg ditolak dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima; - Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Gading Elok RI No. 06 RT 026 RW 004, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01234/Karawang Wetan; - Memerintahkan Turut Terbantah III untuk melaksanakan proses balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01234/Karawang Wetan yang sebelumnya atas nama Terbantah I menjadi atas nama Penggugat; Menghukum Terbantah I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini	
18.	Perkara No. 14/Pdt/2024/PT Mam di Pengadilan Tinggi Mamuju	Syahrir Syukri ("Penggugat") melawan	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan	Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa:	Nilai Gugatan: Materiil (Rp50.000.000) & Imateriil (Rp50.000.000)

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
		Perseroan selaku tergugat	kewajiban Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat wajib membayar denda kepada Perseroan. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Perseroan juga telah melakukan laporan kepolisian terhadap Penggugat.	- menyatakan bahwa objek gugatan tidak boleh ditarik dan dijual secara sepihak oleh Perseroan - memerintahkan kepada Perseroan untuk membayar uang ganti rugi atau dikompensasikan dari sisa hutang penggugat - memerintahkan agar Perseroan menerima uang angsuran sesuai dengan kemampuan bayar dari penggugat memerintahkan untuk Perseroan membayar biaya perkara	Amar Putusan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Status: Dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tinggi
19.	Perkara No. 122/Pdt.G/2023/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo	Modriq Al Hanan dan Sri Mulyaningsih (bersama-sama selaku " Para Penggugat ") melawan Perseroan (" Tergugat "), KPKNL Surakarta (" Turut Tergugat I "), BPB Kabupaten Sukoharjo (" Turut Tergugat II ")	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Penggugat dengan kewajiban Para Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Para Penggugat wajib membayar denda kepada Perseroan. Para Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan.	Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - Menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat. - Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tidak melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa. - Memerintahkan Turut Tergugat II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah terhadap obyek sengketa untuk lelang dan tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa. Menghukum Perseroan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
20.	Perkara No. 194/Pdt.G/2023/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi	Tripud Darmaji (" Penggugat ") melawan	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan	Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa:	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: -

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
		Perseroan selaku tergugat	kewajiban Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat wajib membayar denda kepada Perseroan. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Penggugat keberatan dengan upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan.	- menyatakan Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum - menyatakan perjanjian pembiayaan sah dan berkekuatan hukum - menyatakan sah pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Perseroan - menyatakan dilakukan penundaan pembayaran kredit atau angsuran - memerintahkan Perseroan tidak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan/objek pembiayaan menghukum Perseroan membayar biaya perkara.	Status: Dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri
21.	Perkara No. 7/Pdt.G/2024/PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung	Muhammad Suaidi ("Penggugat") melawan Perseroan tergugat	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat wajib membayar denda kepada Perseroan. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Penggugat keberatan dengan isi perjanjian pembiayaan.	Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - menetapkan barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan merupakan milik Penggugat - menyatakan eksekusi barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan oleh Perseroan merupakan perbuatan melawan hukum - menyatakan tidak dibuatkan akta notariil dalam hal pengikatan jaminan fidusia atas barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan merupakan perbuatan melawan hukum - menyatakan penggunaan proccoll dengan biaya yang dibebankan kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum	Nilai Gugatan: Materiil (Rp1.214.800.000) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
			Penggugat keberatan dengan tindakan penguasaan atas barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan.	- memerintahkan Perseroan menyerahkan barang objek/jaminan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat - memerintahkan Perseroan membayar denda dan ganti rugi kepada Penggugat - memerintahkan putusan serta merta - menghukum Perseroan membayar uang paksa - menghukum Perseroan membayar biaya perkara	
22.	Perkara No. 08/Pdt.Bth/2024/PT Mnk di Pengadilan Negeri Manokwari	H Zainuddin ("Pelawan") melawan Perseroan ("Terlawan I") dan Indrayasa Zainuddin ("Terlawan II")	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pelawan dengan kewajiban Penggugat membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat wajib membayar denda kepada Perseroan. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Perseroan meskipun telah diberikan peringatan dan teguran oleh Perseroan. Sehingga Perseroan mengajukan eksekusi terhadap barang jaminan perjanjian pembiayaan melalui Pengadilan. Dalam perkembangannya muncul Pelawan yang mengaku sebagai pemilik dari barang jaminan perjanjian pembiayaan dan Pelawan merasa keberatan atas barang yang dijadikan sebagai	Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Perseroan dan debitur dengan meminta berupa: - menyatakan terjadinya perjanjian pembiayaan dengan jaminan berupa barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pelawan - menyatakan Pelawan merupakan pemilik atas barang jaminan perjanjian pembiayaan - menyatakan Pelawan tidak pernah menjaminkan atau memberikan kuasa kepada siapapun atas penjaminan barang tersebut kepada Perseroan - menyatakan Pelawan memiliki kepentingan atas penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Manokwari - menyatakan atas adanya penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Manokwari, maka Pelawan dirugikan - menyatakan Pelawan masih menguasai barang - menyatakan batal pelaksanaan eksekusi atas barang dari Pengadilan Negeri	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (0) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
			jaminan perjanjian pembiayaan sebab Pelawan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk barang tersebut dijadikan jaminan perjanjian pembiayaan.	Menokwari - menghukum Perseroan dan debitur tunduk pada putusan ini dan membayar biaya perkara	
23.	Perkara No. 262/Pdt.G/2024/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang	PT CIMB Niaga Auto Finance ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dan Yuniar Achmad ("Turut Tergugat")	Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur dengan kewajiban debitur membayar angsuran kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam dua perjanjian pembiayaan. Kedua perjanjian pembiayaan saling terikat <i>cross default</i> dan <i>cross collateral</i>. Dalam perkembangannya, debitur melunasi hutang berdasarkan salah satu dari kedua perjanjian pembiayaan Penggugat merasa uang pelunasan hutang tersebut berasal dari Penggugat karena debitur telah menjadi debitur dari Penggugat, sehingga Penggugat meminta agar Perseroan menyerahkan BPKB atas barang objek salah satu dari perjanjian pembiayaan diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran hutang debitur kepada Penggugat. Perseroan menolak permintaan Penggugat tersebut sebab BPKB tersebut masih menjadi jaminan atas hutang debitur berdasarkan salah satu dari perjanjian pembiayaan yang belum lunas, sesuai ketentuan <i>cross collateral</i>.	Penggugat keberatan atas sikap Perseroan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan meminta berupa: - menyatakan perjanjian pembiayaan antar Penggugat dan debitur sah - menyatakan hubungan hukum antar debitur dan Perseroan berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah lunas tersebut telah berakhir - menyatakan perbuatan Perseroan yang menahan BPKB atas barang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum - memerintahkan Perseroan menyerahkan BPKB atas barang kepada Penggugat - menghukum Perseroan membayar ganti rugi dan uang paksa kepada Penggugat menghukum Perseroan membayar biaya perkara	Nilai Gugatan: Materiil (0) & Imateriil (Rp500.000.000) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri

No.	Nomor Perkara	Status Kedudukan Para Pihak	Kasus Posisi	Petitum	Nilai Gugatan, Putusan Pengadilan, Status Perkara
24.	Perkara No. 247/Pdt.G/2024/PN Bks di Pengadilan Negeri Bekasi	PT Tomo Indah Sejati ("Penggugat") melawan Nugroho Utomo Putro ("Tergugat I"), Gunawan Prasetyo ("Tergugat II") dan Perseroan ("Tergugat III")	Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Penggugat meminjamkan dana talangan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk keperluan usaha printing milik Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat merasa membeli barang objek perjanjian pembiayaan melalui Perseroan yang kemudian barang tersebut disewakan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk kebutuhan operasional Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II belum membayarkan lunas dana talangan tersebut kepada Penggugat.	Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan dengan meminta berupa: - menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji - menyatakan barang objek pembiayaan perjanjian pembiayaan merupakan milik Penggugat - menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi dan uang paksa kepada Penggugat - menyatakan putusan serta merta - menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara	Nilai Gugatan: Materiil (Rp283.614.096) & Imateriil (Rp300.000.000) Amar Putusan: - Status: Dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri

Perkara-perkara yang saat ini dihadapi Perseroan tidak memiliki pengaruh negatif secara material terhadap: (i) kelangsungan usaha Perseroan, (ii) kegiatan usaha Perseroan, (iii) operasional Perseroan, dan/atau (iv) rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi, dan rencana Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

Adapun Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan, dan rencana Penawaran Umum Obligasi Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tidak Terlibat Perkara yang telah ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

Trinugraha Capital & Co SCA ("TC&Co")

1. Sejarah Singkat

TC&Co adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan Maître Joseph Elvinger, notaris di Luxembourg dan terdaftar pada *the Registre de Commerce et des Sociétés* di Luxembourg di bawah nomor B 160504. Anggaran Dasar TC&Co telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir telah berlaku secara efektif berdasarkan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa TC&Co tertanggal 22 November 2022, dibuat di hadapan Maître Edouard Delosch, notaris di Luxembourg.

TC&Co berdomisili di Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg dan memiliki kantor di 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

TC&Co merupakan *institutional fund* asing yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak atas nama nasabahnya yang diwakili oleh kustodian sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham untuk kepentingan investasi kolektif dari individu atau lembaga yang tergabung dalam *institutional fund* tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar TC&Co, kegiatan usaha TC & Co termasuk namun tidak terbatas pada untuk melakukan penyertaan, dalam bentuk apapun, baik di Luxembourg maupun perusahaan asing, atau perusahaan-perusahaan lainnya, akuisisi melalui pembelian, mengambil bagian penyertaan, atau dengan cara lain baik dengan pengalihan melalui jual beli, pertukaran saham, obligasi, surat utang, notes dan surat-surat berharga lainnya dalam bentuk apapun, dan pemilikan, administrasi, pengembangan dan pengelolaan/manajemen dari portofolionya. TC&Co juga dapat memiliki penyertaan dalam kemitraan (*partnership*) dan menjalankan kegiatan usahanya melalui cabang-cabang di Luxembourg dan di luar negeri.

Saat ini TC&Co bergerak pada bidang investasi.

3. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TC&Co berdasarkan anggaran dasarnya adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp8.560 Per Saham					
	Saham Biasa		Saham Manajemen	Jumlah Saham	Nilai Saham	
	Kelas B	Kelas D				
Modal Dasar				272.795.718	2.335.131.346.080	
Bravo Investments Limited	253.274.151	3	-	253.274.154	2.168.026.758.240	99,34
Garibaldi Thohir	1.675.113	1	-	1.675.114	14.338.975.840	0,66
Trinugraha Capital Sarl	-	-	1	1	8.560	0,00
Jumlah saham ditempatkan	254.949.264	4	1	254.949.269	2.182.365.742.640	100,00
Saham dalam Portepel				17.846.449	152.765.603.440	

Catatan:

- Saham kelas B tidak memiliki hak suara (*non-voting*) tapi mempunyai hak yang sama untuk menerima dividen atau distribusi lainnya, dan untuk berpartisipasi dalam hasil likuidasi.
- Saham kelas D memiliki hak suara (*voting*) dan mempunyai hak yang sama untuk menerima dividen atau distribusi lainnya, dan untuk berpartisipasi dalam hasil likuidasi
- Saham manajer dimiliki oleh manajer yang mengelola TC&Co, dalam hal ini Trinugraha Capital Sarl.

4. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan anggaran dasar TC&Co, TC&Co dikelola oleh satu atau beberapa manajer yang merupakan pemegang saham tanpa tanggung jawab terbatas (*unlimited liability shareholders/commandité*). Dalam hal ini, Trinugraha Capital, sebuah société à responsabilité limitée, merupakan pihak yang ditunjuk menjadi manajer tunggal dari TC&Co.

C. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan adalah PT Finansial Integrasi Teknologi.

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Tahun Mulai Penyertaan	Status
PT Finansial Integrasi Teknologi	2017	Pinjam Meminjam Online Berbasis Teknolog	99,00	0,3%	2017	Beroperasi

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Mei 2024, jumlah ekuitas yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp9.577.617 juta. Adapun jumlah penyertaan Perseroan pada FIT adalah sebesar Rp74.250 juta atau sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) dari jumlah ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat

(2) dan ayat (3) POJK 35/2018, yakni jumlah seluruh penyertaan langsung pada FIT dan jumlah seluruh penyertaan langsung kepada entitas dalam 1 (satu) grup tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

PT Finansial Integrasi Teknologi

1. Sejarah Singkat

FIT didirikan berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 15 Setember 2017 di hadapan Herna Gunawan, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0043022.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0121375.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, dan telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar melalui Akta No. 1 tanggal 5 Agustus 2022, dibuat di hadapan Geraldine Herlina Sally Shinta Ulyana Sianturi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055755.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022 mengenai Perubahan Kedudukan Perseroan, Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041558 tanggal 8 Agustus 2022.

FIT berkantor pusat, di Foresta Business Loft 5 Unit 11, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar FIT, ruang lingkup kegiatan FIT adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Permodalan

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp Saham	1.000.000 Per Saham Rupiah	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	74.250	74.250.000.000	99,00
Tuan Lay Sioe HO (Francis Lay Sioe HO)	750	750.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.000	75.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.000	25.000.000.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Francis Lay Sioe Ho
Komisaris : Sudjono

Direksi

Presiden Direktur : Tjiu Herman Handoko
Direktur : Ichwan Peryana

5. Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah Aset	49.818	54.016	63.574
Jumlah Liabilitas	7.031	6.932	32.704
Jumlah Ekuitas	42.787	47.084	30.870

Posisi pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp4.198 juta mengalami penurunan sebesar Rp4.198 juta atau 7,77% dari Rp54.016 juta pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 26,82% atau Rp18.131 juta menjadi Rp13.268 juta.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp7.031 juta mengalami kenaikan sebesar Rp99 juta atau 1,43% dari Rp6.932 juta pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan jumlah liabilitas terutama pada pos liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar Rp301 juta atau 17,7% dari Rp1.701 juta.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp42.787 juta mengalami penurunan sebesar Rp4.297 juta atau 9,13% dari Rp47.084 juta pada 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai defisit FIT sebesar 15,39% atau Rp4.297 juta dari Rp27.916 juta di akhir tahun 2023 menjadi Rp32.213 juta pada tanggal 31 Mei 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.016 juta mengalami penurunan sebesar Rp9.558 juta atau 15,03% dari Rp63.574 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 43,65% atau Rp32.175 juta menjadi Rp18.131 juta.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.131 juta mengalami penurunan sebesar Rp25.772 juta atau 78,8% dari Rp43.903 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh setoran modal yang dicatat sebagai uang muka setoran modal (*timing difference*), dimana pada 31 Desember 2023 sudah dicatat sebagai modal dasar ditempatkan dan disetor penuh.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.084 juta mengalami kenaikan sebesar Rp16.214 juta atau 52,52% dari Rp30.870 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh uang muka setoran modal yang sudah menjadi modal dasar ditempatkan dan disetor penuh.

Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Pendapatan	8.473	11.346	22.869	21.419
Beban Usaha	14.016	12.515	34.278	21.393
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(4.294)	(907)	(8.871)	(121)

(dalam jutaan Rupiah)

Kontribusi pendapatan FIT terhadap Perseroan pada periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,3% dan 0,4%.

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023

Pendapatan. Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, pendapatan FIT berasal dari pendapatan platform (92,59% dari keseluruhan), dan penghasilan keuangan dan lain-lain (7,41%). Jumlah pendapatan FIT untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp8.473 juta, menurun Rp2.873 juta atau 25,32% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp11.346 juta.

Beban Usaha. Jumlah beban usaha FIT untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp14.016 juta, meningkat Rp1.501 juta atau 11,99% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp12.515 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp831 juta atau 14,20% dan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp670 juta atau 10,6%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan. Jumlah pendapatan FIT untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.869 juta, meningkat Rp1.450 juta atau 6,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.419 juta. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh peningkatan penghasilan keuangan dan lain-lain sebesar Rp1.782 juta atau 56,09%.

Beban Usaha. Jumlah beban usaha FIT untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.278 juta, meningkat Rp12.885 juta atau 60,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.393 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp10.097 juta atau 108,79% dan beban umum dan administrasi sebesar Rp2.788 juta atau 23,02%.

D. KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, ruang lingkup kegiatan bisnis Perseroan adalah pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan konsumen berbasis syariah, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan salah satu misi Perseroan yaitu untuk menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen, saat ini Perseroan memfokuskan penyaluran pembiayaannya untuk segmen usaha kecil dan menengah.

Aktivitas pembiayaan investasi dan modal kerja merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, seperti alat berat, mesin industri, properti, kendaraan bermotor roda dua dan empat, serta pembiayaan barang modal lainnya, dengan jangka waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan aktivitas pembiayaan *multifinance* merupakan pembiayaan masyarakat berupa pendanaan untuk beragam kebutuhan dengan jaminan berupa kendaraan roda dua dan empat, melalui skema pembayaran angsuran secara berkala untuk beragam kebutuhan.

Perseroan juga melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berbasis Syariah berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 yang berbentuk pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa.

1. Kegiatan Usaha

4.1. Service Product Perseroan

Pada saat ini, Perseroan tetap fokus pada tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna karena pembiayaan Perseroan cukup terdiversifikasi dan tidak hanya fokus pada segmen/jenis pembiayaan tertentu. Pada saat ini, strategi Perseroan untuk meningkatkan sektor pembiayaan adalah melalui pengembangan channel penjualan dan menjangkau konsumen secara langsung melakukan kolaborasi dengan ekosistem digital.

Pembiayaan Multifinance

Pembiayaan *multifinance* meliputi pembiayaan mobil baru dan bekas yang dibeli melalui dealer, dan pembiayaan dengan agunan mobil bekas dan motor bekas.

1. **Pembiayaan Mobil dengan Perantara Dealer**
Pembiayaan mobil melalui dealer telah menjadi bisnis inti di Perseroan selama dari 25 tahun. Produk yang dipasarkan di hampir semua kantor cabang ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan mobil melalui rekanan dealer. Pembiayaan ini menggunakan suku bunga tetap.
2. **Pembiayaan Mobil dan Sepeda Motor Non-Dealer**
Pembiayaan *non-dealer* untuk melayani kebutuhan para konsumen secara langsung (pemilik mobil dan sepeda motor), juga para pelanggan yang melakukan transaksi *repeat order*, konsumen baru dari referensi pelanggan (program *Customer-Get-Customer*), atau melalui agen penjualan lepas dan *telesales call center* (pemasaran dan penjualan langsung). Target pemasaran Perseroan adalah kalangan masyarakat berpenghasilan bawah hingga menengah.

Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi

Pembiayaan modal kerja dan investasi meliputi jasa keuangan yang ditujukan bagi pelanggan perorangan dan badan usaha yang melakukan pembelian atau pembiayaan atas alat-alat berat, mesin-mesin, kendaraan bermotor dan peralatan lainnya, baik untuk kondisi baru maupun bekas. Pelanggan modal kerja dan investasi Perseroan umumnya berasal dari sektor industri pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa, pertanian, manufaktur, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain.

Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah

Pembiayaan berbasis syariah mulai dijalankan Perseroan pada tahun 2018. Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan dan memasarkan penggunaan akad-akad dari pembiayaan berkonsep

syariah, yaitu:

1. Akad Ijarah untuk pembiayaan umrah;
2. Akad Ijarah untuk pembiayaan wisata halal;
3. Akad Ijarah untuk pembiayaan berbagai keperluan jasa;
4. Akad Ijarah untuk pembiayaan pendidikan;
5. Akad Murabahah untuk pembiayaan kendaraan bermotor;
6. Akad Murabahah untuk pembiayaan berbagai keperluan barang; dan
7. Akad al-Bai' wa al-Isti'jar untuk pembiayaan kembali (refinancing) berbasis syariah, yang izinnya diperoleh UUS berdasarkan surat persetujuan dari OJK No. S-1027/NB.213/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Dari tujuh produk pembiayaan syariah yang dikelola oleh UUS, Perseroan hanya memfokuskan pemasaran dari empat produk, terdiri dari:

1. My Hajat untuk pembiayaan multijasa berbagai keperluan jasa, seperti jasa penyewaan rumah atau ruko, renovasi rumah dan konsultan;
2. My Car Syariah untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat bekas;
3. My Faedah untuk pembiayaan *multifinance* pembelian berbagai keperluan pembelian barang, seperti bahan material bangunan, kebutuhan barang rumah tangga, dan barang lainnya yang memiliki manfaat untuk masyarakat; dan
4. My B-Share untuk pembiayaan *multifinance* dengan menggunakan skema refinancing (pembiayaan kembali) untuk berbagai keperluan produktif maupun konsumtif, seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, dan pengembangan usaha.

Khusus produk My Ihram (pembiayaan umrah), My Safar (pembiayaan wisata halal) dan My Ta'lim (pembiayaan pendidikan), untuk sementara aktivitas pemasarannya masih dinonaktifkan, dengan pertimbangan manajemen UUS yang masih memfokuskan pemasaran pada produk pembiayaan barang dan jasa berbasis syariah, serta mensyaratkan adanya jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Seluruh produk pembiayaan syariah dipasarkan secara daring melalui microsite BFI Finance Syariah, syariah.bfi.co.id, kanal pemasaran digital lainnya, dan secara konvensional melalui cabang-cabang perwakilan syariah yang tersebar di 45 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 dari Peraturan OJK No. 10/2019, Perseroan sudah membentuk Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah sejak tahun 2021 yang diketuai oleh pimpinan UUS,

4.2. Pendapatan Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

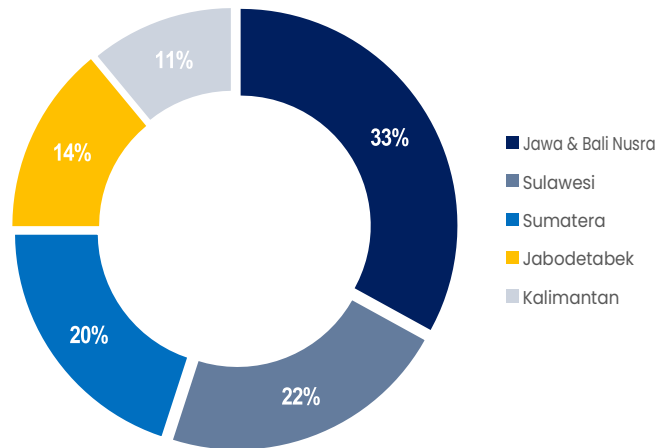
Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023*	2023	2022
Perseroan				
Piutang Pembiayaan	2.400.675	2.530.212	5.915.933	5.034.005
Keuangan	22.416	23.911	81.740	22.462
Syariah	58.438	41.374	108.662	65.157
Lain-lain	92.515	70.818	223.912	239.967
Jumlah	2.574.044	2.666.315	6.330.247	5.361.591
FIT				
Piutang Pembiayaan	7.846	4.754	17.909	18.243
Keuangan	262	410	824	408
Lain-lain	366	6.180	4.133	2.768
Jumlah	8.474	11.344	22.866	21.419

Catatan:

*) tidak diaudit

4.3. Pemasaran dan Jaringan Kerja

Dalam pemasaran kegiatan usaha Perseroan sebanyak 192 kantor cabang, 31 gerai dan 45 kantor perwakilan syariah dibuka di seluruh pelosok Indonesia. Dari chart di bawah ini, daerah Jawa & Bali menempati kontribusi usaha yang terbesar sejalan dengan perkembangan industri perdagangan, pengangkutan, wisata dan pertanian serta konstruksi berkembang dengan cepat. Peluang yang terbuka luas bagi Perseroan untuk mengembangkan usahanya adalah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi karena terbuka peluang untuk mendapatkan konsumen karena kebutuhan akan alat-alat berat dan barang modal lainnya semakin meningkat di pulau-pulau tersebut.



Untuk mencapai target pemasaran di seluruh Indonesia, Perseroan telah membangun satu jaringan kerja yang kokoh dengan agen dan *dealer-dealer*. Per 31 Mei 2024, jumlah *dealer* dan penjual kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan Perseroan adalah sekitar 1.221 *dealer*. Kerja sama yang baik inilah yang membuahkan hasil bagi Perseroan dalam pencapaian target serta tujuan usaha Perseroan.

4.4. Kegiatan Operasional



Proses dalam memberikan pembiayaan konsumen kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

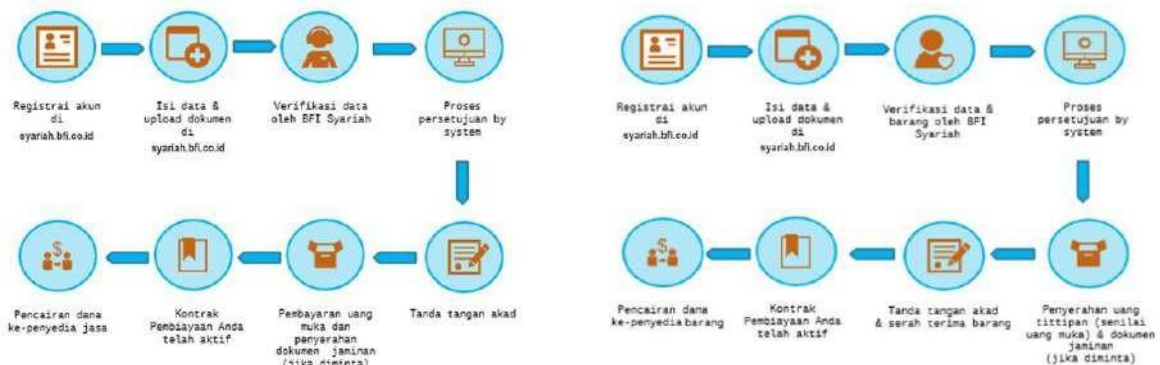
1. Calon konsumen mengisi aplikasi kredit setelah diberi penjelasan struktur pembiayaan yang diberikan.
2. Karyawan Perseroan memeriksa *negative list* dan *customer exposure* (untuk pelanggan lama) di sistem.
3. Melakukan verifikasi calon konsumen baik melalui biro *credit* atau *survey* dan mengunjungi calon konsumen dan pemeriksaan kredit oleh *marketing*.
4. *Marketing* mempersiapkan laporan *survey* untuk dikaji dan dianalisa oleh *marketing supervisor* atau *analyst*.
5. Input data (profil pelanggan, aset, pemasok, struktur, jangka waktu dan kondisi).
6. Persetujuan kredit oleh pimpinan cabang (atau komite kredit jika diperlukan).
7. Penandatanganan perjanjian kontrak.
8. Pengeluaran *purchase order*.



Proses dalam memberikan sewa pembiayaan kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Petugas Perseroan menerima aplikasi kredit dari calon *lessee* baik secara langsung atau melalui *supplier*.
2. Pertemuan awal dan wawancara dengan *lessee* yang termasuk dengan pemeriksaa ditempat jika perlu.
3. *Lessee* menyerahkan data untuk keperluan analisa kredit oleh Perseroan.
4. *Credit analyst* membuat laporan *credit review* untuk meminta persetujuan *credit committee*.
5. Persetujuan oleh *credit committee* termasuk tambahan persyaratan jika diperlukan.
6. Konfirmasi persetujuan oleh *lessee*.
7. Input data aplikasi di sistem.
8. Tanda tangan kontrak.
9. Penerbitan perintah order ke *supplier*.
10. *Supplier* menyerahkan barang modal ke *lessee*.
11. Tagihan dari *supplier* termasuk penyerahan dokumen yang diterima.
12. Pembayaran ke *supplier*.

Proses dalam memberikan pembiayaan konsumen berbasis syariah kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:



2. Strategi Perseroan

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan menjalankan berbagai strategi usaha. Ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, maka strategi usaha yang dimiliki Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memperluas pembiayaan kendaraan bermotor (khususnya mobil bekas), dan pada saat yang bersamaan melakukan kegiatan pembiayaan di wilayah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang potensial.
2. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan non bank serta mencari sumber dana alternatif lainnya dalam memperoleh sumber pendanaan yang lebih besar dan murah untuk mendukung pertumbuhan usaha.
3. Memfokuskan pada pengelolaan risiko dengan mempertahankan kualitas dari aset produktif dalam rangka meminimalisasi risiko tidak tertagihnya piutang pembiayaan Perseroan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen sehingga *repeat order* diharapkan akan terus meningkat.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.
6. Mengembangkan jaringan cabang tambahan secara berkelanjutan di wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang menguntungkan dan kondisi politik yang stabil.
7. Meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan kapabilitas kantor cabang Perseroan untuk memperoleh potensi dan basis usaha pembiayaan yang baru.

3. Persaingan Usaha

Secara umum, industri pembiayaan mendasarkan usahanya pada kegiatan pembiayaan atas kendaraan bermotor dan pembiayaan atas barang modal. Sektor usaha ini juga diramaikan oleh perbankan yang juga meningkatkan kredit kendaraan bermotor sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor ini terutama dalam penetapan suku bunga pembiayaan kepada konsumen.

Untuk menghadapi persaingan dalam industri pembiayaan yang ketat, Perseroan mengedepankan berbagai langkah dan strategi untuk perkembangan usaha yang berkelanjutan, di antaranya adalah dengan meningkatkan secara berkelanjutan kualitas layanan kepada konsumen yang dapat meningkatkan *stickiness* dari konsumen tersebut dan menghasilkan *repeat order* transaksi pembiayaan, menyediakan 4 jenis produk (pembiayaan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan komersial dan alat-alat berat), menambah jaringan kantor cabang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan risiko atas aset produktif Perseroan.

Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan senantiasa menjaga kualitas dan kepuasan konsumen dalam pembiayaan dengan tetap mengacu kepada manajemen risiko yang *prudent*.

Hingga saat ini, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang dikenal memiliki kinerja diatas rata-rata dalam industri pembiayaan di Indonesia selama ini. Sampai dengan 31 Mei 2024, Non-Performing Financing (NPF) dari total piutang yang dikelola Perseroan adalah sebesar 1,42% yang berada di bawah rata-rata industri pembiayaan sebesar 2,45% (sumber: data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia OJK, per Maret 2024).

4. Kolektabilitas Piutang

4.1. Piutang Macet (Non-Performing Financing)

Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	2022
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari Jumlah Piutang yang Dikelola)			
Sewa Pembiayaan	1,39%	1,27%	0,82%
Pembiayaan Konsumen	1,54%	1,60%	1,43%
Syariah - Murabahah	1,07%	1,17%	0,42%
Syariah - Ijarah dan IMBT	1,08%	0,26%	1,83%
Jumlah	1,42%	1,36%	1,00%

4.2. Penghapusan Piutang (Loan Write-Off)

Keterangan	31 Mei* 2024	31 Desember 2023	2022
Penghapusan Piutang (% dari Jumlah Piutang yang Dikelola)			
Sewa Pembiayaan	2,93%	2,63%	1,48%
Pembiayaan Konsumen	5,10%	7,00%	2,66%
Syariah - Murabahah	2,90%	2,13%	0,98%
Syariah - Ijarah dan IMBT	0,24%	0,55%	12,63%
Penghapusan Piutang (% dari Jumlah Piutang Bersih)			
Sewa Pembiayaan	3,02%	2,71%	1,49%
Pembiayaan Konsumen	5,15%	7,05%	2,67%
Syariah - Murabahah	2,90%	2,13%	0,98%
Syariah - Ijarah dan IMBT	0,24%	0,55%	12,63%

*disetahunkan

4.3. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Coverage*)

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan Penyisihan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	2022
Kerugian Penurunan Nilai			
Sewa Pembiayaan	491,7	467,9	548,8
Pembiayaan Konsumen	323,6	279,4	276,2
Syariah - Murabahah	19,1	16,8	8,5
Syariah - Ijarah dan IMBT	2,8	1,1	0,3
Jumlah	837,2	765,2	833,8
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (% dari Piutang Dikelola)			
Sewa Pembiayaan	3,28%	3,12%	3,97%
Pembiayaan Konsumen	4,78%	4,37%	4,40%
Syariah - Murabahah	3,09%	3,04%	2,22%
Syariah - Ijarah dan IMBT	3,46%	1,95%	4,06%
Kecukupan Pencadangan (terhadap Piutang Dikelola) (x)			
Sewa Pembiayaan	2,4	2,4	4,8
Pembiayaan Konsumen	3,1	2,7	3,1
Syariah - Murabahah	2,9	2,6	5,3
Syariah - Ijarah dan IMBT	3,2	7,6	2,2

5. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 ("PMK"), yang mengatur sejumlah kriteria terkait tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (*gearing ratio*).

Saat ini, Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal *gearing ratio*, nilai maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10x, sementara per 31 Mei 2024 (dan sejak tahun 2022), *gearing ratio* Perseroan masih jauh di bawah nilai tersebut, yaitu sebesar 1,4x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Perseroan mencatatkan modal senilai Rp9 triliun per 31 Mei 2024, jauh di atas jumlah minimum yang diatur dalam PMK tersebut.

6. Prospek Usaha

Kinerja ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap stabil di tengah melemahnya prospek ekonomi global. Dengan dukungan fundamental ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,2% (yoy). Target tersebut masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, dimana selama tujuh kuartal berturut-turut (Q4-2021 hingga Q2-2023) Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar lebih dari 5%. Meski begitu, faktor-faktor domestik seperti perlambatan ekspor, kenaikan suku bunga dalam negeri dan pelemahan nilai tukar Rupiah juga perlu dipertimbangkan.

Pemilu Presiden tahun 2024 merupakan salah satu faktor utama yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi Indonesia. Banyak pelaku usaha yang memilih untuk *wait and see* dampak dari hasil Pemilu terhadap kebijakan Pemerintah kedepannya. Di lain sisi, pemulihan ekonomi di tahun 2024 juga perlu diwaspadai dengan berbagai ketidakstabilan politik global seperti perang Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina yang dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri serta ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasokan pangan dan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara global.

OJK memperkirakan piutang-piutang pembiayaan *multifinance* untuk tumbuh *double digit* pada tahun 2024. Dengan berkaca pada kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023, proyeksi atas pemulihan ekonomi yang berlanjut di tahun 2024 serta perkembangan kinerja dan pencapaian Perseroan di tahun 2023, Perseroan berada di posisi yang kuat untuk dapat memanfaatkan potensi pasar dengan berbagai strategi yang akan ditempuh di tahun 2024 dan beberapa tahun ke depan. Rencana dan langkah-langkah strategis ini akan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan yang ditargetkan Perseroan.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan *multifinance* di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Menurut data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2023 yang diterbitkan oleh OJK, pembiayaan *multifinance* merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, dengan kontribusi sebesar 52,0% dan jumlah piutang yang mencapai Rp245,2 triliun per 31 Desember 2023. Segmen ini mengalami peningkatan piutang sebesar 13,8% dari posisi

piutang pada tahun 2022 sebesar Rp215,4 triliun. Sementara itu, rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami peningkatan dari 2,32% per 31 Desember 2022 menjadi 2,44% per 31 Desember 2023.

Perseroan memiliki keunggulan dalam beberapa area, antara lain teknologi informasi, SDM yang handal, serta fokus usaha yang jelas dan wilayah jangkauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keunggulan ini akan dimanfaatkan Perseroan untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dengan risiko yang terukur. Perseroan berkeyakinan dapat tumbuh lebih baik di semester II 2024 setelah melakukan banyak konsolidasi dan penyesuaian di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang semester I 2024, sehingga pada akhir tahun 2024, Perseroan dapat membukukan pertumbuhan positif dengan kualitas aset yang diharapkan dan mencapai profitabilitas di atas rata-rata industri.

7. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan untuk pengelolaan risiko atas ketidakpastian, ancaman serta memastikan bahwa karyawan bertindak sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Efektivitas sistem manajemen risiko memungkinkan manajemen untuk mendapatkan informasi yang terkini dan akurat dalam hal adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur, dan hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan untuk mengurangi pengaruh risiko. Dalam hubungannya dengan aset Perseroan yang mengandung risiko, selama tahun ini Perseroan memperkenalkan beberapa inisiatif di bidang *quality assurance* dan manajemen risiko. Tujuannya agar risiko yang berhubungan dengan portofolio dan pembiayaan individu dapat dikontrol dengan lebih baik.

Dalam kegiatan usaha Perseroan terdapat berbagai risiko yang tidak terhindarkan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Risiko Pendanaan dan Likuiditas

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung tersedianya pendanaan yang umumnya berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk membiayai transaksi pembiayaan baru.

Untuk memperkecil risiko likuiditas, Perseroan selalu memelihara kecukupan saldo kas dan setara kas yang nilainya disesuaikan dari waktu ke waktu dan di pantau secara berkala baik harian, mingguan dan bulanan. Selain itu, Perseroan juga menjaga kecukupan fasilitas pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu, serta bekerja sama dengan pemegang saham utama Perseroan untuk menggunakan jaringan sumber pendanaan yang dimiliki.

Selain itu Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang terdiri dari pinjaman bank baik dari dalam negeri maupun luar negeri, penerbitan obligasi secara berkala, kerjasama pembiayaan bersama serta arus kas internal Perseroan.

Atas risiko terhadap fluktuasi perubahan kurs valuta asing berkala dari adanya pinjaman dalam mata uang asing, telah dilakukan Lindung Nilai atas seluruh kewajiban pokok dalam mata uang asing melalui bank-bank terkemuka.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko pokok dari suatu perusahaan pembiayaan yang tidak dapat dihindari (*inherent risk*). Oleh karena itu, filosofi manajemen risiko yang diterapkan Perseroan mengacu kepada '*Risk - Reward trade-off*'. Manajemen risiko bukan hanya sekedar menyangkut pengawasan, melainkan juga bagaimana fungsi manajemen risiko dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan profitabilitas dengan cara penentuan segmen pembiayaan yang dibedakan menurut tingkat risiko yang dihadapi, dan setiap penentuan harga jual (bunga pinjaman) harus memperhitungkan risiko yang dihadapi dari masing-masing segmen tersebut.

Selain itu, pengawasan risiko kredit juga dilakukan atas wewenang pemberian kredit, dimana setiap pegawai yang diberi kuasa untuk memberikan persetujuan kredit akan dievaluasi berdasarkan rekam jejaknya yang tercatat secara *online*, dan hasil kerjanya akan menentukan otoritas kredit yang diberikan kepada yang bersangkutan, serta berimplikasi langsung terhadap penilaian kinerja dan promosi jabatan.

Dengan pengembangan sistem pengawasan risiko kredit yang sudah berjalan dengan baik saat ini, maka setiap parameter risiko kredit dapat dimonitor secara harian lewat *Business Intelligence system* yang ada, dan langsung diambil tindakan koreksi bila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pihak pengambil keputusan seperti kepala cabang dan kepala manajemen produk dapat mengetahui kinerja mereka masing-masing secara tepat waktu sehingga akan membantu yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang tepat.

Beberapa contoh penerapan manajemen risiko di bidang kredit yang telah berjalan dengan baik, antara lain segmentasi dan diversifikasi portofolio pembiayaan ke dalam beberapa aspek risiko, meliputi diversifikasi geografis, jenis dan merek peralatan, jenis produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, dan lain-lain.

a. Diversifikasi Geografis

Portofolio tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran portofolio terbesar berturut-turut dimulai dari Pulau Jawa dan Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Diversifikasi ini memungkinkan Perseroan mengelola penyebaran risiko ke beberapa daerah atas kemungkinan adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kegagalan panen atau penurunan perekonomian lokal.

b. Diversifikasi Jenis dan Merek

Dalam hal nilai pembiayaan kendaraan, hampir seluruh pembiayaan konsumen untuk kendaraan adalah merek Jepang, yang memiliki nilai jual kembali yang tinggi dan adanya permintaan yang bagus di pasar sekunder.

c. Tipe Diversifikasi

Sebagian besar kendaraan bermotor yang dibiayai merupakan kendaraan penumpang dan komersial (non-sedan). Kendaraan komersial ini digunakan untuk memperoleh penghasilan dan pada umumnya digunakan untuk usaha.

d. Fokus pembiayaan barang modal adalah peralatan yang umum digunakan dan memiliki risiko rendah, sebagian besar dari piutang sewa pembiayaan merupakan pembiayaan aset berupa kendaraan dan alat berat yang dapat digunakan untuk kegiatan di berbagai industri termasuk alat berat *excavator*, *bulldozer*, *motor grader* dan lain-lain, serta alat transportasi sungai dan laut, seperti *tug boat* dan tongkang.

e. Tidak ada piutang kepada pihak yang berelasi dan pembiayaan kepada grup sendiri.

Perseroan tidak mempunyai transaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa karena Perseroan tidak berafiliasi dengan suatu grup usaha.

3. Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional merupakan siklus dari proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap risiko akibat kegagalan atau ketidakcukupan kontrol terhadap sistem dan proses internal, faktor manusia, maupun kejadian yang disebabkan faktor eksternal. Untuk mengurangi risiko operasional internal, Perseroan telah memiliki sistem TI (Teknologi Informasi) yang cukup handal saat ini dan tetap akan mengembangkan teknologi informasi yang ada sehingga benar-benar dapat mendukung pertumbuhan bisnis saat ini dan dimasa mendatang.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, faktor keamanan dan ketersediaan dan akurasi informasi sudah merupakan hal pokok yang harus dimiliki. Guna mendukung proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat gangguan selama jam operasi bisnis, Perseroan telah melakukan langkah-langkah pengembangan sistem informasi yang dimiliki, tidak terbatas hanya dari sisi perangkat keras dan *backup data*, tapi meliputi *backup jaringan* dan *data center*.

Salah satu penekanan Perseroan dalam hal penerapan manajemen risiko operasional adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan antisipasi terhadap potensi gangguan dan kerusakan yang dapat berakibat fatal pada operasional Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan telah memiliki rencana pemulihan kerusakan atau yang biasanya disebut *Disaster Recovery Plan* (DRP). Salah satu strategi DRP yang dilakukan dengan membangun *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang berlokasi terpisah dari pusat data Perseroan. DRC tersebut dikelola secara profesional oleh vendor DRC independen yang merupakan salah satu penyedia pusat data terbesar di Indonesia dan telah memenuhi standarisasi DRC Tier-3, mencakup antara lain: *redundant infrastructure capacity*, *dual power source* dan *concurrently maintainable site*. DRC dikembangkan dengan konsep data *mirroring* secara *real-time*, sehingga setiap perubahan atau *update* pada *database* induk secara otomatis akan melakukan *update database* pada DRC secara *real-time*. Dengan demikian, potensi gangguan operasional dan kehilangan data jika terjadi masalah pada pusat data utama dapat diminimalisir, dan kegiatan operasional baik di kantor cabang maupun kantor pusat tetap berjalan normal. Departemen Teknologi Informasi di Perseroan telah melakukan serangkaian tes dan simulasi dari waktu ke waktu guna memastikan bahwa DRP yang ada telah berjalan sesuai dengan ekspektasi Perseroan.

Dari segi keamanan atau *security*, Perseroan telah melakukan pengkajian atau *assessment* terhadap implementasi keamanan yang telah dilakukan. Pengkajian ini merupakan kepedulian Perseroan terhadap keamanan data serta informasi yang dimiliki Perseroan. Atas dasar hasil pengkajian tersebut, Perseroan telah mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memperkuat *security* data dari serangan pihak luar maupun pencurian data oleh pihak oknum karyawan, serta dalam menetapkan prioritas pengembangan keamanan jaringan Perseroan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Dalam rangka meningkatkan keamanan pusat data dan jaringan serta dengan semakin kompleksnya sistem informasi dan digitalisasi yang digunakan, Perseroan telah melakukan berbagai identifikasi dan mitigasi risiko terkait dengan teknologi informasi dan digitalisasi, antara lain sebagai berikut:

- Dibentuknya komite pengarah teknologi informasi (*IT Steering Committee*).
- Penetapan rencana strategis teknologi informasi yang termasuk peningkatan keamanan *cyber* yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.
- Standardisasi penerapan dan pengelolaan perangkat jaringan komunikasi dan sistem data dan aplikasi; termasuk pengelolaan kewenangan akses sistem, dan peremajaan secara berkala.
- Penerapan pengembangan sistem aplikasi dengan model *Secured Software Development Life Cycle* (S-SDLC).
- Pelaksanaan *Penetration Test* dan *Vulnerability Assessment* (VA) untuk menguji keamanan dan kehandalan sistem aplikasi dan jaringan informasi dari potensi serangan *cyber*.

Selain itu, Perseroan secara terus-menerus memperbaharui Standar Prosedur Operasi untuk menjamin adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari setiap fungsi dalam Organisasi, sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan/*fraud* yang dilakukan oleh karyawan internal. Fungsi audit internal juga diberdayakan untuk menguji efektivitas sistem pengawasan internal yang berjalan dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi.

Perseroan juga telah mengalihkan sebagian risiko yang ada ke pihak external, dengan cara menutup asuransi atas seluruh aset tetap, asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, serta mewajibkan konsumen untuk mengasuransikan kendaraan yang dibiayai Perseroan.

Perseroan juga menyadari bahwa dengan semakin berkembang Perseroan, risiko reputasi juga menjadi semakin penting. Hal ini berdampak pada kepercayaan konsumen dan nama baik Perseroan dimata *stakeholders* dan selaku perusahaan terbuka. Untuk meminimalisir risiko yang ada, Perseroan telah menerapkan *tele survey* ke konsumen untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Perseroan, dan juga melakukan respon yang cepat atas keluhan yang disampaikan oleh konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat surat pembaca di Koran.

Risiko legal juga merupakan salah satu risiko operasional yang dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu menjaga agar selalu mengikuti aturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku, dan selalu mengupdate perubahan yang terjadi.

4. Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, kondisi demografi pasar dan faktor lainnya

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, saat ini hampir semua orang sudah menjadi pengguna telepon seluler dan bahkan sudah menggunakan layanan data-3G dan menggunakan telepon pintar (*smart phone*). Sebagai dampak dari hal tersebut, muncul berbagai aplikasi berbasis teknologi yang memberikan penawaran produk/jasa kepada para pengguna *smart phone* tersebut, diantaranya layanan transaksi perbankan online, perdagangan online (*e-commerce*), transportasi serta layanan inovatif di bidang keuangan lainnya yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan di bidang teknologi keuangan (*fintech*).

Segala perubahan ini menyebabkan perilaku konsumen, diantaranya:

- Terdapat informasi yang lebih transparan terhadap produk yang ditawarkan, baik dari sisi spesifikasi barang, harga, cara pembayaran dll.
- Kemudahan dalam menjual memasarkan produk secara online yang menyebabkan hilangnya batas demografi secara fisik yang biasa menjadi pembatas jangkauan pasar tradisional

Dengan perubahan yang begitu cepat, maka semua pelaku pasar harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terjadi dan cepat beradaptasi diri supaya bisa tetap relevan.

Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan investasi dan pengembangan pada beberapa area diantaranya:

- Pembentukan unit kerja pengembangan bisnis berbasis digital.
- Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi teknologi informasi saat ini sehingga dapat berkomunikasi dengan aplikasi dari pihak ketiga via "*web services*".

- Pengembangan mobile technology sehingga proses kerja karyawan lapangan dapat dilaksanakan langsung di lapangan dan tidak perlu pulang ke kantor untuk mengupdate hasil kerja yang diperoleh selama di lapangan (mis. *survey report* atau laporan *collection*).
- Pengembangan website Perseroan sehingga memberikan tampilan, informasi dan sebagai alat komunikasi yang efektif dengan konsumen dan para *stakeholders* lainnya.
- Pengembangan komunikasi pemasaran secara digital lewat media sosial.
- Membuka kerja sama dengan perusahaan fintech dalam rangka pengembangan product dan service yang saat ini belum dapat dilakukan sendiri oleh Perseroan.

Perseroan sadar bahwa perubahan teknologi yang terjadi secara pesat saat ini adalah suatu kesempatan bisnis besar bagi yang siap, dan Perseroan berkeyakinan bahwa dengan strategi dan investasi yang tepat, maka perubahan ini akan menjadi kesempatan besar bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya kedepan, termasuk mendahului kompetitor yang belum siap untuk beradaptasi.

5. Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan perusahaan Perubahan

dalam harga cukup dinamis di pasar, yang utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Besaran bunga patokan BI yang berdampak pada kenaikan/penurunan suku bunga perbankan yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat suku bunga pinjaman/penjualan yang terjadi di perusahaan pembiayaan.
- Faktor kompetisi, dimana semakin tinggi tingkat kompetisi di suatu daerah atau produk tertentu, akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan ke konsumen. Hal ini umumnya terjadi pada produk mobil baru.
- Tingkat biaya kredit dan biaya bunga di masing-masing perusahaan pembiayaan, dimana umumnya semakin tinggi tingkat bunga pinjaman serta biaya kredit, maka akan berdampak pada tingginya suku bunga yang ditawarkan ke konsumen guna menjaga tingkat margin yang diharapkan.

Perseroan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar, dan menyesuaikan strateginya untuk tetap dapat bersaing secara sehat dan memberikan nilai tambah lain diluar bunga sehingga tetap mendapatkan konsumen yang ditargetkan tanpa harus kehilangan margin keuntungan.

Sementara itu, dalam hal pemasok atau peristiwa lain yang mempengaruhi penjualan Perseroan, tidak ada suatu persoalan atau perkembangan negatif yang terjadi.

6. Pengaruh produk baru atau penarikan produk.

Sejalan dengan izin usaha baru dari OJK sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, saat ini perusahaan pembiayaan diperbolehkan melakukan pembiayaan dibidang investasi, modal kerja dan multi guna. Terkait dengan hal tersebut, sebelumnya Perseroan hanya fokus melakukan pembiayaan dibidang otomotif dan alat-alat berat, namun saat ini sudah melakukan pengembangan produk pembiayaan baru, antara lain pembiayaan di bidang properti dan mesin-mesin, serta menjajaki kerja-sama dengan perusahaan-perusahaan di bidang teknologi keuangan (*fintech*) untuk meningkatkan jangkauan kepada konsumen-konsumen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh Perseroan.

Disisi lain, tidak ada penarikan produk yang dilakukan oleh Perseroan.

8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dalam rangka komitmen Perseroan untuk mendukung berbagai program yang membantu proses pemberdayaan masyarakat kurang mampu menjadi mandiri dan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan secara aktif melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan pada bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan cepat tanggap bencana.

2024

Pelatihan Digital Guru Kreatif 4.0 Batch 3 pada bulan Januari hingga Maret 2024 yang terdiri dari beberapa tahapan program pembekalan materi interaktif PowerPoint secara daring (online) hingga pembuatan proyek akhir dari para guru yang berasal dari 4 sekolah di berbagai wilayah Indonesia;



Program Beasiswa Guru yang merupakan keberlanjutan dari program “Guru Kreatif Go Digital” berupa pemberian beasiswa kepada para guru yang telah lulus pelatihan “Guru Kreatif Go Digital” melalui pemberian akses platform kursus daring secara gratis selama 1 tahun.

Berbagi Berkah Ramadan melalui pembagian 2.378 paket takjil di 14 cabang dan pembagian 157 paket sembako di 5 cabang berbagai wilayah Indonesia selama bulan Maret 2024;



Program Cepat Tanggap Bencana Banjir Demak untuk masyarakat penyintas melalui pemeriksaan kesehatan gratis untuk 160 warga penerima manfaat pada 3 April 2024;

Program pelayanan kesehatan gratis untuk konsumen dan masyarakat umum di sekitar lokasi Cabang Balaraja (Tangerang) berupa pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah pada 20 April 2024;

Program Edukasi literasi keuangan dengan tema “Pengenalan dan Simulasi Perusahaan Pembiayaan” untuk para siswa SDN Doyo Lama, Jayapura pada 15 Mei 2024;



Program Gerakan 1.000 Sepatu dan Kaos Kaku untuk Anak Bangsa melalui pemberian 1.038 pasang sepatu dan kaos kaki untuk 7 lokasi SD di 5 wilayah Pulau Papua: Jayapura, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Merauke pada 16 Mei 2024;



Program Sekolah Kreatif melalui renovasi infrastruktur sekolah berupa pembangunan sarana pendidikan dan perbaikan sarana sanitasi sekolah, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium komputer, dan sarana pendukung digitalisasi lainnya, di beberapa wilayah cabang Depok, Karawang, Malang, Pekanbaru, Luwuk, Manggarai, Sumbawa, Palembang, Banjarmasin dan Paser selama bulan Januari hingga Juni 2024;



Program BFI Berkurban 2024 melalui donasi hewan kurban dalam rangka perayaan Iduladha 1455 H, berupa pemberian 7 ekor sapi dan 16 ekor kambing yang dibagikan kepada 1.565 warga masyarakat di berbagai wilayah Indonesia pada bulan Juni 2024;

2023

- Program sosialisasi Stunting untuk kaum Ibu di Kelurahan Pucang Sewu, Surabaya dalam rangka hari Gizi pada 28 Februari 2023;
- Program pelayanan kesehatan keliling/ambulans keliling yang bekerjasama dengan Sekolah Relawan kepada penyintas bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat pada Maret 2023;
- Program pelayanan kesehatan untuk warga Kecamatan Cugenang, Cianjur, pengadaan 12 pintu MCK di 4 titik lokasi wilayah Cianjur dan pemberian bibit tanaman beserta alat pertaniannya untuk pemberdayaan kelompok Tani Cianjur pada bulan April 2023;
- Program Sehat untuk Merdeka yang merupakan program pemeriksaan kesehatan di 12 wilayah Indonesia dengan jumlah penerima manfaat program ini mencapai 1.144 orang selama bulan Agustus 2023;
- Berbagai program kerelawanan dari karyawan Perseroan melalui program BFI 4 U pada bulan September hingga Desember 2023, antara lain:
 - Program Revitalisasi satu posyandu di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat melalui pemerian bantuan peralatan baru, edukasi dan penyuluhan, serta pembuatan akun media sosial posyandu.
 - Renovasi empat unit fasilitas sanitasi umum di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat.
 - Perbaikan infrastruktur dan pelatihan pengolahan sampah menjadi alat permainan edukatif dan kerajinan tangan bernilai ekonomis, bertempat di PAUD Saluyu, Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang, Banten.
 - Renovasi bangunan dan perbaikan fasilitas belajar di TK PGRI Menara Rumpin di Bogor, Jawa Barat.
 - Program pendampingan kepada masyarakat dalam menjalankan bisnis dan pemasaran di ranah digital di kawasan Bojongkoneng, Bandung, Jawa Barat.
 - Program Magotsuka Edufarm melalui kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah nonorganik, dan membudidayakan larva (maggot) di Cimahi, Jawa Barat dari Black Soldier Fly (untuk pengolahan sampah organik secara ekonomis);
 - Program Keberlanjutan Monitoring Literasi Keuangan berupa lokakarya dengan topik pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM di Belitung, Kepulauan Riau pada 17 Oktober 2023;
 - Program #BFItingkatUsahaLokalyang berupa program pelatihan dan pendampingan usaha dengan materi pemasaran digital, teknik dasar fotografi, public speaking, dan ide usaha kreatif untuk konsumen, komunitas UMKM, dan masyarakat umum di Semarang (Jawa Tengah) dan Medan (Sumatra Utara) selama bulan Oktober hingga Desember 2023;
 - Program penanaman 10.000 bibit mangrove (bakau) di berbagai desa yang tersebar di Denpasar (Bali), Indramayu (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Semarang (Jawa Tengah), dan Tegal (Jawa Tengah) pada bulan Desember 2023;

- Program sosialisasi gaya hidup ramah lingkungan ("BFI Green Lifestyle") di kalangan karyawan dan komunitas sekitar wilayah Perseroan dimana program dimulai pada tahun 2022 yang mencakup pengelolaan sampah botol plastik disertai dengan program edukatif "Start from Your Plastic Bottles", dan kampanye peningkatan kesadaran pemilahan sampah plastik di Kantor Pusat.
- Program pembangunan dan renovasi sanitasi air bersih di desa dan sekolah berbagai wilayah Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2018 hingga sekarang; dan
- Berbagai donasi dari Perseroan untuk membantu para korban bencana alam dan kebakaran di berbagai wilayah Indonesia; termasuk para karyawan dan konsumen Perseroan yang tertimpa musibah; yang juga dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

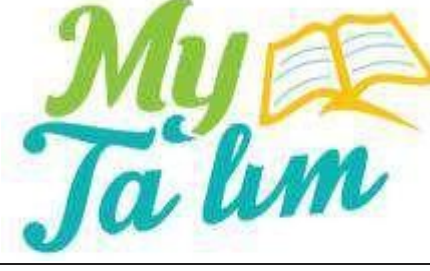
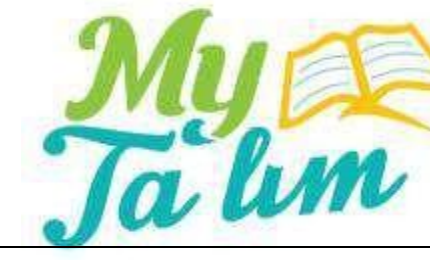
9. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

No.	Nomor/Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
1.	IDM000877807		9	10 Februari 2030
2.	IDM000942675		35	10 Februari 2030
3.	IDM000942676		38	10 Februari 2030
4.	IDM000877805		9	10 Februari 2030

No.	Nomor/Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
5.	IDM000891755		36	10 Februari 2030
6.	IDM000891756		35	10 Februari 2030
7.	IDM000891758		38	10 Februari 2030
8.	IDM000891773		42	10 Februari 2030
9.	IDM000742614		35	8 Februari 2028

No.	Nomor/Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
10.	IDM000784829		9	8 Februari 2028
11.	IDM000742601		36	8 Februari 2028
12.	IDM000742495		38	8 Februari 2028
13.	IDM000742474		42	8 Februari 2028
14.	IDM000877836		9	10 Februari 2030

No.	Nomor/Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
15.	IDM000891775		35	10 Februari 2030
16.	IDM000891776		36	10 Februari 2030
17.	IDM000891777		38	10 Februari 2030
18.	IDM000891778		42	10 Februari 2030
19.	IDM000768722		9	28 Desember 2027

No.	Nomor/Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
20.	IDM000768681		36	28 Desember 2027
21.	IDM000768674		42	28 Desember 2027
22.	IDM000768667		38	28 Desember 2027
23.	IDM000768659		35	28 Desember 2027

No.	Nomor/Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
24.	IDM000782594		9	16 Januari 2028
25.	IDM000782558		35	16 Januari 2028
26.	IDM000782541		36	16 Januari 2028
27.	IDM000782520		38	16 Januari 2028

No.	Nomor/Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
28.	IDM000782475		42	16 Januari 2028
29.	IDM000784823		9	8 Februari 2028
30.	IDM000742249		35	8 Februari 2028
31.	IDM000742217		36	8 Februari 2028
32.	IDM000742202		42	8 Februari 2028

No.	Nomor/Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
33.	IDM000247466		36	14 Juli 2028
34.	IDM000831793		42	18 Desember 2028
35.	IDM000831789		42	18 Desember 2028
36.	IDM000719363		9	18 Desember 2028

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

IX. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan diskonto dari Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

1. Atas Bunga Obligasi dengan kupon sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"); dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;

Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;

Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
3. Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;

Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi merupakan:

1. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

B. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan. Sampai dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan telah memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 18 Juni 2020, Peraturan Pemerintah No. 56/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka ("PP No. 30/2020").

PP No. 30/2020 ini mengatur perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa

Efek; saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak; masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 Hari Kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**UU HPP**"). Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah undang-undang ini disahkan.

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi persyaratan di atas, sesuai UU HPP dan PP No. 30/2020, untuk mendapatkan penurunan tarif sebesar 3%, sehingga Perseroan dikenakan tarif sebesar 19% untuk perhitungan PPh Badan.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 98 tertanggal 26 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang penjualannya dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah ini tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Para Pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Seri C	Total	%
PT BCA Sekuritas	25.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	25,00
PT BRI Danareksa Sekuritas	25.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	25,00
PT Mandiri Sekuritas	25.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	25,00
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	25.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	25,00
Total	100.000.000.000	200.000.000.000	300.000.000.000	600.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK, Afiliasi berarti:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang
 - bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan.
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pegawai yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPPSK, kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dikarenakan terdapat kesamaan 1 (satu) orang anggota Komisaris dengan Perseroan yaitu Sunata Tjiterosampurno. Sebagaimana telah diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) Financial
Institution & Capital Market Division (FICD) Menara 2 BTN
Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980
Tel.: (021) 38825147

Untuk Perhatian: Wali Amanat – *Financial Services Department*

Surat Penunjukan : No. OP/TRS/L/VI/24-0203 tanggal 4 Juni 2024.
Surat Tanda Terdaftar : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Pedoman
Kerja : Standar prosedur operasi Wali Amanat BTN.
Tugas Utama : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

BTN selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat:

- i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- ii. Tidak memiliki hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan;
- iii. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu; atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi; dan/atau
- iv. Tidak merangkap sebagai penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan.

KONSULTAN HUKUM

Jusuf Indradewa & Partners
Menara BCA Lantai 50 Jl.
M.H. Thamrin No. 1 Jakarta
Pusat 10310 Indonesia

Surat Penunjukan : No. OP/TRS/L/VI/24-0205 tanggal 4 Juni 2024 Nama
Rekan : Dr. Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H, M.A
Surat Tanda Terdaftar : STTD.KH-21/PJ-1/PM.02.2023 tanggal 8 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (Anggota HKHPM No.92036)
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Tugas Utama : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka penerbitan Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

Member firm of BDO International
Treasury Tower 11 Floor Suite H, District
8-SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12910

Surat Penunjukan : No. Corp/SJN/L/VI/24-0109 Nama
Rekan : Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA
Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-223/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 Izin Usaha
Nomor : 622/KM.1/2016
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Nomor Anggota: 11.D50162
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Tugas Utama
: Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka penerbitan Obligasi ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160 Indonesia

Surat Penunjukan : No. OP/TRS/L/VI/24-0204 tanggal 4 Juni 2024 Surat
Tanda Terdaftar : STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023 Keanggotaan
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman Kerja : (i) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan (ii) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Tugas Utama : Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan prosedur pekerjaan yaitu mempersiapkan perjanjian yang dimulai dari pembuatan draft-draft, pembahasan, dan penandatanganan perjanjian yang selanjutnya menerbitkan salinan perjanjian-perjanjian tersebut. Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka penerbitan Obligasi ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta perubahannya

PERUSAHAAN PEMERINGKAT

PT Fitch Ratings Indonesia DBS

Bank Tower Lantai 24 Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta
12940
Telepon: +62 21 29886800
Faksimile: +62 21 29886822

Surat Penunjukan : No. OP/TRS/L/VI/24-0358 tanggal 4 Juni 2024
Pedoman Kerja : Peraturan OJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek Tugas Utama
: Pemeringkatan atas Obligasi Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi.
Kode etik Fitch mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies in Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB").

Perseroan menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPPSK.

Pada tanggal diterbitkannya Propektus ini, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi, sementara BTN juga tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang Perseroan sesuai Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah BTN yang telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan ketentuan UUPPSK.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, BTN telah menandatangani surat pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No. 379/FICD/FS/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024, Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020.
- Surat Pernyataan No. 380/FICD/FS/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024, sesuai Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat:
 - i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - ii. Tidak memiliki hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah melebihi lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi;
 - iii. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024;
 - iv. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan.

A. UMUM

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), BTN disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum BTN menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, BTN beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) BTN.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 6A ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 8 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 April 2024 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No: AHU-0022194.AH.01.02.Tahun 2024 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0085123 tanggal 5 April 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105385 tanggal 15 Maret 2024 ("**Akta No. 07**").

B. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

C. PENGGANTIAN WALI AMANAT

- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. izin usaha bank yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - j. timbulnya hubungan kredit pembiayaan dengan Perseroan yang melampaui dari jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020; atau
 - k. atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan atau apabila Perseroan melakukan kelalaian/cidera janji dengan telah melalui proses sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
- ii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - a. Obligasi telah dilunasi, baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau dari Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - d. Setelah diangkatnya wali amanat baru.

D. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VI/2024-3613 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp Juta)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (< 5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

E. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 7 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Iqbal Latanro
Komisaris	: Andin Hadiyanto
Komisaris	: Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	: Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	: Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	: Bambang Widjanarko *)
Komisaris Independen	: Sentot Achmad Sentausa
Komisaris Independen	: Adi Sulistyowati *)

Dewan Pengawas Syariah

Direktur Utama	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	: Hirwandi Gafar
Direktur Finance	: Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	: Eko Waluyo
Direktur Assets Management	: Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Institutional Funding	: Jasmin
Direktur Information Technology	: Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	: Setiyo Wibowo
Direktur Operational and Customer Experience	: Hakim Putratama
Direktur SME and Retail Funding	: Muhammad Iqbal

*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

F. KEGIATAN USAHA

BTN selaku bank umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025" dan misi antara lain secara aktif mendukung Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974, BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di BEI, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para "Milenial," sebutan bagi generasi produktif Indonesia.

Salah satu melakukan terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara *digital* melalui *Hero Campaign*-nya yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi *value chain* bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan *new* aplikasi mobile banking BTN serta telah membuat variasi produk KPR bersama produk cash management maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap BTN seperti launching KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent to Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spektakuler. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat

Di Tahun 2024, BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan pada ajang *Mob-ex Award* Tahun 2024 di Singapura dalam kategori *Best Launch* pada kampanye BTN Mobile, BTN berhasil masuk daftar *Fortune Southeast Asia 500* Tahun 2024, BTN meraih penghargaan *Customer Experience Initiative of The Year* dalam ajang *ABF Retail Banking Awards 2024*, *Gold Award* dalam kategori *Corporate Governance & Investor Relation* Tahun 2024, *ASEAN GRC Award Winner 2023*, *Top 50 of Biggest Market Capitalization Public Listed Companies*, serta BTN meraih penghargaan sebagai *The Best GRC for IT/Digital Transformation 2023 (Banking Industries)*.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*). BTN telah melaksanakan proses sertifikasi dan mendapatkan akreditasi No. IS 790715 tahun 2023.

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital banking seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkuat pilar-pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Empat produk utama BTN, yakni *consumer banking*, *wealth management*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent to Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit *multifinance* dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *Wealth Management* menawarkan produk Bancassurance, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan Foreign Exchange.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) for *Milenials*.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di Pasar Modal, BTN selama 4 (empat) tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024; dan

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024.

G. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN telah memiliki 2 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 539 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional dan 51 Mobil BTN Move didukung dengan 2.146 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah:
BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah, 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

H. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 yang tidak diaudit serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember	
		2023	2022
Total Aset	451.349.698	438.749.736	402.148.312
Total Liabilitas	420.641.109	381.164.489	351.376.683
Total Dana Syirkah Temporer	28.642.839	27.106.095	24.862.275
Total Ekuitas	30.708.589	30.479.152	25.909.354
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	479.992.537	438.749.736	402.148.312

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan bunga dan bagi hasil	12.456.527	11.229.776	28.281.252	25.907.368
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(7.419.724)	(5.899.083)	(14.850.962)	(10.910.084)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	5.036.803	5.330.693	13.430.290	14.997.284
Laba operasional	1.482.948	1.479.357	4.539.729	3.814.803
Laba sebelum pajak	1.442.913	1.463.482	4.380.210	3.875.690
Beban pajak	(282.660)	(306.946)	(879.222)	(830.617)
Laba periode/tahun berjalan	1.160.253	1.156.536	3.500.988	3.045.073
Laba komprehensif selama periode/tahun berjalan	929.635	1.480.529	3.848.720	1.983.756
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)*	-	-	249	288

*Laba bersih per saham dasar hanya dicatatkan pada laporan keuangan triwulanan

I. INFORMASI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8 Jl.
H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia Tel.:
(021) 38825147
Website: www.btn.co.id
Untuk Perhatian: Financial Services Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 pada pukul 08.00 - 16.00 WIB.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pengajuan pemesan dilakukan dengan menyampaikan FPPO selama jam kerja baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, ke kantor atau melalui *email* para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang telah ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 23 September 2024.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 24 September 2024 (*in good funds*) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Thamrin
No Rekening: 2063564222 Atas
Nama: PT BCA Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang:
Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028 Atas
Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Jakarta
No Rekening: 067101000680304 Atas
Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank

Central Asia Tbk Cabang: KH Mas
Mansyur
No Rekening: 179.303.0308
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 25 September 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

a. Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Penjatahan

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat penjatahan dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar denda kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan, yang harus dibayarkan secara tunai atau transfer. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

b. Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Apabila Perseroan melakukan penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum dan uang pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum tersebut.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan akibat penundaan atau pembatalan penawaran umum, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan, yaitu Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan, yang harus dibayarkan secara tunai atau transfer. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

C. Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Persyaratan Pencatatan Obligasi di BEI Tidak Terpenuhi

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi karena persyaratan pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka tanggung jawab pengembalian dana pemesanan Obligasi menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal batalnya Penawaran Umum akibat tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Obligasi di BEI.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan Denda dikenakan pada hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal keputusan pembatalan atau penundaan tersebut yang dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal batalnya Penawaran Umum tersebut, maka Perseroan tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dari Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 25 September 2024.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPS serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 20 September 2024 dari kantor atau melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41 Jl.
M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Tel.: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas Menara

Mandiri I, Lantai 25 Jl. Jend.
Sudirman Kav. 54-55 Jakarta
12190
Telp.: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id; sett_fisd@mandirisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23 Jl.
Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp.: (021) 5091 4100 ext. 3218
Faksimili: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: IB-Group1@brids.co.id;
debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19 Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190
Telp.: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150 www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/IX/2024

Jakarta, 13 September 2024

Kepada Yang Terhormat,

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Sunburst CBD Lot 1.2

Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD

City – Tangerang Selatan 15322

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024”.

Sehubungan dengan maksud **PT BFI Finance Indonesia Tbk** (selanjutnya disebut “**BFI**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City – Tangerang Selatan 15322 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan “**Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024**”, sebesar **Rp.600.000.000.000,00** (enam ratus miliar Rupiah), yang merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) yang terdiri dari :

1. Seri A, Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
2. Seri B, Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C, Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri A, 25 September 2026 untuk Obligasi Seri B dan 25 September 2027 untuk Obligasi Seri C.

No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Satuan pemindahbukuan sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia yaitu AA-(idn) (Double A minus), obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. seluruh kekayaan perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk obligasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. (selanjutnya disebut **"PUB VI Tahap I"**), kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa, S.H. & Partners, selaku konsultan hukum independen dalam hal ini diwakili oleh Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H., dengan STTD.KH-21/PJ-1/PM.22/2023 telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat BFI No.OP/TRS/L/VI/24-02205 tanggal 4 Juni 2024, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (**"Uji Tuntas"**) yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (**"Pendapat Hukum"**) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari PUB VI Tahap I ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal dan dengan berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan sepenuhnya pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No. 040-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-H/VII/2024 tanggal 13 September 2024 (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Laporan Uji Tuntas"**).

Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini maka Pendapat Hukum No.041-R7/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024 tanggal 9 September 2024 menjadi tidak berlaku lagi.

Asumsi

Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

- otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen milik pihak ketiga yang tidak termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut.
 - d. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini.
 - e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Kualifikasi

Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Uji Tuntas diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi negara lain dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut :

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan mengenai adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan didalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk didalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka PUB VI Tahap I dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Uji Tuntas, asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut :



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

1. Perseroan, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan didirikan dengan nama "PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia No. 57 tanggal 7 April 1982 *juncto* Akta Perubahan No.40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-2091.HT.01.01.Th.82 tanggal 28 Oktober 1982, telah didaftarkan di dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 9 Nopember 1982 di bawah No.4265 dan No.4266 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No.1390.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami perubahan-perubahan, adapun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.19 tanggal 29 Juni 2022, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052483.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal

27 Juli 2022; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0271122 tanggal 27 Juli 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0144874.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal

27 Juli 2022; dan Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republi Indonesia No.031534, Berita Negara Republik Indonesia No. 74 ("**Akta No.19 tanggal 29 Juni 2022**"), mengenai perubahan Pasal 3 anggaran dasar tentang maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan dan Perubahan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

3. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal yang mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
4. Berdasarkan Akta No.19 tanggal 29 Juni 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :
 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembiayaan (aktivitas keuangan).



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Usaha Pembiayaan:
 - b. Pembiayaan Investasi;
 - c. Pembiayaan Modal Kerja;
 - d. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
 - e. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. Usaha Pembiayaan Syariah:
 - g. Pembiayaan Jual Beli;
 - h. Pembiayaan Investasi; dan/ atau
 - i. Pembiayaan Jasa
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. melakukan perencanaan dan pengembangan, antara lain menambah jaringan usaha, membangun infrastruktur dan kegiatan lain yang mendukung usaha dan kinerja Perseroan.
 - b. melakukan kegiatan mencari dan/atau memperoleh sumber pendanaan.
 - c. melakukan segala perbuatan pemilikan dan sewa menyewa dengan pihak lain.
 - d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan atau terkait dengan kegiatan usaha utama.
 - e. Sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 29 Juni 2022 tersebut diatas telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha Perseroan, khususnya POJK No. 7/POJK.05/2022 Tahun 2022.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan yang telah diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut serta peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menjalankan Usaha Pembiayaan Syariah, Perseroan telah memperoleh izin dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusannya No.Kep-



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

27/NB.223/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia No. 1 tanggal 5 Mei 2017 ("**Akta No.1 tanggal 5 Mei 2017**"), dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0134738 tanggal 9 Mei 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0060009.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 **Juncto** Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh per tanggal 30 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per **31 Agustus 2024** adalah sebagai berikut :

	NILAI NOMINAL RP 25,00 (DUAPULUH LIMA RUPIAH) PER SAHAM		%
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RP)	
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450,00	51,12
Masyarakat di bawah 5%	7.351.257.682	183.781.442.050,00	48,88
Sub-total	15.039.383.620	375.984.590.500,00	100,00
Saham Treasuri	927.732.000	23.193.300.000,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500,00	
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500,00	

Struktur permodalan Perseroan baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sah, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laporan Keuangan Audited Per 31 Mei 2024, Perseroan telah memenuhi minimum 20% cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang

[Handwritten signature]

No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"). Total sampai 31 Mei 2024 cadangan wajib Perseroan sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar), yang merupakan 31,3% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Nama pemegang saham yang menjadi Pengendali Perseroan adalah Trinugraha Capital & Co. SCA. Nama individu pemegang saham yang menjadi pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 adalah Garibaldi Thohir dan Jerry Ng.

Perseroan telah menyampaikan pelaporan atas pemilik manfaat akhir atas nama Garibaldi Thohir dan Jerry Ng kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Informasi Penyampaian Data tanggal 17 Juni 2022.

Dasar penentuan Garibaldi Thohir dan Jerry Ng sebagai Pemilik Manfaat adalah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yaitu menerima manfaat dari perseroan terbatas dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Sehingga penentuan Garibaldi Thohir dan Jerry Ng sebagai pemilik manfaat telah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

6. Perseroan telah melakukan pemenuhan POJK No.47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No.47/2020**") terkait Pasal 9 tentang total kepemilikan Asing pada Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah ("**Perusahaan**") yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, yaitu paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor. Berdasarkan "Daftar Komposisi Pemilik Efek Per 31 Mei 2024", yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan Pemodal Asing Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemodal Asing	Jumlah Efek	%
Perorangan Asing	1.448.780	0,009
Badan Usaha Asing	11.589.142.162	72,581
Lain-lain	0	0,00
Total	11.590.590.942	72,590

7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 22 Mei 2024, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0210827 tanggal 6 Juni 2024 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110977.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024,

No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

<u>Direksi</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Direktur	: Francis Lay Sioe Ho	2021 – 2026
Direktur	: Sudjono	2024 – 2027
Direktur	: Sutadi	2024 – 2027
Direktur	: Andrew Adiwijanto	2022 – 2027
Direktur	: Goklas	2024 – 2027
<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Komisaris	: Kusmayanto Kadiman	2021 – 2026
Komisaris Independen :	Johanes Sutrisno	2021 – 2026
Komisaris Independen :	Alfonso Napitupulu	2021 – 2026
Komisaris	: Saurabh Narayan Agarwal	2024 – 2029
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno	2020 – 2025
<u>Dewan Pengawas Syariah</u>		
Ketua	: H. Asrori S. Karni	
Anggota	: Dr. Hj. Helda Rahmi Sina	

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kecuali Direksi Goklas tersebut di atas telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK dan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 **Juncto** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2020 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Goklas belum dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur. Sampai dengan tanggal pendapat hukum dikeluarkan *fit and proper test* atas nama Goklas masih dalam proses tahap melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk mengikuti *fit and proper test* di OJK.

Masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

8. Susunan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Unit Audit Internal Perseroan, yakni sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Sudjono



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/I/2016-01 tanggal 26 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SL/I/2021-01 tanggal 26 Januari 2021, susunan Komite Audit Perseroan yang berlaku sampai 25 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

Ketua : Johanes Sutrisno (Komisaris Independen)
Anggota : Edy Sugito
Anggota : Friso Palilingan

Pembentukan Komite Audit dan Piagamnya telah sesuai dan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2024-0116 tanggal 20 Juni 2024, yang berlaku efektif pada tanggal yang sama, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Alfonso Napitupulu
Anggota : Sunata Tjiterosampurno
Anggota : Luki Sri Herlambang

Masa Jabatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak 1 April 2021 sampai 1 April 2026 kecuali Luki Sri Herlambang terhitung sejak 20 Juni 2024 sampai 21 Juni 2026.

Pembentukan Komite Remunerasi Perseroan telah sesuai dan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal dan berdasarkan Surat Penunjukan Anggota Unit Audit Internal No. SK/BOD/VII/14-0009 tanggal 16 Juli 2014, yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Ketua : Fledy Rizmar
Anggota : Roy Rinladi



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Pembentukan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan surat No. Com/JS/SK/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan Resolusi Dewan Komisaris Atas Perubahan Nama Dari Komite Manajemen Risiko Menjadi Komite Pemantau Risiko Ref.No.BOC/V/2020-001 tanggal 13 Mei 2020 *Juncto* berdasarkan Resolusi Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2021-0092 tanggal 15 Juni 2021, maka Susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Johanes Sutrisno (Komisaris Independen)
Anggota : Jono Effendy

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dan memenuhi POJK No. 30/2014 *juncto*. POJK No. 29/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

9. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya baik untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang Konvensional, Kantor Cabang Unit Syariah Gerai dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Terhitung sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas dikeluarkan, Cabang, Gerai dan Kantor Perwakilan Syariah, Perseroan berjumlah **192** Kantor Cabang, **31** Gerai dan **45** Kantor Perwakilan Syariah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

10. Penggunaan akad-akad untuk kegiatan Pembiayaan Syariah Perseroan sesuai dengan POJK No.10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-219/NB.223/2018 tanggal 14 Februari 2018, yakni penggunaan akad-akad sebagai berikut:

- a. Akad *Ijarah* untuk Pembiayaan Umrah;
- b. Akad *Ijarah* untuk Pembiayaan Wisata Halal; dan
- c. Akad *Murabahah* untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

11. Perseroan telah memelihara Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.05/2020 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank ("**POJK No. 28/2020**") dan telah memenuhi persyaratan *gearing ratio* bagi Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 POJK No.35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 35/2018**") dengan nilai *gearing ratio* sebesar 1,4 (satu koma empat) kali



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

per Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Mei 2024 (*Audited*).

12. Perseroan telah terdaftar sebagai anggota Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No.28/2014**"), yaitu pada PT Kredit Biro Indonesia dan PT Pefindo Biro Kredit.

Perseroan telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 POJK No.28/2014, sesuai dengan Sertifikat Keanggotaan APPI tanggal 22 Desember 2023, yang menyatakan Perseroan sebagai anggota APPI, dengan Nomor Keanggotaan 1002/JKT/82, periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Sehingga perizinan, persetujuan dan/atau sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan masih berlaku.

13. Aspek ketenagakerjaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajiban pembayaran iuran untuk 3 (tiga) periode terakhir atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perseroan telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Kota yang berlaku pada provinsi dimana Kantor Pusat, Kantor Cabang Konvensional, Kantor Cabang Syariah Perseroan berada, telah melakukan pemenuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1981.

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HI.00.00/00.0000.230818003/B/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT BFI Finance Indonesia Tbk. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan, yaitu sejak 5 Agustus 2024 sampai dengan 4 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami yang termuat dalam LPSH dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Juni 2024, jumlah karyawan Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebanyak 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) orang. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit.

Perseroan telah membentuk LKS Bipartit sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Wakil Pengusaha dan Pekerja/Buruh Perseroan, dicatatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dengan nomor bukti pencatatan: 500.15.13.2/03/Disnaker/2024 pada tanggal 27 Mei 2024.

Perseroan saat ini mempekerjakan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Asing ("TKA") dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ng Koon Pek (Consultant Marketing)
- b. Tomas Hrcir (Head of Asset Management)

Yang keduanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/032706/PK.04.01/III/2024 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing Perpanjangan Pada Perseroan tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/163452/PK.04.01/XII/2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada Perseroan tanggal 18 Desember 2023. Keduanya juga memiliki ITAS dengan nomor NIORA: J1TAA64321 dan NIORA: IM2VAC52824. Seluruh dokumen perizinan ketenagakerjaan asing yang dimiliki bersangkutan masih berlaku.

14. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan baik berupa harta tetap maupun harta bergerak telah dilakukan secara sah, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang Indonesia, secara khusus anggaran dasar Perseroan dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, serta tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan sebagai berikut hak tagih atas piutang terhadap konsumen pembiayaan yang dijaminkan secara fidusia kepada sejumlah kreditur.

Dalam hal terjadi eksekusi atas harta kekayaan yang dijaminkan tersebut, maka tidak akan berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan Perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Juni 2024.

Perseroan telah melakukan pendaftaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa Merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Seluruh pendaftaran HAKI yang dilakukan Perseroan telah memberikan perlindungan yang cukup bagi Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang Indonesia.

Perseroan telah mengasuransikan aset material Perseroan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungan sebagaimana hal ini ditegaskan Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Juni 2024



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

15. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, mengikat Perseroan, tidak bertentangan satu sama lain, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan PUB VI Tahap I ini serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku. Serta dalam penerbitan obligasi PUB VI Tahap I ini *financial covenant* yang tertuang dalam perjanjian Kredit antara Perseroan dengan Bank CIMB Niaga dan Bank Pan masih terpenuhi sehingga tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit dengan Bank CIMB Niaga dan Bank Pan.

Ketentuan dari PUB VI Tahap I tidak lebih menguntungkan secara substansial bagi Pemegang Obligasi dibandingkan dengan ketentuan dari Akta Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 30 Agustus 2021 yang mana Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus sedangkan fasilitas kredit sindikasi dijamin dengan jaminan khusus berupa piutang usaha Perseroan. Oleh karenanya, Pemegang Obligasi tidak memiliki hak untuk didahulukan dalam penerimaan pembayaran dibandingkan dengan Kreditur lain. Kemudian, hak-hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik terhadap asset yang ada sekarang maupun yang akan ada dan penggunaan dana PUB VI Tahap I ini masih untuk kebutuhan modal kerja sehingga penerbitan PUB VI Tahap I ini masih memenuhi klausul yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 30 Agustus 2021 tersebut.

16. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan Surat pernyataan Perseroan tanggal 26 Juni 2024 dengan ini tidak pernah mengalami gagal bayar dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 26 Juni 2024.
17. Berdasarkan hasil uji tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 26 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja, sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim yang mungkin timbul dan/atau somasi, kecuali untuk 24 (dua puluh empat) perkara baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun pihak lain dalam perkara yang berada di wilayah Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang sebagai berikut:



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

NO.	NOMOR PERKARA	STATUS KEDUDUKAN PARA PIHAK
1.	415/Pdt/2012/PT.Sby (Pengadilan Tinggi Surabaya)	Edy Setiawan (Debitur/Pembanding) melawan Perseroan selaku Terbanding.
2.	1641K/Pdt/2019 (Mahkamah Agung)	Syaroni (Debitur/ Pembanding / Termohon Kasasi) melawan Perseroan selaku Terbanding dan Pemohon Kasasi
3.	2648 K/PDT/2022 (Mahkamah Agung)	Jimi Karter Hariandja (Debitur/Penggugat) melawan Perseroan selaku Tergugat.
4.	Perkara Pengaduan di BPSK Kota Medan	Ahmad Yanto (Debitur/Pengadu) melawan PT Asuransi Wahana Tata (Teradu I) dan Perseroan (Teradu II)
5.	Perkara Pengaduan di BPSK DKI Jakarta	Jogi Partopuan Pasaribu (Debitur/Pengadu) melawan Perseroan (Teradu).
6.	Perkara Pengaduan di BPSK Depok	Nurni (Debitur/Pengadu) melawan Perseroan (Teradu).
7.	276/Pdt.Bth/2022/PN Mks (Pengadilan Negeri Makassar)	Hj. Herlinda Mahmuddin (Pelawan) melawan Nur Darmiati (Terlawan I); Perseroan (Terlawan II); Nona Angriany (Terlawan III); Drs. H. Mubarak Pataba (Terlawan IV); Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar (Terlawan V)
8.	81/Pdt.G/2023/PN Mks (Pengadilan Negeri Makassar)	Ernawati N (Penggugat I), Muh Rusdi (Penggugat II) melawan Perseroan (Tergugat I dan Tergugat II), Rizal, SH selaku Direktur PT Rezky Syifa Global (Tergugat III)
9.	Perkara No. 318/Pdt/2023/PT BTN di Pengadilan Tinggi Banten	Penggugat I: Ahmad Suja'l Penggugat II: Ecih Mariani Tergugat: Perseroan
10.	Perkara No. 125/Pdt/2024/PT Sby di Pengadilan Tinggi Surabaya	Penggugat: Yayuk Wijastuti Tergugat I: Perseroan Tergugat II: Silvy Kurniawati Tergugat III: Bambang Marsudi Turut Tergugat: Fuad Agung
11.	Perkara Pengaduan di BPSK Kabupaten Pahuwato	Pengadu: Usman Ota Teradu: Perseroan
12.	Perkara Pengaduan No. 08/P3K/BPSK/VII/2023 di BPSK Kota Sukabumi	Pengadu: Tatan Suahemi Teradu: Perseroan
13.	Perkara Pengaduan di BPSK Kabupaten Pahuwato	Pengadu: Sri Yusniawati S Bafadal Teradu: Perseroan
14.	Perkara Pengaduan di BPSK Kabupaten Tohuwatu	Pengadu: Ruslan Taib Teradu: Perseroan

[Handwritten signature]

No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

NO.	NOMOR PERKARA	STATUS KEDUDUKAN PARA PIHAK
15.	Perkara No. 9/Pdt/2024/PT BJM di Pengadilan Tinggi Banjarbaru	Penggugat: Nasir Tergugat: Perseroan
16.	Perkara Pengaduan di BPSK Kabupaten Pahuwato	Pengadu: Roslan Doholio Teradu I: Perseroan Teradu II: Moh. Zulkidert M. Waraga
17.	Perkara No. 119/Pdt.Bth/2023/PN Kwg di Pengadilan Negeri Karawang	Dede Sunarya selaku Penggugat melawan Liana selaku Terbantah I, Perseroan selaku Terbantah II, Michael Ryan Adiwina selaku Terbantah III, Notaris Bayu Rusdian Utama selaku Turut Terbantah I, KPKNL selaku Turut Terbantah II, dan BPN Karawang selaku Turut Terbantah III
18.	Perkara No. 14/Pdt/2024/PT Mam di Pengadilan Tinggi Mamuju	Syahrir Syukri selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat
19.	Perkara No. 122/Pdt.G/2023/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo	Modriq Al Hanan selaku Penggugat I dan Sri Mulyaningsih selaku Penggugat II melawan Perseroan selaku Tergugat, KPKNL Surakarta selaku Turut Tergugat I, BPB Kabupaten Sukoharjo selaku Turut Tergugat II
20.	Perkara No. 194/Pdt.G/2023/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi	Triput Darmaji selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat
21.	Perkara No. 7/Pdt.G/2024/PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung	Muhammad Suaidi selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat
22.	Perkara No. 08/Pdt.Bth/2024/PT Mnk di Pengadilan Negeri Manokwari	H Zainuddin selaku Pelawan melawan Perseroan selaku Terlawan I dan Indrayasa Zainuddin selaku Terlawan II
23.	Perkara No. 262/Pdt.G/2024/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang	PT CIMB Niaga Auto Finance selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat dan Yuniar Achmad selaku Turut Tergugat
24.	Perkara No. 247/Pdt.G/2024/PN Bks di Pengadilan Negeri Bekasi	PT Tomo Indah Sejati selaku Penggugat melawan Nugroho Utomo Putro selaku Tergugat I, Gunawan Prasetyo selaku Tergugat II dan Perseroan selaku Tergugat III

Perkara-perkara yang saat ini sedang dihadapi Perseroan tersebut tidak berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap (1) Kelangsungan usaha Perseroan; (2) Kegiatan usaha Perseroan; (3) Operasional Perseroan; dan/atau (4) Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan VI Tahap I



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Tahun 2024 dan rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2024.

18. Berdasarkan hasil uji tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi Perseroan tertanggal 26 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan masing-masing anggota Direksi Perseroan baik dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 26 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan baik dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun sebagai pribadi (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi.

19. Dalam rangka PUB VI Tahap I ini, telah dibuat dan ditandatangani:



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia No. 96 tanggal 26 Juni 2024 **Jis.** (i) Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia No. 01 tanggal 02 Agustus 2024 dan (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia No. 09 tanggal 6 September 2024 oleh Perseroan selaku Emiten yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 97 tanggal 26 Juni 2024 **Jis.** (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 16 tanggal 12 Juli 2024; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 02 tanggal 02 Agustus 2024 dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 10 tanggal 06 September 2024 oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 98 tanggal 26 Juni 2024 **Jis.** (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 17 tanggal 12 Juli 2024; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 03 tanggal 02 Agustus 2024 dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 12 tanggal 06 September 2024 oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT BCA Sekuritas, PT BRI Danarakesa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, keempatnya selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- d. Perjanjian Agen Pembayaran No. 99 tanggal 26 Juni 2024, oleh dan antara Perseroan selaku Penerbit Efek dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-068/OBL/KSEI/0624 tanggal 26 Juni 2024 oleh dan antara Perseroan selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan.



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

- f. Akta Pengakuan Utang Obligasi Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 11 tanggal 06 September 2024, oleh Perseroan selaku Emiten, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

Perjanjian-perjanjian tersebut diatas seluruhnya telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

20. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, PUB VI Tahap I ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Obligasi, dalam pengertian bahwa apabila masih terdapat Obligasi yang ditawarkan yang tidak habis terjual kepada Masyarakat, maka sisa Obligasi tersebut wajib dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Obligasi pada Tanggal Pembayaran dengan Harga Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing.
21. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi maka Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan dengan maksud untuk pelunasan tidak memiliki hak untuk menghadiri RUPO, tidak memiliki hak suara dan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
22. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. seluruh kekayaan perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
23. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No.19 tanggal 29 Juni 2022, untuk PUB VI Tahap I ini tidak diperlukan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Direksi No. SK/BOD/VI/24-0100 tanggal 7 Juni 2024 (SK Direksi), Direksi Perseroan:

1. Memutuskan untuk mendapatkan pendanaan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia" dengan target dana yang akan dihimpung sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah) ("Obligasi"), yang akan diterbitkan dalam beberapa tahap penerbitan dan selanjutnya mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Jasa Keuangan dan mencatatkan Obligasi tersebut untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang seluruhnya dilakukan dengan syarat, ketentuan dan tata cara yang dianggap baik dan tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan

2. Memutuskan untuk menentukan penggunaan yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi tersebut yang akan dituangkan dalam surat pernyataan penggunaan dana dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka PUB VI Tahap I ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 5 tanggal 22 Mei 2024, dibuat oleh Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (RUPSLB) dan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari BEI berdasarkan Surat No. S-07880/BEI.PPI/07-2024 tertanggal 30 Juli 2024.

Berdasarkan pendelegasian kewenangan RUPSLB, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan SK Direksi penerbitan dan penetapan jumlah obligasi PUB Obligasi VI Tahap I telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh antara Perseroan dengan Kreditur Perseroan, maka dalam rangka PUB VI Tahap I ini Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Kreditur dan/atau pemberitahuan kepada Kreditur Perseroan.

24. Perseroan dan Wali Amanat, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPM") dan hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
25. Perseroan dan PT Fitch Ratings Indonesia, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
26. Antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa, dan PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sedangkan antara Perseroan dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

27. Perseroan adalah pihak yang memenuhi syarat untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 ("**POJK No.36/2014**") tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Efek yang diterbitkan dalam PUB VI Tahap I ini telah memenuhi persyaratan Efek sebagaimana diatur dalam POJK No.36/2014, yaitu merupakan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

28. Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka PUB VI Tahap I, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tidak tercapai, maka sumber pendanaan lain yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja adalah pendanaan dari fasilitas perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Rencana penggunaan dana hasil PUB VI Tahap I bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, mengingat nilainya tidak mencapai 20% (dua puluh) persen dari Ekuitas Perseroan dan apabila akan digunakan untuk transaksi dengan pihak Afiliasi dan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 42/POJK.04/2020.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB VI Tahap I kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, serta wajib menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil PUB V Tahap I secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil PUB VI Tahap I telah direalisasikan.



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB VI Tahap I Obligasi ini wajib mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB VI Tahap I Obligasi yang belum direalisasikan, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Berdasarkan keterangan Perseroan Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yaitu untuk modal kerja Perseroan tidak terdapat perjanjian dengan pihak lain/pihak afiliasi untuk pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB VI Tahap I.

29. Informasi yang disajikan dalam Prospektus dalam rangka PUB VI Tahap I yang berkaitan dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang kami lakukan.
30. Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT"), berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, sebanyak 74.250 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah Rp.74.250.000.000 (tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta), yang merupakan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh FIT.

Penyertaan Perseroan pada FIT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah sesuai dengan Pasal 68 POJK 35/2018 dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

- a. FIT adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin - ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Perubahan Anggaran Dasar FIT telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai mana telah diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi kecuali perubahan Anggaran Dasar FIT terakhir yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya.



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 UUPT kewajiban untuk mengumumkan Akta Pendirian dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar dalam BNRI dan Tambahannya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan dalam UUPT tidak diatur mengenai konsekuensi hukum belum diumumkannya akta-akta perubahan Anggaran Dasar terakhir FIT dalam BNRI.

- b. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 28 Desember 2022 ("**Akta No. 10 tanggal 28 Desember 2022**"), dibuat di hadapan Geraldine Herlina Sally Shinta Ulyana Sianturi, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah (i) Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No AHU-AH.01.03-0497389 tanggal 29 Desember 2022 dan (ii) Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0263098.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FIT adalah sebagai berikut :

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000% per saham	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor:</u>			
PT BFI Finance Indonesia Tbk	74.250	74.250.000.000	99,00
Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)	750	750.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	75.000	75.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	25.000	25.000.000.000	

Riwayat struktur permodalan FIT baik yang mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar FIT dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 8 Mei 2023, dibuat di hadapan Geraldine Herlina Sally Shinta Ulyana Sianturi, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapat (i) Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0115544 tanggal 10 Mei 2023 dan (ii) Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084941.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FIT adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Tjiu Herman Handoko



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

Direktur : Ichwan Peryana

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)

Komisaris : Sudjono

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris FIT tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar FIT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Berdasarkan Anggaran Dasar FIT, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha FIT adalah sebagai berikut:
- a. Maksud dan tujuan FIT adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
 - b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, FIT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (FP2P) Konvensional (64951);
 - 2) Kelompok ini mencakup usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*) yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

FIT telah menjalankan kegiatan usahanya, yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar FIT dan telah memperoleh perizinan sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-20/D.05/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Finansial Integrasi Teknologi serta peraturan perundangan yang berlaku.

- e. Berdasarkan hasil uji tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan FIT tertanggal 26 Juni 2024, FIT tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan) maupun harta bergerak (kendaraan bermotor).



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

- f. FIT telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan telah melakukan kewajiban pembayaran iuran untuk 3 (tiga) periode terakhir atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

FIT telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan No. 4/HI.00.00/36.3603.230303017/B/V/2023 Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Finansial Integrasi Teknologi tanggal 12 Mei 2023. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu 12 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2025.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami yang termuat dalam LPSH dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan FIT tanggal 26 Juni 2024, jumlah karyawan FIT per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit.

Dalam memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, FIT telah membentuk LKS Bipartit dan dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintahan Kabupaten Tangerang ("Disnakertrans"), sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 560/471-Disnaker/2024 tanggal 24 Juli 2024, perihal: Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Finansial Integrasi Teknologi, yang mencatat Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Finansial Integrasi Teknologi. Masa Kerja kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit FIT tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2027.

- g. Berdasarkan hasil uji tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam surat pernyataan FIT tanggal 26 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan FIT maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris FIT dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi, (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum di bidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha FIT.

- h. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh FIT dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh FIT, mengikat FIT dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka PUB VI Tahap I PT BFI Finance Indonesia Tbk dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS



Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H.

STTD.KH-21/PJ-1/PM.02.2023
Anggota HKHPM No.92036

Tembusan:

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yang Terhormat PT BCA Sekuritas.
3. Yang Terhormat PT BRI Danareksa Sekuritas.
4. Yang Terhormat PT Mandiri Sekuritas.



No. 041-R8/CS-MN-RG-DM-MJ-CC/II-G/VIII/2024

5. Yang Terhormat PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
6. Yang Terhormat Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



XVI. LAPORAN KEUANGAN AUDIT

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Francis Lay Sioe Ho
Alamat Kantor : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Alamat Rumah : Jl. Duta Indah II No 6, RT 001
RW 014 Pondok Pinang Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Sudjono
Alamat Kantor : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Alamat Rumah : Taman Provence, Blok 3 A9 No. 36
RT 002 RW 025, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong,
Tangerang Selatan
Nomor Telepon : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY**

We, the undersigned:

1. Name : Francis Lay Sioe Ho
Office Address : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Residential Address : Jl. Duta Indah II No 6, RT 001
RW 014, Pondok Pinang Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Telephone : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Title : President Director
2. Name : Sudjono
Office Address : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Residential Address : Taman Provence, Blok 3 A9 No. 36
RT 002 RW 025, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong,
Tangerang Selatan
Telephone : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Title : Finance Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements;
2. PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
- 3.a. All information contained in PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. We are responsible for PT BFI Finance Indonesia Tbk and its Subsidiary's internal control system.

We certify the accuracy of this statement.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Tangerang Selatan, 21 Juni 2024 / South Tangerang, 21 June 2024



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur / President Director

Sudjono
Direktur Keuangan / Finance Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ekshibit A

Exhibit A

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 MEI 2024, 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 MAY 2024, 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
ASET					ASSETS
KAS DAN SETARA KAS	2e,f,4	1.394.669	1.739.659	1.073.255	CASH AND CASH EQUIVALENTS
PIUTANG PEMBIAYAAN					FINANCING RECEIVABLES
– setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 834.391, Rp 764.120 dan Rp 833.435 pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	2e,g,h,i 5	20.972.708	20.706.393	19.554.254	– net of allowance for Impairment losses of Rp 834,391, Rp 764,120 and Rp 833,435 as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022
PIUTANG IJARAH DAN IMBT					IJARAH AND IMBT RECEIVABLES
– setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.855, Rp 1.047 dan Rp 329 pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	2e,j,n,6	79.640	52.769	7.767	– net of allowance for impairment losses of Rp 2,855, Rp 1,047 and Rp 329 as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022
PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA	2e,k,7	339.523	250.715	162.635	OTHER RECEIVABLES – THIRD PARTIES
ASET DERIVATIF	2e,l,w,8	85.195	56.657	103.056	DERIVATIVE ASSETS
BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	2m,9	49.046	34.437	24.767	PREPAID EXPENSES AND ADVANCES
ASET TETAP					FIXED ASSETS
– setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 657.878, Rp 624.202 dan Rp 556.597 pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	2o,10	699.409	720.827	659.145	– net of accumulated depreciation of Rp 657,878, Rp 624,202 and Rp 556,597 as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022
ASET HAK-GUNA					RIGHT-OF-USE ASSETS
– setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 72.873, Rp 76.631 dan Rp 66.900 pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	2p,11	41.807	41.025	38.419	– net of accumulated depreciation of Rp 72,873, Rp 76,631 and Rp 66,900 as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022
ASET TAKBERWUJUD					INTANGIBLE ASSETS
– setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 203.345, Rp 174.496 dan Rp 120.637 pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	2q,12	236.351	255.166	139.499	– net of accumulated amortization of Rp 203,345, Rp 174,496 and Rp 120,637 as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022
ASET PAJAK TANGGUHAN	2r,14c	135.600	131.963	164.029	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	2e	2.321	1.824	2.808	OTHER ASSETS
JUMLAH ASET		<u>24.036.269</u>	<u>23.991.435</u>	<u>21.929.634</u>	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an
integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 MEI 2024, 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 MAY 2024, 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Pinjaman yang diterima – Pihak ketiga	2e,s,x,13	10.094.134	8.665.860	10.246.908	Fund borrowings – Third parties
Surat berharga yang diterbitkan – setelah dikurangi biaya emisi surat berharga yang belum diamortisasi sebesar Rp 5.557, Rp 9.225 dan Rp 3.510 pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	2e,t,15	3.117.443	4.720.775	1.581.490	Securities issued – net of unamortized securities issuance cost of Rp 5,557, Rp 9,225 and Rp 3,510 as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022
Beban akrual	2e,x,16	189.837	324.121	479.299	Accrued expenses
Utang dividen	2ac,18	407.446	788	1.522	Dividend payables
Utang pajak	2r,14a	19.705	199.717	263.269	Taxes payable
Utang lain-lain – Pihak ketiga	2e,19	470.674	437.423	489.352	Other payables – Third parties
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2u,17	159.413	142.955	111.885	Post-employment benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS		14.458.652	14.491.639	13.173.725	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent
Modal saham – nilai nominal Rp 25 (nilai penuh) per saham Modal dasar – 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.967.115.620 saham	20	399.178	399.178	399.178	Share capital – par value of Rp 25 (full amount) per share Authorized capital – 20,000,000,000 shares Issued and fully paid capital – 15,967,115,620 shares
Tambahan modal disetor – neto	21	609.459	609.459	609.459	Additional paid-in capital – net
Saham treasuri	2z,20	(232.957)	(232.957)	(232.957)	Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain (Kerugian) keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – neto	21,8,33	(72.526)	666	(10.267)	Other comprehensive income Cumulative (losses) gain on derivative instrument for cash-flows hedges – net
Keuntungan pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	2u,17,33	58.942	64.537	73.020	Gain on remeasurement of defined benefit actuarial program
Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya		125.000 8.689.866	120.000 8.538.215	115.000 7.801.690	Retained earnings Appropriated Unappropriated
Kepentingan nonpengendali		9.576.962 655	9.499.098 698	8.755.123 786	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		9.577.617	9.499.796	8.755.909	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		24.036.269	23.991.435	21.929.634	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Tangerang Selatan, 21 Juni 2024 / South Tangerang, 21 June 2024



Sudjono
Direktur Keuangan / Finance Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an
integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei/ May		31 Desember/ December		
		2024	2023	2023	2022	
PENDAPATAN						INCOME
Piutang pembiayaan	2e,g,h,v,22	2.408.521	2.534.966	5.933.842	5.052.248	Financing receivables
Keuangan	2e,v	22.678	24.321	82.564	22.870	Finance
Syariah	2e,i,j,v,23	58.438	41.374	108.662	65.157	Sharia
Lain-lain	2e,o,v,24	92.881	76.998	228.045	242.735	Others
Jumlah Pendapatan		2.582.518	2.677.659	6.353.113	5.383.010	Total Income
BEBAN						EXPENSES
Gaji dan tunjangan	2u,v,25,29	(650.313)	(608.586)	(1.457.103)	(1.324.648)	Salaries and benefits
Beban bunga dan keuangan	2e,s,t,v,26	(391.649)	(379.200)	(951.310)	(624.099)	Interest and financing charges
Umum dan administrasi	2m,o,p,q,r,27	(365.154)	(346.986)	(870.505)	(771.052)	General and administrative
Cadangan kerugian penurunan nilai Piutang pembiayaan	2e,v,5	(404.187)	(421.501)	(785.034)	(367.235)	Provision for impairment losses
Piutang ijarah dan IMBT	2e,v,6	(1.890)	(427)	(1.015)	(223)	Financing receivables
Lain-lain	2e,v,28,37	(75.582)	(70.303)	(262.894)	(57.072)	Ijarah and IMBT receivables
Jumlah Beban		(1.888.775)	(1.827.003)	(4.327.861)	(3.144.329)	Total Expenses
LABA SEBELUM PAJAK		693.743	850.656	2.025.252	2.238.681	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	2r,14b	(131.072)	(164.726)	(381.453)	(432.002)	Income Tax Expenses
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		562.671	685.930	1.643.799	1.806.679	PROFIT FOR THE PERIOD/ YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi						Items that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	21,8,33	(90.360)	16.674	13.498	26.409	Effective portion of the fair value change of the derivative instrument - cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait	14c,33	17.168	(3.168)	(2.565)	(5.018)	Related income tax
		(73.192)	13.506	10.933	21.391	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Items that will not be reclassified to profit or loss
Kerugian pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	2u,17,33	(6.907)	(278)	(10.468)	(8.979)	Loss on remeasurement of defined benefit actuarial program
Pajak penghasilan terkait	14c,33	1.312	53	1.986	1.713	Related income tax
		(5.595)	(225)	(8.482)	(7.266)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/ TAHUN BERJALAN - Setelah Pajak		(78.787)	13.281	2.451	14.125	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR - Net of Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN		483.884	699.211	1.646.250	1.820.804	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an
integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B/2

Exhibit B/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/	31 Mei/May		31 Desember/ December Notes 2024		
	2023	2023	2022	2022	
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					PROFIT FOR THE PERIOD/ YEAR ATTRIBUTTABLE TO:
Pemilik entitas induk	562.714	685.939	1.643.888	1.806.680	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(43)	(9)	(89)	(1)	Non-controlling interests
	<u>562.671</u>	<u>685.930</u>	<u>1.643.799</u>	<u>1.806.679</u>	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR ATTRIBUTTABLE TO:
Pemilik entitas induk	483.927	699.220	1.646.338	1.820.807	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	(43)	(9)	(88)	(3)	Non-controlling interests
	<u>483.884</u>	<u>699.211</u>	<u>1.646.250</u>	<u>1.820.804</u>	
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2ab,32	37	46	109	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)
				121	

Tangerang Selatan, 21 Juni 2024 / South Tangerang, 21 June 2024



Sudjono
Direktur Keuangan / Finance Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which
are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C

Exhibit C

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE LIMA
BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31
DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE
FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED) AND THE
YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent											
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - neto/ Additional paid-in capital - net	Saham treasury/ Treasury stock	Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai aruskas - neto/ Cumulative gain (loss) on derivative instrument for cash flows hedges - net	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti/ Gain (loss) on remeasurement of defined benefit actuarial program	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah sebelum kepentingan nonpengendali/ Total before non-controlling interests	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
						Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
189 Saldo per 31 Desember 2023	399.178	609.459	(232.957)	666	64.537	120.000	8.538.215	9.499.098	698	9.499.796	Balance as of 31 December 2023
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan											Total comprehensive income for the period Profit for the period
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	562.714	562.714	(43)	562.671	
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak:											Other comprehensive income, net of tax:
Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas	21,8	-	-	(73.192)	-	-	-	(73.192)	-	(73.192)	Effective portion of cash-flows hedges
Kerugian pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	2u,17	-	-	-	(5.595)	-	-	(5.595)	-	(5.595)	Loss on remeasurement of defined benefit actuarial program
		-	-	(73.192)	(5.595)	-	562.714	483.927	(43)	483.884	
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	18	-	-	-	-	5.000	(5.000)	-	-	-	Appropriation for general reserve
Dividen kas tahun 2023	2ac,18	-	-	-	-	-	(406.063)	(406.063)	-	(406.063)	Cash dividend of 2023
Saldo per 31 Mei 2024	399.178	609.459	(232.957)	(72.526)	58.942	125.000	8.689.866	9.576.962	655	9.577.617	Balance as of 31 May 2024

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE LIMA
BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31
DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE FIVE-
MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED) AND
THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

190

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent											
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - neto/ Additional paid-in capital - net	Saham treasury/ Treasury Stock	Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto/ Cumulative gain (loss) on derivative instrument for cash flows hedges - net	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti/ Gain (loss) on remeasurement of defined benefit actuarial program	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah sebelum kepentingan nonpengendali/ Total before noncontrolling interests	Kepentingan nonpengendali/ Noncontrolling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
						Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo per											Balance as of 31
31 Desember 2022	399.178	609.459	(232.957)	(10.267)	73.020	115.000	7.801.690	8.755.123	786	8.755.909	December 2022
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan											Total comprehensive income for the period
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	685.939	685.939	(9)	685.930	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak:											Other comprehensive income, net of tax
Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas	21,8	-	-	-	13.506	-	-	13.506	-	13.506	Effective portion of cash-flows hedges
Kerugian pengukuran kembali program aktuarial											Loss on remeasurement of defined benefit actuarial program
manfaat pasti	2u,17	-	-	-	(225)	-	-	(225)	-	(225)	
		-	-	-	13.506	(225)	685.939	699.220	(9)	699.211	
Dividen kas tahun 2022	2ac,18	-	-	-	-	-	(481.260)	(481.260)	-	(481.260)	Cash dividend of 2022
Saldo per 31 Mei 2023	399.178	609.459	(232.957)	3.239	72.795	115.000	8.006.369	8.973.083	777	8.973.860	Balance as of 31 May 2023

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE LIMA
BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31
DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE FIVE-
MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED) AND THE
YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent											
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahkan modal disetor - neto/ Additional paid-in capital - net	Saham treasury/ Treasury stock	Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto/ Cumulative loss on derivative instrument for cash flows hedges - net	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti/ Gain (loss) on remeasurement of defined benefit actuarial program	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah sebelum kepentingan nonpengendali/ Total before non-controlling interests	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
						Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo per 31 Desember 2022	399.178	609.459	(232.957)	(10.267)	73.020	115.000	7.801.690	8.755.123	786	8.755.909	Balance as of 31 December 2022
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan											Total comprehensi ^{ve} income for the year
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1.643.888	1.643.888	(89)	1.643.799	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak: Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas	2l,8	-	-	-	10.933	-	-	10.933	-	10.933	Other comprehensive income, net of tax: Effective portion of cash flows hedges
Kerugian pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	2u,17	-	-	-	(8.483)	-	-	(8.483)	1	(8.482)	Loss on remeasurement of defined benefit actuarial program
		-	-	-	10.933	(8.483)	-	1.646.338	(88)	1.646.250	
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	18	-	-	-	-	5.000	(5.000)	-	-	-	Appropriation for general reserve
Dividen tunai tahun 2022	2ac,18	-	-	-	-	-	(481.260)	(481.260)	-	(481.260)	Cash dividend of 2022
Dividen tunai interim tahun berjalan		-	-	-	-	-	(421.103)	(421.103)	-	(421.103)	Interim cash dividend for the year
Saldo per 31 Desember 2023	399.178	609.459	(232.957)	666	64.537	120.000	8.538.215	9.499.098	698	9.499.796	Balance as of 31 December 2023

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE LIMA
BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31
DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE FIVE-
MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED) AND THE
YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

192

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent											
		Tambahan modal		Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto/ Cumulative	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti/ Gain (loss) on	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah sebelum			
Catatan/	Modal saham/ Share	disetor - neto/ Additional paid-in	Saham treasuri/ Treasury	gain (loss) on derivative instrument for cash flows	remeasurement of defined benefit actuarial	Telah ditentukan penggunaannya/	Belum ditentukan penggunaannya/	kepentingan nonpengendali/ Total before noncontrolling interests	Kepentingan nonpengendali/ Noncontrolling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Notes	capital	capital - net	Stock	hedges - net	program	Appropriated	Unappropriated				
Saldo per											Balance as of
31 Desember 2021	399.178	553.286	(252.160)	(31.658)	80.284	110.000	6.570.757	7.429.687	539	7.430.226	31 December 2021
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan											Total comprehensive income for the year Profit for the year
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1.806.680	1.806.680	(1)	1.806.679	
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak:											Other comprehensive income, net of tax:
Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas kerugian pengukuran kembali	21,8	-	-	-	21.391	-	-	21.391	-	21.391	Effective portion of cash-flows hedges
program aktuarial manfaat pasti	2u,17	-	-	-	(7.264)	-	-	(7.264)	(2)	(7.266)	Loss on remeasurement of defined benefit actuarial program
		-	-	-	21.391	(7.264)	-	1.806.680	1.820.807	(3)	1.820.804
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan nonpengendali									250	250	Issuance of subsidiary's share to non-controlling interests
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	18	-	-	-	-	5.000	(5.000)	-	-	-	Appropriation for general reserve
Dividen kas tahun 2021	2ac,18	-	-	-	-	-	(570.747)	(570.747)	-	(570.747)	Cash dividend of 2021
Program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan		-	56.173	19.203	-	-	-	75.376	-	75.376	Management and employee stock ownership program
Saldo per											Balance as of
31 Desember 2022	399.178	609.459	(232.957)	(10.267)	73.020	115.000	7.801.690	8.755.123	786	8.755.909	31 December 2022

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei/May 2024	2023	31 Desember/December 2023	2022	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:						Cash received from:
Transaksi pembiayaan	5,22,23	10.100.844	9.792.943	24.472.851	22.232.359	Financing transactions
Pembiayaan bersama	5,31	257.177	329.718	646.855	105.581	Joint financing
Penghasilan jasa giro dan deposito berjangka		20.137	21.493	80.744	24.211	Interest income from current accounts and time deposits
Lain-lain	24	95.906	98.266	212.989	243.739	Others
Pengeluaran kas untuk:						Cash disbursement for:
Transaksi pembiayaan baru	5,22,23	(8.523.693)	(9.714.255)	(21.292.704)	(23.346.729)	New financing transactions
Beban umum dan administrasi	2v	(1.167.889)	(1.084.432)	(2.223.972)	(1.757.063)	General and administrative
Pembiayaan bersama	31a	(188.396)	(56.018)	(255.576)	(47.050)	Joint financing
Beban bunga dan keuangan	2v	(408.319)	(391.044)	(964.384)	(629.813)	Interest and financing charges
Pembayaran pajak penghasilan		(205.899)	(275.221)	(400.126)	(346.829)	Income taxes paid
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas operasi		(20.132)	(1.278.550)	276.677	(3.521.594)	Net cash flows (for) from operating activities
ARUS KAS UNTUK						CASH FLOWS FOR
AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	10	17.064	7.588	27.380	31.632	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	10	(42.139)	(78.949)	(192.943)	(164.033)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset takberwujud	12	(10.034)	(42.973)	(169.526)	(105.798)	Acquisition of intangible assets
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi		(35.109)	(114.334)	(335.089)	(238.199)	Net cash flows for investing activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:						Cash received from:
Pinjaman yang diterima	13,34	3.976.110	2.867.514	4.988.647	10.327.231	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan		-	2.700.000	3.800.000	-	Securities issued
Penerimaan setoran modal dari kepentingan nonpengendali		-	-	-	250	Receipts of paid-in capital from noncontrolling interests
Pengeluaran kas untuk:						Cash disbursement for:
Pinjaman yang diterima	13,34	(2.658.859)	(3.120.466)	(6.506.468)	(4.982.868)	Fund borrowings
Pelunasan pokok surat berharga yang diterbitkan	15,34	(1.607.000)	-	(655.000)	(910.000)	Repayment of securities issued principal
Dividen tunai		-	-	(902.363)	(570.747)	Cash dividend
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan		(289.749)	2.447.048	724.816	3.863.866	Net cash flows (for) from financing activities
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS (Saldo dipindahkan)		(344.990)	1.054.164	666.404	104.073	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (Balance brought-forward)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an
integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D/2

Exhibit D/2

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) AND 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei/May		31 Desember/December		
		2024	2023	2023	2022	
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS (Saldo pindahan)		(344.990)	1.054.164	666.404	104.073	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (Balance carry-forward)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/ TAHUN		1.739.659	1.073.255	1.073.255	969.182	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD/ YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/ TAHUN		1.394.669	2.127.419	1.739.659	1.073.255	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD/ YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:						CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:
Kas dan bank	4	678.646	1.198.677	897.633	803.732	Cash on hand and in banks
Deposito berjangka	4	716.023	928.742	842.026	269.523	Time deposits
		1.394.669	2.127.419	1.739.659	1.073.255	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E
terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an
integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT BFI Finance Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia pada tanggal 7 April 1982 berdasarkan Akta No. 57 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT01.01.TH82 tanggal 28 Oktober 1982 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390. Berdasarkan Akta No. 54 yang dibuat di hadapan Inge Hendarmin, S.H., pengganti dari Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 17 September 1986, nama Perusahaan diubah dari PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia menjadi PT Bunas Intitama Leasing Indonesia, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6977-HT.01.04.TH.86 tanggal 7 Oktober 1986 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 94 tanggal 25 November 1986, Tambahan No. 1451. Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 22 November 1989 Akta No. 27 tanggal 8 Maret 1990 keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., nama Perusahaan diubah dari PT Bunas Intitama Leasing Indonesia menjadi PT Bunas Finance Indonesia, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1441-HT.01.04.TH.90 tanggal 13 Maret 1990 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1990, Tambahan No. 1537. Berdasarkan Akta No. 37 yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 8 Agustus 1996, nama Perusahaan diubah dari PT Bunas Finance Indonesia menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9625-HT.01.04.TH.96 tanggal 21 Oktober 1996 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 7 Februari 1997, Tambahan No. 552. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya berdasarkan Akta No. 116 tanggal 27 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nama Perusahaan dari PT Bunas Finance Indonesia Tbk menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03668-HT.01. 04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 35 tanggal 30 April 2002, Tambahan No. 4195.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information of the Company

PT BFI Finance Indonesia Tbk (the "Company") was established as PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia on 7 April 1982 based on Notarial Deed No. 57 of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-2091-HT01.01.TH82 dated 28 October 1982 and was published in the State Gazette No. 102, dated 21 December 1982, Supplement No. 1390. Based on Notarial Deed No. 54 of Inge Hendarmin, S.H., a substitute of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta dated 17 September 1986, the Company's name changed from PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia to PT Bunas Intitama Leasing Indonesia, this amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-6977-HT.01.04.TH.86 dated 7 October 1986 and was published in the State Gazette No. 94 dated 25 November 1986, Supplement No. 1451. Based on Notarial Deed No. 80 dated 22 November 1989, Deed No. 27 dated 8 March 1990, both of which were made before Kartini Muljadi, S.H. the Company's name changed from PT Bunas Intitama Leasing Indonesia to PT Bunas Finance Indonesia, this amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-1441-HT.01.04.TH.90 dated 13 March 1990 and was published in the State Gazette No. 34 dated 28 April 1990, Supplement No. 1537. Based on Deed No. 37 which were made before Achmad Abid, S.H., a substitute of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta dated 8 August 1996, the name of the Company was changed from PT Bunas Finance Indonesia to PT Bunas Finance Indonesia Tbk, a change which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C2-9625-HT.01.04.TH.96 dated 21 October 1996 and was published in the State Gazette No. 11 dated 7 February 1997, Supplement No. 552. The Company's Articles of Association has been amended several times, which one of the amendments was based on Notarial Deed No. 116 dated 27 June 2001 of Aulia Taufani, S.H., a substitute of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, in connection with the change of name of the Company from PT Bunas Finance Indonesia Tbk to PT BFI Finance Indonesia Tbk. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-03668-HT.01.04.TH.2001 dated 24 July 2001 and was published in the State Gazette No. 35 dated 30 April 2002, Supplement No. 4195.

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. **UMUM** (Lanjutan)

a. **Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan** (Lanjutan)

Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 19 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0271122 tanggal 27 Juli 2022 serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan nomor AHU-0052483.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2022, Tambahan No. 31534.

Perusahaan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982, yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990.

Pada tanggal 20 Februari 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengamandemen izin usaha Perusahaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-038/KM.5/2006.

Melalui amandemen ini, izin usaha yang sebelumnya diberikan kepada PT Bunas Finance Indonesia Tbk berlaku surut sejak adanya persetujuan perubahan nama Perusahaan dari PT Bunas Finance Indonesia Tbk menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk dari instansi yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

I. Usaha Pembiayaan:

- a. Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

II. Usaha Pembiayaan Syariah:

- a. Pembiayaan jual beli
- b. Pembiayaan investasi
- c. Pembiayaan jasa

1. **GENERAL** (Continued)

a. **Establishment and General Information of the Company** (Continued)

The latest amendment based on Deed No. 19 dated 29 June 2022 made before Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang District, regarding approval for amendment to Article 3 and Article 15 of the Company's articles of association, which has been accepted and recorded in Legal Entity Administration System Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Receipt of Notification of Amendments to Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0271122 dated 27 July 2022 and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree Number AHU-0052483.AH.01.02.Tahun 2022 dated 27 July 2022 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia of Republic No. 74 dated 16 September 2022, Supplement No. 31534.

The Company obtained its license to operate as a financing company from the Minister of Finance by virtue of his decree No. KEP-038/KM.11/1982 dated 12 August 1982 as amended by Decree No. 493/KMK.013/1990 dated 23 April 1990.

On 20 February 2006, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia amended the Company's license in its decision letter No. KEP-038/KM.5/2006.

Through this amendment, the previous license granted to PT Bunas Finance Indonesia Tbk was applied for retroactively since the approval of the change in the name of the Company from PT Bunas Finance Indonesia Tbk to PT BFI Finance Indonesia Tbk from the regulatory authority in its decision letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-03668.HT.01.04.TH.2001 dated 24 July 2001.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company may carry out the following main business activities:

I. Financing:

- a. Investment financing
- b. Working capital financing
- c. Multipurpose financing
- d. Other financing activities under the approval of the Financial Service Authority

II. Sharia Financing:

- a. Financing sale and purchase
- b. Investment financing
- c. Financing services

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. **UMUM** (Lanjutan)

a. **Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan** (Lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan dan pengembangan, antara lain menambah jaringan usaha, membangun infrastruktur dan kegiatan lain yang mendukung usaha dan kinerja Perusahaan.
- Melakukan kegiatan mencari dan/atau memperoleh sumber pendanaan.
- Melakukan segala perbuatan pemilikan dan sewa menyewa dengan pihak lain.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan kegiatan usaha utama.
- Sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1982. Kantor pusat Perusahaan terletak di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan.

Untuk menjalankan usaha pembiayaan syariah, Perusahaan telah menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-27/ NB.223/2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perusahaan dan keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 8 Februari 2018.

Perusahaan dan entitas anaknya mempunyai kantor cabang, gerai dan kantor cabang syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December		
		2023	2022	
Kantor cabang	193	195	203	Branches
Gerai	31	31	34	Kiosk
Cabang Syariah	45	45	45	Sharia Branches
Jumlah	269	271	282	Total

b. **Penawaran Umum Saham Perusahaan**

Pada tahun 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas 2.125.000 sahamnya dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham melalui bursa efek di Indonesia dengan harga penawaran sejumlah Rp 5.750 (nilai penuh) per saham. Pada tahun 1993, Perusahaan melakukan penawaran tambahan sebanyak 8.500.000 saham dengan nilai nominal per saham yang sama melalui bursa efek di Indonesia.

1. **GENERAL** (Continued)

a. **Establishment and General Information of the Company** (Continued)

To achieve the above-mentioned purpose and objective, and to support its main business activities, the Company may conduct supporting business activities as follows:

- To undertake planning and development, among others, to increase business network, build infrastructure, and other activities that support the business and performance of the Company.
- To conduct activities to seek and/or obtain funding sources
- To carry out all ownership and lease activities with other parties.
- To carry out other activities needed to support and/or related to the main business activities.
- To provide operating lease and/or fee-based service as long as it is not against the stipulations and laws in financial services sector.

The Company started its commercial operations in 1982. The Company's registered office is located at BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, South Tangerang.

To undertake a sharia financing business, the Company has received a copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Service Authority Number Kep-27/NB.223/2018 concerning the License to Open Sharia Business Unit to the Company and the Decree effective on 8 February 2018.

The Company and its subsidiary have branches, kiosk and sharia branch throughout Indonesia as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 as follow:

b. **Public Offering of the Company's Shares**

In 1990, the Company conducted an initial public offering of its 2,125,000 shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share through the stock exchanges in Indonesia at an offering price of Rp 5,750 (full amount) per share. In 1993, the Company offered an additional of 8,500,000 shares at the same par value per share through a stock exchange in Indonesia.

Ekshibit E/4

Exhibit E/4

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. **UMUM** (Lanjutan)

b. **Penawaran Umum Saham Perusahaan** (Lanjutan)

Pada tanggal 8 April 1993, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen saham dengan dasar 1 (satu) saham baru untuk 10 (sepuluh) saham yang dimiliki, sebanyak 1.062.500 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan juga menyetujui untuk menerbitkan saham bonus dengan dasar 17 (tujuh belas) saham baru untuk setiap 20 (dua puluh) saham yang dimiliki, sebanyak 9.934.668 saham dengan nilai nominal yang sama. Pada tanggal 22 Januari 1994, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen saham dengan dasar 1 (satu) saham baru untuk 3 (tiga) saham yang dimiliki, sebanyak 7.207.390 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 18 April 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/BAPEPAM-LK dan terakhir dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan/OJK) (BAPEPAM) melalui surat No. S-639/PM/1994 dalam rangka penawaran umum terbatas pertama (I) Perusahaan sebanyak 28.829.558 saham dengan harga penawaran sejumlah Rp 1.500 (nilai penuh) per saham dimana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 1 (satu) saham baru. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 1997, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK melalui surat No. S-71/PM/1997 dalam rangka penawaran umum terbatas kedua Perusahaan sebanyak 115.318.232 saham dengan harga penawaran Rp 1.000 (nilai penuh) per saham dimana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 2 (dua) saham baru.

Pada tanggal 17 Juni 1997, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 500 (nilai penuh) per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari sebanyak 172.977.348 saham menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

Dalam rangka restrukturisasi utang, para pemegang saham Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 27 Januari 2000 menyetujui penerbitan *Mandatory Convertible Bonds* atau Obligasi Wajib Konversi (MCB) yang wajib dikonversikan menjadi sebanyak 414.384.585 saham Perusahaan.

Pada bulan Mei 2006, seluruh MCB telah dikonversi menjadi sebanyak 414.384.585 saham biasa sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi sebanyak 760.339.281 saham pada tanggal 31 Desember 2006.

1. **GENERAL** (Continued)

b. **Public Offering of the Company's Shares** (Continued)

On 8 April 1993, the shareholders of the Company approved to distribute share dividends on the basis of 1 (one) new share for every 10 (ten) shares held totaling 1,062,500 shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share. On the same date, the shareholders of the Company also approved to issue bonus shares on the basis of 17 (seventeen) new shares for every 20 (twenty) shares held totaling 9,934,668 shares at the same par value. On 22 January 1994, the shareholders of the Company approved to distribute share dividends on the basis of 1 (one) new share for every 3 (three) shares held totaling 7,207,390 shares at a par value of Rp 1,000 (full amount) per share.

On 18 April 1994, the Company received effective statement from the Capital Market Supervisory Board (was then changed to Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency/BAPEPAM-LK and recently known as the Financial Services Authority/OJK) (BAPEPAM) through letter No. S-639/ PM/1994 to conduct the first rights issue of the Company's shares on a 1 (one) for 1 (one) basis totaling 28,829,558 shares at an offering price of Rp 1,500 (full amount) per share. Moreover, on 17 January 1997, the Company received effective statement from the BAPEPAM-LK through letter No. S-71/PM/1997 to conduct the second rights issue of the Company's shares on the basis of 2 (two) new shares for every 1 (one) shares held totaling 115,318,232 shares at an offering price of Rp 1,000 (full amount) per share.

On 17 June 1997, the shareholders of the Company approved a stock split, resulting in a change in par value per share from Rp 1,000 (full amount) to Rp 500 (full amount), thus resulting in the increase in number of the Company's subscribed shares from 172,977,348 shares to 345,954,696 shares.

In respect with the debt restructuring, the Company's shareholders through Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 27 January 2000 approved to issue the Mandatory Convertible Bonds (MCB) which should be converted into 414,384,585 shares of the Company.

In May 2006, all of the MCB was converted into common shares totaling 414,384,585 shares, thus resulting in a total outstanding number of the Company's shares of 760,339,281 shares as of 31 December 2006.

Ekshibit E/5

Exhibit E/5

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. **UMUM** (Lanjutan)

b. **Penawaran Umum Saham Perusahaan** (Lanjutan)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta notaris No. 65 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp 500 (nilai penuh) per saham menjadi sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 760.339.281 saham menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham, dan menyetujui untuk mengubah Pasal 15 ayat 3b mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Pemecahan saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 31 Juli 2012.

RUPSLB tersebut juga telah menyetujui penerbitan saham untuk pelaksanaan program *Management & Employee Stock Option Program (MESOP)* untuk Tahap I di BEI sebanyak 60.826.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham untuk periode sampai dengan tanggal 20 Juni 2014. BEI melalui suratnya No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 6 Juli 2012 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap I tersebut secara pra-pencatatan di BEI.

Pada tanggal 31 Mei 2013, 30 Mei 2014, 29 Mei 2015, dan 31 Mei 2016, Perusahaan telah menerbitkan saham baru masing-masing sebanyak 5.936.000, 23.320.000, 16.025.000 dan 30.752.000 saham sebagai pelaksanaan *Management & Employee Stock Option Program (MESOP)* untuk Tahap I – *Grant Date* 1 dan 2, dan Tahap II – *Grant Date* 1 dan 2, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.596.711.562 saham pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 18 pada tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP untuk tahap II untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dengan harga pelaksanaan yang mengacu kepada sebagaimana diatur dalam butir V.I Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

BEI melalui suratnya No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 tertanggal 6 Juni 2014 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap II secara pra-pencatatan di BEI sebanyak-banyaknya 46.777.000 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.205 (nilai penuh) per saham.

1. **GENERAL** (Continued)

b. **Public Offering of the Company's Shares** (Continued)

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 65 dated 21 June 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the amendment to Paragraphs 1 and 2 of Article 4 of the Articles of Association concerning the changes in par value of the Company's share (stock split) from Rp 500 (full amount) to Rp 250 (full amount) per share, thus, resulting in the increase in number of the Company's shares outstanding from 760,339,281 shares to 1,520,678,562 shares, and Paragraph 3b of Article 15, concerning the Duties and Authorities of the Directors.

The stock split was approved by the BEI through letter No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 dated 31 July 2012.

The EGM had also approved the issuance of shares for the implementation of the Phase I of the Management & Employee Stock Option Program (MESOP) on the Indonesia Stock Exchange, totaling 60,826,400 shares with par value of Rp 250 (full amount) per shares, up 20 June 2014. BEI through its letter No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 dated 6 July 2012 had approved the Company's pre-listing of its MESOP on the Indonesia Stock Exchange for the implementation of phase I.

On 31 May 2013, 30 May 2014, 29 May 2015, and 31 May 2016, the Company has issued the additional 5,936,000, 23,320,000, 16,025,000 and 30,752,000 shares, respectively, for the implementation of the MESOP for Phase I – Grant Date 1 and 2, and Phase II – Grant Date 1 and 2, for options that has been exercised, thus resulting in a total outstanding number of the Company's shares of 1,596,711,562 shares as of 31 December 2016.

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 18 dated 6 May 2014 of Aryanti Artisari, S.H., Notary in Jakarta, had approved the issuance of new shares the results of the implementations of the MESOP program phase II up to 30 June 2016 with exercised price which referred to point V.I Listing Regulation No. I-A as included in the Appendix II of the Decision Decree of virtue of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated on 20 January 2014.

BEI through its letter No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 dated 6 June 2014 approved the registration of the Company's pre-listing of its MESOP on the Stock Exchange for the implementation of phase II maximum 46,777,000 shares with exercised price Rp 2,205 (full amount) per share.

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. **UMUM** (Lanjutan)

c. **Entitas Anak Yang Dikonsolidasikan** (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0439070 tanggal 20 Agustus 2021, mengenai Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar 25.000 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp 25.000.000.000 (nilai penuh). Dengan demikian setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor FIT menjadi 50.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000 (nilai penuh).

Peningkatan modal disetor FIT berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, telah dilaporkan kepada OJK dan telah dicatat dalam administrasi Direktorat Perizinan Industri Keuangan Non Bank dan Inovasi Keuangan Digital dalam surat No. S-1141/NB.223/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Geraldine H.S.S.U. Sianturi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0055755.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.09-0041558 tanggal 8 Agustus 2022, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha disesuaikan dengan KBLI 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan alamat lengkap Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 10 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Geraldine H.S.S.U. Sianturi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0497389 tanggal 29 Desember 2022 mengenai Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh sebesar 25.000 saham atau dengan nilai nominal seluruh Rp 25.000.000.000 (nilai penuh). Dengan demikian setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor FIT menjadi 75.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 75.000.000.000 (nilai penuh).

Peningkatan modal disetor FIT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) No. 10 tanggal 28 Desember 2022 tersebut, telah dilaporkan kepada OJK dan telah dicatat dalam administrasi Direktorat Perizinan Industri Keuangan Non Bank dan Inovasi Keuangan Digital dalam surat No. S-2193/NB.021/2023 tanggal 14 Juni 2023.

1. **GENERAL** (Continued)

c. **Consolidated Subsidiary** (Continued)

Based on Deed of Meeting Decision Letter No. 6 dated 5 August 2021 made before Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang District, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0439070 dated 20 August 2021, regarding Changes in the Increase in Issued and Paid-Up Capital of 25,000 shares or with a total nominal value of Rp 25,000,000,000 (full amount). Thus, after the increase in the issued and paid-up capital of the FIT to 50,000 shares with a total nominal value of Rp 50,000,000,000 (full amount).

The increase in the paid-up capital of FIT based on Notarial Deed No. 6 dated 5 August 2021, has been reported to the OJK and has been recorded in the administration of the Directorate of Licensing for the Non-Bank Financial Industry and Digital Financial Innovation in letter No. S-1141/NB.223/2021 dated 29 December 2021.

Based on Deed of Meeting Decision Letter No. 1 dated 5 August 2022 made before Geraldine H.S.S.U. Sianturi S.H., M.Kn, Notary in South Tangerang District, which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0055755.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 8 August 2022 and has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU.AH.01.09-0041558 dated 8 August 2022, regarding changes to purpose, objectives and business activities and business activities adjusted to the 2020 KBLI, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners and the address of the Company.

Based on the Deed of Statement of Resolutions of Shareholders Outside the Meeting No. 10 dated 28 December 2022 made before Geraldine H.S.S.U. Sianturi, S.H., M.Kn, Notary in South Tangerang City, which has been received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.03-0497389 dated 29 December 2022 regarding Changes in the Increase in Issued and Fully Paid-Up Capital of 25,000 shares or with a total nominal value of Rp 25,000,000,000 (full amount). Thus, after the increase in the issued and paid-up capital of the FIT to 75,000 shares with a total nominal value of Rp 75,000,000,000 (full amount).

The increase in the paid-up capital of FIT based on the Deed of Statement of Resolutions of the Shareholders Outside the Meeting (Circular) No. 10 dated 28 December 2022, has been reported to the OJK and has been recorded in the administration of the Directorate of Licensing for the Non-Bank Financial Industry and Financial Innovation Digital in letter No. S-2193/NB.021/2023 dated 14 June 2023.

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. **UMUM** (Lanjutan)

c. **Entitas Anak Yang Dikonsolidasikan** (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No.6 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Geraldine H.S.S.U. Sianturi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0115544 tanggal 10 Mei 2023 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Sehingga pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Mei/ <u>May 2024</u>	31 Desember/ <u>December 2023</u>
<u>Dewan Komisaris</u>		
Presiden Komisaris	:	Francis Lay Sioe Ho Sudjono
Komisaris	:	
<u>Direksi</u>		
Presiden Direktur	:	Tjiu Herman Handoko
Direktur	:	Ichwan Peryana
Direktur	:	-

d. **Entitas Induk**

Trinugraha Capital & Co. SCA., merupakan pengendali langsung Perusahaan dimana Garibaldi Thohir dan Jerry Ng selaku pemegang saham Trinugraha Capital & Co. SCA. merupakan Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*) Perusahaan.

e. **Pembelian Kembali (BuyBack) Saham Perusahaan**

Pada tanggal 15 April 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak 10% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 saham (sebelum pemecahan saham). Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak RUPSLB adalah tidak lebih dari Rp 341.000.

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang diperkenankan berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK No. XI.B.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Per tanggal 15 Oktober 2016, program pembelian kembali saham ini dinyatakan berakhir dan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan adalah sebanyak 1.002.732.000 saham (setelah pemecahan saham) dengan nilai pembelian sebesar Rp 252.160.

Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perusahaan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan dimana pelaksanaannya diharapkan akan meningkatkan nilai laba bersih per saham *Earnings per Share* (EPS).

1. **GENERAL** (Continued)

c. **Consolidated Subsidiary** (Continued)

Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions Shareholders Outside the Meeting No. 6 dated 8 May 2023 made before Geraldine H.S.S.U. Sianturi, S.H., M.Kn, Notary in South Tangerang City, which has been received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.09-0115544 dated 10 May 2023 regarding changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors. Therefore, as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

	31 Desember/ December 2022		31 Desember/ December 2023
		Board of Commissioners	
Francis Lay Sioe Ho :	President Commissioner		
Sudjono :	Commissioner		
		Board of Directors	
Tjiu Herman Handoko :	President Director		
Ichwan Peryana :	Director		
Agus Gozali :	Director		

d. **Parent Entity**

Trinugraha Capital & Co. SCA., is the Company's controlling parent entity, where Garibaldi Thohir and Jerry Ng as the owner of Trinugraha Capital & Co. SCA are the Ultimate Beneficiary Owner of the Company.

e. **Treasury Shares**

On 15 April 2015, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) approved the buyback of outstanding shares of the Company up to a maximum of 10% of the total shares issued and fully paid-up capital of the Company or amounted of 154,993,456 shares (before stock split). The funds reserved to repurchase shares for a maximum period of 18 (eighteen) months from the EGMS should not more than Rp 341,000.

The Company has bought back its shares publicly traded on the Indonesia Stock Exchange, as allowed based on The Regulation of BAPEPAM-LK No. XI.B.2 Attachment to The Decree of The Chairman of BAPEPAM-LK No. Kep-105/BL/2010 dated 13 April 2010 regarding the Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies.

As of 15 October 2016, the shares buy back program was officially ended and total shares bought back by the Company was totaling 1,002,732,000 shares (after stock split) for a total purchase price of Rp 252,160.

This repurchase transaction was intended to increase the Company's capital management where the implementation expected to increase the value of Earnings per Share (EPS).

Ekshibit E/9

Exhibit E/9

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM** (Lanjutan)

f. **Surat Berharga yang Diterbitkan**

Surat berharga yang diterbitkan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Surat berharga/ Securities	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ Listing date	Tanggal efektif/ Effective date	Total emisi/ Amount issued	Jumlah per seri obligasi/ Amount per serial	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia						
Total limit : (Rp 8.000.000)		7 Juni/ June 2018 (No.S-67/D.04/2018)				
Tahap I Tahun 2018	27 Juni/ June 2018		740.000			
Seri/Serial A:				188.000	6 Juli/ July 2019	Lunas/Paid
Seri/Serial B:				552.000	26 Juni/ June 2021	Lunas/Paid
Tahap II Tahun 2019	25 Februari/ February 2019		1.000.000			
Seri/Serial A:				500.000	2 Maret/ March 2020	Lunas/Paid
Seri/Serial B:				500.000	22 Februari/ February 2022	Lunas/Paid
Tahap III Tahun 2020	8 September 2020		832.000			
Seri/Serial A:				437.000	18 September 2021	Lunas/Paid
Seri/Serial B:				395.000	8 September 2023	Lunas/Paid
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia						
Total limit : (Rp 6.000.000)		21 Mei/ May 2021 (No.S-66/D.04/2021)				
Tahap I Tahun 2021	31 Mei/ May 2021		600.000			
Seri/Serial A:				200.000	8 Juni/ June 2022	Lunas/Paid
Seri/Serial B:				400.000	28 Mei/ May 2024	Lunas/Paid
Tahap II Tahun 2021	9 Agustus/ August 2021		1.000.000			
Seri/Serial A:				210.000	16 Agustus/ August 2022	Lunas/Paid
Seri/Serial B:				260.000	6 Agustus/ August 2023	Lunas/Paid Belum
Seri/Serial C:				530.000	6 Agustus/ August 2024	jatuh tempo/ Not yet due
Tahap III Tahun 2023	30 Januari/ January 2023		1.100.000			
Seri/Serial A:				617.000	7 Februari/ February 2024	Lunas/Paid
Seri/Serial B:				227.000	27 Januari/ January 2025	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Serial C:				256.000	27 Januari/ January 2026	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Tahap IV Tahun 2023	17 April 2023		1.600.000			
Seri/Serial A:				590.000	24 April 2024	Lunas/Paid Belum
Seri/Serial B:				385.000	14 April 2025	jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Serial C:				625.000	14 April 2026	Belum jatuh tempo/ Not yet due

Ekshibit E/10

Exhibit E/10

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM** (Lanjutan)

f. **Surat Berharga yang Diterbitkan** (Lanjutan)

Surat berharga yang diterbitkan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Surat berharga/ Securities	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ Listing date	Tanggal efektif/ Effective date	Total emisi/ Amount issued	Jumlah perseri obligasi/ Amount per serial	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status
Tahap V Tahun 2023 Seri/Serial A:	16 Juni/ June 2023		1.100.000	250.000	25 Juni/ June 2024	Belum jatuh tempo/ Not yet due
Seri/Serial B:				850.000	15 Juni/ June 2026	Belum jatuh tempo/ Not yet due

g. **Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0210827 tanggal 6 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	:
Komisaris (Independen)	:	Johanes Sutrisno	:
Komisaris (Independen)	:	Alfonso Napitupulu	:
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	:
Komisaris	:	Saurabh Narayan Agarwal	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	:
Direktur Bisnis & Manajemen Aset	:	Sutadi	:
Keuangan	:	Sudjono	:
Direktur Operasional	:	Andrew Adiwijanto	:
Direktur Transformasi	:	Goklas*	:

* Efektif setelah diperolehnya persetujuan dari regulator terkait

1. **GENERAL** (Continued)

f. **Securities Issued** (Continued)

Securities issued for the last 5 (five) years are as follows: (Continued)

g. **Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees**

Based on Deed of Meeting Decision Letter No. 7 dated 22 May 2024 made before Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang District, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0210827 dated 6 June 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board as of 31 May 2024 are as follows:

Board of Commissioners

President	Commissioner
Commissioner	(Independent)
Commissioner	(Independent)
	Commissioner
	Commissioner

Board of Directors

President	Director
Business & Asset Management Director	Direktur
Finance	Director
Operations	Director
Transformation Director	

* Will be effective after obtaining approval from the relevant regulator

Ekshibit E/11

Exhibit E/11

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. **UMUM** (Lanjutan)

g. **Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan** (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0123964 tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0032388 tanggal 24 Januari 2024, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	:
Komisaris (Independen)	:	Johanes Sutrisno	:
Komisaris (Independen)	:	Alfonso Napitupulu	:
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	:
Komisaris	:	Saurabh Narayan Agarwal	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	:
Direktur Keuangan	:	Sudjono	:
Direktur Bisnis	:	Sutadi	:
Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	:	Andrew Adiwijanto	:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Asrori S. Karni	:
Anggota	:	Helda Rahmi Sina	:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0036397 tanggal 25 Juli 2022 dan surat nomor AHU-AH.01.09.0037327 tanggal 27 Juli 2022, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	:
Komisaris (Independen)	:	Johanes Sutrisno	:
Komisaris (Independen)	:	Alfonso Napitupulu	:
Komisaris	:	Dominic John Picone	:
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	:
Direktur Keuangan	:	Sudjono	:
Direktur Bisnis	:	Sutadi	:
Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia	:	Andrew Adiwijanto	:
Direktur Risiko Perusahaan	:	Sigit Hendra Gunawan	:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Asrori S. Karni	:
Anggota	:	Helda Rahmi Sina	:

1. **GENERAL** (Continued)

g. **Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees** (Continued)

Based on Deed of Meeting Decision Letter No. 8 dated 16 May 2023 made before Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang District, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0123964 dated 6 June 2023, as stated in the Deed of Meeting Decision Letter No. 6 dated 18 January 2024 made before Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang District, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0032388 dated 24 January 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board as of 31 December 2023 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner (Independent)
Commissioner (Independent)
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Finance Director
Business Director
Operations and Human Capital Director

Sharia Supervisory Board

Chairman
Member

Based on Deed of Meeting Decision Letter No. 18 dated 29 June 2022 made before Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notary in Tangerang District, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0036397 dated 25 July 2022 and Decision Letter No. AHU-AH.01.09.0037327 dated 27 July 2022, the composition of the Company's Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board as of 31 December 2022 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner (Independent)
Commissioner (Independent)
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Finance Director
Business Director
Operations and Human Capital Director
Enterprise Risk Director

Sharia Supervisory Board

Chairman
Member

Ekshibit E/12

Exhibit E/12

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. **UMUM** (Lanjutan)

g. **Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan** (Lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Johanes Sutrisno	:
Anggota	:	Edy Sugito	:
Anggota	:	Friso Palillingan	:

Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK/BOD/VII/14-009 tanggal 16 Juli 2014, Kepala Unit Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Fledy Rizmara.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Sudjono.

Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Karyawan tetap	6.173	6.326	6.100	Permanent employees
Karyawan tidak tetap	4.693	4.881	4.011	Non-permanent employees
Jumlah	<u>10.866</u>	<u>11.207</u>	<u>10.111</u>	Total

Personil manajemen kunci Perusahaan mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1. **GENERAL** (Continued)

g. **Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees** (Continued)

The composition of the Audit Committee of the Company and its subsidiary as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Internal Audit

Based on the Virtue of the Board of Directors of the Company No. SK/BOD/VII/14-009 dated 16 July 2014, Head of Internal Audit Unit of the Company as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 is Fledy Rizmara.

Corporate Secretary

Based on the Virtue of the Board of Directors of the Company No. BOD-BOC/VI/2014-0011 dated 24 June 2014, Corporate Secretary as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 is Sudjono.

Employees

The total number of the Company and its subsidiary's employees as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Ekshibit E/13

Exhibit E/13

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah diterapkan secara konsisten pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 21 Juni 2024.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("PSAK"), termasuk Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (PSAK 201)

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun atas dasar akrual dan berdasarkan konsep nilai historis, kecuali untuk instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar dan utang atas kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan nilai wajar aset program.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada tiap entitas diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan dan entitas anaknya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah ditetapkan secara konsisten pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The significant accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these consolidated financial statements.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiary were authorized for issuance by Board of Directors on 21 June 2024.

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS"), which includes the Interpretations of Financial Accounting Standards, issued by the Indonesian Institute of Accountants and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("Bapepam-LK", which the function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") since 1 January 2013) Regulation No. VIII.G.7 regarding "Emiten or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure Guidelines" as included in the Appendix of the Decision Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012.

b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (SFAS 201)

The consolidated financial statements, except the consolidated statement of cash flows, were prepared on the accrual basis and under the historical cost concepts, excepts for derivative financial instruments which are measured at fair value and the liability for post-employment benefit obligations which is recognized at the present value of defined benefit obligations less the fair value of plan asset.

The consolidated statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements of each entities are measured using the currency of primary economic environment in which the entity operates (the functional currency). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company and its subsidiary' functional and presentation currency.

The significant accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

Ekshibit E/14

Exhibit E/14

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

C. Perubahan Kebijakan Akuntansi

**Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")
yang berlaku efektif pada periode berjalan**

Mulai tanggal 1 Januari 2024, DSAK IAI mengumumkan perubahan penomoran referensi PSAK dan ISAK berupa Kerangka Pelaporan Keuangan Indonesia dan Perubahan Nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAKI) yang mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, berupa kriteria dan perpindahan antar pilar SAK dan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS, standar akuntansi lokal dan syariah.

Amandemen standar berikut berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 yaitu:

- Amandemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" – Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang.
- Amandemen PSAK 116 "Sewa" – Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual Dan Sewa-Balik.

Manajemen berpendapat penerapan dari amandemen diatas tidak menimbulkan perubahan material atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anaknya dan tidak berdampak signifikan pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

d. Prinsip Konsolidasian (PSAK 110)

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak. Transaksi antar entitas dan saldo antara Perusahaan dan Entitas anak dieliminasi secara penuh.

Entitas Anak merupakan *investee* yang dikendalikan oleh Perusahaan. Perusahaan mengendalikan *investee* jika tiga elemen berikut terpenuhi: pengendalian atas *investee*, eksposur atas hak imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan pengendaliannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil variabel dari investor. Pengendalian dapat dikaji kembali ketika fakta dan kondisi mengindikasikan terdapat kemungkinan perubahan pada elemen pengendalian tersebut.

Kepentingan nonpengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset neto Entitas Anak yang tidak diatribusikan pada Perusahaan.

Perusahaan mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas Induk.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

c. Change in Accounting Policies

**Changes to Statement of Financial Accounting Standards
("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards
("IFAS") effective in the current period**

From 1 January 2024, DSAK IAI has announced the changes of reference numbering of PSAK and ISAK whereas Indonesia Financial Reporting Standar Framework and Amendment to SFAS and IFAS number, which regulated the SFAS pillars that apply in Indonesia, consists of criteria and exchange between the pillars that apply in Indonesia and numbering for SFAS and IFAS referred to IFRS, local accounting standards and sharia accounting standards.

Amendments of the following standards effective for the year beginning on or after 1 January 2024 are as follows:

- Amendment to SFAS 201 "Presentation of Financial Statements" – Classification of Liabilities as Current And Non-Current.
- Amendment to SFAS 116 "Leases" – Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions.

Management believes the implementation of amendments has no impact on the material to accounting policies of the Company and its subsidiary and has no significant impact on the Consolidated Financial Statements.

d. Principles of Consolidation (SFAS 110)

The consolidated financial statement consists of the Company and its Subsidiary financial statements. Intercompany transactions and balance between Group Companies are therefore eliminated in full.

A subsidiary is when an entity has control over an investee. The entity controls an investee if all three of the following elements are present: power over the investee, exposure to variable returns from the investee, and the ability of the investor to use its power to affect those variable returns. Control is reassessed whenever facts and circumstances indicate that there may be a change in any of these elements of control.

Non-controlling interests represent the proportion of the results and net assets of Subsidiary not attributable to the Company.

The Company recognizes any non-controlling interest in the acquiree on an acquisitions-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the Parent's equity.

Ekshibit E/15

Exhibit E/15

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

2. **MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (Continued)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (PSAK 109)

e. Financial Assets and Liabilities (SFAS 109)

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori (i) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) biaya perolehan diamortisasi, dan (iii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pendapatan komprehensif lain. Pada pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pendapatan komprehensif lain. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut setelah pengakuan awal aset keuangan berdasarkan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan atau karakteristik arus kas kontraktual hanya dari pembayaran pokok dan bunga saja.

Financial assets are classified in categories of (i) fair value through profit or loss, (ii) amortised cost, and (iii) fair value through other comprehensive income. At initial measurement, financial assets determined based on fair value, added with transactions cost attributable direct to financial assets. Management determines the classification of its financial assets prior initial recognition based on assessment of business model for managing the financial assets or contractual cashflows give rise to solely payments of principal and interest.

e.1. Klasifikasi

e.1. Classification

Perusahaan dan entitas anaknya mengklasifikasi aset keuangannya dalam kategori:

The Company and its subsidiary classify its financial assets into the following category.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading. Entity may determine at initial classification of an uncancellable chosen category of a financial asset on a certain equity instrument which commonly measured the fair value through profit and loss rise change in the fair value presented under fair value through other comprehensive income.

(ii) Biaya perolehan diamortisasi

(ii) Amortised cost

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

Financial assets determined under amortised cost if met criteria as outlined below:

- aset keuangan dikelola dalam bisnis yang bertujuan untuk memiliki arus kas keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang hanya dari pembayaran pokok dan bunga.

- financial assets held within a business whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cashflows; and
- determining contractual financial assets give rise to solely payments of principal and interest.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diakui pada nilai wajarnya ditambah nilai transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan penurunan nilai.

Financial assets are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method, less provision for impairment.

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (PSAK 109) (Lanjutan)

e.1. Klasifikasi (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya mengklasifikasi aset keuangannya dalam kategori: (Lanjutan)

(iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pendapatan komprehensif lain adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh tempornya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Perusahaan dan entitas anaknya mengklasifikasi liabilitas keuangannya dalam kategori:

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat adanya kecenderungan ambil untung.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Perusahaan dan entitas anaknya mengelompokkan seluruh liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk liabilitas derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

e. Financial Assets and Liabilities (SFAS 109) (Continued)

e.1. Classification (Continued)

The Company and its subsidiary classify its financial assets into the following category: (Continued)

(iii) A Fair value through other comprehensive income

Fair value through other comprehensive income are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and fixed maturities that the management has positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- a. Financial assets managed under business model which its objective is to both collect the contractual cash flows and sell the financial assets; and
- b. Contractual cash flows characteristics test resulting rights on certain basic term of cashflows meets the solely payments of principal and interest.

The Company and its subsidiary classify its financial liabilities into the following category:

(i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities classified as held for trading.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short-term and there is evidence of a recent actual pattern of profit taking.

(ii) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss fall into this category and are measured at amortized cost.

The Company and its subsidiary classify all of its financial liabilities as other financial liabilities measured at amortized cost, except for derivative liabilities which are classified as financial instruments measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Ekshibit E/17

Exhibit E/17

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (PSAK 109) (Lanjutan)

e. Financial Assets and Liabilities (SFAS 109) (Continued)

e.2. Pengakuan

e.2. Recognition

Perusahaan dan entitas anaknya pada awalnya mengakui aset dan liabilitas keuangan pada tanggal perolehan aset dan liabilitas keuangan tersebut.

The Company and its subsidiary initially recognize financial assets and liabilities on the date of their origination.

Pada saat pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klarifikasi aset dan liabilitas keuangan tersebut.

At initial recognition, the Company and its subsidiary's financial assets or liabilities are measured at fair value plus/minus (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issue of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classifications.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasikan selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga dan keuangan untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of financing income for transaction costs related to financial assets and as part of interest and financing charges for transaction costs related to financial liabilities.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent to initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method.

e.3. Penghentian pengakuan

e.3. Derecognition

Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau pada saat Perusahaan dan entitas anaknya mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

The Company and its subsidiary derecognize a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company and its subsidiary transfer the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognized as a separate asset or liability.

Ekshibit E/18

Exhibit E/18

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (PSAK 109) (Lanjutan)

e.3. Penghentian pengakuan (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan piutang pembiayaan pada saat dilakukannya penarikan jaminan kendaraan. Selain itu, Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anaknya secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan dan entitas anaknya tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan yang ditentukan oleh besarnya perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan dan entitas anaknya menghapus bukukan saldo piutang pembiayaan, pada saat Perusahaan dan entitas anaknya menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada kemampuan keuangan konsumen sehingga konsumen tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau konsumen atau unit yang dibiayai tidak dapat ditemukan atau dikuasai oleh pihak ketiga atau nilai realisasi neto atas jaminan yang dikuasai kembali diperkirakan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur piutang pembiayaan.

Penerimaan atau pemulihan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

e.4. Saling hapus

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

e. Financial Assets and Liabilities (SFAS 109) (Continued)

e.3. Derecognition (Continued)

The Company and its subsidiary derecognize financing receivables at the time when the vehicle collateral has been taken out. In addition, the Company derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transaction where the Company and its subsidiary neither retain nor transfer substantially all the risks and rewards of a financial asset, the Company and its subsidiary derecognize the asset if it does not retain control over the asset. The right and obligation retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers where control over the asset is retained, the Company and its subsidiary continue to recognize the asset to the extent of its continuing involvement determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Company and its subsidiary write off a financing receivables, when the Company and its subsidiary determine that the asset is uncollectible. This decision was taken after consideration of information such as the occurrence of significant changes to the financial ability of consumers so that consumers can no longer pay the loan, or consumer or units being financed cannot be found or is controlled by third party or the net realizable value of collateral is not expected to be sufficient to pay the entire exposure for the financing receivables.

Collection or recovery of financial assets which had been written-off is recorded as other income.

e.4. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company and its subsidiary have legally enforceable rights to offset the recognized amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

Ekshibit E/19

Exhibit E/19

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (PSAK 109) (Lanjutan)

e. Financial Assets and Liabilities (SFAS 109) (Continued)

e.5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

e.5. Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

e.6. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan

e.6. Identification and measurement of impairment for financial assets

Penurunan nilai diukur berdasarkan PSAK 109 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar berdasarkan kerugian kredit ekspektasian. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anaknya mengukur penyisihan kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1).

Impairment of financial assets measured by SFAS 109 required immediate recognition of expected credit losses at the initial recognition of financial assets that are not carried at fair value measured by expected credit loss. At the initial recognition, the Company and its subsidiary measured allowance of impairment of financial assets using 12-months expected credit losses (Stage 1).

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya mengukur penyisihan kerugian aset keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas aset keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal (Tahap 2) atau menjadi memburuk (Tahap 3). Jika tidak, Perusahaan dan entitas anaknya tetap mengukur penyisihan kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Tahap 1).

The Company and its subsidiary at each reporting date, measured allowance of impairment losses of financial assets using lifetime expected credit losses if there's significant increase in credit risk (Stage 2) or become credit impaired (Stage 3). Otherwise, the Company and its subsidiary continue to measure allowance of impairment losses of financial assets using 12-months expected credit losses (Stage 1).

Peningkatan risiko kredit yang signifikan dievaluasi dengan membandingkan risiko wanprestasi suatu aset keuangan pada saat tanggal pelaporan terhadap tanggal pengakuan awal. Penentuan adanya peningkatan risiko kredit yang signifikan atau tidak dievaluasi menggunakan beberapa kriteria, utamanya jika telah mengalami keterlambatan pembayaran 30 hari. Aset keuangan dianggap menjadi memburuk, utamanya jika telah mengalami keterlambatan pembayaran 90 hari.

Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of financial assets at the reporting date to the origination date. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using several criteria, primarily based on 30 days past due. Financial assets determined as credit impaired primarily after 90 days past due criteria.

Kerugian kredit ekspektasian diukur dalam suatu cara yang mencerminkan:

Expected credit losses measured in a way that reflects:

- Jumlah yang tidak biasa dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- Nilai waktu uang; dan
- Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

- An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
- The time value of money; and
- Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

Ekshibit E/20

Exhibit E/20

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Aset dan Liabilitas Keuangan (PSAK 109)** (Lanjutan)

e.6. **Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan**
(Lanjutan)

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang nilainya signifikan. Aset keuangan yang tidak signifikan dan memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dinilai secara kolektif.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan model statistik dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi serta perkiraan kondisi ekonomi masa depan yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih tepat.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

e.7. **Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan dan entitas anaknya memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan dan entitas anaknya mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan dan entitas anaknya menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*).

2. **MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (Continued)

e. **Financial Assets and Liabilities (SFAS 109)** (Continued)

e.6. **Identification and measurement of impairment for financial assets** (Continued)

Individual assessment is performed on the significant financial assets. The financial assets that are not individually significant and have similar credit characteristic are assessed collectively.

In assessing collective impairment, the Company and its subsidiary use statistical modeling of historical trends of the probability of default, timing of recoveries and the amount of loss incurred as well as forecasts of future economic conditions adjusted for management's judgement as to whether current economic and credit conditions are such that the actual losses are likely to be greater or less than suggested by historical modeling. Default rates, loss rates and the expected timing of future recoveries are regularly benchmarked against actual outcomes to ensure that they remain appropriate.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the reversal is recognized in the current year profit or loss.

e.7. **Fair value measurement**

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company and its subsidiary have access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company and its subsidiary measure the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

If a market for a financial instrument is not active, the Company and its subsidiary establish fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties, and if available, reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same, discounted cash flows analysis and option pricing models.

Ekshibit E/21

Exhibit E/21

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (PSAK 109) (Lanjutan)

e. Financial Assets and Liabilities (SFAS 109) (Continued)

e.7. Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

e.7. Fair value measurement (Continued)

Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan dan entitas anaknya, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk-return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anaknya mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs, relies as little as possible on estimates specific to the Company and its subsidiary, incorporate all factors that market participants would consider in setting a price, and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Inputs to valuation techniques reasonably represent market expectations and measures of the risk-return factors inherent in the financial instrument. The Company and its subsidiary calibrate valuation techniques and tests them for validity using prices from observable current market transactions in the same instrument or based on other available observable market data.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan dengan transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang), atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received, unless the fair value of that instrument is evidenced by comparison with the other observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging), or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets. When transaction price provides the best evidence of fair value at initial recognition, the financial instrument is initially measured at the transaction price and any difference between this price and the value initially obtained from a valuation model is subsequently recognized in the statement of profit or loss depending on the individual facts and circumstances of the transaction but not later than when the valuation is supported wholly by observable market data or the transaction is closed out.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Perusahaan yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

Fair values reflect the credit risk of the financial instruments and include adjustments to take into account the credit risk of the Company and counterparty where appropriate. Fair value estimates obtained from models are adjusted for any other factors, such as liquidity risk or valuation model uncertainties, to the extent that the Company believes a third-party market participation would take them into account in pricing a transaction.

Ekshibit E/22

Exhibit E/22

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Kas dan Setara Kas (PSAK 109)

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, sepanjang deposito berjangka tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, serta tidak dibatasi penggunaannya. Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (Catatan 2e).

g. Piutang Pembiayaan (PSAK 109)

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui aset berupa piutang pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan piutang neto. Penerimaan piutang diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan pembiayaan. Pengakuan pendapatan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi Perusahaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan dan pendapatan yang timbul terkait penyelesaian kontrak ini diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Restrukturisasi pembiayaan konsumen berupa modifikasi persyaratan kredit. Pembiayaan yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai kini atas arus kas kontraktual setelah restrukturisasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Selisih antara jumlah tercatat bruto piutang pembiayaan konsumen pada tanggal restrukturisasi dengan nilai kini arus kas kontraktual setelah restrukturisasi diakui dalam laba rugi.

Setelah restrukturisasi, seluruh arus kas kontraktual dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Piutang pembiayaan akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari (untuk piutang pembiayaan sepeda motor), lebih dari 210 hari (untuk piutang pembiayaan mobil) dan lebih dari 270 hari (untuk pembiayaan alat berat dan properti). Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

g.1. Sewa Pembiayaan

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasikan selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

g.2. Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum di amortisasi dan dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

f. Cash and Cash Equivalents (SFAS 109)

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less since the date of placement, as long as these time deposits are not pledged as collaterals for borrowings nor restricted. Cash and cash equivalents are classified as amortized costs (Note 2e).

g. Financing Receivables (SFAS 109)

The Company and its subsidiary recognizes assets as financing receivables and present them at an amount equal to the net financing receivables. Receivables payment is treated as repayment of principal and financing income. The recognition of financing income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company's financing receivables.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting income related to this early termination of a contract is recognized in the current year profit or loss.

Restructuring of customer financing is a modification of the terms of the loans. Restructured financing are stated at present value of discounted contractual cash flows after restructuring using initial effective interest rate. Differences arising from the gross carrying value of the consumer financing receivables at the time of restructuring with present value of contractual cash flows after restructuring are recognized to profit or loss.

Thereafter, all the contractual cash flows under the new terms shall be accounted for as the repayment of principal and interest income, in accordance with the restructuring scheme.

Financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 180 days (for motorcycles financing), more than 210 days (for cars financing) and more than 270 days (for heavy equipment and property financing). Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon receipt.

g.1. Finance Lease

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

g.2. Consumer Financing

Consumer financing receivables are receivables plus (minus) unamortized transaction cost (fee) and minus unearned consumer financing income and allowance for impairment losses of consumer financing receivables.

Ekshibit E/23

Exhibit E/23

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Piutang Pembiayaan (PSAK 109) (Lanjutan)

g.2. Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, akan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (Catatan 2e).

Biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi adalah pendapatan administrasi proses pembiayaan dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pembiayaan konsumen tersebut.

h. Pembiayaan Bersama (PSAK 109)

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pembiayaan bersama konsumen tanpa tanggung renteng (*without recourse*) dimana hanya porsi jumlah piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, antara Perusahaan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan".

i. Piutang Pembiayaan Murabahah (PSAK 402)

Murabahah merupakan akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah, piutang pembiayaan murabahah diakui dengan metode pendapatan efektif. Keuntungan murabahah diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan margin dari piutang pembiayaan murabahah.

Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan pembiayaan konsumen.

Pada setiap akhir periode laporan keuangan, piutang pembiayaan murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

g. Financing Receivables (SFAS 109) (Continued)

g.2. Consumer Financing (Continued)

Unearned consumer financing income, which represents the difference between total installments to be received from the consumer and the principal amount financed, plus or deducted with the unamortized transaction cost (income), will be recognized as income over the term of the contract using effective interest method of the related consumer financing receivable. Consumer financing receivables are classified as amortized costs (Note 2e).

Unamortized transaction cost (income) are financing administration income and transaction costs which are incurred at the first time the financing agreement is signed and directly attributable to consumer financing.

h. Joint Financing (SFAS 109)

All joint financing agreements entered by the Company are joint financing without recourse in which only the Company's financing portion of the total installments are recorded as financing receivables in the statement of financial position (net approach). Financing income is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income after deducting the portions belong to other parties participated to these joint financing transactions.

In joint financing without recourse, arrangements between the Company and the joint financing facility provider, the Company has the right to set higher interest rates to consumer than the interest rates stated in the joint financing agreement with the joint financing facility provider. The difference is recognized as revenue and disclosed as "Financing Income".

i. Murabahah Financing Receivables (SFAS 402)

Murabahah is goods sell-buy contract with a sold price amounting to acquisition cost plus agreed margin and the Company must to disclose the acquisition cost to customer. When murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized at effective income method. Murabahah margin are recognized over the period of the contract based on margin of the murabahah financing receivables.

Substantially, murabahah contract is a financing, so that margin recognition is based on standards which regulate financing, as mentioned in consumer financing policy.

At the end of each period of financial statement, murabahah financing receivables are state at net realizable value, consist of outstanding murabahah receivables less unearned margin and allowance for impairment loss.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

j. Piutang Ijarah dan IMBT (PSAK 407)

Piutang ijarah (porsi pokok sewa) merupakan akrual piutang sewa atas porsi pokok yang belum direalisasikan oleh nasabah dan piutang pendapatan ijarah merupakan akrual piutang sewa atas bagian keuntungan (ujroh) transaksi ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional.

Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa. Aset ijarah muntahiyah bittamlik merupakan akad transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa melalui jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Piutang pendapatan ijarah diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa porsi ujroh dan piutang ijarah sebesar sewa porsi pokok yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang dikurangi penurunan nilai, jika ada pada akhir periode pelaporan.

k. Piutang dalam Proses Penyelesaian (PSAK 109)

Piutang dalam proses penyelesaian merupakan piutang atas jaminan yang dikuasai kembali dan dinyatakan berdasarkan nilai realisasi neto yaitu nilai tercatat atau pokok piutang pembiayaan terkait dikurangi penyisihan penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang pembiayaan direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah melalui proses tahapan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual objek yang dijaminkan atau melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Kelebihan hasil penyelesaian dengan jumlah seluruh kewajiban konsumen merupakan hak dari konsumen, sedangkan kekurangan hasil penyelesaian akan dibebankan sebagai penghapusan piutang lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Piutang dalam proses penyelesaian diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

j. Ijarah and IMBT Receivables (SFAS 407)

Ijarah receivables (principal portion) are based on unrealized accrual rent income from principal portion and ijarah receivable represents portion of accrual rent income from the following month's installment of ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) which is recognized proportionally.

Akad ijarah is a contract for the provision of funds in the context of transferring the use rights or benefits of a good or service based on a lease transaction, without being followed by the transfer of ownership of such goods to the lessee. Asset ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) is a contract based on a lease transaction with option of transfer of ownership of lease object through sale purchase or granted at specific time based on contract.

Ijarah revenue receivables are recognized at maturity amounting to the rent of ujroh and ijarah receivables amounting to the portion of the principal outstanding which has not been received and presented at net realizable value, which is the outstanding amount of the receivables less impairment loss, if any, at the end of reporting period.

k. Receivables in the Settlement Process

Receivables in the settlement process represent receivables from collateral recovered and stated at net realizable value which is carrying amount or principal amount of related financing receivables, less allowance for decline in market value of the collateral retained. Financing receivables are reclassified to receivables in the settlement process when the collateral is withdrawn because the consumer is not able to meet its obligations after going through the stages stipulated in the financing agreement with the consumer.

Customer authorizes the Company to sell the pledged object or performing other actions in solving the debts in the event of default of the financing agreement. Excess result of a settlement with the total obligations of the consumer is the right of the customer, while the shortage of the settlement proceeds will be charged to written-off other receivables in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Receivables in the settlement process are classified as financial assets classified as amortized costs.

Ekshibit E/25

Exhibit E/25

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

l. Instrumen Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko (PSAK 109)

Seluruh instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan digunakan untuk tujuan manajemen risiko. Instrumen derivatif ini digunakan untuk lindung nilai eksposur risiko suku bunga dan risiko mata uang Perusahaan. Instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, beberapa kriteria tertentu harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai.

Pada penetapan awal lindung nilai, Perusahaan mendokumentasikan secara formal hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melaksanakan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektivitas hubungan lindung nilai. Perusahaan menilai, pada awal hubungan lindung nilai dan juga secara berkesinambungan, apakah instrumen lindung nilai diharapkan akan "sangat efektif" dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dari unsur yang dilindung nilai sepanjang periode dimana lindung nilai tersebut ditetapkan.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap unsur yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, yang merupakan bagian dari ekuitas. Bagian yang tidak efektif diakui secara langsung pada laporan laba rugi. Jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi dalam tahun yang sama dimana arus kas yang dilindung nilai mempengaruhi laba atau rugi, dan pada unsur yang sama dalam laporan laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

l. Derivative Instrument for Risk Management Purposes (SFAS 109)

All derivative instruments held by the Company are for risk management purposes. These derivative instruments are used to hedge the Company's exposures to interest rate risk and currency risk. Derivative instruments held for risk management are measured at fair value in the statement of financial position. To qualify for hedge accounting, certain criteria are to be met, including formal documentation to be in place at the inception of the hedge.

On initial designation of the hedge, the Company formally documents the relationship between the hedging instruments and hedge items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. The Company makes an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, whether the hedging instruments are expected to be "highly effective" in offsetting the changes in the fair value or cash flows of the respective hedged item during the period for which the hedge is designated.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized in the current year statement of profit or loss. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the items being hedged in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

The Company and its subsidiary designate derivatives as the hedging instruments of cash flows hedges where the instrument hedges the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss. The effective portion of changes in the fair value of derivatives designated as hedging instruments of cash flows hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, which forms part of equity. Any ineffective portion is recognized immediately in the statement of profit or loss. Amounts deferred in equity are reclassified to the statement of income as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss.

Ekshibit E/26

Exhibit E/26

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

**l. Instrumen Derivatif untuk Tujuan Manajemen Risiko (PSAK 109)
(Lanjutan)**

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas dan direklasifikasi ke laporan laba rugi ketika unsur yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika suatu prakiraan transaksi akan dilindung nilai tidak lagi diharapkan akan terjadi, jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas diakui segera dalam laporan laba rugi.

m. Beban Dibayar Dimuka (PSAK 109)

Beban dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset Ijarah dan IMBT (PSAK 407)

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

Perpindahan kepemilikan suatu aset dalam akad IMBT, dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah.

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad menggunakan metode *flat* (proporsional).

o. Aset Tetap (PSAK 216)

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

**l. Derivative Instrument for Risk Management Purposes (SFAS 109)
(Continued)**

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, and is subsequently transferred to the statement of profit or loss when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss.

When a forecast hedged transaction is no longer expected to occur, the amount deferred in equity is recognized immediately in the statement of profit or loss.

m. Prepaid Expenses (SFAS 109)

Prepaid expenses are amortized and charged as an expense over the periods of benefit using the straight-line method.

n. Ijarah and IMBT Asset (SFAS 407)

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets (ijarah) and are recorded in the statements of financial positions at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in ijarah transaction are depreciated over the lease period.

The transfer of ownership of an asset in an IMBT contract is carried out if the ijarah contract has expired or has been terminated and the ijarah assets have been transfer to the lessee by separate contract.

Income from ijarah is recognised over the period of the contract with flat (proportional) method.

o. Fixed Assets (SFAS 216)

Fixed assets are initially recognized at acquisition cost. After initial measurement, fixed assets are measured using the cost model, carried at cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

Acquisition cost includes purchase price and any costs directly attributable to bring the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Land is stated at cost and not depreciated.

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

o. Aset Tetap (PSAK 216) (Lanjutan)

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	Masa manfaat/ Useful life (Tahun/ Year)
Bangunan dan prasarana	20
Peralatan kantor	5
Kendaraan	5
Perabot dan perlengkapan kantor	5

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi periode dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak digunakan lagi atau dijual), maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dalam pembangunan untuk pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkan, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur dan metode penyusutan dikaji ulang dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

p. Sewa (PSAK 116)

Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Perusahaan dan entitas anaknya menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

o. Fixed Assets (SFAS 216) (Continued)

Depreciation of fixed assets other than land are calculated on the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful life as follows:

	Tarif/ Rates	
	5 %	Building and improvements
	20 %	Office equipment
	20 %	Vehicles
	20 %	Furniture and fixtures

Repairs and maintenance costs, are charged to the the statement of profit or loss during the period in which they are incurred. Expenditures that extend the future life of assets or provide further economic benefits are capitalized and depreciated.

The carrying amount of fixed assets are derecognized upon disposal or when there is no longer a future economic benefit expected from its use or disposal.

When fixed assets are derecognized (retired or disposed of), their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the statement of financial position, and the resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss.

Asset under construction for development are stated at cost and presented as part of the fixed assets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

When the carrying amount of fixed assets is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount which is determined at the higher of net selling price or value in use.

At the end of each year, residual values, useful life and method of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if necessary.

p. Leases (SFAS 116)

At inception of a contract, the Company and its subsidiary assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Ekshibit E/28

Exhibit E/28

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

p. **Sewa (PSAK 116)** (Lanjutan)

Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Perusahaan menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu dimana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Perusahaan bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat dimana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Perusahaan dan entitas anaknya menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset hak-guna" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan dan entitas anaknya tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang, pembayaran atas sewa tersebut diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. **MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (Continued)

p. **Leases (SFAS 116)** (Continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- The Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the identified assets. The Company has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either:
 - The Company has the right to operate the asset; or
 - The Company designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the nonlease components. However, for the leases of improvements in which the Company is a lessee, the Company has elected not to separate nonlease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The Company and its subsidiary recognize a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The Company and its subsidiary present right-of-use assets as part of "Right-of-use assets" in the consolidated statement of financial position.

The Company and its subsidiary not recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less, the lease payment recognize as expenses on a straight-line basis over the lease term.

If the lease transfers the ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Ekshibit E/29

Exhibit E/29

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

p. Sewa (PSAK 116) (Lanjutan)

Sewa Tanah dan Bangunan

Opsi Perpanjangan

Beberapa sewa gedung kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat dieksekusi Perusahaan sebelum periode kontrak yang tidak dapat dibatalkan tersebut berakhir. Jika memungkinkan, Perusahaan berupaya untuk memasukkan opsi perpanjangan dalam sewa baru untuk memberikan fleksibilitas operasional. Perusahaan menilai pada saat permulaan sewa apakah Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan. Perusahaan menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut jika ada peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian Perusahaan.

Sewa Jangka-Pendek dan Sewa Aset Bernilai-Rendah

Perusahaan memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

q. Aset Takberwujud (PSAK 238)

Perangkat lunak

Perangkat lunak pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan awal perangkat lunak meliputi harga pembelian, termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa perangkat lunak siap dipakai. Setelah pengakuan awal, perangkat lunak diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk aset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya, dimulai dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat perangkat lunak adalah lima tahun.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset takberwujud ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan diakui di dalam laporan laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

p. Leases (SFAS 116) (Continued)

Land and Building Leases

Extension Options

Some leases of office buildings contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. Where practicable, the Company seeks to include extension options in new leases to provide operational flexibility. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses whether it is reasonably certain to exercise the options if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Short-Term Leases and Leases of Low-Value Assets

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

q. Intangible Assets (SFAS 238)

Software

Software is initially recognized at acquisition cost. The acquisition cost of software consists of its purchase price, including any directly attributable costs in bringing the software to its intended use. After initial recognition, software is measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Subsequent expenditure on software assets is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the estimated useful life of software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of software is five years.

Amortization methods, useful life and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

Gains or losses on disposal of intangible assets are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are recognized in profit or loss.

Ekshibit E/30

Exhibit E/30

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

r. Pajak Penghasilan (PSAK 212)

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak diakui pada laporan laba rugi kecuali untuk bagian yang langsung diakui di komponen ekuitas lainnya, dimana beban pajak yang terkait dengan bagian tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini adalah utang pajak yang ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Beban pajak tangguhan diakui sehubungan dengan adanya perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai aset dan liabilitas yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan.

Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dikaji ulang setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila besar kemungkinan manfaat pajak terkait tidak lagi mungkin direalisasi. Pengurangan tersebut akan berlaku terbalik saat kemungkinan laba fiskal di masa depan membaik. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan tersedia untuk merealisasikan manfaat pajak tersebut.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

r. Income Tax (SFAS 212)

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in the statement of profit or loss except to the extent it relates to items recognized directly in other equity components, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the current year, using tax rates enacted or substantively enacted at reporting date.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carryforwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

Current tax assets and current tax liabilities shall be offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company has a legal enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Ekshibit E/31

Exhibit E/31

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

r. Pajak Penghasilan (PSAK 212) (Lanjutan)

Perpajakan lainnya

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut diterima.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

s. Pinjaman yang Diterima (PSAK 109 dan 223)

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari berbagai bank dan institusi keuangan, termasuk fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) without recourse. Fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) without recourse disajikan secara gross, yaitu sebanyak pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan pinjaman yang diterima dari bank dicatat dalam nilai penuh dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

t. Surat Berharga yang Diterbitkan (PSAK 109)

Surat berharga yang diterbitkan meliputi utang Obligasi.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

r. Income Tax (SFAS 212) (Continued)

Other taxation matters

Amendments to tax obligations are recorded when an tax assessment letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

The extra amount of tax principal and penalties stipulated by the Tax Assessment Letter (SKP) is recognized as income or expense in the current operations, unless further proposed settlement efforts. The extra amount of tax principal and penalties stipulated by SKP are deferred as long as it meets the criteria for asset recognition.

s. Fund Borrowings (SFAS 109 and 223)

Borrowings represent funds received from various banks and financial institutions, including without recourse joint financing facilities. Without recourse joint financing facilities are presented gross, i.e loans granted to customers and borrowings received from banks are recorded at their full amount with repayment obligations in accordance with the terms of the agreement.

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortized cost. Additional costs that are directly attributable to the acquisition of loans are deducted from total borrowings. See Note 2e for the accounting policy on financial liabilities measured at amortized cost.

t. Securities Issued (SFAS 109)

Securities issued consist of Bonds payable.

Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Additional cost directly attributable to the issuance of securities are recognized as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the securities issued using effective interest rate method.

Refer to Note 2e for accounting policy of financial liabilities at amortized cost.

Ekshibit E/32

Exhibit E/32

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

U. Imbalan Kerja (PSAK 219)

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja

Perusahaan dan entitas anaknya mencadangkan jumlah minimum imbalan panjang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUCK) atau Kontrak Kerja Bersama (KKB), mana yang lebih tinggi, karena UUCK atau KKB adalah program imbalan pasti yang menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun.

Kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca-kerja dimasa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset neto dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaria independen dengan metode *projected-unit-credit*.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan atau beban komprehensif lainnya pada tahun dimana keuntungan/(kerugian) aktuarial terjadi. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dicatat di saldo laba.

Perusahaan dan entitas anaknya telah memiliki program pensiun iuran pasti yang mana Perusahaan membayar iuran ke dana pensiun lembaga keuangan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terutang.

V. Pengakuan Pendapatan dan Beban (PSAK 115 dan 407)

Pendapatan dari piutang pembiayaan (Catatan 2g dan 2h), pendapatan bunga dan beban bunga diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

U. Employees' Benefits (SFAS 219)

Short-term employees' benefits

Short-term employees' benefits are recognized when they are owed to the employees based on an accrual method.

Long-term and post-employment benefits

The Company and its subsidiary are provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Labor Law or collective Labour Agreement (CLA), whichever is higher, since the labour law or the CLA represent defined benefit plans which sets the formula for determining the minimum amount of benefit.

The obligation for post-employment benefits recognized in the statement of financial position is calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior years, deducted by any plan assets. The calculation is performed by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly fully recognized to other comprehensive income or expense in the year when such actuarial gain/(losses) occur. Accumulated actuarial gains and losses are recorded in retained earnings.

The Company and its subsidiary have a defined contribution pension program where the Company pays contributions to a financial institution pension plan which is calculated at a certain percentage of fixed income of the employees who meet the Company's criteria. The contributions are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as they become payable.

V. Revenue and Expenses Recognition (SFAS 115 and 407)

Income from financing receivables (Notes 2g and 2h), interest income and interest expense are recognized over the term of the contract based on the effective interest method.

Ekshibit E/33

Exhibit E/33

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

**v. Pengakuan Pendapatan dan Beban (PSAK 115 dan 407)
(Lanjutan)**

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh biaya yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Biaya transaksi merupakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya tambahan merupakan biaya yang tidak akan terjadi apabila Perusahaan dan entitas anaknya tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan pembiayaan Perusahaan disajikan neto setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank atau pihak lain sehubungan dengan transaksi-transaksi penerusan pinjaman, pembiayaan bersama, anjak piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang.

Pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi *dealer*, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 2e).

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dan transaksi piutang ijarah yang diakui dengan metode akrual selama masa akad ijarah dan IMBT.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

**v. Revenue and Expenses Recognition (SFAS 115 and 407)
(Continued)**

When calculating the effective interest rate, the Company and its subsidiary estimate future cash flow considering all contractual term of the financial instrument (for example, prepayment options, call option and other similar options) but does not consider future credit losses.

The calculation includes all fees, commissions and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums discounts.

Transaction costs are additional charges that are directly attributable to the acquisition, issuance or disposal of financial assets or financial liabilities.

Additional costs are costs that would not occur if the Company and its subsidiary do not obtain, publish or otherwise dispose of financial instruments.

Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

The Company's financing income is presented net of with financing income belongs to the bank in relation with channeling transactions, joint financing cooperations, factoring, and the appointment as manager of accounts receivable.

Income from excess of insurance premiums and excess of commission expenses and subsidy to dealer, administration income, late charges and termination income are recognised as an adjustment to the effective interest rate of the loan and receivables (Note 2e).

Sharia income consist of ijarah income and ijarah receivables on accrual basis over the period of ijarah and IMBT contract.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

Ekshibit E/34

Exhibit E/34

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

W. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan (PSAK 236)

Pengujian penurunan nilai suatu aset non-keuangan menggunakan masa manfaat ekonomi tidak terbatas dilakukan setiap tahun pada akhir periode pelaporan keuangan. Aset non-keuangan lain diuji penurunan nilai ketika telah terjadi atau ada perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak terpulihkan. Apabila nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan (yaitu mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi untuk menjual), maka aset tersebut diturunkan nilainya.

X. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (PSAK 221)

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

	31 Mei/ (nilai penuh)/ (full amount)	31 Desember/December May 2024 2023 (nilai penuh)/ (full amount)	2022 (nilai penuh)/ (full amount)
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	16.253	15.416	15.731

Penjabaran mata uang asing dicatat sesuai dengan PSAK 221 – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.

y. Segmen Operasi (PSAK 108)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (2) hasil operasinya dikaji ulang secara *regular* oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk bagian yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

2. **MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)**

w. Impairment of non-financial assets (SFAS 236)

Impairment test on non-financial assets with indefinite useful economic life are undertaken annually at the financial year end. Other non-financial assets are subject to impairment test whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amount may not be recoverable. Where the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of value in use and fair value less costs to sell), the asset is written down accordingly.

x. Balances in Foreign Currency Transactions (SFAS 221)

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the statement of financial position date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates applied for translating the foreign currency as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 are based of the mid exchange rate published by Bank Indonesia, are as follows:

Foreign currency translation is recorded in accordance with SFAS 221 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

y. Operating Segment (SFAS 108)

An operating segment is a component of entity which:

- (1) involves with business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);
- (2) operations result is observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and
- (3) separate financial information is available.

Segment results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

y. Segmen Operasi (PSAK 108) (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis.

Perusahaan dan entitas anaknya menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

z. Saham Treasuri (PSAK 201)

Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut (saham treasuri) dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas.

aa. Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham (PSAK 102)

Karyawan (termasuk eksekutif senior) Perusahaan menerima remunerasi dalam bentuk pembayaran berbasis saham, dimana karyawan memberikan jasa sebagai pertimbangan untuk instrumen ekuitas ('equity-settled transactions'). Saat opsi di eksekusi, Perusahaan menerbitkan saham baru. Hasil neto dari eksekusi berupa biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan premi saham.

Dalam situasi di mana instrumen ekuitas yang diterbitkan dan beberapa atau seluruh barang atau jasa yang diterima oleh entitas sebagai pertimbangan tidak dapat diidentifikasi secara khusus, barang atau jasa yang diterima (atau yang akan diterima) yang tidak dapat diidentifikasi diukur sebagai selisih antara nilai wajar pembayaran berbasis saham dan nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima yang teridentifikasi pada tanggal pemberian hak. Hal ini kemudian dikapitalisasi atau dibebankan secara tepat.

Beban program opsi karyawan berbasis saham dan beban program opsi manajemen diukur pada tanggal pemberian kompensasi (grant date) berdasarkan nilai wajar dari seluruh opsi yang diberikan yang dihitung dengan menggunakan metode *black-scholes*.

ab. Laba per Saham (PSAK 233)

Sesuai dengan PSAK 233 "Laba per saham", laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang berjalan.

Laba per saham dilusi dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

y. Operating Segment (SFAS 108) (Continued)

The Company and its subsidiary manage its business activities and identifies its segments reported based on product categories and geographic area.

The Company and its subsidiary determine and present operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

z. Treasury Stock (SFAS 201)

If the entity regain its equity instruments, then those instruments (treasury shares) are deducted from equity. Gains or losses arising from the purchase, sale, issuance, or cancellation of the entity's equity instruments are not recognized in profit or loss. Compensation paid or received is recognized directly in equity.

aa. Management and Employees Stock Option Program (SFAS 102)

Employees (including senior executives) of the Company receive remuneration in the form of share-based payment transactions, whereby employees render services as consideration for equity instruments ('equity-settled transactions'). When the options are exercised, the Company issues new shares. The proceeds received net of any directly attributable transaction costs are credited to share capital (nominal value) and share premium.

In situations where equity instruments are issued and some or all of the goods or services received by the entity as consideration cannot be specifically identified, the unidentified goods or services received (or to be received) are measured as the difference between the fair value of the share-based payment transaction and the fair value of any identifiable goods or services received at the grant date. This is then capitalised or expensed as appropriate.

Employee stock option program and management option program costs are measured at grant date based on the fair value of the stock option using a *black-scholes* model.

ab. Earnings per Share (SFAS 233)

In accordance with SFAS 233 "Earning per share", earnings per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during current year.

Diluted earning per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

Ekshibit E/36

Exhibit E/36

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

ab. Laba per Saham (PSAK 233) (Lanjutan)

Jika jumlah saham yang beredar meningkat akibat dari pemisahan saham (*stock split*), maka perhitungan laba per saham dasar untuk seluruh periode penyajian harus disesuaikan secara retrospektif.

Perusahaan dan entitas anaknya tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, oleh karena itu laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ac. Dividen (PSAK 201)

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

ad. Provisi (PSAK 237)

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anaknya memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dipulihkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

ae. Kontinjensi (PSAK 237)

Liabilitas kontinjen tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjen tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (Continued)

ab. Earnings per Share (SFAS 233) (Continued)

If the outstanding number of shares increase as result of stock split, the computation of basic earnings per share for all presentation periods is adjusted retrospectively.

The Company and its subsidiary have no outstanding dilutive potential dilutive ordinary shares as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, accordingly no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss other comprehensive income.

ac. Dividends (SFAS 201)

Dividend distributions to the Company's shareholders is recognised as a liability in the financial statement in the period which the dividends are approved by the Company's shareholders. Interim dividend distributions are recognised as a liability when the dividends are approved based on a Board of Directors resolution in accordance with the Company's Articles of Association.

ad. Provisions (SFAS 237)

Provisions are recognized when the Company and its subsidiary have a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre - tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

ae. Contingencies (SFAS 237)

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

Ekshibit E/37

Exhibit E/37

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

a). **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (PSAK 210)**

Peristiwa setelah periode pelaporan yang menyajikan bukti dari kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan bila material.

2. **MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (Continued)

a). **Events After the Reporting Period (SFAS 210)**

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. **PENGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN**

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset, liabilitas, komitmen, dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya unsur ketidakpastian melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

I. **Penggunaan Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

(i) **Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan kategori atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

(ii) **Cadangan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan**

Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu, hubungan dengan pelanggan dan status piutang dari pelanggan berdasarkan catatan piutang pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anaknya.

3. **USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS**

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions

The preparation of the Company's financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, commitments, and contingent liabilities which are reported. Due to inherent uncertainty in the estimates thus can lead to actual results reported in future periods differ from those estimates.

I. **Use of Judgements**

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

(i) **Classification of financial assets and financial liabilities**

The Company and its subsidiary determine the category of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2e.

(ii) **Allowance for impairment of financial assets**

The Company and its subsidiary evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current receivables status based on any available third party receivables reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company and its subsidiary expected to collect.

Ekshibit E/38

Exhibit E/38

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)

**Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi
(Lanjutan)**

I. Penggunaan Pertimbangan (Lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan: (Lanjutan)

**(ii) Cadangan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan
(Lanjutan)**

Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan. Nilai tercatat dari piutang pembiayaan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 21.807.099, Rp 21.470.513 dan Rp 20.387.689. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

II. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan entitas anaknya. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

(i) Nilai wajar atas instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substantial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 36.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

**Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions
(Continued)**

I. Use of Judgements (Continued)

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements: (Continued)

**(ii) Allowance for impairment of financial assets
(Continued)**

These specific allowances are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of financing receivables. The carrying amount of the Company's financing receivables before allowance for impairment losses as of

31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 were amounted to Rp 21,807,099, Rp 21,470,513 and Rp 20,387,689, respectively. Further details are shown in Note 5.

II. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiary. Such changes reflected in the assumptions as they occur.

(i) Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models. Further details are shown in Note 36.

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. **PENGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN** (Lanjutan)

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi
(Lanjutan)

II. **Estimasi dan Asumsi** (Lanjutan)

(ii) **Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan**

Perusahaan dan entitas anaknya telah menelaah pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Perusahaan membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi neto agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan cadangan perubahan kerugian penurunan nilai tersebut di masa mendatang.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

(iii) **Estimasi umur manfaat aset tetap dan aset takberwujud**

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Lihat Catatan 10 untuk jumlah tercatat aset tetap.

(iv) **Imbalan pasca-kerja**

Nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca-kerja.

3. **USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (Continued)

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions
(Continued)

II. **Estimates and Assumptions** (Continued)

(ii) **Allowance for impairment losses of financial assets**

The Company and its subsidiary have reviewed loans and receivables at each statements of financial positions date to assess whether impairment should be recognized in the profit or loss or not. In particular, justification by management is required to estimate the amount and timing of future cash flows when determining impairment. In the estimation of cash flows, the Company makes the justification of the financial condition of debtors and net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in reserves of changes in these impairment losses in the future.

Allowance for impairment losses that collectively assessed includes inherent credit losses in financing receivables portfolios with similar credit risk characteristics when objective evidence of impairment exist for those portfolios. In assessing the need for collective allowances for impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations, and economic factors. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances. Further details are shown in Note 5.

(iii) **Useful life estimate for fixed assets and intangible assets**

The Company and its subsidiary review periodically the estimated useful life of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. See Note 10 for the carrying amount of fixed assets.

(iv) **Post-employment benefits**

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations.

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. **PENGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN** (Lanjutan)

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi
(Lanjutan)

II. **Estimasi dan Asumsi** (Lanjutan)

(iv) **Imbalan pasca-kerja** (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban.

Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

(v) **Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham**

Perusahaan dan entitas anaknya mengukur biaya *equity-settled transactions* karyawan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal diberikan. Estimasi nilai wajar untuk pembayaran berbasis saham untuk menentukan model penilaian yang paling sesuai, tergantung pada persyaratan dan kondisi pemberian. Estimasi ini juga mengharuskan menentukan *input* yang paling tepat untuk valuasi model termasuk masa manfaat yang diharapkan dari opsi saham, volatilitas dan *dividend yield* dan membuat asumsi yang digunakan.

(vi) **Pajak penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14b.

(vii) **Aset pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14c.

3. **USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (Continued)

Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions
(Continued)

II. **Estimates and Assumptions** (Continued)

(iv) **Post-employment benefits** (Continued)

The Company and its subsidiary determine the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations.

In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefit obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions. Further details are shown in Note 17.

(v) **Management and employees stock option program**

The Company and its subsidiary measure the cost of equity-settled transactions with employees by reference to the fair value of the equity instruments at the date at which they are granted. Estimating fair value for share-based payment transactions requires determining the most appropriate valuation model, which is dependent on the terms and conditions of the grant. This estimate also requires determining the most appropriate inputs to the valuation model including the expected life of the share option, volatility and dividend yield and making assumptions about them.

(vi) **Income tax**

Significant judgement is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiary recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are shown in Note 14b.

(vii) **Deferred tax assets**

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are shown in Note 14c.

Ekshibit E/41

Exhibit E/41

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ December 2023	December 2022
Kas – Rupiah	5.164	11.889	11.495
Bank – Rupiah			
PT Bank Victoria International Tbk	277.315	264.593	149.565
PT Bank Tabungan Negara Tbk (UU Syariah)	200.000	150.000	60.115
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.575	131.780	259.182
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	43.198	72.663	128.083
PT Bank Central Asia Tbk	34.646	56.870	37.836
PT Bank CIMB Niaga Tbk Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	17.194	36.801	4.928
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.922	10.256	7.280
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	10.761	15.752	4.658
PT Bank Permata Tbk	10.178	10.692	4.437
PT Bank Jabar Banten Syariah	2.377	1.810	1.687
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	545	3.050	102.930
Lain-lain (saldo di bawah Rp 1.000)	303	30.452	31.248
Jumlah bank	673.482	885.744	792.237
Jumlah kas dan bank	678.646	897.633	803.732
Deposito berjangka – Rupiah			
PT Bank KB Bukopin Syariah	403.132	302.624	150.000
PT Bank Sahabat Sampoerna	200.773	100.000	50.000
PT Allo Bank Indonesia Tbk	100.000	100.000	-
PT Bank Jago Tbk	7.710	4.171	7.500
PT Bank Ina Perdana Tbk	2.054	2.015	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.003	5.132	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	351	348	341
PT Bank Mega Tbk	-	170.000	-
PT Bank Mandiri Taspen	-	102.078	4.182
PT Bank Panin Syariah Tbk	-	50.000	-
PT Bank BTPN Syariah Tbk	-	5.658	7.500
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	-	50.000
Jumlah deposito berjangka	716.023	842.026	269.523
Jumlah kas dan setara kas	1.394.669	1.739.659	1.073.255

Kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka diatas adalah sebagai berikut:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ December 2023	December 2022
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	6,75% – 7,50%	5,00% – 7,00%	5,00% – 7,00%

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of the followings:

Cash on hand – Rupiah	
Cash in banks – Rupiah	
PT Bank Victoria International Tbk	
PT Bank Tabungan Negara Tbk (UU Syariah)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank Jabar Banten Syariah	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Barat dan Banten Tbk	
Others (balance below Rp 1,000)	
Total cash in banks	
Total cash on hand and in banks	
Time deposits – Rupiah	
PT Bank KB Bukopin Syariah	
PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT Allo Bank Indonesia Tbk	
PT Bank Jago Tbk	
PT Bank Ina Perdana Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mega Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Panin Syariah Tbk	
PT Bank BTPN Syariah Tbk	
PT Bank Jabar Banten Syariah	
Total time deposits	
Total cash and cash equivalents	

The range of the interest rates from the above time deposits are as follows:

Time deposit interest rate
per annum
Rupiah

Ekshibit E/42

Exhibit E/42

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Rincian kontrak deposito Perusahaan dan entitas anaknya
berdasarkan periode jatuh temponya adalah sebagai berikut:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

The details of the deposit contract of the Company and its subsidiary
based on the maturity period are as follows:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	
Deposito berjangka	716.023	842.026	269.523	Time deposits
Dikurangi:				Less:
Periode jatuh tempo dibawah tiga bulan	716.023	842.026	269.523	Due date period below three months
Periode jatuh tempo di atas tiga bulan	-	-	-	Due date period above three months

5. PIUTANG PEMBIAYAAN

5. FINANCING RECEIVABLES

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	
Piutang pembiayaan konvensional	27.355.442	26.934.603	25.432.460	Conventional financing receivables
Piutang pembiayaan murabahah	816.748	728.736	510.314	Murabahah financing receivables
Jumlah piutang pembiayaan - bruto	28.172.190	27.663.339	25.942.774	Total financing receivables - gross

Rincian piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

The details of financing receivables are as follows:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	
Piutang pembiayaan - bruto	28.172.190	27.663.339	25.942.774	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(5.830.529)	(5.684.065)	(5.389.631)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	19.203	(20.933)	(63.335)	Unamortized transaction costs
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - neto	(553.765)	(487.828)	(102.119)	Joint financing and channeling - net
Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	(834.391)	(764.120)	(833.435)	Less : allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - neto	20.972.708	20.706.393	19.554.254	Total financing receivables - net

Angsuran piutang pembiayaan - bruto, yang akan diterima dari
konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai
berikut:

The installments of financing receivables - gross, which will be collected
from consumers in accordance with the due dates are as follows:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	
<= 1 tahun	14.634.451	14.319.041	13.616.597	<= 1 year
1 - 2 tahun	8.195.344	8.155.369	7.594.289	1 - 2 years
> 2 tahun	5.342.395	5.188.929	4.731.888	> 2 years
Jumlah	28.172.190	27.663.339	25.942.774	Total

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. **PIUTANG PEMBIAYAAN** (Lanjutan)

Pengelompokan piutang pembiayaan - bruto menurut jumlah hari
tunggakan adalah sebagai berikut:

5. **FINANCING RECEIVABLES** (Continued)

The classification of financing receivables - gross based on days
overdue are as follows:

	31 Mei/			31 Desember/December 31 Mei/			
	31 Desember/December	May 2024		2023	2022		
	May 2024	2023	2022	%	%	%	
Belum jatuh tempo	22.714.175	22.467.058	22.083.727	80,63	81,22	85,13	Current
Lewat jatuh tempo:							Past due:
1-30 hari	4.414.425	4.294.764	3.240.739	15,67	15,52	12,49	1-30 days
31-90 hari	725.317	601.608	413.108	2,57	2,17	1,59	31-90 days
91-120 hari	119.574	88.177	67.146	0,42	0,32	0,26	91-120 days
121-180 hari	146.303	151.538	86.287	0,52	0,55	0,33	121-180 days
> 180 hari	52.396	60.194	51.767	0,19	0,22	0,20	> 180 days
Jumlah	28.172.190	27.663.339	25.942.774	100,00	100,00	100,00	Total

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat piutang
pembiayaan selama periode berjalan:

The following tables show movement of carrying amount of receivables
during the period:

	31 Mei/May 2024				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	21.156.309	502.122	299.910	21.958.341	Beginning balance
Pergerakan antar tahap :					Interstage movement
- Pindah ke tahap 1	86.191	(81.175)	(5.016)	-	Transfer to stage 1 -
- Pindah ke tahap 2	(552.935)	556.383	(3.448)	-	Transfer to stage 2 -
- Pindah ke tahap 3 Aset	(240.706)	(94.213)	334.919	-	Transfer to stage 3 -
keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(6.194.534)	(335.251)	22.392	(6.507.393)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and financing interest receivable
Aset keuangan yang baru diperoleh	7.191.981	48.417	3.434	7.243.832	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(333.916)	(333.916)	Written-off
Saldo akhir	21.446.306	596.283	318.275	22.360.864	Ending balance
	31 Desember/December 2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	19.937.885	346.723	205.200	20.489.808	Beginning balance
Pergerakan antar tahap :					Interstage movement
- Pindah ke tahap 1	33.847	(32.477)	(1.370)	-	Transfer to stage 1 -
- Pindah ke tahap 2	(377.326)	378.062	(736)	-	Transfer to stage 2 -
- Pindah ke tahap 3 Aset	(213.565)	(10.421)	223.986	-	Transfer to stage 3 -
keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(12.494.602)	(429.584)	583.404	(12.340.782)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and financing interest receivable
Aset keuangan yang baru diperoleh	14.270.070	249.819	143.775	14.663.664	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(854.349)	(854.349)	Written-off
Saldo akhir	21.156.309	502.122	299.910	21.958.341	Ending balance

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. **PIUTANG PEMBIAYAAN** (Lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan selama periode berjalan: (Lanjutan)

	31 Desember/December 2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	14.034.387	346.818	181.806	14.563.011	Beginning balance
Pergerakan antar tahap :					Interstage movement:
- Pindah ke tahap 1	38.616	(35.899)	(2.717)	-	Transfer to stage 1 -
- Pindah ke tahap 2	(241.647)	244.462	(2.815)	-	Transfer to stage 2 -
- Pindah ke tahap 3 Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(139.920)	(27.280)	167.200	-	Transfer to stage 3 - Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and financing interest receivable
Aset keuangan yang baru diperoleh	15.795.248	189.139	100.348	16.084.735	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(375.831)	(375.831)	Written-off
Saldo akhir	<u>19.937.885</u>	<u>346.723</u>	<u>205.200</u>	<u>20.489.808</u>	Ending balance

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan selama periode/tahun berjalan:

5. **FINANCING RECEIVABLES** (Continued)

The following tables show movement of carrying amount of receivables during the period: (Continued)

	31 Desember/December 2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	14.034.387	346.818	181.806	14.563.011	Beginning balance
Pergerakan antar tahap :					Interstage movement:
- Pindah ke tahap 1	38.616	(35.899)	(2.717)	-	Transfer to stage 1 -
- Pindah ke tahap 2	(241.647)	244.462	(2.815)	-	Transfer to stage 2 -
- Pindah ke tahap 3 Aset keuangan yang telah dilunasi, perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(139.920)	(27.280)	167.200	-	Transfer to stage 3 - Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and financing interest receivable
Aset keuangan yang baru diperoleh	15.795.248	189.139	100.348	16.084.735	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(375.831)	(375.831)	Written-off
Saldo akhir	<u>19.937.885</u>	<u>346.723</u>	<u>205.200</u>	<u>20.489.808</u>	Ending balance

The following tables show movement of the allowance for impairment losses of financing receivables during the period/tahun:

	31 Mei/May 2024				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	392.270	104.798	267.052	764.120	Beginning balance
Pergerakan antar tahap :					Interstage movement:
- Pindah ke tahap 1	20.434	(16.054)	(4.380)	-	Transfer to stage 1 -
- Pindah ke tahap 2	(18.045)	21.088	(3.043)	-	Transfer to stage 2 -
- Pindah ke tahap 3 Aset keuangan yang telah dilunasi dan pengukuran kembali penurunan nilai - neto	(9.065)	(19.633)	28.698	-	Transfer to stage 3 - Financial assets that have been repaid and remeasurement of loss impairment - net
Aset keuangan yang baru diperoleh	125.586	13.461	3.004	142.051	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(333.916)	(333.916)	Written-off
Saldo akhir	<u>430.900</u>	<u>148.727</u>	<u>254.764</u>	<u>834.391</u>	Ending balance

	31 Desember/December 2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	623.311	82.102	128.022	834.335	Beginning balance
Pergerakan antar tahap :					Interstage movement:
- Pindah ke tahap 1	7.485	(6.625)	(860)	-	Transfer to stage 1 -
- Pindah ke tahap 2	(15.250)	15.680	(430)	-	Transfer to stage 2 -
- Pindah ke tahap 3 Aset keuangan yang telah dilunasi dan pengukuran kembali penurunan nilai - neto	(8.872)	(3.798)	12.670	-	Transfer to stage 3 - Financial assets that have been repaid and remeasurement of loss impairment - net
Aset keuangan yang baru diperoleh	254.390	53.604	128.277	436.271	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(854.349)	(854.349)	Written-off
Saldo akhir	<u>392.270</u>	<u>104.798</u>	<u>267.052</u>	<u>764.120</u>	Ending balance

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
piutang pembiayaan selama periode/tahun berjalan: (Lanjutan)

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

The following tables show movement of the allowance for impairment
losses of financing receivables during the period/tahun: (Continued)

31 Desember/December 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Saldo awal	569.178	124.934	147.919	842.031	Beginning balance
Pergerakan antar tahap :					Interstage movement
- Pindah ke tahap 1	15.848	(13.619)	(2.229)	-	Transfer to stage 1 -
- Pindah ke tahap 2	(24.611)	26.780	(2.169)	-	Transfer to stage 2 -
- Pindah ke tahap 3	(12.456)	(11.445)	23.901	-	Transfer to stage 3 -
Aset keuangan yang telah dilunasi dan pengukuran kembali penurunan nilai - neto	(341.147)	(73.716)	279.520	(135.343)	Financial assets that have been repaid and remeasurement of loss impairment - net
Aset keuangan yang baru diperoleh	416.499	29.168	56.911	502.578	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(375.831)	(375.831)	Written-off
Saldo akhir	623.311	82.102	128.022	833.435	Ending balance

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan
berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif adalah sebagai
berikut:

The movements in the allowance for impairment losses of financing
receivables based on individual and collective assessments are as
follows:

31 Mei/May 2024				
Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total		
Saldo awal	-	764.120	764.120	Beginning balance
Penambahan cadangan	63.760	340.427	404.187	Additions to allowance
selama periode berjalan - neto	(6.182)	(327.734)	(333.916)	during the period - net
Penghapusan	-	-	-	Written-off
Saldo akhir	57.578	776.813	834.391	Ending balance

31 Desember/December 2023				
Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total		
Saldo awal	159.028	674.407	833.435	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) cadangan selama tahun berjalan - neto	(159.028)	944.062	785.034	Additions (recovery) to allowance during the year - net
Penghapusan	-	(854.349)	(854.349)	Written-off
Saldo akhir	-	764.120	764.120	Ending balance

31 Desember/December 2022				
Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total		
Saldo awal	423.649	418.382	842.031	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) cadangan selama tahun berjalan - neto	(162.401)	529.636	367.235	Additions (recovery) to allowance during the year - net
Penghapusan	(102.220)	(273.611)	(375.831)	Written-off
Saldo akhir	159.028	674.407	833.435	Ending balance

Ekshibit E/46

Exhibit E/46

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

a. Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan

a. Financing receivables based on purpose of financing

31 Mei/May 2024							
Konvensional/Conventional					Syariah/ Sharia		
Investasi/ Investment	Modal Kerja/ Working Capital	Multiguna/ Multi- purpose	Sub- jumlah/ Sub-total	Sub- jumlah/ Murabahah	Total	Jumlah/	
Piutang pembiayaan - bruto	5.508.939	16.365.483	5.481.020	27.355.442	816.748	28.172.190	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(939.551)	(3.395.217)	(1.273.238)	(5.608.006)	(222.523)	(5.830.529)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(16.510)	(25.712)	38.990	(3.232)	22.435	19.203	Unamortized transaction cost
	4.552.878	12.944.554	4.246.772	21.744.204	616.660	22.360.864	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - neto	(15.545)	(498.407)	(39.813)	(553.765)	-	(553.765)	Joint financing and channeling - net
	4.537.333	12.446.147	4.206.959	21.190.439	616.660	21.807.099	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(144.441)	(458.273)	(212.598)	(815.312)	(19.079)	(834.391)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - neto	4.392.892	11.987.874	3.994.361	20.375.127	597.581	20.972.708	Total financing receivables - net

31 Desember/December 2023							
Konvensional/Conventional					Syariah/ Sharia		
Investasi/ Investment	Modal Kerja/ Working Capital	Multiguna/ Multi- purpose	Sub- jumlah/ Sub-total	Sub- jumlah/ Murabahah	Total	Jumlah/	
Piutang pembiayaan - bruto	5.371.843	16.380.716	5.182.044	26.934.603	728.736	27.663.339	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(919.333)	(3.411.412)	(1.157.816)	(5.488.561)	(195.504)	(5.684.065)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(21.179)	(39.947)	21.615	(39.511)	18.578	(20.933)	Unamortized transaction cost
	4.431.331	12.929.357	4.045.843	21.406.531	551.810	21.958.341	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - neto	(4.095)	(445.933)	(37.800)	(487.828)	-	(487.828)	Joint financing and channeling - net
	4.427.236	12.483.424	4.008.043	20.918.703	551.810	21.470.513	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(115.243)	(429.080)	(203.028)	(747.351)	(16.769)	(764.120)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - neto	4.311.993	12.054.344	3.805.015	20.171.352	535.041	20.706.393	Total financing receivables - net

Ekshibit E/47

Exhibit E/47

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

a. Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan
(Lanjutan)

	31 Desember/December 2022					
	Konvensional/Conventional				Syariah/ Sharia	
	Modal Kerja/ Working		Multiguna/ Multi- purpose		Sub- jumlah/ Murabahah	
	Investasi/ Investment	Capital	Sub-total		Total	Jumlah/ Total
Piutang pembiayaan - bruto	4.140.081	15.729.183	5.563.196	25.432.460	510.314	25.942.774
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(672.153)	(3.360.801)	(1.219.275)	(5.252.229)	(137.402)	(5.389.631)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(22.876)	(57.579)	7.006	(73.449)	10.114	(63.335)
	3.445.052	12.310.803	4.350.927	20.106.782	383.026	20.489.808
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - neto	(109)	(79.711)	(22.299)	(102.119)	-	(102.119)
	3.444.943	12.231.092	4.328.628	20.004.663	383.026	20.387.689
Cadangan kerugian penurunan nilai	(147.441)	(472.990)	(204.505)	(824.936)	(8.499)	(833.435)
Jumlah piutang pembiayaan - neto	3.297.502	11.758.102	4.124.123	19.179.727	374.527	19.554.254

Pembiayaan investasi diberikan untuk pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi.

Pembiayaan modal kerja diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha.

Kegiatan pembiayaan investasi dan modal kerja ditujukan untuk debitur yang :

- memiliki usaha produktif; dan/atau
- memiliki ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pembiayaan multiguna diberikan untuk pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif.

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

a. Financing receivables based on purpose of financing
(Continued)

	Financing receivables - gross
	Unearned financing income
	Unamortized transaction cost
	Joint financing and channeling - net
	Allowance for impairment losses
	Total financing receivables - net

Investment financing were extended to finance capital goods and services needed for business/investment activities.

Working capital financing were extended for working capital needs which fully utilized within one cycle of business activities.

Investment and working capital financing activities were intended to borrowers which :

- have productive businesses; and/or
- have ideas to develop the productive businesses.

Multipurpose financing were extended for financing of goods/services for consumption and non-business related or productive activities.

Ekshibit E/48

Exhibit E/48

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

b. Piutang pembiayaan berdasarkan jenis pengikatan

b. Financing receivables based on type of contract

31 Mei/May 2024					
	Sewa pembiayaan/ <i>Finance lease</i>	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing</i>	Pembiayaan Murabahah/ <i>Murabahah financing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Piutang pembiayaan - bruto	18.628.081	8.727.361	816.748	28.172.190	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(3.608.074)	(1.999.932)	(222.523)	(5.830.529)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(46.307)	43.075	22.435	19.203	Unamortized transaction cost
	14.973.700	6.770.504	616.660	22.360.864	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - neto	(490.665)	(63.100)	-	(553.765)	Joint financing and channeling - net
	14.483.035	6.707.404	616.660	21.807.099	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(491.689)	(323.623)	(19.079)	(834.391)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - neto	13.991.346	6.383.781	597.581	20.972.708	Total financing receivables - net
31 Desember/December 2023					
	Sewa pembiayaan/ <i>Finance lease</i>	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing</i>	Pembiayaan Murabahah/ <i>Murabahah financing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Piutang pembiayaan - bruto	18.730.616	8.203.987	728.736	27.663.339	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(3.661.404)	(1.827.157)	(195.504)	(5.684.065)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(63.342)	23.831	18.578	(20.933)	Unamortized transaction cost
	15.005.870	6.400.661	551.810	21.958.341	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - neto	(442.680)	(45.148)	-	(487.828)	Joint financing and channeling - net
	14.563.190	6.355.513	551.810	21.470.513	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(467.932)	(279.419)	(16.769)	(764.120)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - neto	14.095.258	6.076.094	535.041	20.706.393	Total financing receivables - net

Ekshibit E/49

Exhibit E/49

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

b. Piutang pembiayaan berdasarkan jenis pengikatan
(Lanjutan)

b. Financing receivables based on type of contract
(Continued)

	31 Desember/December 2022				
	Sewa pembiayaan/ Finance lease	Pembiayaan konsumen/ Consumer financing	Pembiayaan Murabahah/ Murabahah financing	Jumlah/ Total	
Piutang pembiayaan - bruto	17.445.172	7.987.288	510.314	25.942.774	Financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(3.540.554)	(1.711.675)	(137.402)	(5.389.631)	Unearned financing income
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(80.460)	7.011	10.114	(63.335)	Unamortized transaction cost
	13.824.158	6.282.624	383.026	20.489.808	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - neto	(77.612)	(24.507)	-	(102.119)	Joint financing and channeling - net
	13.746.546	6.258.117	383.026	20.387.689	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(548.780)	(276.156)	(8.499)	(833.435)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang pembiayaan - neto	13.197.766	5.981.961	374.527	19.554.254	Total financing receivables - net

Informasi pokok lainnya sehubungan dengan piutang
pembiayaan adalah sebagai berikut:

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah
piutang pembiayaan sebesar 3,83%, 3,56% dan 4,09%
masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023
dan 2022.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai
yang dibentuk memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul
akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan tersebut.

Seluruh transaksi pembiayaan dilakukan dengan pihak ketiga.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan
atas kendaraan bermotor dan alat-alat berat berkisar antara 6-60 bulan,
serta perumahan (KPR) berkisar 12-84 bulan.

Rincian bunga kontraktual dan margin syariah per tahun untuk piutang
pembiayaan adalah sebagai berikut:

Other significant information relating to financing receivables is as
follows:

Percentage of the allowance for impairment losses to
financing receivables was 3.83%, 3.56% and 4.09% as of 31 May 2024, 31
December 2023 and 2022, respectively.

The management believes that the allowance for impairment losses
was sufficient to cover possible losses arising from uncollectible
financing receivables.

All of the Company's financing transactions are entered
with third parties.

The period of financing installment contract for vehicle and heavy
equipment cranged from 6-60 months, and for housing ranges
between 12-84 months.

The detail of contractual interest and sharia margin rates per annum
on financing receivables are as follows:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December		
	%	2023	2022	
	%	%	%	
Mobil	15 - 20	15 - 20	16 - 21	Cars
Sepeda motor	36 - 40	35 - 40	36 - 40	Motorcycles
Properti	17 - 20	17 - 20	18 - 20	Property
Alat berat dan mesin	9 - 17	9 - 16	14 - 16	Heavy equipment and machinery
Channeling	16 - 28	16 - 28	18 - 30	Channeling
Syariah	17 - 25	17 - 25	19 - 26	Sharia

Ekshibit E/50

Exhibit E/50

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas kendaraan bermotor dan properti (bangunan) yang dibiayai Perusahaan dan faktur atas kendaraan bermotor/alat berat/obyek jaminan yang dibiayai oleh Perusahaan.

Piutang pembiayaan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 7.461.574, Rp 6.932.406 dan Rp 8.902.225 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 13) dan sebesar Rp 1.561.651, Rp 2.365.225 dan Rp 832.102 digunakan sebagai jaminan surat berharga yang diterbitkan (Catatan 15).

Channeling adalah platform layanan teknologi peer-to-peer milik FIT, entitas anak.

Perusahaan bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan risiko terhadap aset dan pembiayaan yang diberikan Perusahaan, terutama PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Pan Pasific Insurance, PT AIA Financial, PT FWD Insurance Indonesia dan PT Chubb Life Insurance Indonesia. Seluruh perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Perusahaan adalah pihak ketiga.

5. FINANCING RECEIVABLES (Continued)

As the collateral to the financing receivables, the Company receives the Book of Vehicle Ownership (BPKB), Proprietary Certificate (SHM) and Property Use Right Certificate (SHGB) of the vehicles and property (building) financed by the Company and purchase invoices of the motor vehicles/heavy equipment/collateral asset financed by the Company.

Financing receivable as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 7,461,574, Rp 6,932,406 and Rp 8,902,225 were used as collateral to borrowings (Note 13) and amounting to Rp 1,561,651, Rp 2,365,225 and Rp 832,102 were used as collateral to securities issued, respectively (Note 15).

Channeling is a peer-to-peer lending platform with technology services owns by FIT, a subsidiary.

The Company engages several insurance companies to provide risk protection for assets and financing provided by the Company, mainly PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Pan Pasific Insurance, PT AIA Financial, PT FWD Insurance Indonesia and PT Chubb Life Insurance Indonesia. All insurance companies that the engaged by the Company are third parties.

6. PIUTANG IJARAH DAN IMBT

6. IJARAH AND IMBT RECEIVABLES

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	
Piutang ijarah	41	68	307	Ijarah receivables
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)	6.285	3.592	216	Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) receivables
Jumlah	6.326	3.660	523	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(297)	(92)	(114)	Allowance for impairment losses
Neto	6.029	3.568	409	Net
Aset ijarah	1.404	2.273	8.436	Ijarah assets
Akumulasi penyusutan	(945)	(1.456)	(6.007)	Accumulated depreciation
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5)	(13)	(170)	Allowance for impairment losses
Sub - Jumlah	454	804	2.259	Sub - Total
Aset IMBT	95.872	59.606	5.313	IMBT assets
Akumulasi penyusutan	(20.162)	(10.267)	(169)	Accumulated depreciation
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.553)	(942)	(45)	Allowance for impairment losses
Sub - Jumlah	73.157	48.397	5.099	Sub - Total
Jumlah piutang ijarah dan IMBT - neto	79.640	52.769	7.767	Total ijarah and IMBT receivables - net

Ekshibit E/51

Exhibit E/51

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG IJARAH DAN IMBT (Lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December	
		2023	2022
Saldo awal tahun	(1.047)	(329)	(1.128)
Mutasi periode berjalan:			
- Piutang ijarah dan IMBT	(206)	22	99
- Aset ijarah	8	157	745
- Aset IMBT	(1.610)	(897)	(45)
Saldo akhir	(2.855)	(1.047)	(329)

Aset ijarah terdiri dari pembiayaan umroh, pendidikan, kebutuhan multijasa dan wisata halal.

Penyusutan dan kerugian penurunan nilai dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

6. IJARAH AND IMBT RECEIVABLES (Continued)

Mutation of allowance for impairment losses are as follows:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December		
		2023	2022	
Saldo awal tahun	(1.047)	(329)	(1.128)	Beginning balance
Mutasi periode berjalan:				Mutation during the period:
- Piutang ijarah dan IMBT	(206)	22	99	Ijarah and IMBT receivables -
- Aset ijarah	8	157	745	Ijarah assets -
- Aset IMBT	(1.610)	(897)	(45)	IMBT assets -
Saldo akhir	(2.855)	(1.047)	(329)	Ending balance

Ijarah assets consist of financing for umrah, education, multiservices needs and halal tourism.

Depreciation and impairment losses was charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

7. PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December	
		2023	2022
Piutang dalam proses penyelesaian – neto	243.763	147.294	72.045
Piutang karyawan	47.593	48.463	52.921
Piutang penerimaan angsuran konsumen	41.055	50.312	33.086
Premi asuransi	1.640	995	2.240
Lain-lain	5.472	3.651	2.343
Jumlah	339.523	250.715	162.635

Piutang dalam proses penyelesaian – pihak ketiga dinyatakan dalam nilai neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 48.351, Rp 44.230 dan Rp 10.205. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tersebut, cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang dalam proses penyelesaian – pihak ketiga.

Piutang penerimaan angsuran konsumen merupakan pembayaran angsuran konsumen yang diantaranya dilakukan secara online melalui fasilitas layanan pembayaran pelanggan (payment point) seperti jaringan ATM Prima, ATM Bersama, jaringan toko ritel Indomaret dan Alfamart (termasuk di dalamnya jaringan Alfa Midi, Dandan, dan Lawson) serta marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan Gojek. Fasilitas payment point ini akan meneruskan angsuran yang dibayarkan konsumen tersebut ke rekening Perusahaan di beberapa bank dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dari tanggal angsuran konsumen diterima.

7. OTHER RECEIVABLES – THIRD PARTIES

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December		
		2023	2022	
Piutang dalam proses penyelesaian – neto	243.763	147.294	72.045	Receivables in the settlement process - net
Piutang karyawan	47.593	48.463	52.921	Employee receivables
Piutang penerimaan angsuran konsumen	41.055	50.312	33.086	Customer installment receipt Receivables
Premi asuransi	1.640	995	2.240	Insurance premium
Lain-lain	5.472	3.651	2.343	Others
Jumlah	339.523	250.715	162.635	Total

Receivables in the settlement process – third parties are recorded at net amount, after deducting the allowance for impairment losses as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 48,351, Rp 44,230 and Rp 10,205, respectively. Management believes that the allowance for impairment losses are adequate to cover possible losses from uncollectible receivables from receivables in the settlement process – third parties.

Customer installment receipt receivables are customer installment such paid through online customer's payment channel (payment point) such as ATM networks of Prima, ATM Bersama and outlets of Indomaret and Alfamart retail stores (including the store chains of Alfa Midi, Dandan, and Lawson) and marketplace such as Tokopedia, Shopee, Blibli and Gojek. These channels will transfer the installment paid to the Company's bank account in several bank within 1 (one) day up to 2 (two) days from the date that the customer installment is received.

Ekshibit E/52

Exhibit E/52

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF

Perusahaan memiliki beberapa kontrak *cross currency* dan *interest rate* swap dengan beberapa bank. Perincian dari kontrak-kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

8. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES)

The Company has several *cross currency* and *interest rate* swap contracts with several banks. The details of these contracts are as follows:

31 Mei/May 2024					
	Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount (full amount)		Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nilai wajar/ <i>Fair value</i> Aset (liabilitas) derivatif/ Derivative assets (liabilities)
Pihak lawan/ Counterparty					
Cross Currency and Interest Rate Swap					
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD	3.000.000	16-Sep-2021	16-Sep-2024	6.430
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD	3.000.000	13-Oct-2021	15-Oct-2024	6.424
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	2.000.000	23-Nov-2021	25-Nov-2024	4.104
PT Bank Permata Tbk	USD	3.000.000	18-Jan-2022	20-Jan-2025	6.282
PT Bank Permata Tbk	USD	4.500.000	14-Feb-2022	14-Feb-2025	8.906
PT Bank Permata Tbk	USD	6.000.000	14-Mar-2022	14-Mar-2025	12.154
PT Bank CTBC Indonesia	USD	10.500.000	22-Feb-2023	20-Feb-2026	11.192
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	8.000.000	22-May-2023	22-May-2026	12.593
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	USD	9.000.000	19-Jun-2023	26-Jun-2026	(13.355)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	9.000.000	27-Jul-2023	27-Jul-2026	11.981
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	USD	18.000.000	16-Aug-2023	28-Aug-2026	(19.183)
PT Bank Permata Tbk	USD	15.000.000	27-Nov-2023	27-Nov-2026	13.134
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	USD	25.000.000	18-Dec-2023	18-Dec-2026	(8.770)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	USD	10.000.000	18-Jan-2024	25-Jan-2027	(6.483)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	20.000.000	15-Feb-2024	15-Feb-2027	11.770
PT Bank Permata Tbk	USD	20.000.000	21-Mar-2024	21-Mar-2027	15.084
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	9.444.444	26-Mar-2024	26-Mar-2027	4.501
PT Bank Permata Tbk	USD	6.500.000	5-Apr-2024	5-Apr-2027	2.550
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	USD	10.000.000	18-Apr-2024	26-Apr-2027	304
PT Bank Permata Tbk	USD	9.500.000	18-Apr-2024	18-Apr-2027	3.769
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	11.000.000	7-May-2024	21-May-2027	1.808
					85.195

31 Desember/December 2023					
Pihak lawan/ Counterparty	Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount (full amount)	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nilai wajar/Fair value Aset (liabilitas) derivatif/ Derivative assets (liabilities)	
Cross Currency and Interest Rate Swap					
PT Bank Permata Tbk	USD 1.666.667	13-Apr-2021	15-Apr-2024		927
PT Bank Permata Tbk	USD 2.216.667	20-Apr-2021	22-Apr-2024		906
PT Bank Permata Tbk	USD 1.950.000	20-Apr-2021	22-Apr-2024		797
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 4.500.000	16-Sep-2021	17-Sep-2024		5.658
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD 6.000.000	13-Oct-2021	15-Oct-2024		7.655
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 4.000.000	23-Nov-2021	23-Nov-2024		4.846
PT Bank Permata Tbk	USD 5.000.000	18-Jan-2022	20-Jan-2025		6.262
PT Bank Permata Tbk	USD 7.500.000	14-Feb-2022	14-Feb-2025		8.462
PT Bank Permata Tbk	USD 7.500.000	14-Mar-2022	14-Mar-2025		8.563
PT Bank CTBC Indonesia	USD 13.000.000	22-Feb-2023	20-Feb-2026		1.865
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 10.000.000	22-May-2023	22-May-2026		6.038
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	USD 10.000.000	26-Jun-2023	26-Jun-2026		(1.211)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 10.000.000	27-Jul-2023	27-Jul-2026		3.445
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	USD 20.000.000	28-Aug-2023	28-Aug-2026		(1.934)
PT Bank Permata Tbk	USD 15.000.000	27-Nov-2023	27-Nov-2026		(957)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	USD 25.000.000	18-Dec-2023	18-Dec-2026		5.335
					56.657

Ekshibit E/53

Exhibit E/53

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF (Lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa kontrak *cross currency* dan *interest rate swap* dengan beberapa bank. Perincian dari kontrak-kontrak tersebut adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

8. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES) (Continued)

The Company has several *cross currency* and *interest rate swap* contracts with several banks. The details of these contracts are as follows: (Continued)

31 Desember/December 2022					
Pihak lawan/ Counterparty	Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount (full amount)		Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Nilai wajar/Fair value Aset derivatif/ Derivative assets
Cross Currency and Interest Rate Swap					
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD	2.500.000	19-Mar-2020	23-Mar-2023	515
PT Bank Permata Tbk	USD	5.000.000	7-Apr-2021	15-Apr-2024	2.368
PT Bank Permata Tbk	USD	6.650.000	13-Apr-2021	22-Apr-2024	2.158
PT Bank Permata Tbk	USD	5.850.000	13-Apr-2021	22-Apr-2024	1.898
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD	10.500.000	16-Sep-2021	17-Sep-2024	15.785
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	USD	12.000.000	13-Oct-2021	15-Oct-2024	17.430
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD	8.000.000	23-Nov-2021	25-Nov-2024	11.438
PT Bank Permata Tbk	USD	9.000.000	18-Jan-2022	20-Jan-2025	13.478
PT Bank Permata Tbk	USD	13.500.000	14-Feb-2022	14-Feb-2025	18.744
PT Bank Permata Tbk	USD	13.500.000	14-Mar-2022	14-Mar-2025	19.242
					103.056

Perusahaan melakukan kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima.

The Company entered into *cross currency swap* and *interest rate swap* contracts to hedge the risk of fluctuations in cash flows arising from exchange rates and interest rates on borrowing.

Perubahan atas nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, yang secara efektif menghapus variabilitas arus kas dari pinjaman terkait, dicatat di ekuitas. Nilai ini kemudian diakui dalam laporan laba rugi sebagai penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs dan beban bunga pinjaman terkait yang dilindungi nilai pada periode yang sama dimana selisih kurs dan beban bunga tersebut diakui pada perkiraan laba rugi.

Changes in the fair value of *cross currency swap* and *interest rate swap* contract designated hedging instruments that effectively offset the variability of cash flows associated with the borrowings are recorded in equity. The amounts subsequently are recognized to the profit or loss as adjustments of the exchange rate differences and interest payments related to the hedged borrowings in the same period in which the related exchange rate differences and interest affects profit or loss.

(Kerugian) dan keuntungan kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp 72.526), Rp 666 dan (Rp 10.267) disajikan sebagai "(Kerugian) keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan akan diakui dalam laporan laba rugi pada saat realisasinya.

The cumulative (loss) and gain arising from the changes in fair values of the derivative instruments as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 amounting to (Rp 72,526), Rp 666 and (Rp 10,267), respectively, were presented as "Cumulative (losses) gain on derivative instrument for cash flow hedges - net" under the "Equity" section in the consolidated statement of financial position and will be recognized in the statement of profit or loss upon its realization.

Ekshibit E/54

Exhibit E/54

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

9. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023 2022		
Beban Dibayar Di Muka				Prepaid Expenses
Asuransi	13.276	300	333	Insurance
Bunga	681	11.493	2.485	Interest
Sewa	390	458	496	Rent
Lain-lain	862	347	454	Others
Sub-jumlah	15.209	12.598	3.768	Sub-total
Uang Muka				Advances
Honorarium tenaga ahli	12.804	-	-	Professional fees
Akses biro kredit	10.633	12.872	13.147	Loan access bureau
Implementasi proyek IT	8.919	8.131	6.671	IT implementation project
Uang muka	325	836	1.181	Advance payment
Lain-lain	1.156	-	-	Others
Sub-jumlah	33.837	21.839	20.999	Sub-total
Jumlah	49.046	34.437	24.767	Total

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	31 Mei/May 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan Pemilikan langsung						Acquisition cost Direct ownership
Tanah	207.193	-	-	-	207.193	Land
Bangunan dan prasarana	446.797	549	(25)	2.630	449.951	Building and improvements
Peralatan kantor	326.524	5.187	(955)	125	330.881	Office equipment
Kendaraan	338.710	33.503	(28.714)	-	343.499	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	24.703	363	(187)	84	24.963	Furniture and fixtures
	1.343.927	39.602	(29.881)	2.839	1.356.487	
Aset dalam pembangunan	1.102	2.537	-	(2.839)	800	Asset under construction
Jumlah Harga Perolehan	1.345.029	42.139	(29.881)	-	1.357.287	Total Acquisition Cost
Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung						Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan dan prasarana	245.587	9.682	(10)	-	255.259	Building and improvements
Peralatan kantor	230.516	15.891	(884)	-	245.523	Office equipment
Kendaraan	126.431	25.719	(16.938)	-	135.212	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	21.668	401	(185)	-	21.884	Furniture and fixtures
Jumlah Akumulasi Penyusutan	624.202	51.693	(18.017)	-	657.878	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	720.827				699.409	Carrying Amount

Ekshibit E/55

Exhibit E/55

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS (Continued)

31 Desember/December 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan Pemilikan langsung						Acquisition cost Direct ownership
Tanah	207.193	-	-	-	207.193	Land
Bangunan dan prasarana	432.605	3.741	-	10.451	446.797	Building and improvements
Peralatan kantor	273.812	57.523	(5.571)	760	326.524	Office equipment
Kendaraan	277.440	119.118	(57.848)	-	338.710	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	22.790	646	(237)	1.504	24.703	Furniture and fixtures
	1.213.840	181.028	(63.656)	12.715	1.343.927	
Aset dalam pembangunan	1.902	11.915	-	(12.715)	1.102	Asset under construction
Jumlah Harga Perolehan	1.215.742	192.943	(63.656)	-	1.345.029	Total Acquisition Cost
Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung						Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan dan prasarana	221.982	23.605	-	-	245.587	Building and improvements
Peralatan kantor	199.482	36.479	(5.445)	-	230.516	Office equipment
Kendaraan	114.147	56.392	(44.108)	-	126.431	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	20.986	908	(226)	-	21.668	Furniture and fixtures
Jumlah Akumulasi Penyusutan	556.597	117.384	(49.779)	-	624.202	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	659.145				720.827	Carrying Amount

31 Desember/December 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan Pemilikan langsung						Acquisition cost Direct ownership
Tanah	207.193	-	-	-	207.193	Land
Bangunan dan prasarana	425.524	1.900	(123)	5.304	432.605	Building and improvements
Peralatan kantor	253.157	19.820	(4.968)	5.803	273.812	Office equipment
Kendaraan	216.083	132.555	(71.198)	-	277.440	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	22.149	832	(538)	347	22.790	Furniture and fixtures
	1.124.106	155.107	(76.827)	11.454	1.213.840	
Aset dalam pembangunan	4.430	8.926	-	(11.454)	1.902	Asset under construction
Jumlah Harga Perolehan	1.128.536	164.033	(76.827)	-	1.215.742	Total Acquisition Cost
Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung						Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan dan prasarana	197.626	24.461	(105)	-	221.982	Building and improvements
Peralatan kantor	172.566	31.789	(4.873)	-	199.482	Office equipment
Kendaraan	131.010	43.048	(59.911)	-	114.147	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	20.693	808	(515)	-	20.986	Furniture and fixtures
Jumlah Akumulasi Penyusutan	521.895	100.106	(65.404)	-	556.597	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	606.641				659.145	Carrying Amount

Ekshibit E/56

Exhibit E/56

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 rincian aset dalam pembangunan dengan persentase penyelesaian masing-masing sebesar 35%, 66% dan 43% sebagai berikut:

Proyek	Perkiraan tahun penyelesaian/ Estimation of completion	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December		Project
			2023	2022	
Bangunan dan prasarana	2024	648	1.056	1.610	Building and improvement
Peralatan kantor	2024	144	28	-	Office equipment
Perabot dan perlengkapan kantor	2024	8	18	292	Furniture and fixtures
		<u>800</u>	<u>1.102</u>	<u>1.902</u>	

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada operasi adalah sejumlah Rp 51.693 dan Rp 46.516 masing-masing untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, serta Rp 117.384 dan Rp 100.106 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 27).

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") yang memiliki masa manfaat yang akan berakhir antara tahun 2025 sampai tahun 2051. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah karena tanah tersebut diperoleh secara sah dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.

Pengurangan aset tetap untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari penghapusbukuan peralatan kantor dan rehabilitasi gedung kantor, serta penjualan aset tetap kendaraan dan peralatan kantor dengan rincian keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December		
		2023	2022	
Hasil penjualan	17.064	27.380	31.632	Proceeds
Nilai tercatat	(11.863)	(13.878)	(11.423)	Carrying amount
Keuntungan penjualan aset tetap	<u>5.201</u>	<u>13.502</u>	<u>20.209</u>	Gain on sale of fixed assets

Keuntungan atas penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 24).

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional adalah masing-masing sebesar Rp 311.454, Rp 294.166 dan Rp 251.363.

Seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir dan risiko kerugian lainnya (all risks) dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 470.730, Rp 453.806 dan Rp 448.977 pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap terhadap risiko-risiko yang dipertanggungkan.

Tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022.

10. FIXED ASSETS (Continued)

As of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 the details of asset under construction with percentage of completion of are 35%, 66% and 43%, respectively, are as follows:

Depreciation charged to operations was amounted to Rp 51,693 and Rp 46,516 for the five-month period ended 31 May 2024 and 2023, respectively and Rp 117,384 and Rp 100,106 for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively (Note 27).

The Company owns several plots of land with "Property Use Rights" titles ("HGB") with remaining useful lives that will expire in the various years between 2025 to 2051. The management of the Company believes that there will be no difficulty in extending the land rights as the land were acquired legally and supported by sufficient evidences of ownership.

Deductions of fixed assets for the five-month period ended 31 May 2024 and for the year ended 31 December 2023 and 2022 consisted of written off office equipment and leasehold improvement, and sales of fixed assets - vehicles and office equipment with details of gain on sale are as follows:

Gain on sale of fixed assets is recognized as part of "Other Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 24).

As of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 the cost of fixed asset which have been fully depreciated but still in use in the operational activities amounted to Rp 311,454, Rp 294,166 and Rp 251,363, respectively.

All fixed assets, except for land, are covered against losses from fire, flood and other risks (all risks) with a total sum insured amounting to Rp 470,730, Rp 453,806 and Rp 448,977 as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, respectively. The management believes that the sum insured is sufficient to cover the possible losses that may arise from the said insured risks.

There were no fixed assets pledged as collateral as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022.

Ekshibit E/57

Exhibit E/57

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. **ASET TETAP** (Lanjutan)

Manajemen Perusahaan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap.

Manajemen Perusahaan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan jumlah tercatat.

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan.

10. **FIXED ASSETS** (Continued)

The management of the Company and its subsidiary believes that there were no conditions or event that indicate impairment in the carrying amount of its fixed assets, and therefore an allowance for impairment losses of fixed assets was not considered necessary.

The management of the Company and its subsidiary believes that there is no significant difference between the fair value and the carrying amount of fixed assets.

All of fixed assets as at the reporting date are fully used to support the Company's operation activities.

11. **ASET HAK-GUNA**

Klasifikasi kelompok utama aset hak-guna adalah sebagai berikut:

11. **RIGHT-OF-USE ASSETS**

The major classification of right-of-use assets are as follows:

31 Mei/May 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
Sewa bangunan	117.656		10.282	(13.258)	114.680
Akumulasi					Buildings leases
penyusutan					Accumulated depreciation
Sewa bangunan	76.631	9.500	(13.258)	72.873	Buildings leases
Nilai Tercatat	<u>41.025</u>			<u>41.807</u>	Carrying Amount
31 Desember/December 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
Sewa bangunan	105.319	25.218	(12.881)	117.656	Buildings leases
Akumulasi					Accumulated depreciation
penyusutan					Buildings leases
Sewa bangunan	66.900	22.612	(12.881)	76.631	Buildings leases
Nilai Tercatat	<u>38.419</u>			<u>41.025</u>	Carrying Amount
31 Desember/December 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
Sewa bangunan	81.391	23.928	-	105.319	Buildings leases
Akumulasi					Accumulated depreciation
penyusutan					Buildings leases
Sewa bangunan	45.356	21.544	-	66.900	Buildings leases
Nilai Tercatat	<u>36.035</u>			<u>38.419</u>	Carrying Amount

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada operasi adalah sejumlah Rp 9.500 dan Rp 9.293 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 serta Rp 22.612 dan Rp 21.544 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 27).

Depreciation charged to operations was amounted to Rp 9,500 and Rp 9,293 for the five-month period ended 31 May 2024 and 2023, respectively and Rp 22,612 and Rp 21,544 for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively (Note 27).

Ekshibit E/58

Exhibit E/58

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK
PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIVE-
MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED) AND THE
YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. **ASET HAK-GUNA** (Lanjutan)

Beberapa transaksi sewa gudang dan kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

11. **RIGHT-OF-USE ASSETS** (Continued)

Some leases of warehouses and offices contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

12. **ASET TAKBERWUJUD**

12. **INTANGIBLE ASSETS**

31 Mei/May 2024						
Saldo awal/ Beginning	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending		
balance				balance		
Harga perolehan Pemilikan langsung					Acquisition cost	Direct ownership
Piranti lunak	427.298	2.173	-	429.471		Software
Piranti lunak dalam penyelesaian	2.364	7.861	-	10.225		Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	429.662	10.034	-	439.696	Total Acquisition Cost	
Akumulasi amortisasi Pemilikan langsung					Accumulated amortization	Direct ownership
Piranti lunak	174.496	28.849	-	203.345		Software
Nilai Tercatat	255.166			236.351	Carrying Amount	
31 Desember/December 2023						
Saldo awal/ Beginning	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending		
balance				balance		
Harga perolehan Pemilikan langsung					Acquisition cost	Direct ownership
Piranti lunak	191.059	144.413	-	427.298		Software
Piranti lunak dalam penyelesaian	69.077	25.113	-	2.364		Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	260.136	169.526	-	429.662	Total Acquisition Cost	
Akumulasi amortisasi Pemilikan langsung					Accumulated amortization	Direct ownership
Piranti lunak	120.637	53.859	-	174.496		Software
Nilai Tercatat	139.499			255.166	Carrying Amount	
31 Desember/December 2022						
Saldo awal/ Beginning	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending		
balance				balance		
Harga perolehan Pemilikan langsung					Acquisition cost	Direct ownership
Piranti lunak	146.720	32.228	-	191.059		Software
Piranti lunak dalam penyelesaian	7.618	73.570	-	69.077		Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	154.338	105.798	-	260.136	Total Acquisition Cost	
Akumulasi amortisasi Pemilikan langsung					Accumulated amortization	Direct ownership
Piranti lunak	98.145	22.492	-	120.637		Software
Nilai Tercatat	56.193			139.499	Carrying Amount	

Ekshibit E/59

Exhibit E/59

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. **ASET TAKBERWUJUD** (Lanjutan)

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada operasi adalah sejumlah Rp 28.849 dan Rp 11.641 masing-masing untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 serta Rp 53.859 dan Rp 22.492 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 27).

12. **INTANGIBLE ASSETS** (Continued)

Amortization charged to operations was amounted to Rp 28,849 and Rp 11,641 for the five-month period ended 31 May 2024 and 2023, respectively and Rp 53,859 and Rp 22,492 for the year ended 31 December 2023 and 2022, (Note 27).

13. **PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA**

Pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan terdiri dari:

13. **FUND BORROWINGS – THIRD PARTIES**

Borrowings from financial institutions consist of the following:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ December 2023	December 2022	
Pinjaman (Dolar AS)				Borrowings (US Dollar)
Pinjaman Sindikasi	2.689.871	1.919.292	1.085.439	Syndicated Loan
PT Bank CIMB Niaga Tbk	332.284	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	260.048	-	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CTBC Indonesia	170.657	200.408	-	PT Bank CTBC Indonesia
responsAbility SICAV (Lux) – konsolidasian	-	89.927	275.292	responsAbility SICAV (Lux) – consolidated
Sub-jumlah pinjaman (Dolar AS)	3.452.860	2.209.627	1.360.731	Sub-total borrowings (US Dollar)
Pinjaman (Rupiah)				Borrowings (Rupiah)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.503.951	1.221.847	1.963.402	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	936.111	980.555	1.654.167	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	873.971	1.052.320	1.667.859	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Pinjaman Sindikasi (Agen : PT Bank DKI)	858.406	1.076.474	931.386	Syndicated Loan (Agent : PT Bank DKI)
PT Bank KEB Hana Indonesia PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT	454.167	330.278	237.778	PT Bank KEB Hana Indonesia PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	297.090	132.177	212.787	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	283.333	-	-	PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Bank Jago Tbk	244.722	296.893	300.000	PT Bank Jago Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	202.363	276.891	230.756	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DKI	190.991	261.214	422.774	PT Bank DKI
PT Bank Shinhan Indonesia	66.667	100.000	166.667	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Permata Tbk	-	35.417	135.417	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Permata Syariah Tbk	-	10.417	35.417	PT Bank Permata Syariah Tbk
PT Bank UOB Indonesia	-	100.000	400.000	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk	-	-	100.000	PT Bank Victoria International Tbk
Sub-jumlah pinjaman (Rupiah)	6.274.272	6.024.483	8.458.410	Sub-total borrowings (Rupiah)
Jumlah pinjaman	9.727.132	8.234.110	9.819.141	Total borrowings
Dikurangi:				Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(42.759)	(35.648)	(31.951)	Unamortized transaction costs
Pinjaman – neto	9.684.373	8.198.462	9.787.190	Borrowings – net

Pinjaman yang diterima dari lembaga non-keuangan terdiri dari:

Borrowings from non-financial institutions consist of the followings:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ December 2023	December 2022	
Pinjaman (Rupiah)				Borrowings (Rupiah)
PT United Tractors Tbk	382.776	432.257	407.100	PT United Tractors Tbk
PT Gaya Makmur Tractors	26.985	35.141	52.618	PT Gaya Makmur Tractors
Jumlah pinjaman (Rupiah)	409.761	467.398	459.718	Total borrowings (Rupiah)

Ekshibit E/60

Exhibit E/60

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA (Lanjutan)

13. FUND BORROWINGS – THIRD PARTIES (Continued)

Kisaran suku bunga kontraktual setahun untuk pinjaman dari bank di atas
adalah sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on the above bank
loans are as follows:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	
Rupiah	5,00 – 7,30	5,00 – 7,50	5,00 – 8,50	Rupiah
Dolar AS	6,03 – 7,30	2,25 – 7,36	2,25 – 6,45	US Dollar

Rincian dari fasilitas pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

The detail of loan facilities are as follows:

Nama Bank/ Bank's Name	Perjanjian terakhir/ Latest agreement	Jatuh tempo fasilitas/ Facility due date**	Batas fasilitas/ Facility limit	Saldo pinjaman/ Outstanding loan		
			May 2024	31 Mei/ 2023	31 Desember/ 2023	December 2022
Dolar AS/US Dollar						
Pinjaman Sindikasi (Agen : Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.)	17-Mar-2020	23-Mar-2023	USD 100.000.000*	-	-	39.327
(Agen: Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.)	30-Aug-2021	14-Mar-2025	USD 80.000.000*	349.439	531.852	1.046.112
(Agen : Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.)	2-May-2023	23-Apr-2027	USD 150.000.000*	2.340.432	1.387.440	-
			USD 330.000.000*	2.689.871	1.919.292	1.085.439
PT Bank CIMB Niaga Tbk***	25-Mar-2024	28-Mar-2027	USD 10.000.000*	153.501	-	-
	7-May-2024	21-May-2027	USD 11.000.000*	178.783	-	-
			USD 21.000.000	332.284	-	-
PT Bank Permata Tbk	18-Apr-2023	18-Apr-2027	USD 16.000.000	260.048	-	-
PT Bank CTBC Indonesia	20-Feb-2023	20-Feb-2026	USD 18.000.000*	170.657	200.408	-
responsAbility SICAV (Lux) - konsolidasian	5-Apr-2021	22-Apr-2024	USD 35.000.000*	-	89.927	275.292
Jumlah Dolar AS/Total US Dollar			USD 399.000.000*	3.452.860	2.209.627	1.360.731
Rupiah						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29-Dec-2020	23-Feb-2024	250.000	-	20.833	104.167
	31-Mar-2021	14-Jul-2025	200.000	60.688	82.443	132.232
	8-Dec-2021	8-Mar-2026	250.000	121.707	147.631	207.169
	29-Mar-2022	26-Apr-2026	750.000	253.107	362.792	614.697
	26-Jul-2022	22-Aug-2024	500.000	57.212	165.114	412.925
	20-Sep-2022	9-Dec-2024	500.000	144.639	250.519	492.212
	28-Feb-2023	27-Mar-2025	750.000	130.253	192.515	-
	2-Apr-2024	22-May-2026	750.000	736.345	-	-
			3.950.000	1.503.951	1.221.847	1.963.402
PT Bank Central Asia Tbk	24-Oct-2019	19-Feb-2023	500.000	-	-	11.111
	14-Mar-2024	24-Jan-2025	800.000	-	-	-
	14-Dec-2020	18-Feb-2025	1.000.000	165.278	283.333	595.834
	26-Jan-2022	22-Dec-2025	1.200.000	315.278	530.555	1.047.222
	29-Dec-2022	27-Mar-2027	1.700.000	455.555	166.667	-
			5.200.000	936.111	980.555	1.654.167
Saldo pindahan/Balance carry forward			9.150.000	2.440.062	2.202.402	3.617.569

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. **PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA** (Lanjutan)

13. **FUND BORROWINGS – THIRD PARTIES** (Continued)

Rincian dari fasilitas pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The detail of loan facilities are as follows: (Continued)

Nama Bank/ Bank's Name	Perjanjian terakhir/ Latest agreement	Jatuh tempo fasilitas/ Facility due date**	Batas fasilitas/ Facility limit	Saldo pinjaman/ Outstanding loan		
				31 Mei/ May 2024	31 Desember/ 2023	December 2022
Rupiah						
Saldo dipindahkan/Balance brought forward			9.150.000	2.440.062	2.202.402	3.617.569
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6-Dec-2019	27-Feb-2023	500.000	-	-	16.667
	29-Aug-2023	31-Aug-2024	100.000	-	-	100.000
	30-Apr-2021	24-Jan-2025	1.000.000	110.082	210.653	609.526
	24-Aug-2022	12-Dec-2025	1.000.000	375.000	541.667	941.666
	13-Mar-2023	18-Dec-2026	<u>1.000.000</u>	<u>388.889</u>	<u>300.000</u>	<u>-</u>
			3.600.000	873.971	1.052.320	1.667.859
Pinjaman Sindikasi (Agen : PT Bank DKI)	23-Sep-2022	29-Mar-2026	1.600.000	858.406	1.076.474	931.386
PT Bank KEB Hana Indonesia	11-Feb-2020	3-Mar-2023	400.000	-	-	23.611
	6-Feb-2024	11-Feb-2025	100.000	-	100.000	100.000
	23-Sep-2021	21-Oct-2024	200.000	4.167	19.167	114.167
	13-Dec-2022	3-Feb-2026	300.000	169.444	211.111	-
	15-Feb-2024	25-Mar-2027	<u>300.000</u>	<u>280.556</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			1.300.000	454.167	330.278	237.778
PT United Tractors Tbk	26-Jun-2023	24-May-2027	1.250.000	382.776	432.257	407.100
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	20-Dec-2023	22-Apr-2027	390.000	362.500	150.000	-
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	9-Jun-2022	7-Jul-2025	250.000	97.090	132.177	212.787
	14-May-2024	27-May-2027	<u>300.000</u>	<u>200.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			550.000	297.090	132.177	212.787
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	7-Jun-2023	19-Apr-2027	300.000	283.333	-	-
PT Bank Jago Tbk	22-Sep-2022	27-Dec-2026	300.000	244.722	296.893	300.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	17-Mar-2022	14-Mar-2025	300.000	83.613	126.891	230.756
	25-May-2023	28-Dec-2025	<u>500.000</u>	<u>118.750</u>	<u>150.000</u>	<u>-</u>
			800.000	202.363	276.891	230.756
PT Bank DKI	16-Jun-2022	29-Jun-2025	500.000	190.991	261.214	422.774
PT Bank Shinhan Indonesia	28-Apr-2022	19-May-2025	200.000	66.667	100.000	166.667
PT Gaya Makmur Tractors	6-Jan-2022	25-Jan-2026	67.106	26.985	35.141	52.618
PT Bank Permata Tbk	28-May-2021	24-May-2024	200.000	-	35.417	135.417
	18-Apr-2023	18-Apr-2024	<u>400.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			600.000	-	35.417	135.417
PT Bank Permata Syariah Tbk	28-May-2021	24-May-2024	50.000	-	10.417	35.417
	18-Apr-2023	18-Apr-2024	<u>100.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			150.000	-	10.417	35.417
PT Bank UOB Indonesia	28-Sep-2023	28-Sep-2024	400.000	-	100.000	400.000
Saldo pindahan/Balance carry forward						
			21.157.106	6.684.033	6.491.881	8.818.128

Ekshibit E/62

Exhibit E/62

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

13. **PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA** (Lanjutan)

Rincian dari fasilitas pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

13. **FUND BORROWINGS – THIRD PARTIES** (Continued)

The detail of loan facilities are as follows: (Continued)

Nama Bank/ Bank's Name	Perjanjian terakhir/ Latest agreement	Jatuh tempo fasilitas/ Facility due date**	Batas fasilitas/ Facility limit May 2024	Saldo pinjaman/ Outstanding loan		
				31 Mei/ 2023	31 Desember/December 2022	
Rupiah						
Saldo dipindahkan/Balance brought forward			21.157.106	6.684.033	6.491.881	8.818.128
PT Bank Victoria International Tbk	1-Sep-2023	9-Jun-2024	250.000	-	-	100.000
PT Bank Mizuho Indonesia	25-Nov-2023	25-Nov-2024	150.000	-	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	8-Mar-2024	8-Mar-2025	300.000	-	-	-
Jumlah Rupiah/Total Rupiah			21.857.106	6.684.033	6.491.881	8.918.128
Jumlah pinjaman/Total borrowings				10.136.893	8.701.508	10.278.859

*) Nilai penuh

**) Tanggal angsuran terakhir dari pinjaman yang diterima

*** Merupakan bagian penarikan pinjaman dalam Dolar AS dari fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 (dalam Rupiah/ Dolar AS)

*) Full amount

**) The date of the last installment of the loan received

*** Represent part of the loan drawdown in US Dollar from the Special Transaction Loan 2 facility (in Rupiah/ US Dollar)

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 200.000.

Pada tanggal 5 April 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan 2 sub fund dari responsAbility SICAV (Lux) yaitu: responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund; dan responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund serta MultiConcept Fund Management S.A. dengan total keseluruhan fasilitas sebesar USD 35.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 30 April 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap V dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 1.000.000.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Term Loan 2 sebesar Rp 200.000 dan Fasilitas Term Loan 3 Musyarakah Mutanaqisoh sebesar Rp 50.000 dengan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 24 Juni 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp 600.000 dengan PT Bank Jago Tbk.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (Term Loan) sebesar USD 80.000.000 (nilai penuh), dimana Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited bertindak sebagai Agen Fasilitas (the "Facility Agent"), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (the "Security Agent").

Pada tanggal 23 September 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Working Capital Installment sebesar Rp 200.000 dengan PT Bank KEB Hana Indonesia.

On 31 March 2021, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 200,000.

On 5 April 2021, the Company entered into Loan Agreements with 2 sub funds of responsAbility SICAV (LUX), i.e.: responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund; and responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion Fund, concurrently with a Loan Agreement with MultiConcept Fund Management S.A. with overall facilities amounting to USD 35,000,000 (full amount).

On 30 April 2021, the Company entered into a Credit Agreement Fixed Loan V with PT Bank Pan Indonesia amounting to Rp 1,000,000.

On 28 May 2021, the Company entered into a Credit Agreement Term Loan 2 facility amounting to Rp 200,000 and Term Loan 3 Facility Musyarakah Mutanaqisoh amounting to Rp 50,000 with PT Bank Permata Tbk.

On 24 June 2021, the Company entered into a Term Loan Credit Agreement amounting to Rp 600,000 with PT Bank Jago Tbk.

On 30 August 2021, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 80,000,000 (full amount), whereas Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited acting as the Facility Agent, and PT Bank Central Asia Tbk. acting as the Security Agent.

On 23 September 2021, the Company entered into Working Capital Installment Agreement amounting to Rp 200,000 with PT Bank KEB Hana Indonesia.

Ekshibit E/63

Exhibit E/63

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pada tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 250.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 6 Januari 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit sebesar Rp 50.000 dengan PT Gaya Makmur Tractors.

Pada tanggal 26 Januari 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 1.000.000 dengan PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 17 Maret 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 300.000 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 25 Maret 2022, Perusahaan menandatangani Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp 300.000 dengan PT Bank Jago Tbk.

Pada tanggal 29 Maret 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 750.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 28 April 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 200.000 dengan PT Bank Shinhan Indonesia.

Pada tanggal 9 Juni 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 250.000 dengan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dan Rp 250.000 dengan PT Bank Victoria International Tbk.

Pada tanggal 16 Juni 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 500.000 dengan PT Bank DKI.

Pada tanggal 26 Juli 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 500.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 24 Agustus 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap VI dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 1.000.000.

Pada tanggal 20 September 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 500.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 23 September 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan 4 BPD sebesar Rp 1.600.000 dimana PT Bank DKI bertindak sebagai Agen.

Pada tanggal 28 September 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 400.000 dengan PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 14 Oktober 2022, plafon fasilitas kredit dari PT Gaya Makmur Tractors dinaikkan menjadi Rp 67.106.

Pada tanggal 25 November 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 150.000 dengan PT Bank Mizuho Indonesia.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 300.000 dengan PT Bank KEB Hana Indonesia.

13. FUND BORROWINGS – THIRD PARTIES (Continued)

On 8 December 2021, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 250,000 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On 6 January 2022, the Company entered into a Credit Agreement amounting to Rp 50,000 with PT Gaya Makmur Tractors.

On 26 January 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 1,000,000 with PT Bank Central Asia Tbk.

On 17 March 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 300,000 with PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On 25 March 2022, the Company entered into a second addendum Term Loan Credit Agreement amounting to Rp 300,000 with PT Bank Bank Jago Tbk.

On 29 March 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 750,000 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On 28 April 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 200,000 with PT Bank Shinhan Indonesia.

On 9 June 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 250,000 with PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk and Rp 250,000 with PT Bank Victoria International Tbk.

On 16 June 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 500,000 with PT Bank DKI.

On 26 July 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 500,000 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On 24 August 2022, the Company entered into a Credit Agreement Fixed Loan VI with PT Bank Pan Indonesia amounting to Rp 1,000,000.

On 20 September 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 500,000 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On 23 September 2022, the Company entered into a Syndication Credit Agreement with 4 BPD amounting to Rp 1,600,000 whereas PT Bank DKI acting as the Agent.

On 28 September 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 400,000 with PT Bank UOB Indonesia.

On 14 October 2022, the credit facility limit from PT Gaya Makmur Tractors increased to Rp 67,106.

On 25 November 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 150,000 with PT Bank Mizuho Indonesia.

On 13 December 2022, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 300,000 with PT Bank KEB Hana Indonesia.

Ekshibit E/64

Exhibit E/64

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit (*Installment Loan-6*) sebesar Rp 2.000.000, penambahan limit fasilitas Kredit Multi Fasilitas sebesar Rp 300.000, dan mengalihkan jumlah fasilitas Kredit Multi sebesar Rp 200.000 menjadi fasilitas *Installment Loan 5* dengan PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 20 Februari 2023 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar USD 18.000.000 (nilai penuh) dengan PT Bank CTBC Indonesia.

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 750.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 13 Maret 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap VII dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 1.000.000.

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit *Term Loan 4* sebesar Rp 400.000 dan Fasilitas *Term Financing Musyarakah Mutanaqisoh 2* sebesar Rp 100.000 dengan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 2 Mei 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 150.000.000 (nilai penuh), dimana Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited bertindak sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*).

Pada tanggal 25 Mei 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 sebesar Rp 500.000 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 7 Juni 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 300.000 dengan PT Bank Maspion IndonesiaTbk.

Pada tanggal 20 Desember 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 390.000 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pada tanggal 15 Februari 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja V sebesar Rp 300.000 dengan PT Bank KEB Hana Indonesia.

Pada tanggal 8 Maret 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit *Demand Loan* sebesar Rp 300.000 dengan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Pada tanggal 2 April 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 750.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 14 Mei 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp 300.000 dengan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

13. FUND BORROWINGS – THIRD PARTIES (Continued)

On 29 December 2022, the Company entered into a Credit Facility (*Installment Loan-6*) Agreement amounting to Rp 2,000,000, additional Multi Credit Facility limits amounting Rp 300,000, and transferred the amount of Multi Credit Facility limits amounting Rp 200,000 to Credit Facility (*Installment Loan 5*) with PT Bank Central Asia Tbk.

On 20 February 2023, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to USD 18,000,000 (full amount) with PT Bank CTBC Indonesia.

On 28 February 2023, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 750,000 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On 13 March 2023, the Company entered into a Credit Agreement Fixed Loan VII with PT Bank Pan Indonesia amounting to Rp 1,000,000.

On 18 April 2023, the Company entered into a Credit Facility Agreement relating to Term Loan 4 with amount up to Rp 400,000 and Term Financing Musyarakah Mutanaqisoh 2 Agreement amounting to Rp 100,000 with PT Bank Permata Tbk.

On 2 May 2023, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 150,000,000 (full amount), whereas Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited acting as the Facility Agent, and PT Bank Central Asia Tbk acting as the Security Agent.

On 25 May 2023, the Company entered into a Facility Agreement relating to Pinjaman Transaksi Khusus 2 amounting to Rp 500,000 with PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On 7 June 2023, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 300,000 with PT Bank Maspion Indonesia Tbk.

On 20 December 2023, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 390,000 with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

On 15 February 2024, the Company entered into a Working Capital Installment V Agreement amounting to Rp 300,000 with PT Bank KEB Hana Indonesia.

On 8 March 2024, the Company entered into a Demand Loan Agreement amounting to Rp 300,000 with PT Bank OCBC NISP Tbk.

On 2 April 2024, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 750,000 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On 14 May 2024, the Company entered into a Working Capital Credit Agreement amounting to Rp 300,000 with PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

Ekshibit E/65

Exhibit E/65

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PINJAMAN YANG DITERIMA – PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Seluruh perjanjian di atas mencakup adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang umumnya diharuskan untuk fasilitas-fasilitas kredit tersebut, antara lain, pembatasan untuk melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi dengan pihak lain, mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak lain selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang normal atau melakukan perubahan atas struktur modal dan/atau anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan/persetujuan tertulis dari kreditur dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan jadwal. Pembayaran pokok pinjaman untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024 dan pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.658.859, Rp 6.506.468 dan Rp 4.982.868.

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 Perusahaan dan entitas anaknya telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perusahaan, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, yang pada umumnya meliputi:

- Menjaga rasio jumlah pencadangan kerugian penurunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku,
- Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Bank selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan dan laporan keuangan kuartalan paling lambat 60 hari sejak berakhirnya tiap kuartal,
- Menjaga rasio antara jaminan fasilitas kredit minimal 100% dari outstanding pinjaman,
- Menjaga *gearing ratio* (rasio antara pinjaman dengan modal sendiri) tidak lebih besar dari 5 (lima) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali,
- Menjaga *Non-Performing Loan (NPL) Ratio* tidak melebihi 5% dari total piutang pembiayaan,
- Dampak mata uang yang tidak dilindungi secara keseluruhan maksimum 25% dari jumlah ekuitas secara keseluruhan,
- Ekuitas diharuskan lebih besar dari Rp 1.000.000 atau melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank, salah satunya apabila terdapat perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, perubahan susunan anggota komisaris dan direksi, perubahan bidang atau jenis kegiatan usaha Perusahaan, serta apabila Perusahaan melakukan pembubaran, penggabungan usaha dan atau peleburan dengan Perusahaan lain.

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan utang bank berjangka tersebut seperti yang telah disebutkan dalam perjanjian kredit pihak bank.

13. FUND BORROWINGS – THIRD PARTIES (Continued)

All loan agreements include certain covenants which are normally required for such credit facilities, such as limitations to initiate merger or consolidation with other parties, obtain loans from other parties except loans obtained in the normal course of business, or changes in its capital structure and/or articles of association without notification to/prior written approval from creditors and maintenance of certain agreed financial ratios.

Interest and principal loan payments have been paid by the Company on schedule. Payment of principal borrowings for the five-month period ended 31 May 2024 and for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 2,658,859, Rp 6,506,468 and Rp 4,982,868, respectively.

As of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 the Company and its subsidiary have complied with all the requirements mentioned in the loan facility agreements.

For loans received by the Company, generally creditors require certain restrictions and obligations that must be fulfilled by the Company, which generally include:

- Maintain the ratio of the amount of provision for impairment losses in accordance with applicable accounting standards,
- Submit audited annual financial statements to the Bank no later than 4 (four) months from the end of the relevant financial year and quarterly financial statements no later than 60 days from the end of each quarter,
- Maintain a ratio between credit facility guarantees of at least 100% of outstanding loans,
- Maintain the *gearing ratio* (ratio of loans with own capital) not greater than 5 (five) times to 10 (ten) times,
- Maintaining the *Non-Performing Loan (NPL) Ratio* not exceeding 5% of the total financing receivables,
- The impact of an unprotected currency as a whole is a maximum of 25% of the total equity,
- Equity is required to be greater than Rp 1,000,000 or notify the Bank in writing, one of which is if there is a change in the composition of the majority shareholders, a change in the composition of the commissioners and directors, a change in the field or type of business activities of the Company, and if the Company dissolves, merges and/or merges with other companies

Compliance with Loan Covenants

As of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, the Company has either compliance with all of the required covenants of the above-mentioned period loan as stipulated in the respective bank loan agreement.

Ekshibit E/66

Exhibit E/66

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December	
		2023	2022
Pajak Penghasilan:			
Pasal 21	6.006	33.430	38.902
Pasal 23	947	950	1.391
Pasal 25	-	23.542	37.161
Pasal 26	1.758	61.258	60.125
Pasal 4(2) - Final	380	42	341
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.730	3.815	2.426
Taksiran Pajak Penghasilan Badan (Pasal 29) terutang 2023	7.884	76.680	122.923
Jumlah	19.705	199.717	263.269

Income Taxes:
Article 21
Article 23
Article 25
Article 26
Article 4(2) - Final
Value Added Tax (VAT)

Estimated Current Income Tax
(Article 29) of fiscal year 2023

Total

b. Beban pajak penghasilan

	31 Mei/May		31 Desember/December	
	2024	2023	2023	2022
Pajak kini				
Perusahaan	114.427	176.920	342.193	429.256
Entitas anak	-	-	-	-
Tangguhan				
Perusahaan	16.092	(16.255)	34.025	(1.400)
Entitas anak Penyesuaian tahun lalu	(1.248)	(263)	(2.538)	147
-Perusahaan	1.801	4.324	7.773	3.999
Jumlah	131.072	164.726	381.453	432.002

Current
The Company
Subsidiary

Deferred
The Company
Subsidiary Prior
years adjustment
- The Company

Total

Ekshibit E/67

Exhibit E/67

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

b. **Beban pajak penghasilan** (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan taksiran laba kena pajak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei/May</u>		<u>31 Desember/December</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	693.743	850.656	2.025.252	2.238.681
Rugi (laba) entitas anak sebelum pajak penghasilan	5.542	1.170	11.409	(26)
Laba sebelum pajak Perusahaan	699.285	851.826	2.036.661	2.238.655
Beda tetap:				
Beban sewa	-	547	-	952
Pendapatan keuangan yang pajaknya bersifat final	(22.660)	(24.156)	(83.120)	(22.870)
Beban asuransi	-	7.212	-	13.869
Beban depresiasi	-	742	-	2.289
Beban lain-lain	10.318	9.432	26.554	18.982
Jumlah beda tetap	(12.342)	(6.223)	(56.566)	13.222
Beda temporer:				
Gaji dan imbalan pasca-kerja	(104.939)	(121.588)	(39.698)	60.940
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan dan piutang lain-lain	481.659	492.231	1.048.943	424.530
Penghapusan piutang	(405.458)	(250.674)	(1.083.515)	(431.456)
Penyusutan aset tetap	(9.458)	2.100	(44.133)	12.112
Keuntungan neto atas penjualan aset tetap	(1.999)	(2.780)	(7.208)	(10.202)
Amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan	3.668	(7.428)	(5.715)	4.007
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(7.111)	(175)	(3.697)	(10.732)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	(41.059)	(26.132)	(44.053)	(41.835)
Jumlah beda temporer	(84.697)	85.554	(179.076)	7.364
Taksiran laba kena pajak	602.246	931.157	1.801.019	2.259.241
Tarif pajak	19%	19%	19%	19%
Taksiran beban pajak kini Dikurang:	114.427	176.920	342.193	429.256
pajak dibayar dimuka	(106.542)	(116.500)	(265.513)	(306.333)
Taksiran utang pajak kini - Perusahaan	7.885	60.420	76.680	122.923

14. **TAXATION** (Continued)

b. **Income tax expenses** (Continued)

A reconciliation between profit before tax, as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable profit for the five-month period ended 31 May 2024 and 2023 and for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Loss (profit) before tax of subsidiary
Profit before tax of the Company
Permanent differences:
Rent expenses
Finance income subjected to final tax
Insurance expenses
Depreciation expenses
Other expenses
Total permanent differences
Temporary differences:
Salaries and post-employment benefits
Allowance for impairment losses of financing receivables and other receivables
Receivables written-off
Depreciation of fixed assets
Net gain on sale of fixed assets
Amortization of securities issuance cost
Unamortized transaction cost on fund borrowings
Unamortized transaction cost on financing receivables
Total temporary differences
Estimated taxable profit
Tax rate
Estimated current tax expense
Less : prepaid taxes
Estimated current tax payable - The Company

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

b. **Beban pajak penghasilan** (Lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Perusahaan.

c. **Pajak tangguhan**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dengan beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Mei/May		31 Desember/December	
	2024	2023	2023	2022
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	693.743	850.656	2.025.252	2.238.681
Rugi (laba) entitas anak sebelum pajak	5.542	1.170	11.409	(26)
Laba sebelum pajak - Perusahaan	699.285	851.826	2.036.661	2.238.655
Beban pajak dengan tarif pajak tunggal yang berlaku	132.864	161.847	386.966	425.344
Pengaruh pajak penghasilan atas:				
Beda tetap pada tarif pajak tunggal yang berlaku	(2.345)	(1.182)	(10.748)	2.512
Penyesuaian tahun lalu	1.801	4.324	7.773	3.999
Jumlah	132.320	164.989	383.991	431.855

Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Loss (profit) before tax of subsidiary

Profit before tax of - the Company

Tax expense at the applicable single tax rate

Tax effects on:
Permanent differences at the applicable single tax rate
Prior years adjustment

Total

Ekshibit E/69

Exhibit E/69

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

14. **TAXATION** (Continued)

c. **Pajak tangguhan** (Lanjutan)

c. **Deferred tax** (Continued)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal terdiri dari:

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows:

	31 Desember/ December 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan rugi / Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas dari penghasilan komprehensif lain/ laba Credited to equity from other comprehensive income	31 Mei/ May 2024	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Cadangan kerugian					Allowance for
penurunan nilai piutang	88.173	14.478	-	102.651	impairment losses on receivables
Imbalan pasca-kerja	27.108	1.824	1.312	30.244	Post-employment benefits
Beban akrual	37.400	(21.696)	-	15.704	Accrued expenses
Penyusutan aset tetap					Depreciation of fixed assets and
dan amortisasi aset takberwujud	(19.201)	(2.176)	-	(21.377)	amortization of intangible assets
Biaya transaksi yang belum					Unamortized transaction cost
diamortisasi atas					on financing receivables
piutang pembiayaan	3.664	(7.801)	-	(4.137)	
Biaya emisi surat berharga					Unamortized securities
yang diterbitkan yang					issued cost
belum diamortisasi	(1.753)	697	-	(1.056)	
Biaya transaksi yang belum					Unamortized transaction cost
diamortisasi atas					on fund borrowings
pinjaman yang diterima	(6.772)	(1.351)	-	(8.123)	
Penghasilan komprehensif lain	(158)	-	17.168	17.010	Other comprehensive income
Rugi fiskal	3.502	1.182	-	4.684	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - neto	131.963	(14.843)	18.480	135.600	Deferred tax assets - net

	31 Desember/ December 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas dari penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to equity from other comprehensive income	31 Desember/ December 2023	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Cadangan kerugian					Allowance for
penurunan nilai piutang	94.742	(6.569)	-	88.173	impairment losses on receivables
Imbalan pasca-kerja	21.206	3.916	1.986	27.108	Post-employment benefits
Beban akrual	48.845	(11.445)	-	37.400	Accrued expenses
Penyusutan aset tetap					Depreciation of fixed assets and
dan amortisasi aset takberwujud	(9.446)	(9.755)	-	(19.201)	amortization of intangible assets
Biaya transaksi yang belum					Unamortized transaction cost
diamortisasi atas					on financing receivables
piutang pembiayaan	12.034	(8.370)	-	3.664	
Biaya emisi surat berharga yang					Unamortized securities
diterbitkan yang					issued cost
belum diamortisasi	(667)	(1.086)	-	(1.753)	
Biaya transaksi yang belum					Unamortized transaction cost
diamortisasi atas					on fund borrowings
pinjaman yang diterima	(6.070)	(702)	-	(6.772)	
Penghasilan komprehensif lain	2.407	-	(2.565)	(158)	Other comprehensive income
Rugi fiskal	978	2.524	-	3.502	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - neto	164.029	(31.487)	(579)	131.963	Deferred tax assets - net

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

14. **TAXATION** (Continued)

c. **Pajak tangguhan** (Lanjutan)

c. **Deferred tax** (Continued)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal terdiri dari: (Lanjutan)

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows:
(Continued)

		Dikreditkan (dibebankan) ke laporan rugi / Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke ekuitas dari penghasilan komprehensif lain/ Credited laba (charged) to equity from other comprehensive income		
	31 Desember/ December 2021			31 Desember/ December 2022	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	96.058	(1.316)	-	94.742	Allowance for impairment losses on receivables
Imbalan pasca-kerja	21.858	(2.365)	1.713	21.206	Post-employment benefits
Beban akrual	34.758	14.087	-	48.845	Accrued expenses
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset takberwujud	(9.816)	370	-	(9.446)	Depreciation of fixed assets and amortization of intangible assets
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	19.982	(7.948)	-	12.034	Unamortized transaction cost on financing receivables
Biaya emisi surat berharga yang diterbitkan yang belum diamortisasi	(1.428)	761	-	(667)	Unamortized securities issued cost
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(4.031)	(2.039)	-	(6.070)	Unamortized transaction cost on fund borrowings
Penghasilan komprehensif lain	7.425	-	(5.018)	2.407	Other comprehensive income
Rugi fiskal	1.275	(297)	-	978	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan – neto	166.081	1.253	(3.305)	164.029	Deferred tax assets – net

Manajemen berkeyakinan bahwa laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

The management believes that future taxable profit will be sufficient to be compensated against the deductible of temporary differences.

d. **Administrasi**

d. **Administration**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perusahaan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Ekshibit E/71

Exhibit E/71

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

14. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

14. **TAXATION** (Continued)

d. **Administrasi** (lanjutan)

d. **Administration** (Continued)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 ("PP No. 1/2020") tentang "Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan" yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai Tahun Pajak 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 18 Juni 2020, PP No. 56/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 ("PP No. 30/2020") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

PP No. 30/2020 ini mengatur perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak; masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 Perusahaan telah memenuhi persyaratan di atas (sesuai "UU HPP" dan "PP No.30/2020") untuk mendapatkan penurunan tarif sebesar 3%, sehingga menggunakan tarif 19% untuk perhitungan PPH Badan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

On 31 March 2020, the President of the Republic Indonesia established Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of Year 2020 ("PP No. 1/2020") concerning "State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease ("Covid-19") Pandemic and/or In Order to Face Threats that Harm National Economy and/or Financial System Stability" which has become Law (UU) No.2 Year 2020, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 Year 2020 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since 19 June 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishment from 25% to 22% for fiscal year 2020 and 2021 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards.

On 18 June 2020, PP No. 56/2015 concerning the Amendment of Government Regulation No. 77 Year 2013, revoked and declared invalid, replaced by Government Regulation No. 30 Year 2020 ("PP No. 30/2020") on "Income Tax Rate Reduction Corporate Taxpayers in the Form of Publicly-listed Companies".

PP No. 30/2020 regulates publicly-listed companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate of 3% lower than the income tax rate corporate taxpayer in the country, provided they meet the prescribed criteria, ie at least 40% of the total paid-up shares recorded to be traded on the stock exchanges in Indonesia; the shares must be held by at least 300 Parties; each Party may only have a share of less than 5% of the total shares issued and fully paid; and must be met in a short time at least 183 calendar days within a fiscal year.

On 29 October 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 2021 concerning Harmonisation of Tax Regulations ("UU HPP"). The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayer and business establishment of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

As of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, the Company has met requirements ("UU HPP" and "PP No. 30/2020") to obtain the reduced income tax rate of 3%, so that the rate using of 19% for corporate income tax calculation.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ 2023	December 2022	
Nilai nominal:				Nominal value:
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020	-	-	395.000	Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021	-	400.000	400.000	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021	530.000	530.000	790.000	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023	483.000	1.100.000	-	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023	1.010.000	1.600.000	-	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023	1.100.000	1.100.000	-	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023
Jumlah nilai nominal Dikurangi:	3.123.000	4.730.000	1.585.000	Total nominal value
Biaya emisi Obligasi yang belum diamortisasi	(5.557)	(9.225)	(3.510)	Less:
Jumlah - neto	3.117.443	4.720.775	1.581.490	Unamortized Bonds issuance cost
				Total - net
	31 Mei/ May 2024	31 Desember/ 2023	December 2022	
Utang Obligasi sesuai jatuh temponya:				Bonds payable by maturity profile:
• < 1 tahun	1.392.000	2.387.000	655.000	< 1 year ☒
• 1-2 tahun	881.000	612.000	930.000	1-2 years ☒
• 2-3 tahun	850.000	1.731.000	-	2-3 years ☒
	3.123.000	4.730.000	1.585.000	
Amortisasi biaya emisi Obligasi yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 26)	3.634	7.924	4.026	Amortization of Bonds issuance costs charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 26)

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Serial A	Rp 437.000	8,00%	18 September 2021	Lunas/Paid	A+(idn)
Seri/Serial B	Rp 395.000	9,50%	8 September 2023	Lunas/Paid	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Serial A	Rp 200.000	6,00%	8 Juni/June 2022	Lunas/Paid	A+(idn)
Seri/Serial B	Rp 400.000	7,75%	28 Mei/May 2024	Lunas/Paid	AA-(idn)

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

15. SECURITIES ISSUED (Continued)

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Serial A	210.000	5,25%	16 Agustus/August 2022	Lunas/Paid	A+(idn)
Seri/Serial B	260.000	6,25%	6 Agustus/August 2023	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Serial C	530.000	7,25%	6 Agustus/August 2024	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Serial A	617.000	6,25%	7 Februari/ February 2024	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Serial B	227.000	7,00%	27 Januari/January 2025	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)
Seri/Serial C	256.000	7,375%	27 Januari/January 2026	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Serial A	590.000	6,10%	24 April 2024	Lunas/Paid	AA-(idn)
Seri/Serial B	385.000	7,00%	14 April 2025	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)
Seri/Serial C	625.000	7,15%	14 April 2026	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Status pembayaran/ Payment status	Peringkat/ Rating
Seri/Serial A	250.000	6,00%	25 Juni/June 2024	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)
Seri/Serial B	850.000	7,00%	15 Juni/June 2026	Belum jatuh tempo/Not yet due	AA-(idn)

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori lancar sebesar 50% untuk Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia, dari nilai pokok Obligasi yang terutang (Catatan 5).

According to the Bonds Trustee agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of financing receivables amounting to 50% for Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia, of the outstanding principal amount of the Bonds (Note 5).

Selain itu, selama pokok Obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, membagi dividen dalam hal Perusahaan lalai dalam membayar jumlah terutang obligasi, melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama, dan menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Moreover, during the time that the Bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, declare dividends in the event that the Company defaults in bond obligations, merge unless performed on the same business, and sells or hand over more than 50% of the Company's assets, except for daily operation activity. The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

Semua pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi dilakukan secara triwulan.

Pada tanggal 27 Februari 2024, Perusahaan telah menerima surat dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No. 22/DIR/RATLTR/II/2024 yang menyatakan bahwa Fitch mengafirmasi peringkat nasional jangka panjang "AA-(idn)" dengan outlook stabil. Peringkat Nasional 'AA' menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

15. SECURITIES ISSUED (Continued)

All Bonds principal is paid in full as they fall due. All Bonds interest is paid on quarterly basis.

On 27 February 2024, the Company has received a letter from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No. 22/DIR/RATLTR/II/2024 affirming the national long term rating of the Company at "AA-(idn)" with stable outlook. 'AA' National Ratings denote expectations of a very low level of default risk relative to other issuers or obligations in the same country or monetary union.

16. BEBAN AKRUAL

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December		
		2023	2022	
Bonus dan tunjangan lainnya	84.600	198.843	259.129	Bonus and other allowances
Bunga	68.127	75.090	48.133	Interest
Jasa tenaga ahli	4.101	8.449	129.387	Professional fees
Lain-lain	33.009	41.739	42.650	Others
Jumlah	189.837	324.121	479.299	Total

16. ACCRUED EXPENSES

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Perusahaan dan entitas anaknya menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan tetap yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan, dimana program pensiun ini dikelola dan diadministrasikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Imbalan pasca-kerja meliputi pensiun, uang pisah, uang penghargaan dan imbalan lainnya (Imbalan pasca-kerja ("IPK") sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020, Peraturan Pemerintah No.35/2022 ("PP 35/2021") dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)) dihitung oleh Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya bertanggal 10 Juni 2024, 17 Januari 2024 dan 25 Januari 2023 masing-masing untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja tersebut untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 6.170, 6.293, dan 6.040 karyawan.

17. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The Company and its subsidiary have defined contribution pension program covering its qualified permanent employees who meets the Company's criteria, where the contribution pension program is defined and administered by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Post-employment benefits include pensions, severance pay, service pay and other benefits (Post-employment benefits ("PEB") as stipulated under the Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No.35/2021 ("GR 35/2021") and Defined Contribution (DC) Plan) is calculated by Steven & Mourits, an independent actuary, in its report dated 10 June 2024, 17 January 2024 and 25 January 2023 for the five-month period ended 31 May 2024 and for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively, by using the Projected Unit Credit method. Number of employees entitled for the employee benefits for the five-month period ended 31 May 2024 and for the year ended 31 December 2023 and 2022 was 6,170, 6,293, and 6,040 employees, respectively.

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. **LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA** (Lanjutan)

Rincian liabilitas atas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December			
		2023	2022		
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	234.549	217.639	180.474	Present value	of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(75.136)	(74.684)	(68.589)		Fair value of plan asset
Imbalan pasca-kerja	159.413	142.955	111.885		Post-employment benefits

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

17. **POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES** (Continued)

The details of the liabilities for post-employment benefits recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December			
		2023	2022		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	217.639	180.474	181.820	Present value of defined benefit obligation	at beginning of year
Biaya jasa kini	11.208	23.451	20.368		Current service cost
Biaya jasa lalu atas kurtailmen	-	(473)	-		Past service cost due to curtailment
Biaya bunga	5.974	12.470	10.768		Interest cost
Pembayaran imbalan kerja (sesuai provisi yang dihitung)	(3.411)	(4.451)	(4.821)		Benefit payment from Company (based on computed provision)
Pembayaran imbalan aset program	(1.127)	(2.685)	(2.770)		Benefit payment from plan assets
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	399	733	768	Liability assumed due to recognition of	past services
Pengukuran kembali atas nilai kini liabilitas imbalan pasti:				Remeasurement of present value of defined	benefit obligation:
Kerugian (keuntungan) atas perubahan asumsi ekonomis	(4.890)	6.021	(5.406)	Loss (gain) from changes in financial	assumption
Kerugian atas penyesuaian pengalaman	8.757	2.099	6.588		Loss from experience adjustments
Dampak penyesuaian atas siaran pers DSAK IAI (Catatan 2c)	-	-	(26.841)		Impact of DSAK IAI press release's adjustments (Note 2c)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode/ tahun	<u>234.549</u>	<u>217.639</u>	<u>180.474</u>	Present value of defined benefit	obligation at end of period/ year
	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December			
		2023	2022		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	74.684	68.589	66.363	Fair value of plan assets at	beginning of year
Pendapatan bunga atas aset program	2.120	5.128	4.962	Interest income on plan assets	
Iuran Perusahaan Pembayaran imbalan dari aset program	2.500	6.000	6.000	Company contribution	
	(1.127)	(2.685)	(2.770)	Benefit payment from	plan assets
Imbal hasil aset program (tidak termasuk pendapatan bunga)	(3.041)	(2.348)	(5.966)	Return on plan assets (excluding	interest income)
Nilai wajar aset program pada akhir periode/ tahun	<u>75.136</u>	<u>74.684</u>	<u>68.589</u>	Fair value of plan assets at end of	period/ year

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. **LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA** (Lanjutan)

17. **POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES** (Continued)

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	
Saldo awal	142.955	111.885	115.457	Beginning balance
Iuran Perusahaan yang dibayarkan	(2.500)	(6.000)	(6.000)	Contribution plan of the Company
Pembayaran imbalan kerja	(20.139)	(14.320)	(14.663)	Benefits paid by the Company
Beban yang diakui pada laba rugi	32.189	40.922	36.784	Expense recognized in profit loss
Beban yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	6.908	10.468	7.148	Expense recognized in other comprehensive income
Dampak penyesuaian atas siaran pers DSAK IAI (Catatan 2c)	-	-	(26.841)	Impact of DSAK IAI press release's adjustments (Note 2c)
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	<u>159.413</u>	<u>142.955</u>	<u>111.885</u>	Liability recognized in statement of financial position

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Mei/May 2024	2023	31 Desember/December 2023	2022	
Biaya jasa kini	11.208	10.817	23.451	20.368	Current service cost
Biaya jasa lalu atas kurtailmen	-	-	(473)	-	Past service cost due to curtailment
Biaya bunga	5.974	5.761	12.470	10.768	Interest cost
Pendapatan bunga atas aset program	(2.120)	(2.447)	(5.128)	(4.962)	Interest income on plan assets
Pengakuan liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu	399	-	733	768	Liabilities assumed due to recognition of past services
Biaya terminasi oleh Perusahaan Dampak penyesuaian atas siaran pers DSAK IAI	16.728	-	9.869	9.842	Termination benefit by Company Impact of DSAK IAI press release's adjustments
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(26.841)</u>	
Jumlah beban (Catatan 25)	<u>32.189</u>	<u>14.131</u>	<u>40.922</u>	<u>9.943</u>	Total expenses (Note 25)

Riwayat penyesuaian pengalaman adalah sebagai berikut:

The history of experience adjustment are as follows:

	31 Mei/ May 2024	2023	31 Desember/December 2022	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(234.549)	(217.639)	(180.474)	(181.820)	(215.418)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	<u>75.136</u>	<u>74.684</u>	<u>68.589</u>	<u>66.363</u>	<u>61.207</u>	Fair value of plan assets
Defisit	<u>(159.413)</u>	<u>(142.955)</u>	<u>(111.885)</u>	<u>(115.457)</u>	<u>(154.211)</u>	Deficit
Penyesuaian pengalaman liabilitas program	<u>(8.757)</u>	<u>(2.099)</u>	<u>(6.588)</u>	<u>13.185</u>	<u>20.906</u>	Experience adjustment on plan liabilities
Penyesuaian pengalaman aset program	<u>(3.041)</u>	<u>(2.348)</u>	<u>(5.966)</u>	<u>(2.842)</u>	<u>(525)</u>	Experience adjustment on plan assets

Kategori utama aset program per 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai persentase dari total aset program adalah pasar uang 50%, pendapatan tetap 30% dan saham 20%.

The main categories of plan assets as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 as percentage of total plan assets was money market 50%, fixed income 30% and shares 20%.

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. **LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA** (Lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja:

17. **POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES** (Continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate of 1%, with all other variables held constant, of the present value of post-employment benefits liabilities:

		31 Mei/May 2024					
		Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate			
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease		
Dampak pada nilai kini							Impact on present value of post-
liabilitas imbalan pasca-kerja		217.936	253.406	254.119	216.952		employment benefits liabilities
		31 Desember/December 2023					
		Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate			
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease		
Dampak pada nilai kini							Impact on present value of post-
liabilitas imbalan pasca-kerja		202.196	235.157	235.180	201.827		employment benefits liabilities
		31 Desember/December 2022					
		Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate			
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease		
Dampak pada nilai kini							Impact on present value of post-
liabilitas imbalan pasca-kerja		168.164	194.385	194.554	167.748		employment benefits liabilities

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur as changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the *Projected Unit Credit* method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the statements of financial position.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas:

Key assumptions used in the above calculation:

		31 Mei/ May 2024	31 Desember/December			
			2023	2022		
Asumsi ekonomi:					Economic assumptions:	
- Tingkat diskonto per tahun		7,00%	6,75%	7,30% - 7,40%	Annual discount rate -	
- Kenaikan gaji per tahun		10%	10%	10%	Annual salary increase -	
Asumsi demografi:					Demographic assumptions:	
- Tingkat kematian		Tabel Mortalitas Indonesia - 2019/ Mortality table of Indonesia - 2019			Mortality rate -	
- Tingkat pengunduran diri		20% per tahun sebelum usia 25 dan terus menurun menjadi 0% pada usia 55 / 20% per annum before the age of 25 and linearly decreasing to 0% per annum at age of 55			Turnover rate -	
- Tingkat kecacatan per tahun		5% dari Tingkat Kematian/ 5% of Mortality Rates			Disability rate per annum -	
- Tingkat pensiun		100% di usia 56/100% at age 56			Retirement rate -	

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. DIVIDEN KAS DAN SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGUNAANNYA**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 22 Mei 2024, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun 2023 sebesar Rp 55 (nilai penuh) per lembar saham. Setelah memperhitungkan dividen tunai interim sebesar Rp 28 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 421,103 yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan pada tanggal 1 Desember 2023, sisanya sebesar Rp 27 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 406,063 akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2024. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 5.000 sebagai cadangan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 28 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 421,103 yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 21 Desember 2023.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 16 Mei 2023, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun 2022 sebesar Rp 60 (nilai penuh) per lembar saham. Setelah memperhitungkan dividen tunai interim sebesar Rp 28 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 421,103 yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2022, sisanya sebesar Rp 32 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 481,260 telah dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2023. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 5.000 sebagai cadangan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 29 Juni 2022, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 17 (nilai penuh) per lembar saham. Setelah memperhitungkan dividen tunai interim sebesar Rp 7 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 104,751 yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan pada tanggal 6 Desember 2021, sisanya sebesar Rp 10 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 149,644 telah dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2022. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 5.000 sebagai cadangan.

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan wajib sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan tersebut.

18. CASH DIVIDENDS AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Based on the decision of Shareholders' Annual General Meeting on 22 May 2024, the Company announced a cash dividend from net profit in 2023 amounting to Rp 55 (full amount) per share. After taking into account the interim cash dividend amounting to Rp 28 (full amount) per share or equivalent to Rp 421,103 to the shareholders of the Company, which has been distributed on 21 December 2023 based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors on 1 December 2023, the remaining balance amounting to Rp 27 (full amount) per share or equivalent to Rp 406,063 which will be distributed on 21 June 2024. The Company agreed to set aside Rp 5,000 for the reserve.

Based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors on 1 December 2023, the Company approved interim cash dividend for the financial year 2023 amounting to Rp 28 (full amount) per share or equivalent to Rp 421,103 to the shareholders of the Company which has been distributed on 21 December 2023.

Based on the decision of Shareholders' Annual General Meeting on 16 May 2023, the Company announced a cash dividend from net profit in 2022 amounting to Rp 60 (full amount) per share. After taking into account the interim cash dividend amounting to Rp 28 (full amount) per share or equivalent to Rp 421,103 to the shareholders of the Company, which has been distributed on 22 December 2022 based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors on 2 December 2022, the remaining balance amounting to Rp 32 (full amount) per share or equivalent to Rp 481,260 has been distributed on 15 June 2023. The Company agreed to set aside Rp 5,000 for the reserve.

Based on the decision of Shareholders' Annual General Meeting on 29 June 2022, the Company announced a cash dividend from net profit in 2021 amounting to Rp 17 (full amount) per share. After taking into account the interim cash dividend amounting to Rp 7 (full amount) per share or equivalent to Rp 104,751 to the shareholders of the Company, which has been distributed on 23 December 2021 based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors on 6 December 2021, the remaining balance amounting to Rp 10 (full amount) per share or equivalent to Rp 149,644 has been distributed on 28 July 2022. The Company agreed to set aside Rp 5,000 for the reserve.

This is in accordance with the Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, which requires companies to set up a statutory reserve until the reserve reach at least 20% of the issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be provided.

Ekshibit E/79

Exhibit E/79

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

19. OTHER PAYABLES – THIRD PARTIES

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023 2022		
Titipan konsumen	273.070	258.891	278.938	Customer deposits
Utang kepada <i>supplier</i>	97.658	81.109	84.116	Payable to suppliers
Premi asuransi	40.649	45.288	58.736	Insurance premium
Utang pengurusan fidusia	882	1.268	1.230	Fiducia processing payables
Lain-lain	58.415	50.867	66.332	Others
Jumlah	470.674	437.423	489.352	Total

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Raya Saham Registra (RSR), Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The composition of the shareholder of the Company based on the share register of PT Raya Saham Registra (RSR), the share registrar, as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 are as follows:

31 Mei/May 2024				
Jumlah saham/ Number of Shares	Nilai nominal/ Amount	%*		Shareholders
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203	51,12	Trinugraha Capital & Co SCA
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	7.351.257.682	183.782	48,88	Others (each below 5%)
	15.039.383.620	375.985	100,00	
Saham treasuri	927.732.000	23.193	-	Treasury stock
Jumlah	15.967.115.620	399.178	100,00	Total
31 Desember/December 2023				
Jumlah saham/ Number of Shares	Nilai nominal/ Amount	%*		Shareholders
Trinugraha Capital & Co SCA DB SPORE SES CLT A/C FOR NTAsian Discovery MSTR FD- 864134218	7.688.125.938	192.203	51,12	Trinugraha Capital & Co SCA DB SPORE SES CLT A/C FOR NTAsian Discovery MSTR FD-864134218
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	832.804.900	20.820	5,54	Others (each below 5%)
	6.518.452.782	162.962	43,34	
	15.039.383.620	375.985	100,00	
Saham treasuri	927.732.000	23.193	-	Treasury stock
Jumlah	15.967.115.620	399.178	100,00	Total
31 Desember/ December 2022				
Jumlah saham/ Number of Shares	Nilai nominal/ Amount	%*		Shareholders
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203	51,12	Trinugraha Capital & Co SCA
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	7.351.257.682	183.782	48,88	Others (each below 5%)
	15.039.383.620	375.985	100,00	
Saham treasuri	927.732.000	23.193	-	Treasury stock
Jumlah	15.967.115.620	399.178	100,00	Total

*) % kepemilikan saham disajikan secara neto, diluar saham treasuri.

*) % share ownership is presented on a net basis, excluded treasury stock.

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

20. **MODAL SAHAM** (Lanjutan)

Jumlah saham yang dimiliki anggota Dewan komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Raya Saham Registra (RSR), biro administrasi efek, adalah sebanyak 399.098.280 saham, 398.175.980 saham dan 450.839.280 saham, yang merupakan kepemilikan sebesar 2,48%, 2,49% dan 2,81% dari jumlah saham Perusahaan yang beredar masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Anggota/ <i>Name of Members</i>	Jabatan/Positions	Jumlah Saham/ Total Shares			% 31 Mei/ 31 Desember/ May December		
		31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	2024	2023	2022
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur/ President Director	343.908.180	344.108.180	386.771.480	2,15	2,16	2,42
Sutadi	Direktur/Director	18.117.000	17.517.000	17.517.000	0,11	0,11	0,11
Sudjono	Direktur/Director	26.310.800	26.310.800	26.310.800	0,16	0,16	0,16
Andrew Adiwijanto	Direktur/Director	10.240.000	10.240.000	10.240.000	0,06	0,06	0,06
Sigit Hendra Gunawan	Direktur/Director	-	-	10.000.000	-	-	0,06
Goklas	Direktur/Director	522.300	-	-	0,00	-	-
Jumlah/ Total		399.098.280	398.175.980	450.839.280	2,48	2,49	2,81

Saham Treasuri

Pada tanggal 29 Juni 2022, RUPSLB menyetujui pengalihan sebagian saham melalui Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan *Management and Employee Stock Ownership Program* atau disebut juga sebagai (program MESOP), yang berasal dari saham treasuri milik Perusahaan sebanyak-banyaknya 75.000.000 lembar saham.

RUPSLB juga telah menyetujui pengalihan sisa saham treasuri sebanyak-banyaknya 927.732.000 lembar saham dengan cara dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek kepada pihak lain, baik kepada pemegang saham utama Perusahaan (Trinugraha Capital & Co. SCA) maupun kepada pihak ketiga lainnya.

Pada tanggal 11 Oktober 2022, Perusahaan melakukan transaksi pengalihan sebagian saham treasuri melalui program MESOP sejumlah 75.000.000 lembar saham pada harga Rp 500 (nilai penuh) per lembar saham. Pengalihan tersebut berlaku efektif pada tanggal 13 Oktober 2022 di mana saham-saham telah berpindah tangan dan diblock (tidak dapat diperdagangkan) dengan periode *vesting* program MESOP selama 3 tahun sejak tanggal dialihkan, dengan harga pasar Rp 1.005 (nilai penuh) per lembar saham.

Pelaksanaan program MESOP ini tidak menimbulkan dampak dilusi kepada pemegang saham atas kepemilikan saham dalam Perusahaan, dikarenakan saham-saham yang dimasukkan ke dalam program MESOP merupakan saham treasuri dan bukan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perusahaan. Hasil pengalihan saham MESOP akan menjadi tambahan modal kerja bagi Perusahaan.

20. **SHARE CAPITAL** (Continued)

The number of shares held by the member of the board of commissioners and board of directors of the Company based on the share register of PT Raya Saham Registra (RSR), the share registrar, was 399,098,280 shares, 398,175,980 shares and 450,839,280 shares representing 2.48%, 2.49% and 2.81% of the total outstanding shares of the Company as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, respectively with detail as follows:

Treasury stock

On 29 June 2022, the Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) has approved to form and implement Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP Program) by transferring a maximum of 75,000,000 of the Company's treasury shares.

The EGMS has also approved the transfer of the remaining 927,732,000 treasury shares by selling either on or outside the Stock Exchange to other parties, including to the main shareholders of the Company (Trinugraha Capital & Co. SCA) or other third parties.

On 11 October 2022, the Company entered into a transaction to transfer part of its treasury shares through the MESOP program in the amount of 75,000,000 shares at a price of Rp 500 (full amount) per share. The transfer is effective on 13 October 2022 where the shares have changed hands and are blocked (non-tradeable) with vesting period for the MESOP program for 3 years from the date of transfer, with market price of Rp 1,005 (full amount) per share.

The implementation of the MESOP program does not have a dilutive impact on shareholders on share ownership in the Company, causes the shares included in the MESOP program are treasury shares and are not new shares issued from the Company's portfolio. The proceeds from the transfer of MESOP shares will be additional working capital for the Company.

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. **MODAL SAHAM** (Lanjutan)

Saham Treasuri (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah saham treasuri masing-masing adalah sebanyak 927.732.000 saham.

Sesuai peraturan yang berlaku, sisa saham treasuri sebanyak 927.732.000 saham wajib dialihkan dan batas waktu pemenuhan kewajiban pengalihan sisa saham treasuri tersebut adalah 5 November 2025.

20. **SHARE CAPITAL** (Continued)

Treasury stock (Continued)

As of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, total treasury stock were 927,732,000 shares, respectively.

In accordance with applicable regulations, the remaining treasury shares of 927,732,000 must be transferred and with deadline for fulfilling the obligation to transfer the remaining treasury shares is 5 November 2025.

21. **TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO**

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 akun ini merupakan selisih lebih antara hasil yang diterima dengan nilai nominal dari setoran modal, penawaran umum perdana dan konversi dari obligasi konversi termasuk penyesuaian saldo karena kuasi reorganisasi.

21. **ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET**

On 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022 this account represents the difference between amount received and par value from paid-in capital, initial public offering and conversion of convertible bonds including adjustments balance of quasi reorganization.

22. **PENDAPATAN PIUTANG PEMBIAYAAN**

	<u>31 Mei/May</u>		<u>31 Desember/December</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan piutang pembiayaan				
Pihak ketiga	1.820.492	1.909.618	4.465.384	3.672.506
Pendapatan administrasi	341.233	370.336	839.352	763.781
Denda keterlambatan	149.997	138.994	352.929	328.755
Pendapatan terminasi	<u>112.469</u>	<u>122.687</u>	<u>299.461</u>	<u>289.397</u>
	<u>2.424.191</u>	<u>2.541.635</u>	<u>5.957.126</u>	<u>5.054.439</u>
Jumlah				
Dikurangi:				
Bagian pendapatan yang dibiayai				
bank sehubungan dengan kerjasama				
penerusan pinjaman dan pembiayaan				
bersama (Catatan 31)	<u>(15.670)</u>	<u>(6.669)</u>	<u>(23.284)</u>	<u>(2.191)</u>
Pendapatan piutang pembiayaan - neto	<u>2.408.521</u>	<u>2.534.966</u>	<u>5.933.842</u>	<u>5.052.248</u>

Financing receivables income
Third parties
Administration income
Late charges
Termination income

Total
Less:
Portion of funds financed by banks
in relation to channeling
and joint financing
cooperation (Note 31)

Financing receivables income - net

Pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp 78.672 dan Rp 84.205 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp 190.645 dan Rp 100.222.

For the five-month period ended 31 May 2024 and 2023, the amortization of transaction costs recognized as a reduction to financing receivables income was amounted to Rp 78,672 and Rp 84,205, respectively and for the year ended 31 December 2023 and 2022, the amortization of transaction costs recognized as a reduction to financing receivables income was amounted to Rp 190,645 and Rp 100,222, respectively.

23. **PENDAPATAN SYARIAH**

	<u>31 Mei/May</u>		<u>31 Desember/December</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Marjin murabahah	52.016	39.234	101.068	63.679
Pendapatan ijarah	131	372	703	1.267
Pendapatan IMBT	<u>6.291</u>	<u>1.768</u>	<u>6.891</u>	<u>211</u>
Jumlah	<u>58.438</u>	<u>41.374</u>	<u>108.662</u>	<u>65.157</u>

Murabahah margin
Ijarah income
IMBT income

Total

23. **SHARIA INCOME**

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENDAPATAN LAIN-LAIN

24. OTHER INCOME

	31 Mei/May		31 Desember/December		
	2024	2023	2023	2022	
Pemulihan dari piutang yang dihapusbukkan	79.559	65.756	196.243	208.407	Recovery on written-off receivables
Keuntungan neto penjualan aset tetap (Catatan 10)	5.201	4.400	13.502	20.209	Gain on sale of fixed assets - net (Note 10)
Lain-lain	8.121	6.842	18.300	14.119	Others
Jumlah	92.881	76.998	228.045	242.735	Total

25. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

25. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

	31 Mei/May		31 Desember/December		
	2024	2023	2023	2022	
Pihak ketiga					Third parties
Gaji dan imbalan kerja	587.395	550.856	1.353.921	1.220.271	Salaries and allowances
Imbalan pasca-kerja (Catatan 17)*	30.450	12.170	37.555	8.527	Post-employment benefits (Note 17)*
Lain-lain (Catatan 20)	-	-	-	37.875	Others (Note 20)
	<u>617.845</u>	<u>563.026</u>	<u>1.391.476</u>	<u>1.266.673</u>	
Pihak berelasi (Catatan 29) Gaji dan imbalan kerja	30.729	43.599	62.260	56.559	Related parties (Note 29) Salaries and allowances
Imbalan pasca-kerja (Catatan 17, 29)*	<u>1.739</u>	<u>1.961</u>	<u>3.367</u>	<u>1.416</u>	Post-employment benefits (Note 17, 29)*
	<u>32.468</u>	<u>45.560</u>	<u>65.627</u>	<u>57.975</u>	
Jumlah	650.313	608.586	1.457.103	1.324.648	Total

*)Terdapat penyesuaian biaya imbalan pasca-kerja atas penerapan Undang-undang Cipta Kerja No.11/2020 dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No.35/2021.

*)There is an adjustment to post-employment benefits due to the implementation of the Job Creation Law No.11/2020 and its derivative regulation, that is Government Regulation No.35/2021.

26. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

26. INTEREST AND FINANCING CHARGES

	31 Mei/May		31 Desember/December		
	2024	2023	2023	2022	
Bunga atas pinjaman yang diterima Bunga atas surat berharga yang diterbitkan (Catatan 15)	268.205	286.268	653.103	476.916	Interest on borrowings Interest on securities issued (Note 15)
Amortisasi biaya emisi atas surat berharga yang diterbitkan (Catatan 15)	<u>3.634</u>	<u>2.319</u>	<u>7.924</u>	<u>4.026</u>	Amortization of securities issuance cost (Note 15)
Jumlah	391.649	379.200	951.310	624.099	Total

Ekshibit E/83

Exhibit E/83

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Mei/May		31 Desember/December		
	2024	2023	2023	2022	
Beban penerimaan angsuran Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	59.101	42.612	150.272	80.592	Installment collection expense Depreciation of fixed assets (Note 10)
Perbaikan dan pemeliharaan	51.693	46.516	117.384	100.106	Repairs and maintenance
Pemasaran	48.315	44.562	124.206	89.072	Marketing
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 12)	39.091	52.857	99.358	79.073	Amortization of intangible assets (Note 12)
Honorarium tenaga ahli	28.849	11.641	53.859	22.492	Professional fees
Perjalanan dinas dan transportasi	24.984	19.820	42.868	148.269	Travel and transportation
Komunikasi	19.817	19.969	51.038	33.772	Communications
Pendidikan dan pelatihan	15.403	11.861	26.191	25.328	Training and education
Asuransi	10.144	21.451	26.866	23.170	Insurance
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 11)	10.125	8.432	21.856	16.560	Depreciation of right-of-use assets (Note 11)
Pengiriman, perangko dan materai	9.500	9.293	22.612	21.544	Courier, postage and stamp duty
Beban alih daya	8.959	9.214	21.533	18.043	Outsourced service expenses
Keanggotaan dan langganan	8.009	7.148	17.092	16.034	Membership and subscription
Listrik dan air	7.126	4.946	13.885	8.388	Electricity and water
Beban kantor	6.902	6.549	16.579	15.702	Office expense
Beban administrasi bank	5.397	6.615	16.348	17.303	Bank administration charges
Sewa	803	1.045	2.483	2.667	Rental
Program CSR	765	796	1.883	2.480	CSR program
Legalisir dokumen dan fotokopi	589	1.030	1.494	3.423	Legalized document and photocopy
Lain-lain	505	590	1.316	1.933	Others
	9.077	20.039	41.382	45.101	
Jumlah	365.154	346.986	870.505	771.052	Total

28. BEBAN LAIN-LAIN

28. OTHER EXPENSES

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other expenses are as follows:

	31 Mei/May		31 Desember/December		
	2024	2023	2023	2022	
Penghapusan piutang dalam proses penyelesaian	71.460	48.635	228.870	64.505	Written-off receivables in the settlement process
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian	4.122	21.668	34.024	(7.433)	Provision (recovery) for impairment losses of receivables in the settlement process
Jumlah	75.582	70.303	262.894	57.072	Total

Ekshibit E/84

Exhibit E/84

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu sebagai berikut:

29. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In carrying out its business activities, the Company and its subsidiary enter into transactions with certain related parties as the followings:

Pihak berelasi/ <i>Related party</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Transaksi/ <i>Transactions</i>			
Karyawan/ <i>Employee</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Imbalan kerja jangka-pendek/ <i>Short-term employees' benefits</i> Imbalan pasca-kerja/ <i>Post-employment benefits</i> Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham/ <i>Management and employee stock</i> <i>options program</i>			
Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:		<i>Balances and transactions to or from a related party are as follows:</i>			
Beban gaji dan tunjangan karyawan		<i>Salaries and employee benefits</i>			
		<u>31 Mei/<i>May</i></u>		<u>31 Desember/<i>December</i></u>	
		<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Personil manajemen kunci:					<i>Key management personnel</i>
Imbalan kerja jangka-pendek		30.729	43.599	62.260	56.559
Imbalan pasca-kerja*		<u>1.739</u>	<u>1.961</u>	<u>3.367</u>	<u>1.416</u>
		<u>32.468</u>	<u>45.560</u>	<u>65.627</u>	<u>57.975</u>
Persentase terhadap jumlah beban		<u>1,72%</u>	<u>2,49%</u>	<u>1,52%</u>	<u>1,84%</u>
					<i>Percentage of total expenses</i>

*) Terdapat penyesuaian biaya imbalan pasca-kerja atas penerapan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No.35/2021.

Transaksi dengan pihak berelasi, kecuali beban gaji dan imbalan kerja kepada personil manajemen kunci, dilakukan dengan menggunakan persyaratan usaha normal.

*)There is an adjustment to post-employment benefits due to the implementation of the Job Creation Law No.11/2020 and its derivative regulation, that is Government Regulation No.35/2021

Transaction with related parties, except salary expense and employee benefits to key management personnel, conducted by normal operations requirements.

Ekshibit E/85

Exhibit E/85

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. **SEGMENT OPERASI**

Perusahaan dan entitas anaknya mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

30. **OPERATING SEGMENT**

The Company and its subsidiary manage its business activities and identifies its reported segments based on product categories and geographic area. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segment's information concerning the main segments are set out as follows:

31 Mei/May 2024					
	Mobil/ Cars	Sepeda motor/ Motorcycles	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan					Income
Pendapatan pembiayaan	1.698.134	399.036	369.789	2.466.959	Financing income
Lain-lain	53.242	18.249	44.068	115.559	Others
Jumlah pendapatan	1.751.376	417.285	413.857	2.582.518	Total income
Beban					Expenses
Beban operasional	1.005.204	232.517	244.977	1.482.698	Operating expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	298.962	56.619	50.496	406.077	Provision for impairment losses
Jumlah beban	1.304.166	289.136	295.473	1.888.775	Total expenses
Laba sebelum pajak	447.210	128.149	118.384	693.743	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(84.494)	(24.211)	(22.367)	(131.072)	Income tax expense
Laba periode berjalan	362.716	103.938	96.017	562.671	Profit for the period
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset					Assets
Piutang pembiayaan - neto	14.613.455	1.516.700	4.842.553	20.972.708	Financing receivables - net
Piutang ijarah dan IMBT - neto	-	-	79.640	79.640	Ijarah and IMBT receivables - net
Lain-lain	194.665	13.291	2.775.965	2.983.921	Others
Jumlah aset	14.808.120	1.529.991	7.698.158	24.036.269	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	10.094.134	10.094.134	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - neto	-	-	3.117.443	3.117.443	Securities issued - net
Lain-lain	89.614	20.152	1.137.309	1.247.075	Others
Jumlah liabilitas	89.614	20.152	14.348.886	14.458.652	Total liabilities

31 Mei/May 2023					
	Mobil/ Cars	Sepeda motor/ Motorcycles	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan					Income
Pendapatan pembiayaan	1.691.975	578.196	306.169	2.576.340	Financing income
Lain-lain	45.375	8.965	46.979	101.319	Others
Jumlah pendapatan	1.737.350	587.161	353.148	2.677.659	Total income
Beban					Expenses
Beban operasional	925.510	287.663	191.902	1.405.075	Operating expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	236.750	143.819	41.359	421.928	Provision for impairment losses
Jumlah beban	1.162.260	431.482	233.261	1.827.003	Total expenses
Laba sebelum pajak	575.090	155.679	119.887	850.656	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(111.363)	(30.147)	(23.216)	(164.726)	Income tax expense
Laba periode berjalan	463.727	125.532	96.671	685.930	Profit for the period

Ekshibit E/86

Exhibit E/86

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. **SEGMENT OPERASI** (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut: (Lanjutan)

30. **OPERATING SEGMENT** (Continued)

The Company and its subsidiary manage its business activities and identifies its reported segments based on product categories and geographic area. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segment's information concerning the main segments are set out as follows: (Continued)

31 Mei/May 2023					
	Mobil/ Cars	Sepeda motor/ Motorcycles	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset					Assets
Piutang pembiayaan - neto	14.533.348	2.432.234	4.146.992	21.112.574	Financing receivables - net
Piutang ijarah dan IMBT - neto	-	-	26.173	26.173	Ijarah and IMBT receivables - net
Lain-lain	110.052	24.204	3.509.623	3.643.879	Others
Jumlah aset	14.643.400	2.456.438	7.682.788	24.782.626	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	9.916.494	9.916.494	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - neto	-	-	4.274.062	4.274.062	Securities issued - net
Lain-lain	87.683	20.489	1.510.038	1.618.210	Others
Jumlah liabilitas	87.683	20.489	15.700.594	15.808.766	Total liabilities
Desember/December 2023					
	Mobil/ Cars	Sepeda motor/ Motorcycles	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan					Income
Pendapatan pembiayaan	4.068.950	1.186.692	786.862	6.042.504	Financing income
Lain-lain	138.229	32.856	139.524	310.609	Others
Jumlah pendapatan	4.207.179	1.219.548	926.386	6.353.113	Total income
Beban					Expenses
Beban operasional	2.337.207	633.858	570.747	3.541.812	Operating expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	442.351	318.281	25.417	786.049	Provision for impairment losses
Jumlah beban	2.779.558	952.139	596.164	4.327.861	Total expenses
Laba sebelum pajak	1.427.621	267.409	330.222	2.025.252	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(268.890)	(50.366)	(62.197)	(381.453)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	1.158.731	217.043	268.025	1.643.799	Profit for the year
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset					Assets
Piutang pembiayaan - neto	14.478.748	1.559.625	4.668.020	20.706.393	Financing receivables - net
Piutang ijarah dan IMBT - neto	-	-	52.769	52.769	Ijarah and IMBT receivables - net
Lain-lain	129.938	10.847	3.091.488	3.232.273	Others
Jumlah aset	14.608.686	1.570.472	7.812.277	23.991.435	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	8.665.860	8.665.860	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - neto	-	-	4.720.775	4.720.775	Securities issued - net
Lain-lain	82.918	16.469	1.005.617	1.105.004	Others
Jumlah liabilitas	82.918	16.469	14.392.252	14.491.639	Total liabilities

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. **SEGMENT OPERASI** (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut: (Lanjutan)

30. **OPERATING SEGMENT** (Continued)

The Company and its subsidiary manage its business activities and identifies its reported segments based on product categories and geographic area. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segment's information concerning the main segments are set out as follows: (Continued)

	Desember/December 2022				
	Mobil/ Cars	Sepeda motor/ Motorcycles	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan					Income
Pendapatan pembiayaan	3.462.187	1.104.184	551.034	5.117.405	Financing income
Lain-lain	143.905	28.568	93.132	265.605	Others
Jumlah pendapatan	3.606.092	1.132.752	644.166	5.383.010	Total income
Beban					Expenses
Beban operasional	1.843.495	542.003	391.373	2.776.871	Operating expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	192.226	118.326	56.906	367.458	Provision for impairment losses
Jumlah beban	2.035.721	660.329	448.279	3.144.329	Total expenses
Laba sebelum pajak	1.570.371	472.423	195.887	2.238.681	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(303.037)	(91.164)	(37.801)	(432.002)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	1.267.334	381.259	158.086	1.806.679	Profit for the year
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset					Assets
Piutang pembiayaan - neto	13.494.914	2.319.601	3.739.739	19.554.254	Financing receivables - net
Piutang ijarah dan IMBT - neto	-	-	7.767	7.767	Ijarah and IMBT receivables - net
Lain-lain	53.736	16.023	2.297.854	2.367.613	Others
Jumlah aset	13.548.650	2.335.624	6.045.360	21.929.634	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	10.246.908	10.246.908	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan - neto	-	-	1.581.490	1.581.490	Securities issued - net
Lain-lain	112.715	19.574	1.213.038	1.345.327	Others
Jumlah liabilitas	112.715	19.574	13.041.436	13.173.725	Total liabilities

Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis:

The following tables present information concerning the main segments based on geographic area:

Segmen Geografis

Geographical Segments

	31 Mei/May 2024					
	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Kalimantan/ Kalimantan	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi dan Indonesia Timur/ Sulawesi and East Indonesia	Jumlah/ Total	
Jumlah Pendapatan	1.373.388	335.750	459.311	414.069	2.582.518	Total Income
Jumlah Aset	14.587.782	3.752.026	3.637.617	2.058.844	24.036.269	Total Assets

Ekshibit E/88

Exhibit E/88

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. **SEGMENT OPERASI** (Lanjutan)

Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis: (Lanjutan)

30. **OPERATING SEGMENT** (Continued)

The following tables present information concerning the main segments based on geographic area: (Continued)

31 Mei/May 2023						
	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Kalimantan/ Kalimantan	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi dan Indonesia Timur/ Sulawesi and East Indonesia	Jumlah/ Total	
Jumlah Pendapatan	1.460.313	332.266	471.309	413.771	2.677.659	Total Income
Jumlah Aset	15.143.824	3.603.201	4.104.213	1.931.388	24.782.626	Total Assets
Desember/December 2023						
	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Kalimantan/ Kalimantan	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi dan Indonesia Timur/ Sulawesi and East Indonesia	Jumlah/ Total	
Jumlah Pendapatan	3.439.479	792.550	1.127.038	994.046	6.353.113	Total Income
Jumlah Aset	14.363.474	3.642.205	4.003.551	1.982.205	23.991.435	Total Assets
Desember/December 2022						
	Jawa dan Bali/ Java and Bali	Kalimantan/ Kalimantan	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi dan Indonesia Timur/ Sulawesi and East Indonesia	Jumlah/ Total	
Jumlah Pendapatan	2.960.283	650.417	947.292	825.018	5.383.010	Total Income
Jumlah Aset	13.347.967	3.313.769	3.701.852	1.566.046	21.929.634	Total Assets

31. **PERJANJIAN KERJASAMA YANG PENTING**

a. **Pembiayaan Bersama**

Dalam kaitan untuk mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha, Perusahaan juga melakukan berbagai kerjasama dengan perbankan, antara lain dalam bentuk perjanjian pembiayaan bersama (*joint financing*) yang dibukukan secara *off balance sheet*.

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022
PT Bank Jago Tbk	563.673	494.892	102.899
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	714
Dikurangi:			
Biaya transaksi belum diamortisasi	(1.239)	(1.068)	(282)
Jumlah - neto	562.434	493.824	103.331

Dalam perjanjian kerjasama dengan skema pembiayaan bersama (*joint financing*) antara Perusahaan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah berkisar 5% dari Perusahaan, dan 95% dari pemberi pembiayaan bersama (bank). Sedangkan untuk jangka waktu pembiayaan bersama sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan kepada konsumen dan berlaku efektif sampai dengan tanggal 25 Mei 2028. Status terkini atas perjanjian kerjasama tersebut adalah masih aktif.

31. **SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS**

a. **Joint Financing**

For the purpose to support funding requirement on business expansion, the Company has also engaged a partnership with banking institutions in the form of joint financing which are classified as "off balance sheet" transactions.

	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022
PT Bank Jago Tbk	563.673	494.892	102.899
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	714
Less:			
Unamortized transaction costs	(1.239)	(1.068)	(282)
Total - net	562.434	493.824	103.331

Pursuant to the agreement with joint financing scheme between the Company and PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), the amount of funds to be financed by each party range from 5% from the Company, and 95% from joint financing providers (banks). As for The tenor of joint financing scheme is available up to 48 (forty eight) months and shall be effective until 25 May 2028. The current status of the agreement is still active.

Ekshibit E/89

Exhibit E/89

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

31. PERJANJIAN KERJASAMA YANG PENTING (Lanjutan)

a. Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

Pada tanggal 5 Agustus 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No.0100/065/B/ 05082021 dengan skema pembiayaan bersama (*joint financing*) sebesar Rp 150.000 dengan PT Bank Jago Tbk. Pada tanggal 25 Maret 2022, dengan perjanjian kerjasama No. 0100/026/B/25032022, jumlah fasilitas ini meningkat menjadi Rp 300.000. Porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah berkisar 10% dari Perusahaan, dan 90% dari pemberi pembiayaan bersama (bank).

Pada tanggal 24 Mei 2023, Perusahaan menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama No.0100/049/B/24052023 dengan PT Bank Jago Tbk. dimana jumlah fasilitas ini berubah menjadi sebesar Rp 2.000.000 dan berlaku efektif sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024. Status terkini atas perjanjian kerjasama tersebut adalah masih aktif.

Fasilitas tersebut di atas berlaku sampai dengan dibayarkannya angsuran terakhir piutang pembiayaan bersama oleh konsumen.

Perusahaan bersama dengan pemberi pembiayaan bersama di atas bertindak sebagai penyedia dana dalam pemberian pembiayaan kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

Kerjasama pembiayaan bersama yang dilakukan ini bersifat *without recourse*, dimana Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyeter angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perusahaan.

b. Penyalur kendaraan

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa penyalur kendaraan. Pembiayaan yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan dicatat sebagai utang kepada penyalur kendaraan.

c. Asuransi

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Pan Pasific Insurance, PT AIA Financial, PT FWD Insurance Indonesia dan PT Chubb Life Insurance Indonesia dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan perlindungan terhadap agunan yang di biayai.

Perusahaan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perusahaan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari konsumen namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang premi asuransi.

31. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS (Continued)

a. Joint Financing (Continued)

On 5 August 2021, the Company entered into joint financing agreement No.0100/065/B/05082021 amounting to Rp 150,000 with PT Bank Jago Tbk. On 25 March 2022, with financing agreement No.0100/026/B/25032022, the amount of this facility has been increased to Rp 300,000. The amount of funds to be financed by each party range from 10% from the Company, and 90% from joint financing providers (banks).

On 24 May 2023, the Company entered into an Amendment and Restatement of Joint Financing Facility Agreement No.0100/049/B/24052023 with PT Bank Jago Tbk. whereas the facility amount increase to Rp 2,000,000 and shall be effective until 5 August 2024. The current status of the agreement is still active.

The above facility will be expired at the time customers pay the latest installment of joint financing receivables.

The Company, together with the joint financing providers mentioned above, extend credit to consumers in accordance with certain criteria laid down in agreements. The Company is responsible to maintain the customer's documentation and administration.

The joint financing facilities were arranged without recourse, whereby the Company is not obliged to pay installments including interest to joint financing providers in the event that the customers fail to meet their installment obligation to the Company.

b. Dealers of Motor Vehicles

The Company has entered into cooperation agreements with dealers of motor vehicles. Approved financing that has not yet been paid to dealers are recorded as payable to dealers.

c. Insurance

The Company has entered into cooperation agreements with insurance companies which are PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Pan Pasific Insurance, PT AIA Financial, PT FWD Insurance Indonesia and PT Chubb Life Insurance Indonesia to providing credit protection insurance and protection for financed collateral.

The Company insures vehicles for the interest of the Company in its capacity as financing provider. Insurance premium payments received from customers that have not yet been paid to insurance companies are recorded as insurance premium payable.

Ekshibit E/90

Exhibit E/90

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba periode berjalan yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/ tahun berjalan.

	31 Mei/May	
	2024	2023
Laba periode/ tahun berjalan untuk perhitungan laba per saham dasar	562.714	685.939
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	15.039.383.620	15.039.383.620
Laba per saham dasar (nilai penuh)	37	46

Perusahaan tidak memiliki instrumen yang memberikan efek dilusi pada laba per saham dasar.

32. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing profit for the period available to shareholders by the weighted average common shares outstanding during the period/ year.

	31 Desember/December	
	2023	2022
Profit for the period/ year for the computation of basic earning per shares	1.643.888	1.806.679
The weighted average of shares outstanding	15.039.383.620	14.975.068.552
Basic earnings per share (full amount)	109	121

The Company does not have instrument that give impact of dilution effect on basic earning per share.

33. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Perubahan komponen penghasilan komprehensif lain yang tidak mempengaruhi laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Mei/May		31 Desember/December	
	2024	2023	2023	2022
Saldo awal tahun – setelah pajak tangguhan	65.202	62.751	62.751	48.626
Kerugian pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	(6.907)	(278)	(10.468)	(8.979)
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif – lindung nilai arus kas	(90.360)	16.674	13.498	26.409
	(32.065)	79.147	65.781	66.056
Aset pajak tangguhan (Catatan 14c)	18.480	(3.115)	(579)	(3.305)
Saldo akhir periode/ tahun – setelah pajak tangguhan	(13.585)	76.032	65.202	62.751

33. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The movement of other comprehensive income component that have not yet affected the profit and loss were as follows:

	2023	2022
Beginning balance of the year – after deferred tax	62.751	48.626
Loss on remeasurement of defined benefit actuarial program	(10.468)	(8.979)
Effective portion of the fair value change of the derivative instrument – cash flow hedge	13.498	26.409
Deferred tax assets (Note 14c)	(579)	(3.305)
Balance at the end of period/ year – after deferred tax	65.202	62.751

Ekshibit E/91

Exhibit E/91

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. PERUBAHAN PADA LIABILITAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

34. CHANGES IN LIABILITIES ARISED FROM FINANCING
ACTIVITIES

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan
adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arised from financing activities are as follows:

31 Mei/May 2024						
Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflows	Pergerakan non-kas/ Non-cash changes		Saldo akhir/ Ending balance		
		Pergerakan valuta asing/ Movement in foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost			
Pinjaman yang diterima Surat berharga yang diterbitkan - neto	8.665.860 4.720.775	1.317.251 (1.607.000)	118.134 -	(7.111) 3.668	10.094.134 3.117.443	Funds borrowings Securities issued - net
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	13.386.635	(289.749)	118.134	(3.443)	13.211.577	Total liabilities from financing activities

31 Desember/December 2023						
Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflows	Pergerakan non-kas/ Non-cash changes		Saldo akhir/ Ending balance		
		Pergerakan valuta asing/ Movement in foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost			
Pinjaman yang diterima Surat berharga yang diterbitkan - neto	10.246.908 1.581.490	(1.517.821) 3.145.000	(59.530) -	(3.697) (5.715)	8.665.860 4.720.775	Funds borrowings Securities issued - net
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	11.828.398	1.627.179	(59.530)	(9.412)	13.386.635	Total liabilities from financing activities

31 Desember/December 2022						
Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflows	Pergerakan non-kas/ Non-cash changes		Saldo akhir/ Ending balance		
		Pergerakan valuta asing/ Movement in foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost			
Pinjaman yang diterima Surat berharga yang diterbitkan - neto	4.789.422 2.487.483	5.344.363 (910.000)	123.855 -	(10.732) 4.007	10.246.908 1.581.490	Funds borrowings Securities issued - net
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	7.276.905	4.434.363	123.855	(6.725)	11.828.398	Total liabilities from financing activities

Perusahaan dan entitas anaknya telah melakukan kebijakan lindung
nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing.

The Company and its subsidiary have conducted hedge policy to
borrowings denominated in foreign currencies.

Ekshibit E/92

Exhibit E/92

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. **MANAJEMEN RISIKO**

Pendahuluan dan gambaran umum

Perkembangan dunia *multifinance* yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas pembiayaan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan dan entitas anaknya pada dasarnya sudah dilakukan sejak perusahaan berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

Perusahaan dan entitas anaknya menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan dapat dikelola secara praktis dan efektif setiap hari, dengan empat tipe risiko utama:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko pendanaan dan likuiditas
4. Risiko operasional
5. Risiko permodalan

Pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di Perusahaan, yang didasarkan pada kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi baik, maka manajemen risiko akan menjadi *strategic partner* bagi bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi Perusahaan.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai, Perusahaan dan entitas anaknya terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko.

Kerangka manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batasan transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh aktivitas lingkup usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

35. **RISK MANAGEMENT**

Introduction and general description

The development in multifinance industry followed with the improvement in complexity of financing activity has emphasized more on the importance of good corporate governance and a reliable risk management. Such both matters are important factors, which bring the investors' attention in assessing their investment targeting. Basically, the implementation of risk management within the Company and its subsidiary had been carried out since the establishment of the Company, even though the Company was still using a conventional manner and keep improving in accordance with the recent development of internal and external circumstances.

The Company and its subsidiary realize that risk is an integral part of its operational activity and can be managed practically and effectively day by day, with the following four particular risks:

1. Credit risk
2. Market risk
3. Funding and liquidity risk
4. Operational risk
5. Capital risk

Risk management within the Company includes overall scope of business activity within the Company, which based on the necessity of balance between business operational function and its risk management thereof. By means of proper risk management and policy, thus the risk management will become a strategic partner to the business in obtaining optimal outcome from the Company's course of operation.

In the event of development of proper risk management, the Company and its subsidiary keep developing and improving the integrated and comprehensive framework of risk management system and internal control structure, in order that they are able to provide information as an early warning of any potential risk and accordingly, take appropriate actions to mitigate the risk.

The framework of risk management is implemented under the form of policy, procedures, transactional limits, authorizations, and other rules as well as various risk management instruments applicable to entire business activity. In order to ensure that the policy and procedures is in line with the current business development, evaluation is frequently carried out in accordance with the change in its risk parameter.

Ekshibit E/93

Exhibit E/93

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portfolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan Manajemen Risiko dalam melakukan fungsi pengawasan.

2. Kebijakan dan penerapan batasan

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan kondisi usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar, Ketentuan Umum dan Surat Keputusan Dewan Direksi, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan terkait. Perusahaan juga menerapkan batasan persetujuan atau otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

3. Identifikasi, pengukuran, pengawasan dan sistem informasi manajemen

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko, terutama risiko kredit dan operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen. Untuk menjamin ketersediaan data risiko yang terkini dan komprehensif, Perusahaan telah melakukan konversi sistem operasi Perusahaan yang ada menjadi *centralized system* yang dikenal dengan CONFINS. Selain itu, Perusahaan juga melakukan implementasi sistem informasi *business intelligence* agar data atau informasi risiko dapat disediakan secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen atau pihak ketiga lainnya.

4. Pengendalian internal

Perusahaan memiliki Departemen Audit Internal yang secara independen melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Tanggung jawab dari Departemen Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari proses bisnis yang ada di dalam Perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan risiko Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian di dalam Perusahaan termasuk rekomendasi perbaikan yang potensial terhadap proses tersebut; dan

35. **RISK MANAGEMENT** (Continued)

Framework of risk management

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors, which includes:

- Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;
- Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;
- Presence of Audit Committee and Risk Management Committee in carrying out their supervisory functions.

2. Policy and implementation limits

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies concerning the level of authority on approval or authorization for both credit and non-credit transactions.

3. Identification, measurement, monitoring, and management information system

The Company has a set of tools to identify, measure, and monitor risks, particularly the credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism. In order to ensure the availability of updated and comprehensive risk data, the Company had converted the existing operating system into a centralized system, which known as CONFINS. Moreover, the Company has also implemented business intelligence information system in order that data or risk information could be provided to the management or other third parties on a prompt and accurate manner.

4. Internal control

The Company has the Internal Audit Division in place, which independently reports on process and results of assessment to the Board of Commissioners and Board of Directors. The responsibility of the Internal Audit Division includes:

- Providing assessment on the adequacy and effectiveness of the entire existing business process within the Company;
- Conducting examination on compliance to the Company's risk policies;
- Reporting on significant issues related to the control activities within the Company, including potential improvements to these processes; and

Ekshibit E/94

Exhibit E/94

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut: (Lanjutan)

4. **Pengendalian internal** (Lanjutan)

Perusahaan memiliki Departemen Audit Internal yang secara independen melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Tanggungjawab dari Departemen Audit Internal mencakup: (Lanjutan)

- Melakukan koordinasi strategis dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, hukum, sistem dan prosedur, dan audit eksternal).

Proses dan penilaian risiko

Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit mengingat risiko yang dihadapi merupakan risiko individual yang melekat pada produk, transaksi maupun proses pada unit yang bersangkutan. Tugas utama dari Departemen Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan, melakukan pengukuran dan pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi.

1. **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko utama Perusahaan, yaitu risiko yang timbul apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Diversifikasi portofolio menurut wilayah, sektor ekonomi dan industri, merk dan tipe barang.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, yaitu penetapan tingkat bunga pembiayaan berdasarkan risiko yang dihadapi, antara lain dinilai dari tingkat uang muka yang dibayar konsumen, usia kendaraan yang dibiayai, jenis penutupan asuransi yang dipilih dan lain sebagainya.
- Adanya *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai "early warning system" atas suatu masing-masing produk pembiayaan maupun kantor cabang.
- Penanganan kontrak bermasalah yang dilakukan secara disiplin dan proaktif.
- Analisa atas kualitas portofolio secara periodik dan tindakan preventif dan sanksi bagi cabang-cabang yang kualitas portofolionya tidak sesuai target.

35. **RISK MANAGEMENT** (Continued)

Framework of risk management (Continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows: (Continued)

4. **Internal control** (Continued)

The Company has the Internal Audit Division in place, which independently reports on process and results of assessment to the Board of Commissioners and Board of Directors. The responsibility of the Internal Audit Division includes: (Continued)

- Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal, system and procedures, and external auditor)

Process and risk assessments

Basically, risk management processes are carried out by each unit considering that the risk faced represents individual risks which are embedded into the products, transactions, as well as process in the related unit. The primary task of Risk Management Division is to determine policies and procedures as well as doing a series of processes of collecting, measuring, and reporting to the Board of Commissioners and Board of Directors. The determination of risk management policies is carried out through approval process by the Board of Directors.

1. **Credit Risk**

Credit risk is the main risk of the Company, that is the risk arising when the customer are unable to meet its obligation in accordance with the agreement as agreed upon between the customer and the Company.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Diversify the portfolio by region, economic sector and industry, brand and type of goods.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, namely setting the interest rate of financing based on the risks faced by, among others, assessed based on the level of advances paid by consumers, age of vehicles financed, type of insurance coverage selected and so forth.
- The Key Performance Indicators (KPI) as an "early warning system" of an individual loan products as well as branch offices.
- Handling of problematic contracts in a discipline and proactive manner.
- Analysis of portfolio quality through periodic and preventive actions and sanctions for branches whose quality of its portfolio is not on target.

Ekshibit E/95

Exhibit E/95

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

35. **RISK MANAGEMENT** (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. **Risiko Kredit** (Lanjutan)

1. **Credit Risk** (Continued)

Tabel berikut menjelaskan eksposur maksimum sesuai dengan konsentrasi risiko kredit:

The following table illustrates the Company's maximum exposure based on credit risk concentration:

31 Mei/May 2024			
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Eksposur maksimum/ Maximum exposure
Kas dan setara kas	1.394.669	-	1.394.669
Piutang pembiayaan	3.426.862	18.380.237	21.807.099
Piutang ijarah dan IMBT	-	82.495	82.495
Aset derivatif	85.195	-	85.195
Piutang karyawan	-	47.593	47.593
	4.906.726	18.510.325	23.417.051
31 Desember/December 2023			
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Eksposur maksimum/ Maximum exposure
Kas dan setara kas	1.739.659	-	1.739.659
Piutang pembiayaan	3.332.910	18.137.603	21.470.513
Piutang ijarah dan IMBT	-	53.816	53.816
Aset derivatif	56.657	-	56.657
Piutang karyawan	-	48.463	48.463
	5.129.226	18.239.882	23.369.108
31 Desember/December 2022			
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Eksposur maksimum/ Maximum exposure
Kas dan setara kas	1.073.255	-	1.073.255
Piutang pembiayaan	2.774.668	17.613.021	20.387.689
Piutang ijarah dan IMBT	-	8.096	8.096
Aset derivatif	103.056	-	103.056
Piutang karyawan	-	52.921	52.921
	3.950.979	17.674.038	21.625.017

Cash and cash equivalents
Financing receivables
Ijarah and IMBT receivables
Derivative assets
Employee receivables

Cash and cash equivalents
Financing receivables
Ijarah and IMBT receivables
Derivative assets
Employee receivables

Cash and cash equivalents
Financing receivables
Ijarah and IMBT receivables
Derivative assets
Employee receivables

Ekshibit E/96

Exhibit E/96

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

1. Credit Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang dibedakan antara yang mengalami penurunan nilai dan yang tidak:

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between those which impaired and not impaired:

31 Mei/May 2024			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Kas dan setara kas	1.394.669	-	1.394.669
Piutang pembiayaan	21.489.173	317.926	21.807.099
Piutang ijarah dan IMBT	81.602	893	82.495
Aset derivatif	85.195	-	85.195
Piutang karyawan	47.593	-	47.593
	23.098.232	318.819	23.417.051
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(837.246)
			22.579.805
31 Desember/December 2023			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami Penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Kas dan setara kas	1.739.659	-	1.739.659
Piutang pembiayaan	21.170.839	299.674	21.470.513
Piutang ijarah dan IMBT	53.679	137	53.816
Aset derivatif	56.657	-	56.657
Piutang karyawan	48.463	-	48.463
	23.069.297	299.811	23.369.108
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(765.167)
			22.603.941

Ekshibit E/97

Exhibit E/97

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

35. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

1. Credit Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang dibedakan antara yang mengalami penurunan nilai dan yang tidak: (Lanjutan)

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between those which impaired and not impaired: (Continued)

31 Desember/December 2022			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Kas dan setara kas	1.073.255	-	1.073.255
Piutang pembiayaan	20.182.489	205.200	20.387.689
Piutang ijarah dan IMBT	7.948	148	8.096
Aset derivatif	103.056	-	103.056
Piutang karyawan	52.921	-	52.921
	21.419.669	205.348	21.625.017
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(833.764)
			20.791.253

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang dibedakan antara individual dan kolektif:

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between individual and collective:

31 Mei/May 2024			
	Individual/ <i>Individual</i>	Kolektif/ <i>Collective</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Kas dan setara kas	1.394.669	-	1.394.669
Piutang pembiayaan	21.356	21.785.743	21.807.099
Piutang ijarah dan IMBT	-	82.495	82.495
Aset derivatif	85.195	-	85.195
Piutang karyawan	47.593	-	47.593
	1.548.813	21.868.238	23.417.051
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(837.246)
			22.579.805

31 Desember/December 2023			
	Individual/ <i>Individual</i>	Kolektif/ <i>Collective</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Kas dan setara kas	1.739.659	-	1.739.659
Piutang pembiayaan	48.428	21.422.085	21.470.513
Piutang ijarah dan IMBT	3	53.813	53.816
Aset derivatif	56.657	-	56.657
Piutang karyawan	48.463	-	48.463
	1.893.210	21.475.898	23.369.108
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(765.167)
			22.603.941

Ekshibit E/98

Exhibit E/98

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

1. **Risiko Kredit (Lanjutan)**

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang dibedakan antara individual dan kolektif: (Lanjutan)

	31 Desember/December 2022			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	1.073.255	-	1.073.255	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	341.111	20.046.578	20.387.689	Financing receivables
Piutang ijarah dan IMBT	819	7.277	8.096	Ijarah and IMBT receivables
Aset derivatif	103.056	-	103.056	Derivative assets
Piutang karyawan	52.921	-	52.921	Employee receivables
	<u>1.571.162</u>	<u>20.053.855</u>	<u>21.625.017</u>	
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(833.764)</u>	Allowance for impairment losses
			<u>20.791.253</u>	

2. **Risiko Pasar**

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang Rupiah yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perusahaan. Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perusahaan saat ini, risiko pasar Perusahaan adalah minimal. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing, sementara seluruh pinjaman luar negeri Perusahaan dalam mata uang asing telah diproteksi dengan *swap* dalam jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sama dengan utangnya. Dalam hal suku bunga, seluruh bunga yang dibebankan ke konsumen adalah suku bunga tetap (*fixed interest rate*), sementara utang yang diperoleh sebagian besar juga dalam suku bunga tetap dan hanya sebagian kecil utang dalam bentuk bunga mengambang (*floating interest rate*).

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Melakukan penelaahan atas tingkat bunga pembiayaan yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pinjaman.
- Membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

35. **RISK MANAGEMENT (Continued)**

Process and risk assessments (Continued)

1. **Credit Risk (Continued)**

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between individual and collective: (Continued)

2. **Market Risk**

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rates and exchange rate of Rupiah currency which could resulting in decrease in revenue, or increase in cost of capital of the Company. With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is mitigated to the minimum level. The Company does not have financing transaction in foreign currency, while all off-shore loans of the Company in foreign currency have been protected by entering into swap transactions at amount and settlement date that similar to the borrowings thereof. In terms of interest rate, all interest rate charged to the customer is fixed interest rate, while most of the borrowings received bear fixed interest rate, and only a small portion the borrowings bear floating interest rate.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Managing risks of foreign exchange rates.
- Performing review over the interest rate on financing associated with interest rate on borrowings.
- Limiting exposure in the investment that has fluctuating market prices.

Ekshibit E/99

Exhibit E/99

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

2. **Risiko Pasar** (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan eksposur Perusahaan atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Mei 2024. Termasuk didalamnya adalah instrumen keuangan Perusahaan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang:

	31 Mei/May 2024	
	USD	
	(Nilai penuh)/	Nilai (Rp)/
	(Full amount)	Equivalent (Rp)
Liabilitas		
Pinjaman yang diterima	212.444.444	3.452.860
Beban akrual	1.465.621	23.821
Jumlah liabilitas	213.910.065	3.476.681
Liabilitas neto		
Kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing	(213.910.065)	(3.746.681)
Eksposur neto dalam mata uang asing	=	=

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap beberapa skenario suku bunga baku maupun non-baku.

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan:

	31 Mei/May		31 Desember/December	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan pembiayaan:				
Kenaikan suku bunga 1% (100 basis poin)	77.697	77.816	190.599	149.972
Penurunan suku bunga 1% (100 basis poin)	(77.697)	(77.816)	(190.599)	(149.972)

35. **RISK MANAGEMENT**(Continued)

Process and risk assessments (Continued)

2. **Market Risk** (Continued)

The following table illustrates the Company's exposure to foreign currency exchange rate risk as of 31 May 2024. Included in the table are financial instruments of the Company at carrying amounts, categorised by currency:

Liabilities	
Fund borrowings	
Accrued expenses	
Total liabilities	
Net liabilities	
Foreign currency swap transactions contract	
Net exposure in foreign currency	=

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios.

The following table illustrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the financing income:

Financing income:	
Increase in interest rate by 1% (100 basis point)	
Decrease in interest rate by 1% (100 basis point)	

Ekshibit E/100

Exhibit E/100

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

35. **RISK MANAGEMENT** (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

2. **Risiko Pasar** (Lanjutan)

2. **Market Risk** (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

The following table illustrates the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing of maturity dates to analyze the impact of changes in interest rate:

		31 Mei/May 2024								
		Tingkat bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat bunga tetap/ Fixed rate					Jumlah/	
		< 3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	< 3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	> 2 tahun/ years	Total		
Aset keuangan										Financial assets
Kas dan setara kas	1.394.669	-	-	-	-	-	-	1.394.669		Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	-	-	3.751.181	7.190.168	6.366.251	4.499.499		21.807.099		Financing receivables
Piutang ijarah dan IMBT	-	-	14.396	24.599	24.588	18.912		82.495		Ijarah and IMBT receivables
Jumlah aset keuangan	1.394.669	-	-	3.765.577	7.214.767	6.390.839	4.518.411	23.284.263	Total financial assets	
Liabilitas keuangan										Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	1.565.524	3.941.892	3.266.053	1.320.665		10.094.134		Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	778.905	609.719	878.917	849.902	3.117.443			Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	2.344.429	4.551.611	4.144.970	2.170.567	13.211.577		Total financial liabilities	
Neto	1.394.669	-	1.421.148	2.663.156	2.245.869	2.347.844	10.072.686		Net	
		31 Desember/December 2023								
		Tingkat bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat bunga tetap/ Fixed rate					Jumlah/	
		< 3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	< 3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	> 2 tahun/ years	Total		
Aset keuangan										Financial assets
Kas dan setara kas	1.739.659	-	-	-	-	-	-	1.739.659		Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	-	-	3.781.082	6.929.697	6.349.324	4.410.410		21.470.513		Financing receivables
Piutang ijarah dan IMBT	-	-	13.702	14.536	14.365	11.213		53.816		Ijarah and IMBT receivables
Jumlah aset keuangan	1.739.659	-	3.794.784	6.944.233	6.363.689	4.421.623	23.263.988		Total financial assets	
Liabilitas keuangan										Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	20.787	-	1.484.229	3.724.801	2.669.140	766.903		8.665.860		Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	614.669	1.766.466	609.510	1.730.130	4.720.775			Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	20.787	-	2.098.898	5.491.267	3.278.650	2.497.033	13.386.635		Total financial liabilities	
Neto	1.718.872	-	1.695.886	1.452.966	3.085.039	1.924.590	9.877.353		Net	

Ekshibit E/101

Exhibit E/101

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

2. **Risiko Pasar** (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga: (Lanjutan)

31 Desember/December 2022								
	Tingkat bunga mengambang/ <i>Floating rate</i>		Tingkat bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>					Jumlah/
	< 3 bulan/ <i>months</i>	3-36 bulan/ <i>months</i>	< 3 bulan/ <i>months</i>	3-12 bulan/ <i>months</i>	1-2 tahun/ <i>years</i>	> 2 tahun/ <i>years</i>	<i>Total</i>	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	1.073.255	-	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	-	-	3.481.977	6.795.767	6.035.931	4.074.014	20.387.689	Financing receivables ijarah
Piutang ijarah dan IMBT	-	-	1.631	2.934	2.083	1.448	8.096	and IMBT receivables
Jumlah aset keuangan	1.073.255	-	3.483.608	6.798.701	6.038.014	4.075.462	21.469.040	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	20.763	83.077	1.453.896	3.744.385	3.653.518	1.291.269	10.246.908	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	652.504	928.986	-	1.581.490	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	20.763	83.077	1.453.896	4.396.889	4.582.504	1.291.269	11.828.398	Total financial liabilities
Neto	1.052.492	(83.077)	2.029.712	2.401.812	1.455.510	2.784.193	9.640.642	Net

3. **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas merupakan risiko terkait dengan kemampuan sumber dana Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya pada jatuh tempo.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mendapatkan pinjaman dengan skedul pembayaran kembali pokok dan bunga yang sesuai dengan periode jatuh tempo piutang, sehingga tidak terjadi *mis-match*.
- Menjaga agar posisi kas dan Perusahaan selalu dalam posisi likuid untuk mendukung aktivitas pembiayaan selama minimal 7 hari.
- Memonitor posisi kas dan bank Perusahaan secara periodik, baik tahunan, bulanan, mingguan maupun harian, guna memastikan agar selalu terdapat surplus kas yang memadai.
- Menjaga agar jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode tertentu lebih besar dibanding dengan utang yang jatuh tempo pada periode yang sama.

35. **RISK MANAGEMENT** (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

2. **Market Risk** (Continued)

The following table illustrates the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing of maturity dates to analyze the impact of changes in interest rate: (Continued)

3. **Liquidity Risk**

Liquidity risk is the risk associated with the ability of the Company to meet its obligations when they fall due.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Obtaining borrowings with principal and interest repayment schedule that aligns with the original maturities of receivables, in order to prevent *mis-match*.
- Maintaining the cash and bank position of the Company to remain in a liquid position in supporting the financing activities for at least 7 days.
- Monitoring the cash and bank position of the Company in a regular basis, whether annually, monthly, weekly or daily, to ensure that there is always sufficient cash surplus.
- Maintaining the number of receivables due in a certain period higher than the debts maturing in the same period.

Ekshibit E/102

Exhibit E/102

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

35. **RISK MANAGEMENT** (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

3. **Risiko Likuiditas** (Lanjutan)

3. **Liquidity Risk** (Continued)

Tabel berikut ini menyajikan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022:

The following table presents the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022:

31 Mei/May 2024							
	Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	>3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	Jumlah/ Total
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	1.394.669	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	-	1.953.944	1.797.237	7.190.168	9.488.121	1.377.629	Financing receivables
Piutang ijarah dan IMBT	-	8.226	6.171	24.599	38.272	5.227	Ijarah and IMBT receivables
Aset derivatif	-	2.039	5.979	27.661	49.516	-	Derivative assets
Piutang karyawan	-	2.123	2.155	5.857	36.766	692	Employees receivables
Jumlah aset keuangan	1.394.669	1.966.332	1.811.542	7.248.285	9.612.675	1.383.548	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	498.602	1.073.491	3.957.704	4.607.096	-	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	250.000	530.000	612.000	1.731.000	-	Securities issued
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	68.127	-	-	-	-	Accrued interest expenses
Utang kepada supplier	-	97.658	-	-	-	-	Payable to suppliers
Utang premi asuransi	-	-	40.649	-	-	-	Insurance premium payables
Jumlah liabilitas keuangan	-	914.387	1.644.140	4.569.704	6.338.096	-	Total financial liabilities
Perbedaan jatuh tempo	1.394.669	1.051.945	167.402	2.678.581	3.274.579	1.383.548	Difference in maturity
31 Desember/December 2023							
	Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	>3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	Jumlah/ Total
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	1.739.659	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	-	1.880.960	1.900.122	6.929.697	9.502.491	1.257.243	Financing receivables
Piutang ijarah dan IMBT	-	9.924	3.778	14.536	22.826	2.752	Ijarah and IMBT receivables
Aset derivatif	-	3.512	7.726	39.800	5.619	-	Derivative assets
Piutang karyawan	-	2.961	2.182	6.635	36.068	617	Employees receivables
Jumlah aset keuangan	1.739.659	1.897.357	1.913.808	6.990.668	9.567.004	1.260.612	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	623.370	887.286	3.739.225	3.451.627	-	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	617.000	1.770.000	2.343.000	-	Securities issued
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	75.090	-	-	-	-	Accrued interest expenses
Utang kepada supplier	-	81.109	-	-	-	-	Payable to suppliers
Utang premi asuransi	-	-	45.288	-	-	-	Insurance premium payables
Jumlah liabilitas keuangan	-	779.569	1.549.574	5.509.225	5.794.627	-	Total financial liabilities
Perbedaan jatuh tempo	1.739.659	1.117.788	364.234	1.481.443	3.772.377	1.260.612	Difference in maturity

Ekshibit E/103

Exhibit E/103

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

3. **Risiko Likuiditas** (Lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022: (Lanjutan)

31 Desember/December 2022								
	Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have	< 1 bulan/ maturity	1-3 bulan/ month	> 3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	> 3 tahun/ years	Jumlah/ Total	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	1.073.255	-	-	-	-	-	1.073.255	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan	-	1.682.792	1.799.185	6.795.766	9.076.297	1.033.649	20.387.689	Financing receivables
Piutang ijarah dan IMBT	-	830	801	2.934	3.019	512	8.096	Ijarah and IMBT receivables
Aset derivatif	-	2.979	9.531	42.493	48.053	-	103.056	Derivative assets
Piutang karyawan	-	4.079	3.235	6.963	37.138	1.505	52.921	Employees receivables
Jumlah aset keuangan	1.073.255	1.690.680	1.812.752	6.848.156	9.164.508	1.035.666	21.625.017	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	678.804	800.173	3.818.252	4.948.485	33.145	10.278.859	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	655.000	930.000	-	1.585.000	Securities issued
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	48.133	-	-	-	-	48.133	Accrued interest expenses
Utang kepada supplier	-	84.116	-	-	-	-	84.116	Payable to suppliers
Utang premi asuransi	-	-	58.736	-	-	-	58.736	Insurance premium payables
Jumlah liabilitas keuangan	-	811.053	858.909	4.473.252	5.878.485	33.145	12.054.844	Total financial liabilities
Perbedaan jatuh tempo	1.073.255	879.627	953.843	2.374.904	3.286.023	1.002.521	9.570.173	Difference in maturity

4. **Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian operasional karena kesalahan karyawan baik yang disengaja maupun tidak; kegagalan sistem dan proses operasional serta tidak berfungsinya sistem pengendalian internal dalam operasional Perusahaan sehari-hari.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menerapkan sistem yang tersentralisasi sehingga proses bisnis dapat terkontrol secara sistem dan dimonitor dari waktu ke waktu.
- Menyiapkan *backup* dan *Disaster Recovery Plan* yang memadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas sistem aplikasi utama Perusahaan, baik dari sisi *hardware* dan *software*.
- Menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.
- Menerapkan aturan kerja yang jelas (SOP) dan sanksi yang tegas atas penyimpangan yang terjadi, sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditemukan.
- Adanya penanaman nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan, sehingga dapat menghindarkan/mengurangi potensi penyimpangan.
- Adanya penilaian kinerja yang *fair* dan transparan serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir.

35. **RISK MANAGEMENT** (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

3. **Liquidity Risk** (Continued)

The following table presents the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022: (Continued)

4. **Operational Risk**

Operational risk is the risk that could potentially cause an operating loss due to employee error whether intentional or not; system failures and operational processes as well as the malfunction of the internal control system in the day-to-day operations.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Implementing a centralized system in order that business processes can be controlled by the system and monitored from time to time.
- Preparing *backup* and *Disaster Recovery Plan* that is sufficient whenever unexpected event or condition occur towards the Company's major application systems, both in terms of hardware and software.
- Implementing a sustainable compliance audit system, both in branch offices or headquarters.
- Implementing a clear code of conduct (SOP) and strict sanctions for irregularities that occurred, according to level of error identified.
- Promoting the Company's core values to employees since the early stage, in order to avoid/reduce the potential for irregularities.
- Fair and transparent performance appraisal and opportunities for career development.

Ekshibit E/104

Exhibit E/104

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

4. Risiko Operasional (Lanjutan)

Dalam rangka meningkatkan keamanan pusat data dan jaringan serta dengan semakin kompleksnya sistem informasi dan digitalisasi yang digunakan, Perusahaan telah melakukan berbagai identifikasi dan mitigasi risiko terkait dengan Teknologi Informasi dan Digitalisasi, antara lain sebagai berikut:

- Dibentuknya komite pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*).
- Penetapan rencana strategis TI yang termasuk peningkatan keamanan *cyber* yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan.
- Standardisasi penerapan dan pengelolaan perangkat jaringan komunikasi dan sistem data dan aplikasi; termasuk pengelolaan kewenangan akses sistem, dan peremajaan secara berkala.
- Penerapan pengembangan sistem aplikasi dengan model *Secured Software Development Life Cycle (S-SDLC)*.
- Pelaksanaan *Penetration Test* dan *Vulnerability Assessment (VA)* untuk menguji keamanan dan kehandalan sistem aplikasi dan jaringan informasi dari potensi serangan *cyber*.

5. Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan dan entitas anaknya dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perusahaan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*).

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perusahaan dan entitas anaknya memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai neto pinjaman (termasuk obligasi dan *medium-term notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

35. **RISK MANAGEMENT(Continued)**

Process and risk assessments (Continued)

4. Operational Risk (Continued)

In order to improve data center and network security as well as the increasingly complex information and digitalization systems used, the Company has carried out various identification and risk mitigation related to Information Technology and Digitalization, including the following:

- *Establishment of an Information Technology steering committee (IT Steering Committee).*
- *Determination of an IT strategic plan that includes cyber security improvement in line with the strategic plan of the Company's business activities.*
- *Standardization of implementation and management of communication network devices and data systems and applications; including management of system access authority, and regular renewal.*
- *Implementation of application system development using the Secured Software Development Life Cycle (S-SDLC) model.*
- *Implementation of Penetration Tests and Vulnerability Assessments (VA) to test the security and reliability of application systems and information networks from potential cyber attacks.*

5. Capital Risk

The Company and its subsidiary's objective in managing its capital is to keep the Company's capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders, and maintain the optimization of capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return for the results of capital to shareholders or issue new shares to reduce lending.

Consistent with other players in the industry, the Company and its subsidiary monitor capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-terms notes) divided by total capital. Total capital is calculated as equity as shown in the statements of financial position.

Ekshibit E/105

Exhibit E/105

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

35. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

5. **Risiko Permodalan (Lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, juncto POJK 35/POJK.5/2018, jumlah maksimum *gearing ratio* adalah sebesar 10 kali dari total modal.

35. **RISK MANAGEMENT(Continued)**

Process and risk assessments (Continued)

5. **Capital Risk (Continued)**

Based on Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No. 84/PMK.012/2006 dated 26 September 2006 regarding Multifinance Company, in conjunction with OJK Regulation No.35/POJK.5/2018, the maximum *gearing ratio* is 10 times from total capital.

Keterangan	PMK84/PMK.012/2006	Struktur Modal Perusahaan/ Company's Capital Structure			Description
		31 Mei/ May 2024	31 Desember/December 2023	2022	
Modal Disetor (dalam miliar Rupiah)	Minimal Rp 100 miliar/ <i>Minimum Rp 100 billion</i>	399	399	399	Paid- up Capital (in billion Rupiah)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	Maksimum 10x/ <i>Maximum 10x</i>	1,4	1,4	1,4	Debt to Equity Ratio
Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, tingkat rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan masing-masing berada pada kondisi sehat, yaitu 1,4 kali.		As of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, debt-to-equity ratio level of the Company was healthy at 1.4 times, respectively.			

36. **ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2d menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) atas nilai wajar diakui.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Demikian halnya dengan liabilitas keuangan telah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

36. **FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES**

Fair value of financial assets and financial liabilities

In the following table, financial instrument have been allocated based on their respective. Significant accounting policies in Note 2d describes how each category of financial assets and financial liabilities are measured and how revenue and expenses, including gains and losses (changes in fair value of financial instruments) in the fair value is recognized.

The classification of financial assets has been classified as financial assets measured at fair value through profit and loss, and loans and receivables. So with the financial liabilities has been classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Ekshibit E/106

Exhibit E/106

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. **ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN** (Lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022:

	Aset/ Assets			Liabilitas/ Liabilities		
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	
31 Mei 2024	profit and loss	comprehensive income		profit and loss		31 May 2024
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	-	-	1.394.669	-	-	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan - neto	-	-	20.972.708	-	-	Financing receivables - net
Piutang ijarah dan IMBT - neto	-	-	79.640	-	-	Ijarah and IMBT receivables - net
Aset derivatif	8	-	-	-	-	Derivative assets
Piutang lain - lain	-	-	47.593	-	-	Other receivables
Jumlah	85.195	-	22.494.610	-	-	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	10.094.134	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	3.117.443	Securities issued
Beban akrual	-	-	-	-	189.837	Accrued expenses
Utang lain-lain	-	-	-	-	470.674	Other payables
Jumlah	-	-	-	-	13.872.088	Total
	Aset/ Assets			Liabilitas/ Liabilities		
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	
31 Desember 2023	profit and loss	comprehensive income		profit and loss		31 December 2023
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	-	-	1.739.659	-	-	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan - neto	-	-	20.706.393	-	-	Financing receivables - net
IMBT - neto	-	-	52.769	-	-	Piutang ijarah dan IMBT receivables - net
	-	-	-	-	-	Aset derivatif
	-	-	48.463	-	-	Derivative assets
Jumlah	56.657	-	22.547.284	-	-	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	8.665.860	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	4.720.775	Securities issued
Beban akrual	-	-	-	-	324.121	Accrued expenses
Utang lain-lain	-	-	-	-	437.423	Other payables
Jumlah	-	-	-	-	14.148.179	Total

36. **FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES** (Continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)

The following table sets out the carrying value and fair value of financial assets and financial liabilities as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022:

Ekshibit E/107

Exhibit E/107

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. **ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN** (Lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022: (Lanjutan)

	Aset/ Assets				Liabilitas/ Liabilities			
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost		Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost		
31 Desember 2022								31 December 2022
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	-	-	1.073.255		-	-		Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan - neto	-	-	19.554.254		-	-		Financing receivables - net
Piutang ijarah dan IMBT - neto	-	-	7.767		-	-	ijarah	and IMBT receivables - net
Aset derivatif	103.056	-	-		-	-		Derivative assets
Piutang lain - lain	-	-	52.921		-	-		Other receivables
Jumlah	103.056	-	20.688.197		-	-		Total
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	-		-	10.246.908		Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-		-	1.581.490		Securities issued
Beban akrual	-	-	-		-	479.299		Accrued expenses
Utang lain-lain	-	-	-		-	489.352		Other payables
Jumlah	-	-	-		-	12.797.049		Total

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Nilai wajar kas dan setara kas, deposito berjangka, beban akrual dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Estimasi nilai wajar terhadap pinjaman yang diterima yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Nilai wajar pinjaman yang diterima dengan tingkat suku bunga mengambang mendekati nilai tercatatnya karena tingkat suku bunganya sering ditinjau ulang.
- Piutang pembiayaan dan aset lain-lain dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi oleh beban penurunan nilai. Estimasi nilai wajar mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.
- Nilai wajar untuk aset keuangan derivatif ditetapkan menggunakan harga pasar.
- Nilai wajar agregat untuk surat berharga yang diterbitkan dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

36. **FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES** (Continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)

The following table sets out the carrying value and fair value of financial assets and financial liabilities as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022: (Continued)

	Aset/ Assets				Liabilitas/ Liabilities			
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost		Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost		
31 Desember 2022								31 December 2022
Financial assets								Financial assets
Cash and cash equivalents	-	-	1.073.255		-	-		Cash and cash equivalents
Financing receivables - net	-	-	19.554.254		-	-		Financing receivables - net
and IMBT receivables - net	-	-	7.767		-	-	ijarah	and IMBT receivables - net
Derivative assets	103.056	-	-		-	-		Derivative assets
Other receivables	-	-	52.921		-	-		Other receivables
Total	103.056	-	20.688.197		-	-		Total
Financial liabilities								Financial liabilities
Fund borrowings	-	-	-		-	10.246.908		Fund borrowings
Securities issued	-	-	-		-	1.581.490		Securities issued
Accrued expenses	-	-	-		-	479.299		Accrued expenses
Other payables	-	-	-		-	489.352		Other payables
Total	-	-	-		-	12.797.049		Total

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- The fair values of cash and cash equivalents, time deposit, accrued expenses and other payables approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.
- The estimated fair value of fund borrowings not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. The fair value of floating rate fund borrowings approximate their carrying amounts because the interest rate is repriced frequently.
- Financing receivables and other assets are recorded at carrying amount net of charges for impairment. The estimated fair value represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Expected cash flows are discounted at current market rates to determine fair value.
- The fair value for derivative financial assets is based on market rates.
- The aggregate fair values securities issued is calculated based on quoted market prices. For those notes where quoted market prices are not available, a discounted cash flow model is used based on a current yield curve appropriate for the remaining term of maturity.

Ekshibit E/108

Exhibit E/108

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

**Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)**

PSAK 113, "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Aset keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah aset keuangan derivatif.

36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

**Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)**

SFAS 113, "Fair Value Measurement" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- (a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- (b) inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- (c) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The Company's financial assets that are measured and recognised at fair value (level 2) are derivative financial assets.

37. RASIO KEUANGAN YANG RELEVAN

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan diharuskan untuk mematuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan, dimana rasio tersebut dapat berbeda jika rasio tersebut dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Tabel berikut menyajikan rasio-rasio keuangan Perusahaan berdasarkan peraturan OJK pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022:

37. RELEVANT FINANCIAL RATIOS

Based on POJK No.35/POJK.05/2018 dated 31 December 2018 regarding the Organisation of Financing Company Business, the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said OJK regulation for regulatory compliance purposes, where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards.

The following table sets out the Company financial ratios based on OJK Regulation as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022:

No.	Rasio	Ketentuan OJK/POJK Requirement	31 Mei/ May 2024	31 Desember/December		Ratio
				2023	2022	
1	Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto terhadap Total Aset	>= 40%	87,59%	86,53%	89,20%	Financing-to-Assets Ratio (FAR)
2	Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto terhadap Total Pinjaman	>= 50%*	159,35%	155,07%	165,38%	Financing to Debt Ratio
3	Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja terhadap Total Saldo Piutang Pembiayaan	>= 10%	77,59%	78,57%	76,86%	Investment and Working Capital Financing to Total Financing Ratio
4	Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing) - bruto	<= 5%	1,42%	1,36%	1,00%	Non-Performing Financing Ratio - gross
5	Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing) - neto	<= 5%	0,28%	0,15%	0,38%	Non-Performing Financing Ratio - net
6	Rasio Permodalan	>= 10%	66,87%	65,03%	62,63%	Capital Ratio
7	Gearing Ratio	<= 10 x	1,38 x	1,41 x	1,35 x	Gearing Ratio
8	Rasio Modal Sendiri terhadap Modal Disetor (MSMD)	>= 50%	2399,34%	2379,84%	2193,49%	Equity-to-Paid-up-Capital Ratio

*) Target yang ditetapkan manajemen sesuai ketentuan POJK No.35/POJK.05/2018

*) The target set by management is in accordance with POJK No.35/POJK.05/2018

Ekshibit E/109

Exhibit E/109

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR
31 MEI 2024 (DIAUDIT) DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (DIAUDIT)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED
31 MAY 2024 (AUDITED) DAN 2023 (UNAUDITED)
AND THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022 (AUDITED)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi dan/ atau perubahan pada Laporan Arus Kas serta Catatan 1, 2, 4, 9, dan 13.

38. REISSUED OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the plans of PT BFI Finance Indonesia Tbk to Sustainable Public Offering of Obligasi Berkelanjutan VI, the Company has reissued the consolidated financial statements for the five-month period ended 31 May 2024 and the years ended 31 December 2023 and 2022 to conform with prevailing capital market regulations. These reissued consolidated financial statements include additional information and/ or changes in Statement of Cashflows and Notes 1, 2, 4, 9, and 13.

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00082/3.0423/AU.1/09/1042-2/1/VI/2024
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
Per 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022

No. : 00082/3.0423/AU.1/09/1042-2/1/VI/2024
Re : Consolidated Financial Statements
As of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT BFI Finance Indonesia Tbk
Tangerang Selatan

The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT BFI Finance Indonesia Tbk
South Tangerang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT BFI Finance Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan dan Entitas Anaknya berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT BFI Finance Indonesia Tbk (the "Company") and its Subsidiary which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the five-month period ended 31 May 2024 and for the years ended 31 December 2023 and 2022, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its Subsidiary as of 31 May 2024, 31 December 2023 and 2022, and the consolidated financial performance and cash flows for the five-month period ended 31 May 2024 and for the years ended 31 December 2023 and 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company and its Subsidiary in accordance with the ethical requirement relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam Audit kami diuraikan sebagai berikut:

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan (Rp 836.944 juta)

Lihat Catatan 5 - Piutang Pembiayaan dan Catatan 6 - Piutang Ijarah dan IMBT

Nilai tercatat neto produk piutang pembiayaan dan ijarah selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah memperhitungkan kerugian ekspektasian.

Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) dihitung berdasarkan tunggakan dan penghapusan historis untuk menentukan tahap kerugian ekspektasian tiap produk yang digunakan untuk penentuan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan umur pinjaman pada tiap produk. Tingkat cadangan ditelaah dan dimuktahirkan atas estimasi kerugian kredit berdasarkan umur tiap piutang pembiayaan pada setiap tanggal pelaporan. KKE dihitung berdasarkan pendekatan kolektif dengan menggunakan beberapa parameter risiko antara lain *Probability of Default*, *Loss Given Default*, *Exposure at Default* dengan mempertimbangkan informasi faktor makroekonomi.

Kami memfokuskan pada area ini sebagai hal audit utama karena jumlah piutang pembiayaan mewakili 87,6% dari total aset Perusahaan dan Entitas Anaknya. Pengukuran KKE dilakukan melalui pertimbangan manajemen dengan penggunaan estimasi dan asumsi yang diharapkan keandalannya dalam penentuan jumlah cadangan penurunan nilai yang diakui pada akhir periode pelaporan.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut:

- Kami telah menguji keakuratan model perhitungan KKE berdasarkan persyaratan dalam PSAK 109;
- Kami telah menilai penerapan model penurunan nilai yang mempertimbangkan tunggakan dan penghapusan historis dan estimasi umur pinjaman yang diharapkan;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined as follows:

Allowance for Impairment Losses of Financing Receivables (Rp 836,944 million)

Refer to Note 5 - Financing Receivables and Note 6 - Ijarah and IMBT Receivables

The net carrying value of financing and ijarah receivables products are subsequently measured at amortised cost after providing for expected losses.

Expected Credit Loss (ECL) is computed based on historical arrears and write-offs to determine an expected loss cycle by product which is used to determine the estimated life of receivables expected loss levels to provided against each product. Levels of allowances are reviewed and updated for the most recent expected life of receivables loss estimates at each reporting date. ECL is computed using collective approach with risk parameters including the Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at Default with consideration of macroeconomic factors information.

We focused on this area as a key audit matter due to amounts of financing receivables represent 87.6% of total assets of the Company and its Subsidiary. The measurement of ECL is determined on the management's judgments using estimates and assumptions to derived reliability on provides allowance of impairment losses to be recognised in the end of reporting period.

In responding to the identified key audit matters, we performed the following audit procedures:

- *We have tested the computation accuracy of ECL model applied with requirements in SFAS 109;*
- *We have assessed the application of the model for impairment that considers the past arrears and write-offs and the expected life of loan loans estimates;*



Hal Audit Utama (Lanjutan)

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut: (Lanjutan)

- Kami telah menilai, membandingkan data historis dan menilai pandangan manajemen atas risiko kredit yang berdampak pada pengakuan kerugian ekspektasian setelah pengakuan awal selama umur pinjaman;
- Kami telah menilai model penerapan yang mempertimbangkan tunggakan dan penghapusan masa lalu dan perkiraan umur kerugian kredit ekspektasian;
- Kami telah menilai kecukupan pengungkapan terkait dengan kerugian kredit ekspektasian.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan oleh karena itu kami tidak menyatakan suatu opini atau bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian pada tanggal tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Key Audit Matters (Continued)

In responding to the identified key audit matters, we performed the following audit procedures: (Continued)

- *We have assessed, compared the historical actual and challenge management's view of credit risk that impacts the recognition of expected losses upon initial recognition over the life of the loans;*
- *We have assessed the application model for impairment that considers the past arrears and write offs and the expected life of loan loss estimates;*
- *We have assessed the adequacy of the disclosures relating to expected loan loss.*

Other matters

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows of the Company and its Subsidiary for the nine-month period ended 31 May 2023 were neither audited nor review. We did not audit or review the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of cash flows for the five-month period ended 31 May 2023, therefore, we do not express an opinion or other forms of assurance on such consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statement of cash flows.

This report has been prepared solely for inclusion in prospectus in connection with the proposed of Public Offering of Bonds Issuance Serial VI of BFI Finance Indonesia, and not intended to be and should not be use for any other purposes.



Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dan Entitas Anaknya dalam mempertahankan kelangsungan usahanya mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan dan Entitas Anaknya atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Company and its Subsidiary's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company and its Subsidiary or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company and its Subsidiary's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)***Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (Continued)***

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama Audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan dan Entitas Anaknya.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company and its Subsidiary' internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company and its Subsidiary' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company and its Subsidiary to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama Audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut atau diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: (Continued)

- Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Company and its Subsidiary to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communications.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA
NIAP AP.1042/
License No. AP.1042

21 Juni 2024/ 21 June 2024



